

PROFIL KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019



**Kerjasama
Dinas Informasi dan Komunikasi
Pemerintah Kabupaten Jembrana
dengan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana
Tahun 2019**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan “Profil Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019” dapat selesai tepat pada waktunya.

Tujuan kajian ini adalah untuk menyusun Profil Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 adalah untuk menyajikan informasi mengenai keberadaan Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, serta tersedianya data dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang dipresentasikan dalam bentuk media informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel sebagai dasar penyusunan program pembangunan di Kabupaten Jember.

Pelaksanaan studi sejak perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data, analisis, dan sampai pada pelaporan tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Dengan berbagai aspek yang telah dikaji berdasarkan data yang ada, maka kajian ini diharapkan dapat menjadi media informasi yang dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Jember.

Denpasar, September 2019
Tim Pengkaji
Fakultas Ekonomi
Universitas Udayana



DAFTAR ISI

Isi	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 2
1.2 Dasar Hukum.....	I - 2
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	I - 3
1.4 Manfaat.....	I - 4
BAB II SEJARAH DAN VISI MISI KABUPATEN JEMBRANA....	II - 1
2.1 Sejarah Kabupaten Jember.....	II - 2
2.2 Visi dan Misi.....	II - 4
BAB III KONDISI GEOGRAFIS DAN LINGKUNGAN KABUPATEN JEMBRANA.....	III - 1
3.1 Kondisi Geografis.....	III - 2
3.2 Topografi.....	III - 5
3.3 Ketinggian Lokasi.....	III - 6
3.4 Geologi.....	III - 8
3.5 Hidrogeologi.....	III - 11
3.6 Kawasan Lindung.....	III - 14
BAB IV STRUKTUR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.....	IV - 1
4.1 Kondisi Pemerintahan Umum.....	IV - 2
4.2 Administrasi Pemerintahan.....	IV - 2
4.3 Perangkat Daerah	IV - 4
4.4 Sumber Daya Aparatur Sipil Negara.....	IV - 9
4.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	IV - 14
BAB V KONDISI KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBRANA.....	V - 1
5.1 Kependudukan.....	V - 1
5.1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	V - 1
5.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga.....	V - 5
5.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	V - 6
5.1.4 Rasio Ketergantungan.....	V - 8
5.1.5 Jumlah Penduduk Berdasar Status Perkawinan.....	V - 9
5.2 Kepemilikan Dokumen.....	V - 11



5.2.1 Jumlah Penduduk Ber KTP dan Kepemilikan KK.....	V – 12
5.2.2 Kepemilikan Kartu Keluarga.....	V – 14
5.2.3 Kepemilikan Akta Perkawinan.....	V – 15
5.2.4 Kepemilikan Akta Kelahiran.....	V – 16
5.2.5 Kepemilikan Akta Kematian.....	V – 17
5.3 Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan.....	V – 18
5.4 Penduduk Berdasarkan Agama.....	V – 19
5.5 Ketenagakerjaan.....	V – 20
5.5.1 Angkatan Kerja.....	V – 20
5.5.2 Penduduk Bekerja.....	V – 22
BAB VI KONDISI SOSIAL BUDAYA KABUPATEN JEMBRANA..	VI – 1
6.1 Satuan Perlindungan Masyarakat.....	VI – 1
6.2 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	VI – 3
6.3 Kesenian, Olah Raga dan Kepemudaan.....	VI – 9
6.3.1 Kesenian.....	VI – 9
6.3.2 Olah Raga.....	VI - 10
6.4 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).....	VI - 14
BAB VII SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN JEMBRANA.....	VII – 1
7.1 Pertanian.....	VII – 2
7.1.1 Komoditas Tanaman Pangan.....	VII – 2
7.1.2 Komoditas Holtikultura.....	VII -12
7.2 Perkebunan.....	VII -24
7.2.1 Komoditas Kelapa.....	VII -25
7.2.2 Komoditas Kakao.....	VII -27
7.2.3 Komoditas Kopi, Cengkeh, dan Panili.....	VII -28
7.3 Peternakan.....	VII -30
7.3.1 Komoditas Peternakan.....	VII -30
7.3.2 Perkembangan Ternak.....	VII -31
7.3.3 Produksi Ternak.....	VII -39
7.4 Kehutanan.....	VII -40
7.4.1 Degradasi Kawasan Hutan Di Jember.....	VII -47
7.4.2 Potensi Flora Dan Fauna.....	VII -48
7.4.3 Kekritisasi Lahan.....	VII -52
7.4.4 Penghijauan Di Luar Kawasan Hutan.....	VII -53
7.4.5 Hutan Mangrove.....	VII -55
7.5 Perikanan.....	VII -57
7.5.1 Potensi Perikanan.....	VII -62
7.5.2 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan.....	VII -63
7.5.3 Perikanan Tangkap.....	VII -66
7.5.4 Armada Perikanan.....	VII -73
7.5.5 Nelayan.....	VII -74



BAB VIII KONDISI INFRASTRUKTUR KABUPATEN

JEMBRANA.....	VIII – 1
8.1 Listrik.....	VIII – 2
8.2 Air Bersih.....	VIII – 3
8.3 Pesampahan.....	VIII – 6
8.4 Pos dan Telekomunikasi.....	VIII – 7
8.5 Karakteristik Transportasi.....	VIII – 9
8.5.1 Transportasi Darat.....	VIII – 9
8.5.2 Transportasi Laut.....	VIII-14

BAB IX KINERJA EKONOMI DAN KEUANGAN KABUPATEN

JEMBRANA.....	IX – 1
9.1 Kinerja Ekonomi.....	IX – 2
9.1.1 Produk Domestik Regional Bruto.....	IX – 2
9.1.2 Pendapatan (PDRB) per Kapita.....	IX – 3
9.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).....	IX – 4
9.1.4 Inflasi dan Indeks Harga Implisit (IHI).....	IX – 5
9.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	IX – 6
9.1.6 Penduduk Miskin.....	IX – 8
9.2 Kinerja Keuangan Daerah.....	IX – 10
9.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	IX – 10
9.2.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	IX – 12
9.2.3 Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah.....	IX – 14
9.3 Upah Minimum Kabupaten (UMK).....	IX – 15
9.4 Investasi, Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi.....	IX – 18
9.4.1 Investasi.....	IX – 18
9.4.2 Perdagangan.....	IX – 19
9.4.3 Perindustrian.....	IX – 23
9.4.4 Koperasi.....	IX – 24
9.4.5 Usaha Mikro Kecil Menengah.....	IX – 25
9.5 Nilai Tukar Petani.....	IX – 26
9.6 Lembaga Keuangan.....	IX – 27

BAB X KINERJA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN

JEMBRANA.....	X – 1
10.1 Pendidikan.....	X – 2
10.1.1 Kondisi Pendidikan.....	X – 3
10.1.2 Capaian Kinerja Pendidikan.....	X – 8
10.1.3 Perpustakaan.....	X – 14
10.2 Kesehatan.....	X – 14
10.2.1 Sumberdaya di Bidang Kesehatan.....	X – 15
10.2.2 Rumah Sakit Umum Daerah.....	X – 19
10.2.3 Capaian Kinerja di Bidang Kesehatan.....	X – 25



10.3 Sertifikat Tanah	X – 61
10.4 Keluarga Berencana.....	X – 59
10.5 Notaris.....	X – 64
10.6 Perijinan dan Retribusi Daerah.....	X – 64
BAB XI INVESTASI KABUPATEN JEMBRANA.....	XI – 1
11.1 Analisis LQ Sektor Kabupaten Jemberana Terhadap Sektor Provinsi Bali.....	X I– 3
11.1.1 Analisis Growth.....	XI – 6
11.1.2 Analisis Share.....	XI – 7
11.1.3 Klasifikasi Sektor Berdasarkan Tingkat Pertumbuhan.....	XI – 8
11.1.4 Kontribusi Sektor Berdasarkan Distribusi PDRB.....	XI –10
11.2 Nilai Investasi Di Kabupaten Jemberana.....	XI –12
11.3 Potensi Pengembangan Wilayah.....	XI –13
Potensi Unggulan Daerah Yang Memiliki Peluang Berkembang	XI - 14
BAB XII PENUTUP.....	XII – 1



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
3.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jembrana	III - 1
3.2 Ketinggian Lokasi Wilayah Kab. Jembrana (Dari Terendah Sampai Tertinggi)	III - 7
4.1 Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar Dinas/Dusun, dan Desa Adat Menurut Kecamatan di Kabupaten Jembrana, 2018	IV - 4
4.2 Jumlah Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jembrana Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2018	IV - 9
4.3 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Jembrana Menurut Golongan Tahun 2014 - 2018	IV -11
4.4 Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2014-2018	IV – 12
4.5 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Jembrana menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014 – 2018	IV – 13
4.6 Jumlah Polisi Pamong Praja, Aparat Linmas, dan Capaian Kegiatannya tahun 2018	IV – 14
4.7 Jumlah DPRD Kabupaten Jembrana periode 2019-2024	IV – 14
4.8 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jembrana 2018	IV – 16
4.9 Peraturan Daerah (Perda) yang Dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Jembrana Periode 2014-2019	IV – 22
5.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2018	V - 2
5.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018	V - 3
5.3 Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga Kabupaten Jembrana Tahun 2018	V - 5
5.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Kabupaten Jembrana Tahun 2018	V - 6
5.5 Jumlah Penduduk Kelompok Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Jembrana 2018	V - 7
5.6 Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jembrana 2018	V - 9
5.7 Jumlah Penduduk berdasar status Perkawinan	V - 10



	di Kabupaten Jember 2018	
5.8	Jumlah Penduduk berdasar status perkawinan menurut Kelompok Umur di Kabupaten Jember 2018	V - 10
5.9	Jumlah Penduduk yang Sudah Merekam KTP-EL Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Jember 2018	V - 13
5.10	Jumlah Wajib KK dan Kepemilikan Kartu KK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2018	V - 14
5.11	Jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Akta Perkawinan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 15
5.12	Jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 16
5.13	Jumlah Akta Kematian Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 17
5.14	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir Per Kecamatan di Kabupaten Jember 2018	V - 18
5.15	Jumlah Penduduk menurut Agama Per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 19
5.16	Tempat Peribadatan di Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 20
5.17	Penduduk menurut Usia Kerja, Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jember tahun 2015 - 2018	V - 21
5.18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Jember, 2014–2018	V - 21
5.19	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Jember, Tahun 2018	V - 22
5.20	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember, 2018	V - 23
5.21	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember, 2018	V - 24
5.22	Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Bali Yang Berasal dari Jember Tahun 2018	V - 25
6.1	Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jember Tahun 2018	VI - 1



6.2	Data Atau Profil Keamanan/Kamtibmas di Walkum Polres Jember Tahun 2018	VI - 3
6.3	Personil TNI AD, TNI AL, dan Veteran di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VI - 4
6.4	Jumlah Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Jumlah Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Kriminal Tahun 2014- 2018	VI - 4
6.5	Jumlah Kasus KDRT dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018	VI - 5
6.6	Jumlah Kasus terdaftar, Jumlah Tindak Kriminal ditangani Polres Jember di Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018.	VI - 5
6.7	Jumlah Perkara berdasar kriteria Perkara Umum, Jumlah Tindak Kriminal, Jumlah Tindak Kriminal Tertangani dan Pencurian, di Kabupaten Jember 2018	VI - 6
6.8	Rekapitulasi Data Perkara di Pengadilan Negeri Negara Tahun 2018	VI - 6
6.9	Data Jenis dan Pusat Kesenian di Kabupaten Jember 2018	VI - 9
6.10	Data Jenis Kesenian di Kabupaten Jember 2018	VI - 9
6.11	Data Jenis Tari-Tarian di Kabupaten Jember 2018	VI - 10
6.12	Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Jember Tahun 2015-2018	VI - 14
7.1	Data Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Jember Tahun 2018	VII - 3
7.2	Komoditas Padi di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 4
7.3	Komoditas Jagung di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 6
7.4	Komoditas Kedelai di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 7
7.5	Komoditas Kacang Tanah di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 8
7.6	Komoditas Kacang Hijau di Kabupaten Jember Tahun 2014 -2018	VII - 9
7.7	Komoditas Ujung Kayu di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 10
7.8	Komoditas Ujung Jalar di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 11
7.9	Data Komoditas Tanaman Hortikultura di Kabupaten Jember Tahun 2018	VII - 12
7.10	Komoditas Semangka di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 14
7.11	Komoditas Melon di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 15
7.12	Komoditas Cabe Merah di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 16
7.13	Komoditas Cabe Rawit di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 17



7.14	Komoditas Menimun di Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018	VII - 17
7.15	Komoditas Terong di Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018	VII - 18
7.16	Komoditas Kacang Panjang di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 19
7.17	Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 21
7.18	Komoditas Mangga, Durian dan Pisang di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 21
7.19	Komoditas Pepaya, Nenas dan Sawo di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 22
7.20	Komoditas Jeruk Keprok, Rambutan dan Alpukat di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII -22
7.21	Komoditas Duku, Jambu Air dan Jambu Biji di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII -23
7.22	Komoditas Salak, Sirsak, dan Manggis di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII -23
7.23	Komoditas Belimbing, Nangka, Melinjo dan Sukun di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII -24
7.24	Perkembangan Luas areal Dan Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Kabupaten Jember	VII -25
7.25	Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Kelapa Dalam di Kabupaten Jember, Tahun 2018	VII -26
7.26	Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Kelapa Deres di Kabupaten Jember, Tahun 2018	VII -26
7.27	Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Kelapa Hibrida di Kabupaten Jember, Tahun 2018	VII -27
7.28	Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Kakao di Kabupaten Jember, Tahun 2018	VII -28
7.29	Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Kopi Robusta di Kabupaten Jember, Tahun 2018	VII -28
7.30	Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Cengkeh di Kabupaten Jember, Tahun 2018	VII -29
7.31	Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Panili di Kabupaten Jember, Tahun 2018	VII -29
7.31	Perkembangan Populasi Sapi Bali di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII -32
7.32	Perkembangan Populasi Kerbau dan Kuda c di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII -34



7.33	Perkembangan Populasi Babi di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII –34
7.35	Perkembangan Populasi Kambing di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII –35
7.36	Perkembangan Populasi Ayam dan Itik di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII –35
7.37	Perkembangan Populasi Aneka Ternak di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII –37
7.38	Kepadatan Ternak Per Km ² di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII –38
7.39	Produksi Daging di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII –39
7.40	Produksi Telur di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII –39
7.41	Titik ketinggian Tempat di Kabupaten Jember	VII –42
7.42	Luas Hutan Di Kabupaten Jember Menurut Fungsinya	VII –43
7.43	Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsinya per Kecamatan	VII –44
7.44	Pembagian wilayah pengelolaan DAS	VII –44
7.45	Pembagian Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	VII –44
7.46	Pengelolaan DAS di Biluk Poh Gumbrih dan Sub DAS Klatakan Lubang	VII –46
7.47	Kondisi Penutupan Lahan Kawasan Hutan Kabupaten Jember	VII –50
7.48	Daftar Satwa Yang Terdapat di Kabupaten Jember	VII –51
7.49	Kekayaan flora di Kabupaten Jember	VII –52
7.50	Tingkat Kekritisan Lahan di Kabupaten Jember	VII –54
7.51	Data Kegiatan Reboisasi Dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Jember	VII –55
7.53	Luas Desa Pantai di Wilayah Pesisir Kabupaten Jember	VII-59
7.54	Tipe Pantai di wilayah Kabupaten Jember	VII-61
7.55	Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII-64
7.56	Perkembangan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII-65
7.57	Perkembangan Produksi Perikanan Tambak di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII-69
7.58	Perkembangan Nilai Produksi PerikananTambak di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	VII-70



7.59	Perkembangan Produksi Perikanan Air Tenang/Kolam di Kabupaten Jembrana Tahun 2014 – 2018	VII-71
7.60	Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Air Tenang/Kolam di Kabupaten Jembrana Tahun 2014 – 2018	VII-72
7.61	Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Kolam Air Deras di Kabupaten Jembrana Tahun 2014 – 2018	VII-73
7.62	Perkembangan Jumlah Kapal Penangkap Ikan dan Perahu di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 – 2017	VII-74
7.63	Perkembangan Jumlah Nelayan dan Pemilik Kartu Nelayan di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 – 2017	VII-75
8.1	Pelanggan Listrik dan Daya Terpasang Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Jembrana Tahun 2014-2018	VIII- 2
8.2	Jumlah Pelanggan, KWH Terjal dan Daya Tersambung Kabupaten Jembrana, 2014-2018	VIII- 3
8.3	Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan di Kabupaten Jembrana, 2018	VIII- 5
8.4	Jumlah Sumber Air yang Digunakan PDAM Kabupaten Jembrana Tahun 2014-2018	VIII- 5
8.5	Volume Penanganan Sampah di Kabupaten Jembrana Tahun 2014 - 2018	VIII- 6
8.6	Daya Tampung Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Jembrana Tahun 2018	VIII- 7
8.7	Jumlah Media Surat Kabar di Kabupaten Jembrana Tahun 2014-2018	VIII- 8
8.8	Jumlah Radio/TV di Kabupaten Jembrana Tahun 2014-2018	VIII-9
8.9	Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang Berwenang di Kabupaten Jembrana, 2014-2018	VIII-10
8.10	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Jembrana, 2014-2018	VIII-10
8.11	Panjang Jalan Menurut Kondisinya di Kabupaten Jembrana, Tahun 2014-2018	VIII-10
8.12	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Kabupaten Jembrana Tahun 2014 – 2018	VIII-12
8.13	Rute Angkutan Umum di Kabupaten Jembrana, Tahun 2014-2018	VIII-13
8.14	Terminal Angkutan Barang dan Kapasitas Kendaraan di Kabupaten Jembrana Tahun 2018	VIII-14
9.1	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun	IX - 1



	2014-2018	
9.2	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018	IX - 3
9.3	Pendapatan Perkapita Kabupaten Jember Tahun 2011-2018	IX - 4
9.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	IX - 5
9.5	Indeks Harga Implisit (IHI) Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2018	IX - 6
9.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018	IX - 7
9.7	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018	IX - 10
9.8	Realisasi APBD Kabupaten Jember Tahun 2014– 2018	IX - 11
9.9	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	IX - 13
9.10	Rasio PDRB dengan APBD Kabupaten Jember Tahun 2014 -2018	IX - 14
9.11	Rasio Efektivitas Kabupaten Jember Tahun 2014 -2018	IX - 15
9.12	Upah Minimum Kabupaten Jember dan Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2015 - 2019	IX - 18
9.13	Realisasi Investasi di Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018	IX - 19
9.14	Perkembangan Jumlah UMKM Sektor Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2018	IX - 21
9.15	Jumlah Pasar Tradisional di Kabupaten Jember Tahun 2018	IX - 21
9.16	Data Pasar dan Pengelola di Kabupaten Jember Tahun 2018	IX - 22
9.17	Perkembangan Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Investasi Sektor Industri Tahun 2014 – 2018	IX - 23
9.18	Data Koperasi di Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017	IX - 24
9.19	Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember Tahun 2018	IX - 25
9.20	Nilai Indeks Petani Provinsi Bali Tahun 2019	IX - 26
9.21	Perkembangan Simpanan, Pinjaman dan Kredit UMKM Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	IX - 27



10.1	Jumlah Murid Tiap jenjang Pendidikan di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	X - 3
10.2	Jumlah Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTS/, SMA/SMK/MA di Kabupaten Jember Tahun 2011-2015	X - 3
10.3	Jumlah Sekolah Berdasarkan Kecamatan SD, SMP, SMA Negeri Dan Swasta di Kabupaten Jember Tahun 2018	X - 4
10.4	Jumlah Sekolah Berdasarkan Kecamatan MI,MTS, MA Negeri Dan Swasta di Kabupaten Jember Tahun 2018	X - 4
10.5	Jumlah Guru Pengajar di Masing-masing Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Jember 2014-2018	X - 5
10.6	Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Jember, Tahun 2014-2018	X - 6
10.7	Jumlah Guru Berdasar Tingkat Pendidikan Terakhir pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Jember Tahun 2018	X - 6
10.8	Angka Kelulusan menurut Tingkatan Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Jember 2014 - 2018	X - 7
10.9	Nilai UN Rata-rata SD dan SMP di Kabupaten Jember 2014-2018	X - 7
10.10	Angka Melek Huruf Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 10
10.11	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Jember Menurut Kelompok Usia Tahun 2014 – 2018	X - 11
10.12	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Jember Menurut Kelompok Usia Tahun 2014 – 2018	X - 12
10.13	Jumlah Perpustakaan, Koleksi, dan Pengunjung di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jember tahun 2015-2018	X - 14
10.14	Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	X -15
10.15	Persebaran Tenaga Kesehatan di Puskesmas di Kabupaten Jember Tahun 2018	X -17
10.16	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jember Tahun 2014- 2018	X -18
10.17	Anggaran Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014– 2018	X -19
10.18	Jumlah Ruang, Tempat Tidur dan Jumlah Bed di RSUD Negara Tahun 2018	X -20
10.19	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2017	X -26
10.20	Angka Harapan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X -27



10.21	Angka Kematian Bayi Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X -27
10.22	Angka Kematian Balita Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X -29
10.23	Diagnose Kematian Ibu Hamil di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	X -31
10.24	Angka Kematian Ibu Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X -31
10.25	Pola Penyakit (10 besar Penyakit) Rawat Jalan di Puskesmas untuk Semua Golongan Umur Kabupaten. Jember Tahun 2018	X -33
10.26	10 (Sepuluh) Besar Diagnosa Di IRJA RSU Negara Tahun 2018	X -33
10.27	10 (Sepuluh) Besar Diagnosa Di IRNA RSU Negara Tahun 2018	X -34
10.28	Hari Rawat, BOR dan LOS RSU Negara Tahun 2018	X -34
10.29	Angka Kesakitan di Puskesmas Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X -34
10.30	Penderita Malaria dan API /1.000 penduduk Tahun 2014 – 2018	X - 36
10.31	Prevalensi Rate/100.000 penduduk dan CFR/ 100 Penderita Penyakit DBD Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018.	X - 37
10.32	Penemuan dan Pengobatan Penderita TB. Paru Tahun 2014 – 2018	X - 40
10.33	Penemuan Penderita Kusta di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 41
10.34	Penemuan dan Penangan Kasus Diare di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 43
10.35	Penderita Penyakit Kelamin dan HIV / AIDS di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 43
10.36	Cakupan Imunisasi BCG, DPT1, Hb 3, Polio 3 dan Campak pada Bayi di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 44
10.37	Cakupan Imunisasi TT 1, TT 2, Boster, dan TT5 pada Ibu Hamil Tahun 2014 – 2018	X - 45
10.38	Prevalensi Status Gizi Buruk pada Balita Di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 48
10.39	Distribusi Vitamin A di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 49
10.40	Distribusi Garam Beryodium di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 50
10.41	Distribusi Tablet Besi (Fe.) pada Ibu Hamil di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 51



10.42	Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018	X - 53
10.43	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Jember Tahun 2018 – 2018	X - 55
10.44	Cakupan Pelayanan Antenatal Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 51
10.45	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 57
10.46	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 59
10.47	Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 60
10.48	Lahan Terdaftar di Kabupaten Jember Tahun 2018	X - 63
10.49	Jumlah Notaris di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	X - 64
10.50	Jenis Ijin dan Aturannya di Kabupaten Jember	X - 65
10.51	Jumlah Ijin yang Diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Jember	X - 85
11.1	Perhitungan LQ Lapangan Usaha di Kabupaten Jember Tahun 2018	XI - 4
11.2	Perhitungan Pertumbuhan Lapangan Usaha di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2018	XI - 5
11.3	Perhitungan Share Lapangan Usaha di Kabupaten Jember Tahun 2018	XI - 7
11.4	Klasifikasi Lapangan Usaha di Kab.Jember Berdasarkan Diagram Growth Share Tahun 2018	XI - 8
11.5	Distribusi PDRB Harga Berlaku Menurut Sektor, Tahun 2017-2018	XI - 11
11.6	Jumlah Investasi PMA dan PMDN Di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	XI - 12



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
3.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jember	III - 3
3.2 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember	III - 4
3.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jember	III - 6
3.4 Peta Ketinggian (M) Diatas permukaan Laut Kabupaten Jember	III - 7
3.5 Peta Geologi Kabupaten Jember	III -10
3.6 Peta Hidrogeologi Kabupaten Jember	III -13
4.1 Jumlah Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jember Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2018	IV 13
Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Jember Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2018	IV- 9
4.2 Diagram Persentase Perbandingan Jumlah Rata-Rata PNS Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jember Tahun 2018	IV 10
4.3 Diagram Presentase Rata-Rata PNS Menurut Golongan di Kabupaten Jember Tahun 2018	IV 11
4.4 Diagram Persentase Jumlah Rata-Rata PNS Menurut Jabatan Struktural di Kabupaten Jember Tahun 2018	IV 12
4.5 Diagram Presentase Rata-Rata PNS Pemerintah Kabupaten Jember Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014 - 2018	IV 13
5.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2018	V - 2
5.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018	V - 4
5.3 Diagram Presentase Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Per Kecamatan Tahun 2018	V - 4
5.4 Diagram Presentase Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Berdasarkan Kepala keluarga Per Kecamatan Tahun 2018	V - 5
5.5 Diagram Piramida Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 7
5.6 Diagram Presentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 8
5.7 Diagram Perbandingan Tingkat Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten jember Tahun 2019	V – 9



5.8	Diagram Perbandingan Tingkat Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2019	V – 9
5.9	Diagram Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 11
5.10	Diagram Perbandingan Persentase Perbandingan Wajib KTP dengan Sudah Rekam KTP-el, di Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 13
5.11	Diagram Perbandingan Antara Wajib KK dengan Sudah Cetak KK di Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 14
5.12	Diagram Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 15
5.13	Diagram Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 16
5.14	Diagram Persentase Akta Kematian Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 17
5.15	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir Per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 18
5.16	Persentase Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Jember Tahun 2018	V - 19
5.17	Diagram Persentase Penduduk Kabupaten Jember Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2018	V - 22
5.18	Diagram Persentase Penduduk Kabupaten Jember Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja berdasarkan Pekerjaan Utama Tahun 2018	V - 23
5.19	Diagram Persentase Penduduk Kabupaten Jember Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja berdasarkan Jam Kerja Tahun 2018	V - 23
6.1	Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jember Tahun 2018	VI - 3
6.2	Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Jember Tahun 2015-2018	VI - 14
7.1	Komoditas Padi di Kabupaten Jember tahun 2014-2018	VII - 4
7.2	Komoditas Jagung di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII - 6
7.3	Komoditas Kedelai di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII – 7
7.4	Komoditas Kacang Tanah di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII – 8
7.5	Komoditas Kacang Hijau di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII – 9



7.6	Komoditas Ubi Kayu di Kabupaten Jemberana Tahun 2014-2018	VII-10
7.7	Komoditas Ubi Jalar di Kabupaten Jemberana Tahun 2014-2018	VII-11
7.8	Komoditas Semangka di Kabupaten Jemberana Tahun 2014-2018	VII-14
7.9	Komoditas Semangka di Kabupaten Jemberana Tahun 2014-2018	VII-15
7.10	Komoditas Melon di Kabupaten Jemberana Tahun 2014-2018	VII-15
7.11	Komoditas Semangka di Kabupaten Jemberana Tahun 2014-2018	VII-14
7.12	Komoditas Cabe Merah di Kabupaten Jemberana Tahun 2014-2018	VII-17
7.13	Komoditas Mentimun di Kabupaten Jemberana Tahun 2014-2018	VII-18
7.14	Komoditas Terong di Kabupaten Jemberana Tahun 2014-2018	VII-18
7.15	Komoditas Kacang Panjang di Kabupaten Jemberana Tahun 2014-2018	VII-18
7.16	Perkembangan Populasi Babi di Kabupaten Jemberana Tahun 2014 – 2018	VII-35
7.17	Perkembangan Populasi Kambing di Kabupaten Jemberana Tahun 2014 – 2018	VII-36
7.18	Perkembangan Populasi Ayam di Kabupaten Jemberana Tahun 2014 – 2018	VII-37
7.19	Perkembangan Populasi Aneka Ternak di Kabupaten Jemberana Tahun 2014 – 2018	VII-38
7.20	Luas Hutan Di Kabupaten Jemberana Menurut Fungsinya	VII-44
7.21	Potensi Lestari Sumberdaya Ikan di Kabupaten Jemberana	VII - 62
7.22	Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Jemberana Tahun 2014 – 2018	VII - 64
7.23	Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Jemberana Tahun 2014 – 2018	VII - 65
7.24	Grafik Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Jemberana Tahun 2014-2018	VII - 66
7.25	Grafik Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Jemberana Tahun 2014-2018	VII – 67
7.26	Grafik Produksi Perikanan Darat di Kabupaten Jemberana Tahun 2014-2018	VII – 68



7.27	Grafik Nilai Produksi Perikanan Darat di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII – 69
7.28	Grafik Produksi Perikanan Tambak di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII – 70
7.29	Grafik Produksi Perikanan Air tenang/Kolam di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII – 71
7.30	Grafik Produksi Perikanan Air tenang/Kolam di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII – 71
7.31	Grafik Nilai Produksi Perikanan Air Tenang/Kolam di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018	VII – 72
7.32	Grafik Jumlah Kapal penangkap Ikan di Kabupaten Jember Tahun 2013-2017	VII – 74
7.33	Grafik Jumlah Nelayan dan Kartu Nelayan	VII - 75
9.1	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018	IX - 10
9.2	Upah Minimum Kabupaten Jember dan Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019	IX - 18
10.1	Angka Melek Huruf Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2018	X - 10
10.2	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Jember Menurut Kelompok Usia Tahun 2014 – 2018	X - 11
10.3	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Jember Menurut Kelompok Usia Tahun 2014-2018	X - 13
10.4	Angka Harapan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 27
10.5	Angka Kematian Bayi Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 28
10.6	Angka Kematian Ibu Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 31
10.7	Angka Kesakitan di Puskesmas Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 35
10.8	Prevalensi Rate/100.000 penduduk dan CFR/100 Penderita Penyakit DBD Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 38
10.9	Penemuan dan Pengobatan Penderita TB. Paru Tahun 2014 – 2018	X - 40
10.10	Penemuan Penderita Kusta di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 41
10.11	Penangan Kasus Diare di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 42



10.12	Penderita HIV / AIDS di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 43
10.13	Cakupan Imunisasi BCG, DPT1, Hb 3, Polio 3 dan Campak pada Bayi di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 45
10.14	Cakupan Imunisasi TT 1, TT 2, Boster, dan TT5 pada Ibu Hamil di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 46
10.15	Prevalensi Status Gizi Buruk pada Balita Di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 48
10.16	Distribusi Vitamin A di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 49
10.17	Distribusi Garam Beryodium di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 50
10.18	Distribusi Tablet Besi (Fe.) pada Ibu Hamil di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 51
10.19	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Jember Tahun 2018 – 2018	X - 55
10.20	Cakupan Pelayanan Antenatal Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 56
10.21	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 58
10.22	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X - 59
10.23	Pelayanan Keluarga Berencana Baru Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X – 61
10.24	Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018	X – 61
10.28	Bagan Alir Prosedur Layanan Perijinan	X - 87
11.1	Diagram Growth Share	XI - 9
11.2	Distribusi PDRB tahun 2018	XI - 11
11.3	Diagram Potensi Lestari Sumberdaya Ikan	XI - 16
11.4	Bendungan di Kabupaten Jember	XI - 17



BAB I

PENDAHULUAN





1.1 Latar Belakang

Semakin maju suatu daerah, semakin tinggi tuntutan terhadap penyediaan data dan informasi yang akurat. Berdasarkan asumsi tersebut, urgensi penyediaan data menjadi sejalan dengan akselerasi pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah. Disamping untuk keperluan perencanaan, data diperlukan untuk bahan dalam proses pembuatan keputusan yang efektif. Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah, merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penyusunan Profil Daerah Kabupaten Jember ini terus diupayakan peningkatan kualitas dan cakupannya, agar data yang disajikan lebih lengkap, terkini dan lebih akurat, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun dokumen perencanaan, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi program serta sasaran yang telah ditetapkan sebagai salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan.

Manajemen data dan informasi dalam suatu pengelolaan basis data yang terintegrasi akan memudahkan berbagai pihak mengetahui potensi dan permasalahan di suatu daerah. Dalam konteks pengembangan Kabupaten Jember, penyusunan Profil Daerah dapat menjadi suatu *entry point* dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan pembangunan



Kabupaten Jember secara terpadu. Melalui penyusunan Profil Daerah diharapkan dapat menjadi sarana teknis dalam pelaksanaan program pembangunan antara lain untuk menilai gambaran fisik dan sifat-sifatnya serta untuk menilai tingkat pemanfaatan lahan, sumber daya alam, dan masalah lingkungan. Selain itu juga dapat digunakan untuk menilai gambaran potensi alam, manusia, dan hasil kegiatannya. Secara lebih spesifik Profil daerah Kabupaten Jember menggambarkan kondisi geografis dan lingkungan, Struktur Pemerintahan, kondisi penduduk dan tenaga kerja, kondisi sosial budaya, kondisi struktur daya alam, infrastruktur, kinerja pelayanan publik, kondisi investasi dan kinerja ekonomi dan keuangan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Profil Daerah Kabupaten Jember seperti berikut ini.

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UUD 1945 - 2 - atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan dan pelayanan



informasi dan dokumentasi kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah.

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
- 8) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Profil Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 adalah untuk menyajikan informasi mengenai keberadaan Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, serta tersedianya data dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang dipresentasikan dalam bentuk media informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel sebagai dasar penyusunan program pembangunan di Kabupaten Jember. Media informasi berupa profil daerah ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Jember.

Sasaran penyusunan Profil Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 adalah seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Jember.



1.3. Manfaat

Manfaat dilaksanakannya penyusunan Profil Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 ini adalah:

- 1) Sebagai media untuk mengetahui potensi yang dapat dijadikan sumber informasi dalam membuat perencanaan dan prospek pengembangan Kabupaten Jember kedepan.
- 2) Tersedianya data-data yang *valid* yang dapat diakses oleh semua pihak.
- 3) Memudahkan dalam menetapkan kebijakan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat.



BAB II

SEJARAH DAN VISI MISI KABUPEN JEMBER





2.1 Sejarah Kabupaten Jember

Berdasarkan bukti-bukti arkeologis dapat diinterpretasikan bahwa munculnya komunitas di Jember sejak 6000 tahun yang lalu. Dari perspektif semiotik, asal-usul nama tempat atau kawasan mengacu nama-nama fauna dan flora. Munculnya nama Jember berasal dari kawasan hutan belantara (Jimbar-Wana) yang dihuni raja ular (Naga-Raja). Sifat-sifat mitologis dari penyebutan nama-nama tempat telah mentradisi melalui cerita turun-temurun di kalangan penduduk. Berdasarkan cerita rakyat dan tradisi lisan (folklore) yang muncul telah memberi inspirasi di kalangan pembangun lembaga kekuasaan tradisional (raja dan kerajaan)

Raja dan pengikutnya yaitu rakyat yang berasal dari etnik Bali Hindu maupun dari etnik non Bali yang beragama Islam telah membangun kraton sebagai pusat pemerintahan yang diberi nama Puri Gede Jember pada awal abad XVII oleh I Gusti Made Yasa (penguasa Brangbang). Raja I yang memerintah di kraton (Puri) Gede Agung Jember adalah I Gusti Ngurah Jember. Selain kraton, diberikan pula rakyat pengikut (wadwa), busana kerajaan yang dilengkapi barang-barang pusaka berupa tombak dan tulup. Demikian pula keris pusaka yang diberi nama "Ki Tatas" untuk memperbesar kewibawaan kerajaan. Tercatat bahwa ada tiga orang raja yang berkuasa di pusat pemerintahan yaitu di Kraton (Puri) Agung Jember.

Sejak kekuasaan kerajaan dipegang oleh Raja Jember I Gusti Gede Seloka, Kraton (Puri) baru sebagai pusat pemerintahan dibangun. Kraton (Puri) yang dibangun itu diberi nama Puri Agung Negeri pada awal abad XIX. Kemudian lebih dikenal dengan nama Puri Agung Negara. Patut diketahui bahwa raja-raja yang memerintah di Kerajaan



Jember berikutnya pun memusatkan birokrasi pemerintahannya di Kraton (Puri) Agung Negara. Patut dicatat pula bahwa ada dua periode birokrasi pemerintahan yang berpusat di Kraton (Puri) Agung Negara.

Periode pertama ditandai oleh birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional yang berlangsung sampai tahun 1855. Telah tercatat pada lembaran dokumen arsip pemerintahan Gubernemen bahwa kerajaan Jember yang otonom diduduki oleh Raja Jember V (Sri Padoeka Ratoe) I Goesti Poetoe Ngoerah Djember (1839 - 1855). Ketika berlangsung pemerintahannya lah telah ditanda tangani piagam perjanjian persahabatan bilateral antara pihak pemerintah kerajaan dengan pihak pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Gubernemen) pada tanggal 30 Juni 1849.

Periode kedua selanjutnya digantikan oleh birokrasi modern, melalui tata pemerintahan daerah (Regentschap) yang merupakan bagian dari wilayah administratif Keresidenan Banyuwangi. Pemerintahan daerah Regentschap yang dikepalai oleh seorang kepala pribumi (Regent) sebagai pejabat yang dimasukkan dalam struktur birokrasi Kolonial Modern Gubernemen yang berpusat di Batavia. Status pemerintahan daerah (Regentschap) berlangsung selama 26 tahun (1856 - 1882).

Pada masa Kerajaan Jember VI I Gusti Ngurah Made Pasekan (1855 - 1866) mengalami dua peralihan status yaitu 1855 - 1862 sebagai Raja Jember dan 1862 - 1866 sebagai status Regent (Bupati) kedudukan kerajaan berada di Puri Pacekan Jember.

Ketika reorganisasi pemerintahan di daerah diberlakukan berdasarkan Staatblad Nomor 123 tahun 1882, maka untuk wilayah administratif Bali dan Lombok diberi status wilayah administratif Keresidenan tersendiri. Wilayah Keresidenan Bali dan Lombok dibagi lagi



menjadi dua daerah (Afdelingen) yaitu Afdeling Buleleng dan Afdeling Jember berdasarkan Staatblad Nomor 124 tahun 1882 dengan satu ibukota yaitu Singaraja. Selanjutnya daerah Afdeling Jember terbagi atas distrik-distrik yang pada waktu itu terdiri dari tiga distrik yaitu Distrik Negara, Distrik Jember, dan Distrik Mendoyo. Masing-masing distrik dikepalai oleh seorang Punggawa. Selain distrik juga diberlakukan jabatan Perbekel, khusus yang mengepalai komunitas Islam dan komunitas Timur Asing sebagai kondisi daerah yang unik dari sudut interaksi dan integrasi antar etnik dan antar umat beragama

2.2 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Jember mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas seluruh komponen Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dan mampu menjamin kesinambungan Kepemimpinan Daerah. Visi Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, dan diumumkan di www.jemberkab.go.id adalah sebagai berikut.

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jember Melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat."



Misi Kabupaten Jemberana

Berdasarkan Visi Pembangunan Kabupaten Jemberana tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah 2016 - 2021, yaitu :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan kepada masyarakat.

Aspiratif, partisipatif dan transparan mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang terbuka/transparan.

- 2) Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat;

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jemberana, yaitu dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat tanpa harus meninggalkan sektor-sektor yang lain.

- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya;



- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan, dengan memanfaatkan teknologi modern serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan jaman.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu dari tujuh SKPD yang bertanggung jawab untuk mengawal misi tersebut.

Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis IT (Information Technology) menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk bidang pendidikan, dengan adanya sistem informasi manajemen pendidikan, membuka informasi bagi tenaga pendidikan, peserta didik, maupun pelaku dunia pendidikan untuk mendapatkan akses informasi pendidikan yang ada di Jember.

Pengembangan jaringan internet ke seluruh sekolah, untuk membuka akses informasi bagi seluruh penggunanya, sehingga siswa diperkenalkan terhadap kemajuan informasi dan komunikasi sejak dini. Alur informasi begitu dinamis dan cepat, sehingga setiap orang perlu meng-update informasi setiap saat. Internet menjadi salah satu sarana yang efektif untuk memperoleh informasi terkini yang bisa diakses dengan sangat mudah dan oleh siapa saja.

Pemanfaatan teknologi modern di bidang kesehatan, menjadi faktor pendukung bagi efektifitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan kesehatan masyarakat, disamping menjadi program integral dengan pemanfaatan kartu akses ber-barcode di Indonesia.



- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

Dalam Misi ke-4 tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu dari empat SKPD yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengawal tercapainya Misi tersebut.

Tersedianya sarana dan prasarana publik, baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

Sarana dan prasarana perhubungan menjadi faktor yang sangat penting, disamping ketersediaan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas, berupa traffic light, warning light, dan rambu-rambu penunjuk jalan.

Dalam hal kelestarian lingkungan, untuk mendukung komitmen terhadap Bali Go Green, optimalisasi terhadap pengujian emisi kendaraan bermotor sangat penting dilakukan mengingat polusi udara di Indonesia semakin memprihatinkan dengan peringkat tertinggi ketiga di dunia. Pun demikian dengan kondisi udara di kota-kota besar, seperti Denpasar, Jakarta dan Bandung. Untuk itu perlu perhatian yang khusus terhadap kendaraan bermotor untuk senantiasa melakukan uji emisi berkala.

- 6) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, sehingga terpenuhi rasa aman, damai dan tenteram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penegakkan peraturan



dan adanya kepastian hukum. Dengan demikian akan tumbuh kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi, dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama.

Untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting, karena merupakan kegiatan yang bersinergis dan berkesinambungan. Sosialisasi terkait peraturan kependudukan dan kebijakan publik perlu dilakukan sehingga masyarakat mengerti akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sehingga benturan dan gesekan di masyarakat dapat diminimalisir.



BAB III

KONDISI

GEOGRAFIS DAN LINGKUNGAN

KABUPATEN JEMBER



3.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat.



Kabupaten Jembrana sebagai salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Bali terletak pada $08^{\circ}09'58''$ – $08^{\circ}28'02''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}26'28''$ – $115^{\circ}51'28''$ Bujur Timur. Batas-batas

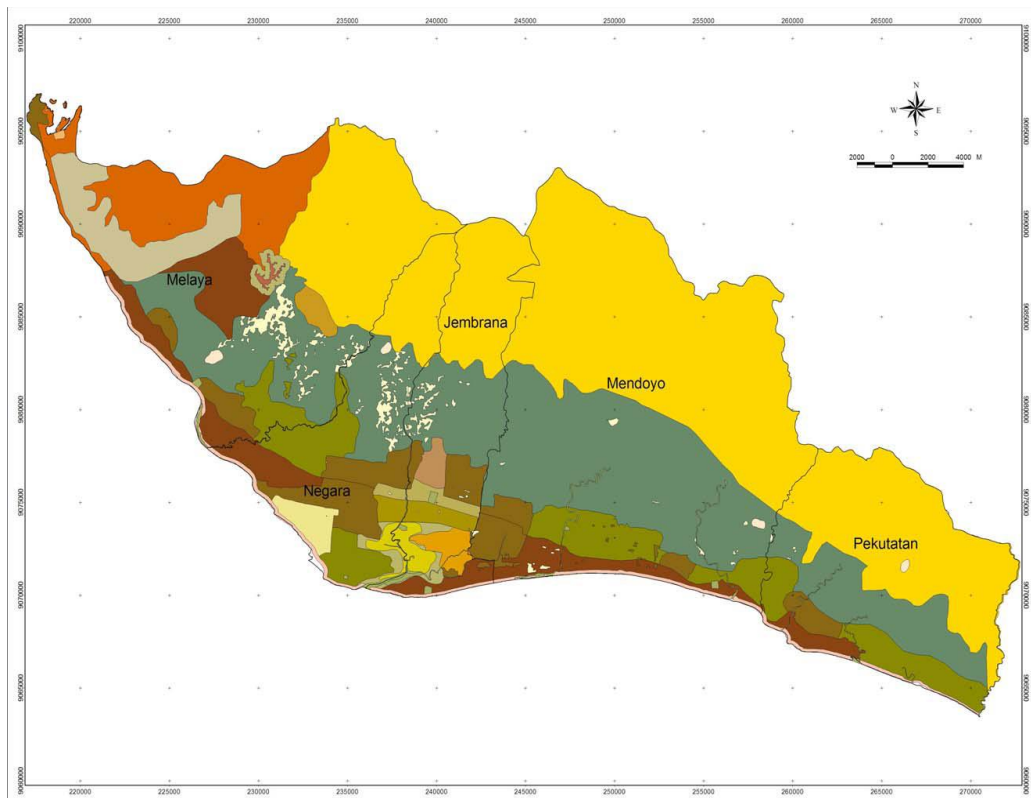
wilayah Kabupaten Jembrana meliputi sebagai berikut :

- 1) Sebelah barat adalah selat Bali
- 2) Sebelah utara adalah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng
- 3) Sebelah timur adalah Kabupaten Tabanan
- 4) Sebelah selatan adalah samudra Indonesia

Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan dengan 51 desa/kelurahan dengan perincian adalah sebagai berikut.

- 1) Kecamatan Melaya : 10 desa/kelurahan
- 2) Kecamatan Negara : 12 desa/kelurahan
- 3) Kecamatan Jember 10 desa/kelurahan
- 4) Kecamatan Mendoyo 11 desa/kelurahan
- 5) Kecamatan Pekutatan : 8 desa

Peta wilayah administrasi Kabupaten Jember disajikan pada Gambar 3.1.



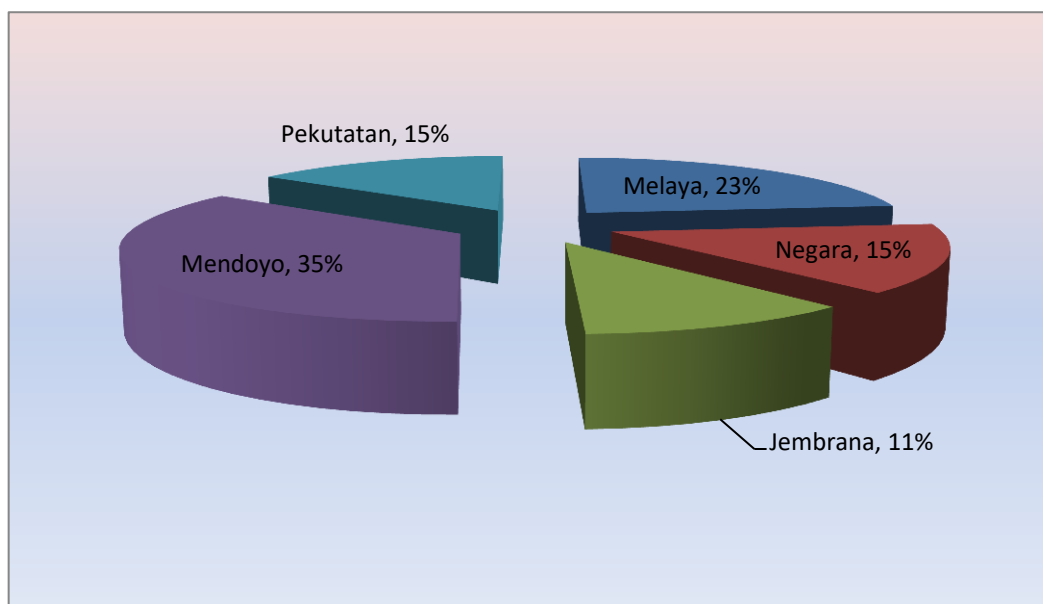
Gambar 3.1 : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jember

Luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Jember masing-masing seperti disajikan pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.2.

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Melaya	191,19	23%
2	Negara	126,5	15%
3	Jember	95,97	11%
4	Mendoyo	294,49	35%
5	Pekutatan	129,65	15%
Jumlah		837,80	100%

Sumber : Kab.Jember Dalam Angka 2019 dan diolah



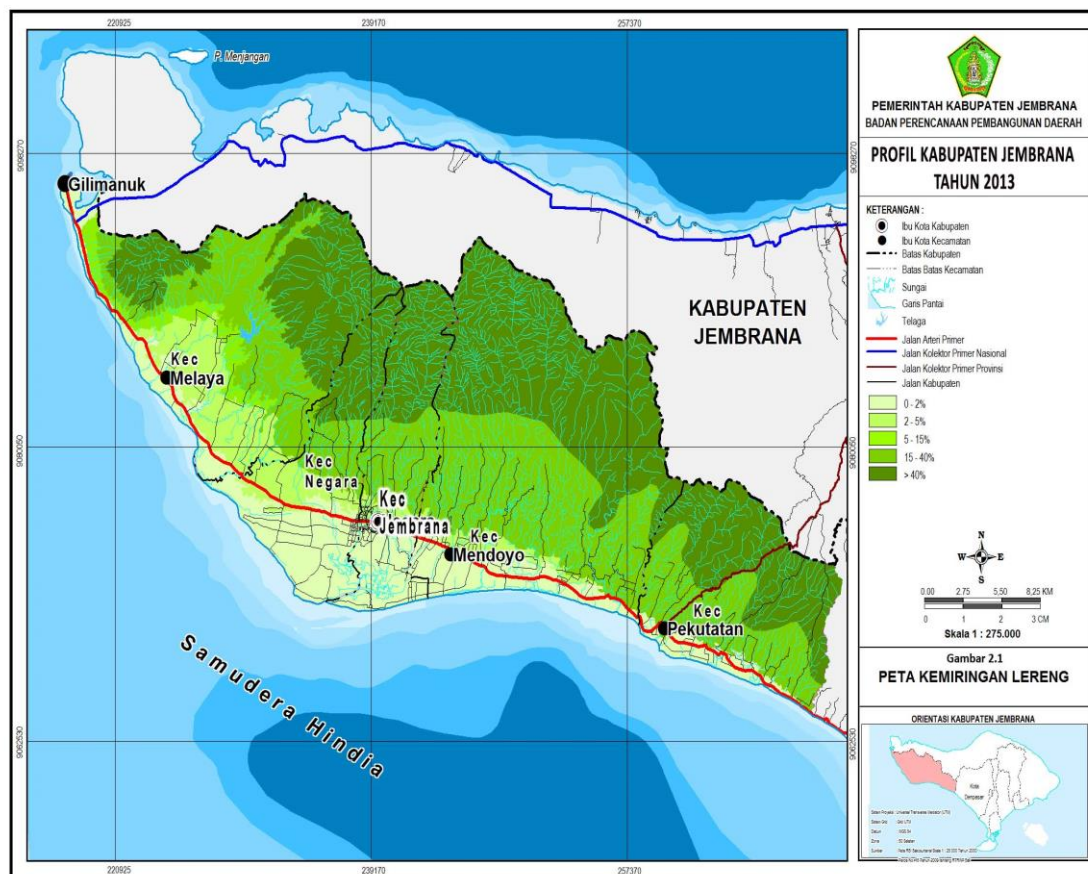
Gambar 3.2 : Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember

Berdasarkan Tabel 3.1 dan Gambar 3.2, menunjukkan bahwa Kecamatan Mendoyo memiliki wilayah yang paling luas yaitu 294,94 Km² atau 35% dari wilayah Kabupaten Jember. Sedangkan daerah kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Jember dengan luas sekitar 95,97 Km² atau 11% dari wilayah Kabupaten Jember.

3.2 Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Jember meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Jember dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok :

- 1) Wilayah dengan kemiringan lereng 0 – 2% (datar), tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Jember dan Kecamatan Negara.
- 2) Wilayah dengan kemiringan lereng 2 – 15% (landai), tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
- 3) Wilayah dengan kemiringan lereng 0 – 2% (datar), tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Jember dan Kecamatan Negara.
- 4) Wilayah dengan kemiringan lereng 2 – 15% (landai), tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
- 5) Wilayah dengan kemiringan lereng 15 – 40% (bergelombang/berbukit), tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
- 6) Wilayah dengan kemiringan lereng >40% (curam sampai sangat curam), merupakan bagian terluas dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jember.



11

Gambar 3.3 : Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jember

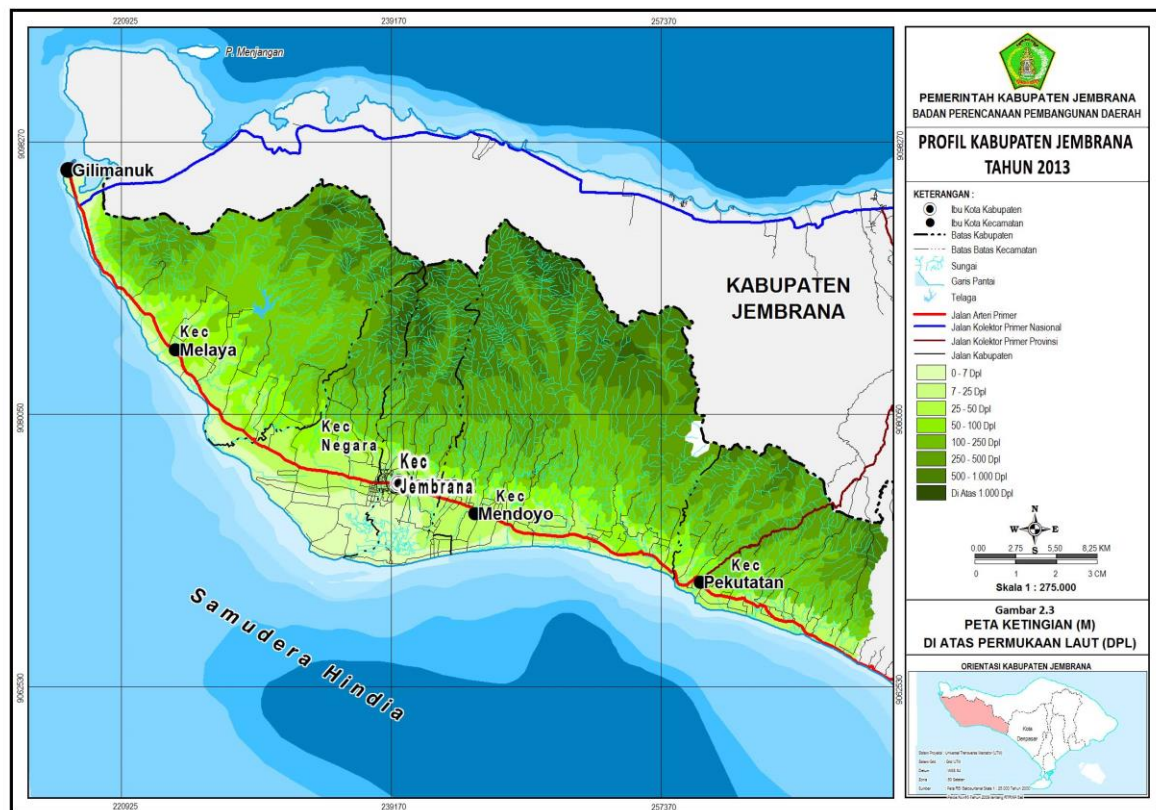
3.3 Ketinggian Lokasi

Di bagian utara wilayah Kabupaten Jember mempunyai morfologi dan fisiografi pegunungan yang dibentuk oleh deretan pegunungan Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Ketinggian tempat bervariasi antara 250 – 700 m dpl. Sedangkan di bagian selatan wilayah Kabupaten Jember topografinya relatif datar hingga bergelombang, ketinggian tempat ini berkisar antara 1 – 250 m dpl.

Tabel 3.1 Ketinggian Lokasi Wilayah Kab. Jember
(Dari Terendah Sampai Tertinggi)

No	Kecamatan	Titik Terendah (m dpl)	Lokasi	Titik Tertinggi (m dpl)	Lokasi
1.	Melaya	3	Gilimanuk, Melaya, Nusa Sari, Ekasari	699	Desa Melaya
2.	Negara	1	Cupel, Pengambengan, Loloan Barat, Lelateng, Baluk, Berangbang	585	Desa Baler Bale Agung
3.	Jember	1	Perancak, Air Kuning, Yeh Kuning, Loloan Timur	483	Dangin Tukadaya
4.	Mendoyo	1	Tegal Cangkring, Penyaringan, Yeh Embang Kauh, Yeh Embang, Yeh Embang Kangin, Yeh Sumbul	700	Yeh Embang Kauh, Yeh Embang, Yeh Embang Kangin
5.	Pekutatan	3	Medewi, Pengeragoan, Manggissari	699	Pulukan

Sumber : Kab. Jember Dalam Angka, Tahun 2019



Gambar 3.4 : Peta Ketinggian (M) Diatas permukaan Laut
Kabupaten Jember

3.4 Geologi

Geologi Kabupaten Jember terdiri dari batuan gunung api yang terdiri dari *lava, breksi, tufa*, yang diperkirakan berumur kwarter kawah dan daerah pedataran yang sebagian daerah persawahan terbentuk dari batuan yang tergabung dan disebut dengan *Formasi Palasari* yang terdiri dari batu pasir, konglomerat dan batu gamping terumbu dan diperkirakan berumur kwarter, sedangkan untuk daerah pesisir pantai pada umumnya endapan aluvium yang terdiri dari pasir, lanau, lempung dan kerikil, yang dijumpai di sekitar daerah pantai di Pengambengan, Tegalbadeng, Perancak, Yeh Kuning, Mendoyo dan di pantai Gilimanuk. Berdasarkan data peta geologi Kabupaten Jember dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jember terdiri dari lima jenis batuan yaitu :

- Formasi Gamping Agung
- Batuan Gunung Api Jember
- Formasi Palasari
- Formasi Alluvium
- Alluvium Formasi Sorga

Gunung yang terdapat di Kabupaten Jember berjumlah 17 buah termasuk gunung yang tidak aktif. Dari jumlah tersebut Kecamatan Melaya mempunyai gunung paling banyak sehingga topografi di Kecamatan Melaya termasuk berbukit-bukit. Dari 17 gunung yang dijumpai di Kabupaten Jember ternyata Gunung Merbuk yang tertinggi (1.386 m dpl) terletak di Kecamatan Jember disusul dengan Gunung Mesehe (1.300 mdpl) di Kecamatan Mendoyo, Gunung Bangul (1.253 m dpl) di Kecamatan Negara dan Gunung Lesung (1.047 m dpl) di Kecamatan Mendoyo.



Berdasarkan peta jenis tanah Provinsi Bali wilayah Kabupaten Jember terdiri dari beberapa jenis tanah yaitu :

- Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol)

Jenis tanah ini tersebar di lima wilayah Kabupaten Jember, yang paling luas terdapat di Kecamatan Mendoyo (25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha) Kecamatan Negara dan Jember (14.130 ha) dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha). Jenis tanah ini dibentuk oleh bahan induk abu vulkanik intermediet dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai sedang dan PH berkisar antara 4,5-5,5.

- Tanah Alluvial Coklat Kelabu

Tanah ini merupakan tanah endapan sungai dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jember (5.725 ha).

- Tanah Alluvial Coklat Kelabu

Jenis tanah ini dibentuk oleh bahan induk batuan gamping dengan bentuk morfologi bergelombang sampai berbukit bukit. Jenis tanah ini mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha).

- Tanah Regosol Coklat Kelabu

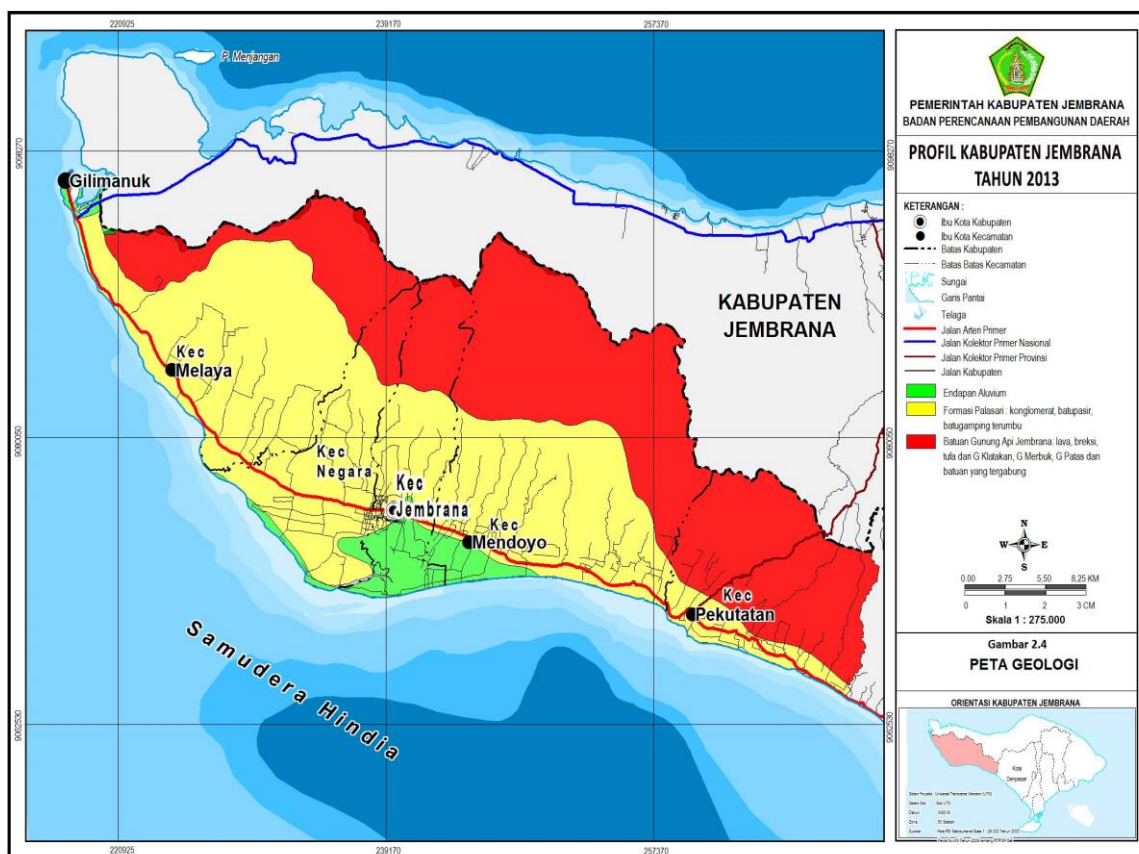
Jenis tanah ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jember seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha. Tanah ini terbentuk oleh induk vulkanik intermediet dengan bentuk wilayah landai sampai berombak.

- Tanah Alluvial Hidromorf

Jenis tanah ini terdapat di wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jember khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan dan di sekitar Desa Pengambengan dan Desa Cupel. Luas jenis tanah ini kurang lebih 1420 Ha. Tanah ini merupakan sedimen

darat dan laut yang dibentuk oleh lempeng pasir dan pecahan karang.

Masing masing jenis tanah yang telah disebutkan mempunyai tekstur yang berbeda-beda. Umumnya tekstur wilayah di Kabupaten Jember tergolong taktur halus (kandungan liat sangat tinggi).Sedangkan tekstur kasar (pasir dan lempung berpasir) merupakan tekstur tanah yang terdapat di sepanjang pantai dari wilayah Kabupaten Jember.Peta jenis tanah pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5.



Gambar 3.5 : Peta Geologi Kabupaten Jember

3.5 Hidrogeologi

Berdasarkan data Identifikasi, Inventarisasi/ Pendataan Penamaan Unsur Rupabumi (Sungai) di Wilayah Kabupaten Jember, sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Jember terdiri dari air sungai, pangkung, tukad dan telabah.



Di daerah ini terdapat 44 sungai, 75 pangkung, 4 tukad dan 2 telabah yang mempunyai arahan aliran dari Utara (pegunungan) ke muara sungai di bagian Selatan yaitu Samudera Indonesia. Masing-masing sungai, pangkung, tukad dan telabah mempunyai daerah tangkapan hujan (*catchment area*) yang berbeda-beda. Sungai yang alirannya paling panjang adalah Sungai Yeh Sumbul sepanjang 70,90 km, dan terpendek adalah Sungai Perahu Mati yang hanya 1,00 km. Sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Jember meliputi :

Air permukaan : air sungai, pangkung, tukad dan telabah, bendung Palasari

Air tanah : air yang bersumber dari bawah tanah

Mata air : terdapat 37 mata air dengan kapasitas 110 l/det.

Berdasarkan karakteristik alirannya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Jember dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sungai-sungai yang terletak di Bagian Darat dari wilayah Kabupaten Jember (sebelah Barat Tukad Melaya), sungai-sungai hanya mengalir pada musim hujan. Hal ini erat kaitannya dengan curah hujan yang

sangat rendah di wilayah itu serta kondisi tanah yang berbentuk dari batuan gamping. Sedangkan kelompok sungai yang mengalir sepanjang tahun adalah sungai-sungai yang terletak diantara Tukad Klatakan disebelah Barat dan Tukad Pulukan disebelah Timur umumnya sungai-sungai tersebut tetap mengalir pada musim kemarau walau debit airnya sangat kecil.

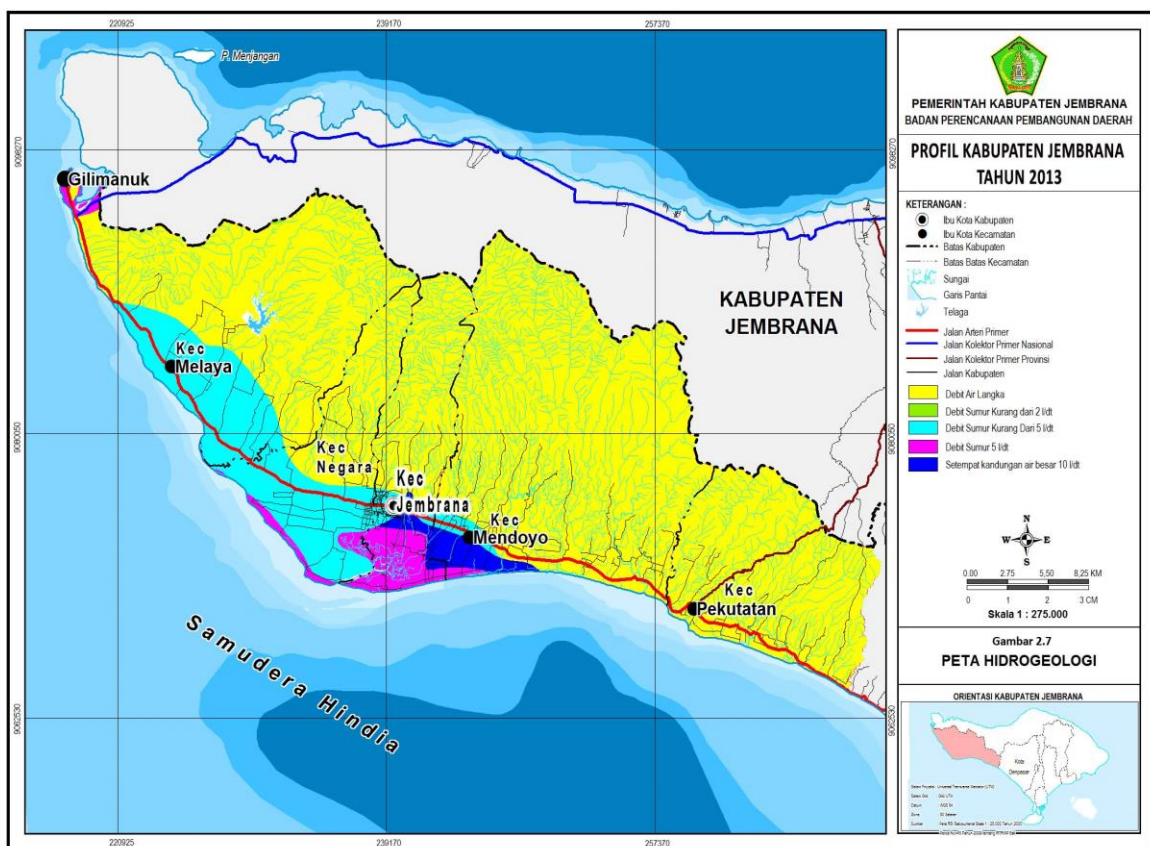
Berdasarkan peta hidrogeologi daerah Kabupaten Jember dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub. Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) kondisi air tanah dan struktur geologi Kabupaten Jember dapat diuraikan sebagai berikut:

Terdapatnya air tanah dan produktivitas akuifer (*occurrence of groundwater and productivity of aquifers*) yaitu :

- 1) Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir (*aquifers in which flow is intergranular*)
 - Akuifer produktif dengan penyebaran luas, berarti: Akuifer dengan keterusan sedang; muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau bawah muka tanah; debit sumur umumnya 5 sampai 10 ltr/dtk ;
 - Akuifer dengan produktivitas sedang, dan penyebaran luas berarti: akuifer dengan keterusan sedang sampai rendah; muka air tanah beragam dari atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 m dibawah tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk ;
 - Setempat akuifer dengan produktivitas sedang berarti: akuifer tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk.

2) Akuifer (bercelah atau sarang) dengan produktivitas rendah dan daerah air tanah langka (*aquifers [fissured or produc] of poor productivity and regions without exploitables groundwater*).

- Akuifer dengan produktivitas rendah setempat berarti: umumnya keterusan sangat rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh dilembah-lembah atau pada zona pelapukan ;
- Daerah air tanah langka.



23

Gambar 3.6 : Peta Hidrogeologi Kabupaten Jember

3.6 Kawasan Lindung

Kawasan lindung Kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada satu wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan – kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Berikut ini adalah Kawasan Lindung yang terdapat di Kabupaten Jember sesuai pola ruang Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2012 – 2032.

1) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung tersebut memiliki luas kurang lebih 32.974,7 Hektar atau 39,17% (tiga puluh sembilan koma tujuh belaspersen) dari luas wilayah kabupaten yang meliputi :

- a. Hutan Lindung Taman Bali Barat seluas kurang lebih 30.387,97(tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh) hektar;
 - Kecamatan Melaya seluas kurang lebih 7.945,5hektar(tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma lima) hektar;
 - Kecamatan Negara dan Kecamatan Jember seluas kurang lebih 2.778 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar,



- Kecamatan Mendoyo seluas kurang lebih 16.851,47 (enam belas ribu delapan ratus lima puluh satu koma empat tujuh) hektar;
- Kecamatan Pekutatan seluas kurang lebih 2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) hektar.

b. Hutan Lindung Yeh Leh-Yeh Lebah seluas kurang lebih 2.587 (dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) hektar yang tersebar di Kecamatan Pekutatan.

2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan di Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yang meliputi kawasan resapan air. Kawasan resapan air tersebut berupa kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air (akuifer), yang tersebar pada bagian utara wilayah Kabupaten Jember.

3) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Perlindungan setempat berdasarkan Perda No. 11 tentang RTRWK Jember 2012 – 2032, meliputi :

- Kawasan suci ;
- Kawasan tempat suci ;
- Kawasan sempadan pantai ;
- Kawasan sempadan sungai ;
- Kawasan sekitar bendungan ;
- Kawasan sempadan jurang.

4) Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi :



a. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Sebaran lokasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana mencakup kawasan seluas kurang lebih 604 (enam ratus empat) hektar yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Melaya, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan.

b. Kawasan Taman Nasional

Sebaran lokasi kawasan taman nasional merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat (TNBB) seluas kurang lebih 19.002,89 (sembilan belas ribu dua koma delapan sembilan) hektar yang berlokasi sebagian wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Buleleng, seluas kurang lebih 5.112 (lima ribu seratus dua belas) hektar di Kabupaten Jember tersebar di Desa Penginuman, Kecamatan Melaya.

c. Kawasan Taman Wisata Alam

Taman wisata alam merupakan usulan pengembangan baru mencakup kawasan hutan bakau seluas kurang lebih 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) hektar tersebar di :

- (1) Kawasan pantai Desa Sangkar Agung, Desa Budeng, Desa Loloan Timur, Desa Cupel, Desa Pengambengan, Desa Lelateng, Kecamatan Negara seluas kurang lebih 822 (delapan ratus dua puluh dua) hektar;
- (2) Kawasan pantai Desa Perancak, Desa Air Kuning dan Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jember seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar.

Arahan pengelolaan taman wisata alam :

- a) Perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang



pelestarian potensi; dan pembinaan habitat dan populasi flora dan fauna;

- b) Pengembangan jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam sesuai ketentuan perundang-undangan

5) Kawasan Konservasi dan Pulau – Pulau Kecil, sebarannya meliputi :

Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan kriteria:

- a. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
- b. Mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
- c. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.
- d. Mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan;
- e. Tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus; dan
- f. Tempat ritual keagamaan atau adat.

Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, sebarannya mencakup :

- a. Kawasan konservasi kawasan suci di sekitar Pura Dang Kahyangan Rambut Siwi;

- b. Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir meliputi kawasan pesisir Perancak, Candikusuma, dan Gilimanuk;
- c. Kawasan konservasi maritim di kawasan permukiman nelayan Desa Perancak;
- d. Kawasan konservasi maritim berupa kawasan pulau-pulau kecil meliputi Pulau Kalong, Pulau Burung dan Pulau Gadung di sekitar Teluk Gilimanuk; dan
- e. Kawasan konservasi pada kawasan pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial budaya dan agama di seluruh pantai tempat melasti dan kawasan laut sekitarnya.

Arahan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :

- a. Perlindungan terhadap tempat ritual keagamaan atau adat;
- b. Pelarangan penangkapan ikan destruktif, pengendalian sumber-sumber pencemaran oleh kegiatan rekreasi pantai dan pariwisata bahari; dan
- c. Pelarangan pengambilan pasir laut.

6) Kawasan Rawan Bencana Alam, meliputi :

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana alam terdiri dari : Kawasan rawan banjir; Kawasan rawan bencana tanah longsor; dan Kawasan rawan gelombang pasang.

a. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan bencana banjir ditetapkan dengan kriteria :

- 1) Terjadi kurang dari 3 (tiga) tahun sekali;
- 2) Lama genangan 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu;
- 3) Tinggi genangan lebih dari 1 (satu) meter;



- 4) Berdampak sedang; dan
- 5) Kawasan yang tergenang luas.

Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 200 hektar, meliputi :

- 1) Kawasan desa Pangyangan dan Lingkungan Koprahan di kecamatan Pekutatan karena meluapnya sungai Tukad Yeh Lebah; dan
- 2) Kawasan di Kelurahan Baler Bale Agung, Kelurahan Lelateng, Kelurahan Loloan Barat dan Desa Pengambengan karena buruknya sistem drainase kota.

Arahan mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan banjir, mencakup :

- 1) Pengelolaan daerah pengaliran sungai yang dapat mengurangi limpasan pada daerah pengaliran sungai tersebut ke sungai;
- 2) Pengelolaan kawasan rawan banjir melalui penerapan peraturan zonasi peruntukan dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan;
- 3) Prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini;
- 4) Mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir;
- 5) Menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sodetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;



- 6) Memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan rekayasa teknis antara lain membangun kolam retensi banjir, banjir kanal, interkoneksi sungai; dan
- 7) Perbaiki sistem drainase.

b. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

- 1) Kawasan rawan bencana tanah longsor ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material
 - b. pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran; dan
 - c. terdapat kerugian ekonomis dan kerugian jiwa.
- 2) Kawasan rawan bencana tanah longsor tersebar terutama di Kawasan Hutan Lindung wilayah Desa Berangbang Kecamatan Jembrana, Desa Manggissari Kecamatan Pekutatan, dan Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo.
- 3) Arahan mitigasi dan adaptasi pada kawasan yang berpotensi rawan bencana tanah longsor, mencakup :
 - a. Mengurangi tingkat keterjalatan lereng, dengan membuat teras bangku;
 - b. Meningkatkan dan memperbaiki sistem drainase baik air permukaan maupun air tanah;
 - c. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam untuk menahan laju gerakan tanah tersebut;
 - d. Menyarankan relokasi bangunan pada kawasan rawan longsor potensi tinggi
 - e. Pengembangan bangunan penahan gerakan tanah; dan



- f. Pengaturan kegiatan budaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan.

c. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

- 1) Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria :
 - a. Terjadi saat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari;
 - b. Kecepatan gelombang antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam
 - c. Berdampak sedang
- 2) Kawasan rawan gelombang pasang, tersebar pada sepanjang kawasan pesisir pantai Kabupaten Jember terdiri dari :
 - a. Kawasan pantai Desa Gilimanuk, Desa Melaya, Desa Candikusuma, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya;
 - b. Kawasan pantai Desa Banyubiru, Desa Baluk, Desa Cupel, Desa Tegal Badeng Barat, dan Desa Pengambangan Kecamatan Negara;
 - c. Kawasan pantai Desa Perancak, Desa Air Kuning, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jember;
 - d. Kawasan pantai Desa Delod Berawah, Desa Penyaringan, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Yeh Embang, Desa Yeh Embang Kangin dan Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo;
 - e. Kawasan pantai Desa Medewi, Desa Pulukan, Desa Pekutatan, Desa Pangyangan, Desa Gumbrih dan Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan.

Arahan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan gelombang pasang mencakup :

- 1) Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk menahan gelombang;



- 2) Penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman gelombang pasang; dan
- 3) Mengembangkan titik-titik dan jalur evakuasi di pantai untuk mengakomodasi pelaku kegiatan dan wisatawan di pantai bila terjadi gelombang pasang.

7) Kawasan Lindung Geologi, meliputi kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah dan tersebar hampir di seluruh Kabupaten Jember, meliputi :

Kawasan lindung geologi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan tersebut diatas adalah berfungsi sebagai perlindungan kelestarian yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta juga perlindungan terhadap keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya dari kerawanan fisik lingkungan yang diakibatkan oleh adanya proses geologi.

Kawasan Lindung Geologi terdiri dari : kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

A. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi, mencakup : kawasan rawan gempa bumi; kawasan rawan gerakan tanah; kawasan rawan tsunami; dan Kawasan rawan abrasi pantai.

1) Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan dengan kriteria :

- Kawasan yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak ;
- Kawasan yang dilalui oleh patahan aktif ;
- Kawasan yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 6 (enam) skala richter; dan



- Kawasan yang mempunyai potensi terjadi pembuburan tanah (*Liquifaction*).

Kawasan rawan gempa bumi meliputi kawasan rawan gempa bumi dengan potensi sedang seluas kurang lebih 6.755 hektar yang tersebar di Kecamatan Mendoyo seluas kurang lebih 2.021 hektar, Kecamatan Pekutatan seluas kurang lebih 834 hektar, Kecamatan Negara seluas kurang lebih 2.473 hektar, dan Kecamatan Melaya seluas kurang lebih 1.427 hektar.

Arahan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan gempa bumi, meliputi :

- a. Kawasan rawan gempa bumi yang mempunyai fungsi lindung mutlak dilindungi dan dipertahankan sebagai kawasan lindung;
- b. Kawasan rawan gempa bumi yang tidak mempunyai fungsi lindung dapat dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
- c. Pengembangan teknologi bangunan yang adaptif terhadap bencana gempa bumi.

2) Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan dengan kriteria memiliki kerentanan gerakan tanah tinggi. Kawasan rawan gerakan tanah meliputi kawasan yang sering terjadi gerakan tanah yang sebarannya terutama pada kawasan perbukitan terjal di wilayah Kecamatan Melaya, Mendoyo dan Pekutatan.

Arahan mitigasi dan adaptasi kawasan gerakan tanah tinggi, meliputi :



- a. Melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam dan konservasi lahan untuk menahan laju gerakan tanah;
- b. Membatasi dan pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan;
- c. Memasang sistem peringatan dini kawasan rawan gerakan tanah; dan
- d. Pengembangan bangunan penahan gerakan tanah.

3) Kawasan Rawan Tsunami

Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan kriteria zona kerawanan tinggi yang merupakan daerah pantai dengan elevasi rendah atau dengan kontur ketinggian kurang dari 10,0 (sepuluh) meter dengan jarak dari garis pantai kurang dari 50,0 (lima puluh) meter.

Kawasan rawan tsunami terdapat di seluruh pantai wilayah Kabupaten Jember dengan potensi sedang.

Arahan pengelolaan kawasan rawan tsunami, meliputi:

- a. Pembangunan sistem peringatan dini tsunami di sepanjang pantai wilayah kabupaten;
- b. Pengembangan zona-zona evakuasi pada lokasi yang lebih tinggi yang sekaligus bisa dimanfaatkan untuk taman dan fasilitas umum lainnya;
- c. Pengembangan dan penentuan jalur-jalur jalan evakuasi ke kawasan yang lebih tinggi;
- d. Penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman tsunami; dan



- e. Pemanfaatan bangunan bertingkat disekitar pantai untuk tempat evakuasi masyarakat dan wisatawan bila terjadi tsunami.

4) Kawasan Rawan Abrasi Pantai

Kawasan rawan abrasi pantai, sebarannya berada pada kawasan pesisir pantai Kabupaten Jember.

Arahan pengelolaan kawasan rawan abrasi adalah:

- a. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
- b. Pemeliharaan berkala pantai dan bangunan pengamanan pantai yang telah terbangun; dan
- c. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan;

B. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah

- 1) Kawasan imbuhan air tanah sebarannya meliputi kawasan lereng pegunungan yang terdapat di Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jember, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan.
- 2) Kawasan sekitar mata air sebarannya meliputi terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) mata air di seluruh wilayah kabupaten meliputi:
 - a. Kecamatan Melaya 6 (enam) mata air;
 - b. Kecamatan Negara 1 (satu) mata air;
 - c. Kecamatan Jember 9 (Sembilan) mata air;
 - d. Kecamatan Mendoyo 14 (empat belas) mata air; dan
 - e. Kecamatan Pekutatan 7 (tujuh) mata air.

8) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung meliputi : Kawasan RTHK dan RTH Lainnya;
Kawasan perlindungan plasma nutfah, dan Terumbu karang

A. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dan RTH Lainnya

Ruang terbuka hijau ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan setra, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan, kawasan lindung berupa hutan lindung, Tahura, Taman Wisata Alam dan sejenisnya;
- 2) Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- 3) Didominasi komunitas tumbuhan.

Kawasan ruang terbuka hijau dikembangkan dengan tujuan :

- 1) Menjaga keserasian dan keseimbangan antara lahan terbangun dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai resapan air;
- 2) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan
- 3) Meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan.

Kawasan RTH dan RTH Lainnya meliputi:

a) RTH publik terdiri atas:

- (1) Kawasan jalur hijau;
- (2) Sabuk hijau berupa kawasan pertanian, persawahan, perkebunan;
- (3) Taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan pada berbagai skala;



- (4) Taman pada obyek wisata
- (5) Hutan kota;
- (6) Setra yang tersebar diseluruh desa adat/pekraman;
- (7) Kuburan umum;
- (8) Taman makam pahlawan;
- (9) Lapangan olah raga;
- (10) Lapangan upacara;
- (11) Parkir terbuka;
- (12) Sabuk hijau berupa lahan pertanian;
- (13) Jalur di bawah tegangan tinggi (sutt dan sutet);
- (14) Sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan bendungan;
- (15) Jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian;
- (16) Bentang alam seperti pegunungan, bukit, lereng dan lembah di seluruh wilayah.

Kawasan RTHK meliputi RTHK publik dan RTHK Private:

Sebaran kawasan jalur hijau, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten sebanyak 9 (sembilan) blok lokasi, meliputi :

- a. Jalur hijau di Kecamatan Pekutatan terdapat di jalur sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Pangyangan;
- b. Jalur hijau di Kecamatan Mendoyo terdiri atas :
 - 1) Jalur pada sebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Yeh Sumbul;
 - 2) Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Yeh Embang Kangin dan Desa Yeh Embang;
 - 3) Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Penyaringan;



- 4) Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Mendoyo Dauh Tukad;
- 5) Jalur pada sebelah barat dan timur jalan Tegalcangkring – Delod Berawah di Desa Tegal Cangkring;
- c. Jalur hijau di Kecamatan Jember terdiri atas:
 - 1) Jalur pada sebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Dandin Tukadaya;
 - 2) Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Kelurahan Dauh Waru;
- d. Jalur pada Kecamatan Negara terdapat di dua Jalur pada sebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Kaliakah.

B. Kawasan perlindungan plasma nutfah, meliputi perlindungan burung jalak putih di kawasan Taman Nasional Bali Barat.

C. Sebaran Terumbu Karang yang terdapat di Kabupaten Jember, terdapat di Kawasan Teluk Gilimanuk dan Kawasan Pesisir Candikusuma-Gilimanuk.

9) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya kabupaten adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas potensi dan kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Berikut adalah Kawasan Budidaya di Kabupaten Jember :

1) Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 2.999,3 ha meliputi :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas

b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, meliputi seluas kurang lebih 2.610,20 Ha, tersebar di hulu Desa Blimbingsari, Desa Melaya, dan Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya.

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap meliputi seluas kurang lebih 383,10 Ha tersebar di hulu Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya.

Arahan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi:

- a. Integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan industri kreatif;
- b. Pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;
- c. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengelolaan hutan produksi;
- d. Reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis dan bekas terbakar.
- e. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan.

2) Kawasan hutan rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan hutan yang dibebani hak milik dan hak lainnya dengan luas minimum 0,25 Ha; dan
- b. Penutupan tajuk tanaman kayu dan tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen).

Kawasan peruntukan hutan rakyat merupakan hutan produksi yang memiliki hak yang diarahkan pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi kesesuaian lahan untuk pengembangan hutan rakyat secara optimal dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumberdaya lahan.

Pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat diarahkan untuk memberi dukungan pada upaya pelestarian alam, menjaga keseimbangan ekosistem kawasan hutan minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah, serta penyediaan bahan baku bangunan, industri kerajinan dan industri kreatif lainnya.

Kawasan hutan rakyat diarahkan seluas kurang lebih 536 hektar atau sekitar 0,64 persen dari luas wilayah kabupaten sebarannya meliputi:

a. Kawasan penyangga hutan di kawasan perbatasan dengan hutan lindung dan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) seluas kurang lebih 442 hektar, meliputi :

- 1) Desa Medewi, Desa Pulukan, Desa Asah Duren, Desa Manggissari, Desa Gumbrih dan Desa Pengeragoan di Kecamatan Pekutatan;
- 2) Desa Yeh Sumbul, Desa Yeh Embang Kangin, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Penyaringan, Desa Tegal Cangkring, Desa Poh Santen, Desa Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo;
- 3) Desa Batuagung, Desa Dauh Waru, Desa Pendem, Desa Baler Bale Agung, Desa Brangbang Kecamatan Negara;
- 4) Desa Manistutu, Desa Belimbingsari, Desa Melaya, Desa Ekasari Kecamatan Melaya.

b. Lahan di sekitar sempadan sungai dengan skala kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten;

c. Lahan di sekitar sempadan jurang tersebar di seluruh wilayah kabupaten;

Kawasan hutan rakyat lainnya tersebar terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40 persen, pada radius kawasan tempat suci, serta kawasan sekitar peruntukan pertanian dengan luasan kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan rakyat, mencakup:

- a. Mengembangkan kawasan peruntukan hutan rakyat pada lahan dengan kemiringan di atas 40%, yang berupa hak milik masyarakat yang beralih fungsi menjadi kegiatan budidaya lainnya;
- b. Mendukung pencapaian tutupan vegetasi hutan minimal 30% dari luas wilayah kabupaten;
- c. Integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan kegiatan industri kecil dan industri kreatif;
- d. Pengembangan fungsi penyangga pada kawasan peruntukan hutan rakyat yang berbatasan dengan hutan lindung; dan
- e. Reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis.

3) Kawasan peruntukan pertanian, meliputi :

Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan kriteria:

- a. Menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan perikanan;
- b. Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya;
- c. Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat;
- d. Pola tanam: monokultur, tumpangsari, campuran tumpang gilir.

Kawasan peruntukan pertanian mencakup: cKawasan pertanian tanaman pangan; vKawasan pertanian hortikultura; vKawasan peruntukan peternakan dan vKawasan perkebunan .

Kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 28.254,3 hektar atau kurang lebih 33,56 persen dari luas wilayah kabupaten.

Luas kawasan peruntukan pertanian selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah kabupaten.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian, mencakup :



- a. Penyusunan rancang bangun peruntukan pertanian berdasarkan hasil identifikasi terhadap potensi dan kondisi wilayah serta sosial budaya masyarakat setempat;
- b. Penguatan kelembagaan dan manajemen subak;
- c. Pengembangan penelitian pengembangan komoditas unggulan, diversifikasi produk dan sistem pola tanam yang mampu mengadaptasi kondisi perubahan iklim;
- d. Optimalisasi fungsi dan pelayanan jaringan irigasi dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas lahan;
- e. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi ke non pertanian agar ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan;
- f. Pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh wilayah kabupaten;
- g. Penetapan pencapaian target luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan yang ada;
- h. Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat melalui sistem agribisnis dan agroindustri terpadu;
- i. Pengembangan kebijakan untuk mendorong integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata, desa wisata dan ekowisata;
- j. Pengembangan kawasan pertanian sekaligus berfungsi sebagai kawasan RTH dan resapan air;
- k. Revitalisasi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan; dan



1. Pengembangan teknologi tepat guna serta sarana dan prasarana produksi dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil produksi/pasca panen.

A. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan diarahkan dalam rangka menjaga ketahanan pangan wilayah, mempertahankan jati diri budaya Bali dan memantapkan status Jember sebagai lumbung berasnya Bali diarahkan seluas kurang lebih 6.601 hektar atau kurang lebih 7,84 persen dari luas wilayah kabupaten yang dikelola 84 subak, sebarannya terdiri atas :

- 1) Kecamatan Melaya seluas kurang lebih 1.219 hektar, yang dikelola 20 subak;
- 2) Kecamatan Negara seluas kurang lebih 1.555 hektar, yang dikelola 22 subak;
- 3) Kecamatan Jember seluas kurang lebih 1.032 hektar, yang dikelola 16 subak;
- 4) Kecamatan Mendoyo seluas kurang lebih 2.241 hektar, yang dikelola 15 subak;
- 5) Kecamatan Pekutatan seluas kurang lebih 554 hektar, yang dikelola 11 subak.

Kawasan peruntukan tanaman pangan ditetapkan menjadi kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 90 persen dari luas yang ada atau kurang lebih seluas 5.940,9 hektar yang tersebar diseluruh kecamatan.

B. Kawasan Budidaya Hortikultura

Kawasan budidaya hortikultura ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan peruntukan budidaya hortikultura secara optimal;
- 2) Pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering; dan
- 3) Pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanam singkat.

Kawasan pertanian hortikultura diperuntukkan bagi tanaman buah-buahan dan sayur mayur yang sebaran lokasinya diarahkan seluas kurang lebih 6.991,3 ha, terdiri atas:

- 1) Komoditas tanaman buah-buahan tersebar dalam skala kecil bercampur dengan tanaman perkebunan rakyat, terutama di Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Pekutatan.
- 2) Pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanaman singkat;
- 3) Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
- 4) Pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya.

Arahan pengelolaan kawasan budidaya hortikultura, mencakup :

- 1) Pengembangan tanaman hortikultura pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan termasuk pertanian perkotaan (*urban farming*),
- 2) Pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering;
- 3) Pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanam singkat;



- 4) Pembatasan perluasan lahan budidaya hortikultura sayur mayur dari kawasan budidaya perkebunan dan peruntukan hutan rakyat;
- 5) Pengendalian kegiatan budidaya hortikultura sayur mayur pada kawasan yang memiliki kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
- 6) Pemantapan Kawasan Agropolitan berbasis pertanian hortikultura sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan;
- 7) Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
- 8) Pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya.

C. Kawasan Budidaya Peternakan

Kawasan budidaya peternakan ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Pemanfaatan area pertanian untuk menghasilkan produk usaha peternakan yang bernilai ekonomi tinggi;
- 2) Pengembangan pada area pertanian lahan kering atau kritis yang produktivitasnya rendah;
- 3) Keterpaduan kegiatan peternakan dengan kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan;
- 4) Kemampuan mendayagunakan bahan pakan rerumputan, semak dan pepohonan serta hasil pertanian dan limbah pertanian secara optimal untuk pakan ternak;
- 5) Kemampuan mengoptimalkan sumber daya lahan dan lingkungan secara optimal; dan
- 6) Kemampuan mempertahankan pelestarian plasma nutfah dan konservasi lahan secara berkelanjutan.



Kawasan peruntukan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian.

Sebaran kawasan peruntukan kegiatan peternakan, meliputi :

- 1) Pengembangan ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan dan peruntukan pertanian dalam arti luas, meliputi :
 - penggemukan sapi tersebar di seluruh wilayah terutama di Kecamatan Melaya;
 - pembibitan sapi tersebar di seluruh wilayah, terutama di Kecamatan Melaya;
 - pengembangan ternak kambing terutama di Kecamatan Negara; dan
 - pengembangan ternak babi tersebar di seluruh wilayah, terutama di kecamatan Mendoyo.
- 2) Pengembangan ternak kecil dalam bentuk usaha peternakan ayam, diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman, sebarannya meliputi :
 - ternak unggas ayam ras petelur tersebar di seluruh wilayah, terutama di Kecamatan Negara dan Melaya;
 - ternak ayam buras/ayam kampung tersebar di seluruh wilayah, terutama di Kecamatan Melaya;
- 3) Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan
- 4) Pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga.



Arahan pengelolaan kawasan peruntukan kegiatan peternakan, mencakup :

- 1) Pengembangan ternak besar seperti ternak sapi, kambing dan lainnya dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan dan peruntukan pertanian dalam arti luas;
- 2) Pengembangan ternak kecil dalam bentuk usaha peternakan seperti peternakan ayam, diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman;
- 3) Arahan pengembangan ternak sapi dominan terdapat di Kecamatan Melaya, Mendoyo dan Pekutatan;
- 4) Arahan pengembangan ternak unggas ayam ras dominan terdapat di Kecamatan Melaya;
- 5) Pengelolaan limbah ternak untuk diintegrasikan dengan sistem pertanian;
- 6) Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan
- 7) Pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga.

D. Kawasan Budidaya Perkebunan

Kawasan budidaya perkebunan ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk tanaman perkebunan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya lahan; dan
- 2) Pengembangan tanaman perkebunan diprioritaskan pada tanaman yang memiliki produktivitas tinggi dan daya saing tinggi serta mampu mendukung kelestarian lingkungan.

Kawasan peruntukan perkebunan, diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri kecil dan menengah dalam negeri maupun untuk memenuhi kebutuhan ekspor, seluas kurang lebih 14.662 hektar atau kurang lebih 17,42 persen dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas:

- 1) Pemantapan kawasan peruntukan perkebunan milik pemerintah daerah di Kecamatan Pekutatan dan Kecamatan Melaya
- 2) Pengembangan perkebunan milik masyarakat di seluruh wilayah terutama dominan di Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Pekutatan, dan Melaya yang tergabung dalam 145 subak abian.
- 3) Pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan berdaya saing global pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan terdiri atas :
 - (1) Komoditas kopi di kawasan Kecamatan Pekutatan;
 - (2) Komoditas kakao tersebar di lima Kecamatan;
 - (3) Komoditas cengkeh di kawasan Kecamatan Pekutatan
 - (4) Komoditas kelapa tersebar di lima Kecamatan
- 4) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri.



- 5) Penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang terintegrasi dengan subak abian;
- 6) Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
- 7) Pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya dengan konsep simantri;
- 8) Pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap berbasis subak abian dan kawasan sesuai potensi;
- 9) Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan sertifikat indikasi geografis;
- 10) Pengembangan agrowisata berbasis tanaman perkebunan di seluruh wilayah; dan
- 11) Pemantapan kawasan agropolitan melaya dan pengembangan kawasan agropolitan promosi pekutatan berbasis tanaman perkebunan sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan.

Arahan pengelolaan kawasan budidaya perkebunan, mencakup :

- 1) Pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan berdaya saing global pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan
- 2) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri.
- 3) Penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang terintegrasi dengan subak abian;
- 4) Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan



- 5) Pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya dengan konsep Simantri;
- 6) Pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap berbasis Subak Abian dan kawasan sesuai potensi.
- 7) Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan sertifikat indikasi geografis;
- 8) Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
- 9) Pengembangan agrowisata dan pemantapan kawasan agropolitan berbasis tanaman perkebunan sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan;

E. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan, mencakup: Kawasan peruntukan perikanan tangkap; Kawasan budi daya perikanan; dan Kawasan pengolahan hasil perikanan.

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap, mencakup:

- 1) Perikanan tangkap di perairan umum, selanjutnya disebut perikanan perairan umum; meliputi kegiatan perikanan tangkap di perairan Bendungan Palasari dan Bendungan Benel dan sungai;
- 2) Perikanan tangkap di perairan laut selanjutnya disebut perikanan laut, meliputi jalur penangkapan ikan dengan batas 0 (nol) sampai 4 (empat) mil untuk perahu nelayan;
- 3) Sebaran pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan laut, sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - a) Pengembangan dan pemberdayaan perikanan laut skala kecil meliputi desa-desa yang memiliki kelompok nelayan



tradisional di desa-desa pesisir dan desa-desa lainnya yang memiliki kelompok nelayan; dan

- b) Pengembangan perikanan laut skala menengah dan besar meliputi : Kawasan Pengembangan, Desa Pengembangan Kecamatan Negara dan Kawasan Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jember
- 4) Pemantapan prasarana pendukung kegiatan perikanan laut, sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - a) Pangkalan perahu/jukung nelayan tradisional, tersebar pantai-pantai di seluruh desa nelayan;
 - b) Pelabuhan Khusus Perikanan meliputi Pelabuhan Nusantara Pengembangan di desa Pengembangan kecamatan Negara;
 - c) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pengembangan
 - d) Pangkalan perahu/jukung nelayan tradisional, tersebar pantai-pantai di seluruh desa nelayan

b. Kawasan budi daya perikanan mencakup budi daya perikanan air tawar, air payau (tambak) dan air laut :

- 1) Perikanan budi daya di Bendungan Palasari dan Bendungan Benel berupa Keramba Jaring Apung (KJA),
- 2) Perikanan budi daya sawah bersama ikan (minapadi);
- 3) Kawasan perikanan budi daya perairan umum;
- 4) Kawasan perikanan budi daya kolam air tenang;
- 5) Kawasan perikanan budi daya saluran irigasi;
- 6) Kawasan perikanan budi daya air laut tersebar di perairan pantai dari Desa Cupel sampai dengan Gilimanuk



- 7) Kawasan perikanan budidaya air payau (tambak) diarahkan seluas 1.129 (seribu seratus dua puluh sembilan) Hektar yang tersebar di wilayah potensi pada 5 kecamatan.
- 8) Pemantapan prasarana pendukung penyediaan benih kegiatan budi daya perikanan, berupa lokasi Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembibitan Rakyat (UPR), meliputi :
 - a) BBI Dinas di Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo
 - b) *Hatchery*, Kecamatan Jember dan Kecamatan Mendoyo
 - c) UPR yang tersebar di seluruh kecamatan.

c. Kawasan pengolahan ikan meliputi kegiatan industri perikanan dan kelautan terdiri atas:

- 1) Sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya tersebar di desa pesisir.
- 2) Kawasan industri berbasis perikanan di kawasan pengembangan, kecamatan negara; dan
- 3) Sentra industri kemaritiman di desa perancak, kecamatan jember

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan, mencakup :

- 1) Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kawasan Pengembangan dan sekitarnya untuk memantapkan daya saing kegiatan perikanan wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati
- 2) Pengaturan zona peruntukan perikanan di kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (WP3K) Kabupaten Jember.
- 3) Memberikan dukungan pengembangan perikanan melalui perekrutan teknologi perikanan serta melaksanakan

pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan dan eradikasi penyakit ikan di darat,

- 4) Melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan di wilayah laut, dan
- 5) Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut.

4) Kawasan Peruntukkan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki keindahan panorama alam dan/atau bangunan peninggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah;
- b. Memiliki karakteristik masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan;
- c. Memiliki potensi sarana dan prasarana pendukung kawasan; dan
- d. Memiliki cadangan lahan yang mencukupi untuk kawasan efektif pariwisata.

Kawasan peruntukan pariwisata mencakup : Kawasan Pariwisata; Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK); dan Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW).

A. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata, merupakan kawasan strategis provinsi meliputi:

1. Kawasan Pariwisata Candikusuma seluas kurang lebih 4.632 hektar, meliputi Desa Baluk dan Desa Banyubiru di Kecamatan Negara, Desa Tukadaya dan Desa Tuwed di Kecamatan Melaya;
2. Kawasan Pariwisata Perancak seluas kurang lebih 19.431 hektar, meliputi:



- a) Desa Perancak, desa Yeh Kuning, Desa Air Kuning dan Desa Penyaringan di Kecamatan Jember;
- b) Desa Penyaringan, Desa Delod Berawah, Desa Yeh Embang Kangin dan Desa Yeh Sumbul di Kecamatan Mendoyo; dan
- c) Desa Medewi dan Desa Pulukan di Kecamatan Pekutatan

B. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK)

KDTWK meliputi:

- 1. KDTWK Palasari seluas kurang lebih 1.869 hektar, meliputi Desa Belimbingsari dan Desa Ekasari, Kecamatan Melaya.
- 2. KDTWK Gilimanuk seluas kurang lebih 5.601 hektar, meliputi Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya

C. Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW)

Kawasan Daya Tarik Wisata (KDTW), merupakan pusat-pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata, terdiri atas :

- 1. DTW pantai meliputi : Pantai Pengeragoan, Pantai Gumbrih, Pantai Pekutatan, Pantai Medewi, Pantai Delodberawah, Pantai Perancak, Pantai Baluk Rening, Teluk Gilimanuk.
- 2. DTW alam meliputi : Bunut Bolong, TNBB, kawasan hutan bakau Perancak dan sekitarnya, kawasan air terjun Yeh Mesehe, Lembah Sawe;
- 3. DTW budaya dan peninggalan sejarah : Museum Manusia Purba Gilimanuk, Monumen Lintas Laut Gilimanuk;
- 4. DTW seni dan budaya : Desa Sangkaragung, Kesenian Jegog, Mekepong, Desa Ekasari, Desa Blimbingsari;
- 5. DTW agro : Perkebunan Pulukan, Perkebunan Sanghyang Melaya ;
- 6. DTW Tirta : Teluk Gilimanuk (*snorkling, diving*), Pantai Medewi (*surfing*), Bendungan Palasari, Bendungan Benel;



7. DTW Taman Rekreasi : Taman Pecangakan, Areal Gedung Kesenian Bung Karno, Taman Tirta Samudra Delodberawah
8. DTW Spiritual: Kawasan Pura Rambut Siwi, Pura Gde Perancak, Gereja Katolik Desa Ekasari, Gereja Protestan Desa Blimbingsari
9. DTW Kuliner : Gilimanuk, Pantai Pebuahan
10. DTW olah raga, petualangan, dan pendidikan : Stadion Pecangakan, GOR Kresna Jvara, TNBB (*treeking, bird watcing, camping*), Kawasan Bendungan Palasari (*off Road*), Pusat Penelitian Kelautan Perancak.
11. DTW Desa Wisata dikembangkan tersebar sesuai potensinya

Arahan pengelolaan Kawasan Peruntukan Pariwisata mencakup :

- a. Pada Kawasan Pariwisata dan KDTWK, dikembangkan dengan ketentuan, meliputi :
 - seluruh kawasan tidak seluruhnya dapat dikembangkan sebagai kawasan yang boleh dibangun fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata, namun juga mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya di luar kawasan peruntukan pariwisata yang pengaturannya dilaksanakan dengan menetapkan Kawasan Efektif Pariwisata (KEP), pada beberapa bagian blok kawasan;
 - KEP dikembangkan sebagai peruntukan akomodasi wisata beserta fasilitas pendukung lainnya sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung kawasan yang dapat dikelola sebagai blok KEP tertutup, terbuka, maupun kombinasi keduanya;
 - Penetapan KEP beserta peruntukan lainnya baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya lainnya, lebih



lanjut diatur dalam rencana rinci tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- b. Pengembangan KDTW didasarkan atas pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat, yang ditunjang pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan makan dan minum, akomodasi wisata kerakyatan, agrowisata, ekowisata, desa wisata, wisata spiritual, wisata bahari dan lainnya;
- c. Pengembangan KEP pada KDTW yang berupa kawasan fungsional atau keseluruhan satu desa, dapat dikembangkan secara tersebar dan terbatas, diluar kawasan lindung dan kawasan lahan pertanian berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan zonasi KDTW;
- d. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi untuk mempermudah akses keseluruhan KEP pada Kawasan Pariwisata dan KDTWK serta DTW
- e. Penataan ruang Kawasan Efektif Pariwisata di Kawasan Pariwisata, KDTW dan DTW didasarkan atas Peraturan Daerah tentang RDTR Kawasan yang lebih luas, selanjutnya dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.

5) Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi :

Kawasan peruntukan kegiatan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki potensi pertambangan, diutamakan terutama pada cadangan akibat letusan gunung berapi yang terdiri dari pasir dan batu;
- b. Berada dalam zonasi pertambangan yang telah ditetapkan;



- c. Kegiatan eksploitasi dibatasi sampai dengan upaya untuk mengembalikan rona awal lahan di tempat galian c tersebut;
- d. Tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; dan
- e. Eksplorasi bahan tambang di luar dapat dikembangkan secara terbatas sesuai dengan potensi yang ada, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi:

- a. Lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan pemanfaatan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Lokasi kegiatan pertambangan skala kecil terbatas berupa pertambangan batuan, pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan berlokasi di kecamatan mela.

Pengelolaan peruntukan kawasan pertambangan adalah :

- a. Pengendalian kegiatan pertambangan rakyat berupa pengambilan batu padas, tanah liat dan pasir, pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
- b. Pelarangan kegiatan pengambilan batu padas, pasir dan batu pada kawasan-kawasan tebing sungai.

6) Kawasan Peruntukkan Industri

Kawasan peruntukan industri, meliputi:

- a. Kawasan Industri; dan
- b. Pengembangan sentra-sentra industri kecil.

Kawasan Industri diarahkan berupa Kawasan Industri khusus menengah berbasis sumber daya perikanan dan kegiatan industri lainnya

di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara berupa Kawasan Industri Pengambengan yang sekaligus merupakan Kawasan Strategis Provinsi Bali yang dialokasikan seluas kurang lebih 625 hektar.

Pengembangan sentra-sentra industri usaha mikro, kecil dan menengah non polutif yang potensi dan sebarannya, meliputi :

- a. Industri kecil dan menengah kemaritiman pembuatan perahu dan kapal nelayan di Desa Perancak
- b. Industri kecil kerajinan Rakyat ;
 - 1) Tenun Cagcag:Desa Baluk, Loloan Timur, Kaliakah, Sangkar Agung, Budeng, Dauharu, Batu Agung, Dangin Tukadaya, Yeh Embang, Poh Santen, Mendoyo Dauh Tukad, Mendoyo Dangin Tukad dan Penyaringan.
 - 2) Rajut Tas:Desa Melaya Pantai, Manistutu, Gilimanuk, Baluk, Cupel, Loloan Timur, Pulukan, Medewi, Melaya, Yeh Sumbul.
 - 3) Kerajinan Semat:Mendoyo Dauh Tukad
- c. Industri pengolahan makanan dan bahan makanan;
 - 1) Sentra Industri Pindang Ikan : Desa Perancak
 - 2) Sentra Industri Gula Merah : Desa Pangkung Tanah, Tuwed Pekutatan, Candi Kusuma, Nusa Sari Pebuahan dan Tegal Cangkring
 - 3) Sentra Industri makanan khas : Gilimanuk, Negara
- d. Industri kecil bahan bangunan ;
 - 1) Sentra Industri Meubeler : Desa Melaya
 - 2) Sentra Industri Bata Merah : Desa Tegal Badeng Timur, Baluk, Cupel, Tegal Badeng Barat, Lelateng, Mendoyo Dangin Tukas dan Air Anakan.



7) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria:

- a. Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;
- b. Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Rencana pola ruang kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian yang diarahkan seluas kurang lebih kurang lebih 6.497 hektar atau kurang lebih 7 persen dari total luas wilayah, mencakup:

- a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. Kawasan permukiman perdesaan.

A. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan, beserta penyediaan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan, yang sebarannya meliputi :

1. Kawasan permukiman di kawasan perkotaan Negara
2. Kawasan permukiman di kawasan perkotaan Glimanuk dan
3. Kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PPK meliputi Melaya, Pengambengan, Yeh Embang, Mendoyo dan Pekutatan



B. Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan beserta pusat-pusat pelayanan kawasan perdesaan sesuai fungsi kawasan baik yang berfungsi PPL maupun kawasan perdesaan murni, yang sebarannya meliputi seluruh pemusatan permukiman pada desa-desa yang berfungsi PPL dan kawasan perdesaan lainnya

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman :

1. Kawasan peruntukan permukiman mencakup fungsi-fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, terdiri atas; kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang terbuka hijau dan fungsi
2. Pemanfaatanruanglainnyasesuaikarakter tiap kawasan permukiman
3. Kawasan permukiman memiliki aksesibilitas yang dihubungkan oleh sistem transportasi dan dilengkapi prasarana pengelolaan lingkungan permukiman seperti jaringan air minum, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, sistem jaringan drainase dan lainnya
4. Pengaturan kepadatan penduduk dalam kepadatan bangunan pada kawasan permukiman ditetapkan sesuai dengan proporsi antara jumlah penduduk dengan luas kawasan permukiman;
5. Pemanfaatan ruang kawasan permukiman memiliki orientasi ruang yang mengacu pada konsep catus patha, tri mandala serta menerapkan ciri khas arsitektur Bali.

6. Terintegrasi dengan konsep *tata palemahan desa pekraman* yang terkait;

8) Kawasan Peruntukan Fasilitas Penunjang Permukiman

Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman, adalah bagian dari kawasan permukiman baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan mencakup :

- a. Fasilitas perdagangan dan jasa
- b. Fasilitas perkantoran pemerintahan
- c. Fasilitas pendidikan
- d. Fasilitas kesehatan
- e. Fasilitas peribadatan
- f. Fasilitas rekreasi dan olah raga

A. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan dan jasa, mencakup :

1. Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah seperti pasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan modern diarahkan tersebar di Kawasan Perkotaan Negara dan Kawasan Perkotaan Gilimanuk, maupun pusat kawasan efektif pariwisata;
2. Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti pasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan modern skala kecamatan tersebar di kawasan perkotaan berfungsi PPK atau kawasan perdesaan berfungsi PPL; dan
3. Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman.



Arahan pengelolaan fasilitas perdagangan dan jasa mencakup :

1. Pemantapan pasar-pasar umum tradisional skala wilayah, skala WP atau kecamatan, atau Pasar Desa, Pasar Desa Adat yang telah ada;
2. Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat perbelanjaan di kawasan perkotaan;
3. Sinergi fasilitas perbelanjaan modern dengan fasilitas perdagangan tradisional; dan
4. Kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani kebutuhan sehari-hari skala lokal mencakup pasar desa, kelompok pertokoan local, minimarket, perbengkelan dan lainnya;
5. Pengelolaan pasar-pasar temporer dan kaki lima diatur penempatan dan waktu operasinya agar tidak mengganggu aktivitas kota dan arus lalu lintas.

B. Fasilitas Perkantoran Pemerintahan

Fasilitas perkantoran pemerintahan mencakup :

1. Fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan Negara;
2. Fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan
3. Fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat desa/kelurahan.

Arahan pengelolaan fasilitas perkantoran pemerintahan mencakup

A. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan mencakup :

1. Fasilitas pendidikan tinggi tersebar di Kawasan Perkotaan Negara;
2. Fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP, SMA dan sejenisnya mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
3. Fasilitas pendidikan dasar mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung

Arahan pengelolaan kawasan pendidikan mencakup :

1. Pengembangan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), tetap mempertahankan yang telah ada dan menambah kebutuhan baru sesuai jumlah penduduk pendukung di setiap unit lingkungan/desa yang dilayani;
2. Fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), diarahkan tersebar minimal pada kawasan perkotaan PPK atau Kawasan Perdesaan fungsi PPL dan disesuaikan dengan jumlah penduduk pendukung dan memperhatikan aksesibilitas untuk mencapainya;
3. Fasilitas pendidikan tinggi yang telah ada, tetap mempertahankan lokasi yang telah ada.

B. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan mencakup :

1. Fasilitas kesehatan pelayanan wilayah tersebar di Kawasan Perkotaan Negara dan sekitar Kawasan Efektif Pariwisata; dan
2. Fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung

C. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas Peribadatan dikembangkan dengan mempertahankan fasilitas peribadatan yang telah ada yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten dan pengembangan fasilitas peribadatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Arahan pengelolaan fasilitas peribadatan mencakup :

1. Menjaga kualitas ruang dan radius kesucian Pura Kahyangan Tiga, Pura Swagina, Pura Dadia, Pura Dang Kahyangan dan dijaga radius kesuciannya; dan
2. Pembangunan peribadatan baru, harus mendapat persetujuan masyarakat dan desa pakraman setempat serta izin tertulis dari Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari tim pembangunan tempat-tempat ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Fasilitas Rekreasi Dan Olah Raga

Fasilitas rekreasi dan olah raga mencakup :

1. Taman-taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota;



2. Lapangan umum atau lapangan olah raga skala banjar, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota; dan
3. Lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan volley, basket, bulu tangkis, futsal, tenis dan lainnya tersebar di dalam kawasan pemukiman.
4. Fasilitas olah raga terpadu di kawasan stadion pecangakan.

Arahan pengelolaan fasilitas rekreasi dan olah raga mencakup :

1. Menjaga kualitas pelayanan daya tarik wisata
2. Mempertahankan fasilitas taman yang telah ada dan menambah jumlah sesuai kebutuhan skala pelayanan;
3. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan umum atau lapangan olah raga terbuka yang telah ada, dan menambah jumlah lapangan baru pada berbagai skala pelayanan yang belum terpenuhi; dan
4. Sebaran lapangan olah raga skala kecil dikembangkan sesuai kebutuhan.

9) Kawasan Peruntukkan Penunjang Prasarana Wilayah

Kawasan peruntukan penunjang prasarana wilayah, meliputi :

- a. Peruntukan kawasan terminal type B Negara dan Gilimanuk dan terminal type C;
- b. Peruntukan kawasan pelabuhan meliputi Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan;
- c. Peruntukan kawasan pembangkit tenaga listrik PLTG Gilimanuk;
- d. Peruntukan kawasan Bendungan Palasari, Bendungan Benel dan rencana pengembangan Bendungan Poh Santen;
- e. Peruntukan kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Peh Kecamatan Negara dan Yeh Embang Kecamatan Mendoyo

10) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, berupa pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan yang berskala wilayah yaitu fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan keamanan disesuaikan dan diserasikan dengan program-program pembangunan bidang lainnya.

Sebaran fasilitas sarana dan prasarana militer dan kemananan meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (KODIM) – 1617/ Jember yang berlokasi di Kecamatan Jember;
- b. Kepolisian Resort (Polres) yang berlokasi di Kecamatan Jember;
- c. Kipan – C, Yonif-900/Raider di Kecamatan Jember;
- d. Pos TNI AL Tipe “C” Gilimanuk yang berlokasi di Kecamatan Melaya;
- e. Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang tersebar di setiap ibukota Kecamatan;
- f. Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di setiap ibukota kecamatan dan KP3 Gilimanuk.

Instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang telah ada tetap dibina dan pengembangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertahanan dan keamanan negara.

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dan RTH Lainnya

Ruang terbuka hijau ditetapkan dengan kriteria:

1. Ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan setra, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur



perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan, kawasan lindung berupa hutan lindung, Tahura, Taman Wisata Alam dan sejenisnya;

2. Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
3. Didominasi komunitas tumbuhan.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau dikembangkan dengan tujuan :

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan antara lahan terbangun dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai resapan air;
2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan
3. Meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan.

A. Kawasan RTH dan RTH Lainnya meliputi:

RTH publik terdiri atas:

1. Kawasan jalur hijau;
2. Sabuk hijau berupa kawasan pertanian, persawahan, perkebunan;
3. Taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan pada berbagai skala;
4. Taman pada obyek wisata
5. Hutan kota;
6. Setra yang tersebar diseluruh desa adat/pekraman;
7. Kuburan umum;
8. Taman Makam Pahlawan
9. Lapangan olah raga;
10. Lapangan upacara;
11. Parkir terbuka;

12. Sabuk hijau berupa lahan pertanian;
13. Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
14. Sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan bendungan;
15. Jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian;
16. Bentang alam seperti pegunungan, bukit, lereng dan lembah di seluruh wilayah.

B. Kawasan RTHK meliputi RTHK publik dan RTHK Private:

Sebaran kawasan jalur hijau, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten sebanyak 9 (sembilan) blok lokasi, meliputi :

- a) Jalur hijau di Kecamatan Pekutatan terdapat di jalur sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Pangyangan;
- b) Jalur hijau di Kecamatan Mendoyo terdiri atas :
 1. Jalur pada sebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Yeh Sumbul
 2. Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Yeh Embang Kangin dan Desa Yeh Embang
 3. Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Penyaringan,
 4. Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Mendoyo Dauh Tukad
 5. Jalur pada sebelah barat dan timur jalan Tegalcangkring – Delod Berawah di Desa Tegal Cangkring;
- c) Jalur hijau di Kecamatan Jembrana terdiri atas :
 1. Jalur pada sebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Dangin Tukadaya
 2. Jalur pada sebelah utara dan selatan jalan Denpasar Gilimanuk di Kelurahan dauh Waru



- d) Jalur pada di Kecamatan Negara terdapat di dua Jalur pada sebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk di Desa Kaliakah.



BAB IV

STRUKTUR PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBRANA





4.1 Kondisi Pemerintahan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana, menyiratkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 16 Dinas Daerah, 4 (empat) Badan Daerah, dan 5 (lima) Kecamatan. Penyusunan struktur organisasi tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, bahwa untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bidang – bidang tertentu dapat berjalan lancar dan berhasil guna, perlu didukung dengan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

4.2 Administrasi Pemerintahan

Pada Provinsi Bali terdapat dua pengertian mengenai desa. Desa dalam pengertian pertama berdasarkan hukum nasional melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah ‘Desa Dinas’ atau ‘Desa Administratif’. Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu Desa Adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama (*Kahyangan Tiga*). Pengertian Desa Pakraman itu sesungguhnya suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai harta kekayaan sendiri dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2001. Perda tersebut kemudian disempurnakan menjadi Perda Nomor 03 Tahun 2003. Jumlah Desa/ Kelurahan, Banjar Dinas dan Desa Pakraman di Kabupaten Jemberana seperti pada tabel berikut ini .



Tabel 4.1 : Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar Dinas/Dusun, dan Desa Adat Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember, 2018

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Banjar Dinas	Desa Adat
1. Melaya	10	61	13
2. Negara	12	50	10
3. Jember	10	45	9
4. Mendoyo	11	67	19
5. Pekutatan	8	30	14
Jumlah/Total	51	253	65
2017	51	253	65
2016	51	253	65
2015	51	253	65
2014	51	250	64

Sumber : Kabupaten Jember Dalam Angka, Tahun 2019

4.3 Perangkat Daerah

Tata Kerja Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah sesuai diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember meliputi :

4.3.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- 2) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;



- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- 4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.3.2 Sekretariat DPRD



Sekretariat Dewan (Setwan) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara struktural bertanggung jawab kepada Pimpinan

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



4.3.3 Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Inspektur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

4.3.4 Dinas Daerah



Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas yang ada di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

- 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang pemuda olahraga;
- 2) Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;



- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang, bidang Pertanahan, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP) dan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran);
- 6) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 9) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- 10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perindustrian dan bidang Perdagangan;



- 11) Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan Persandian;
- 12) Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 13) Dinas Pertanian dan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- 14) Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan dan Perhubungan;
- 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- 16) Dinas Sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

4.3.5. Badan Daerah terdiri dari :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 3) Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.



Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya

4.3.5 Kecamatan



Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati termasuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan di kabupaten Jembrana terdiri dari

- 1) Kecamatan Melaya;
- 2) Kecamatan Negara;
- 3) Kecamatan Jembrana;
- 4) Kecamatan Mendoyo; dan
- 5) Kecamatan Pekutatan .

4.3.6 Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, selain itu Lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.



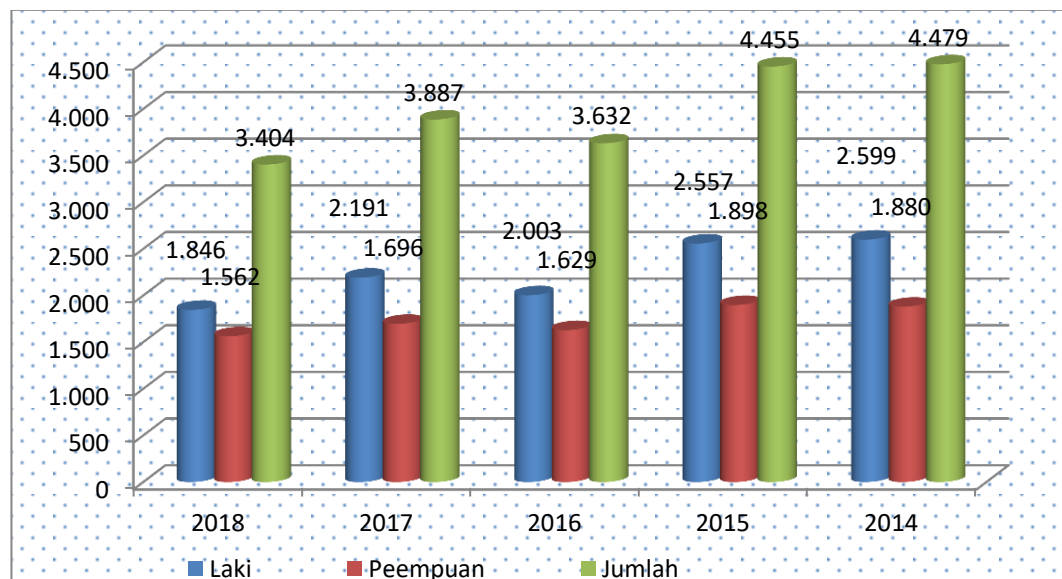
4.4 Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Berikut adalah disajikan tabel jumlah sumber daya Aparatur Sipil Negara yang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jenis Kelamin tahun 2018.

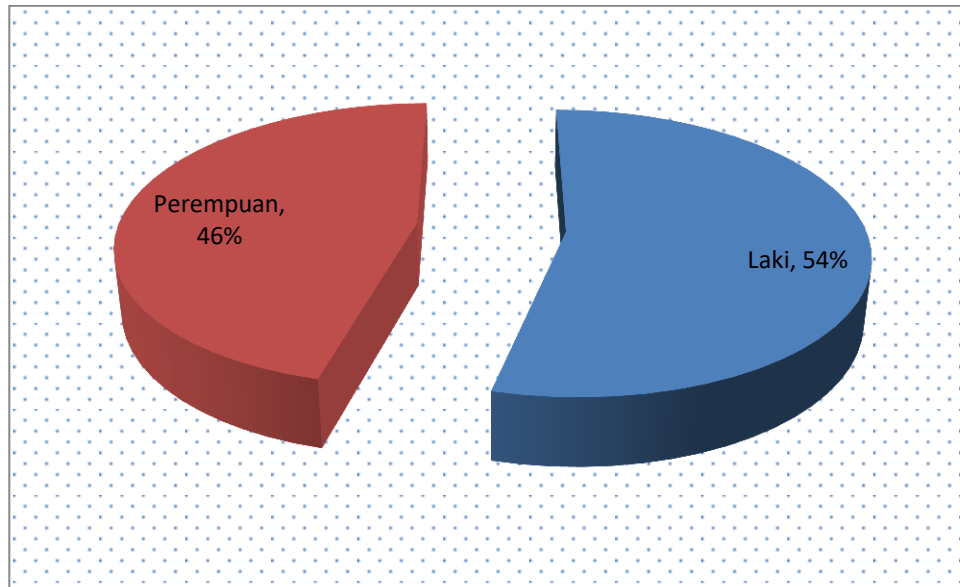
Tabel 4.2 : Jumlah Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jember Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2018

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2018	1.846	1.562	3.404
2017	2.191	1.696	3.887
2016	2.003	1.629	3.632
2015	2.557	1.898	4.455
2014	2.599	1.880	4.479

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2019



Gambar 4.1 : Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Jember Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2018



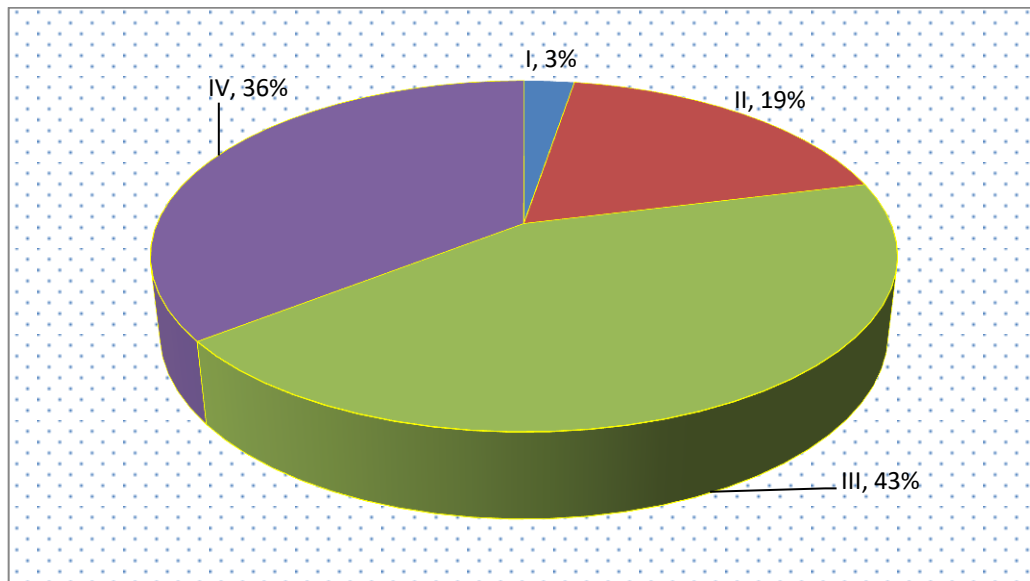
Gambar 4.2 : Diagram Persentase Perbandingan Jumlah Rata-Rata PNS Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jember Tahun 2018

Proporsi Aparatur Daerah/PNS menurut jenis kelamin secara rata-rata tidak menunjukkan selisih yang besar. Berdasarkan tabel terlihat bahwa persentase laki-laki yakni sebesar 57% dan perempuan 43%. Berikut disajikan diagram persentase jumlah PNS di Kabupaten Jember menurut golongan.

Tabel 4.3 : Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Jember Menurut Golongan Tahun 2014 - 2018

Tahun	Golongan PNS				Total
	I	II	III	IV	
2018	89	631	1.476	1.212	3.408
2017	92	705	1.543	1.292	3.632
2016	95	818	1.576	1.298	3.887
2015	102	860	1.794	1.699	4.455
2014	102	847	1.740	1.790	4.479
2013	119	877	1.684	1.893	4.573

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2019



Gambar 4.3 : Diagram Presentase Rata-Rata PNS Menurut Golongan di Kabupaten Jember Tahun 2018

Persentase jumlah rata-rata Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jember, 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan golongan terbanyak adalah PNS golongan IV dengan prosentase 39 %. Sedangkan jumlah paling sedikit adalah PNS golongan I dengan prosentase 2 %. Berikut adalah disajikan tabel jumlah PNS menurut Jabatan Struktural tahun 2013-2017

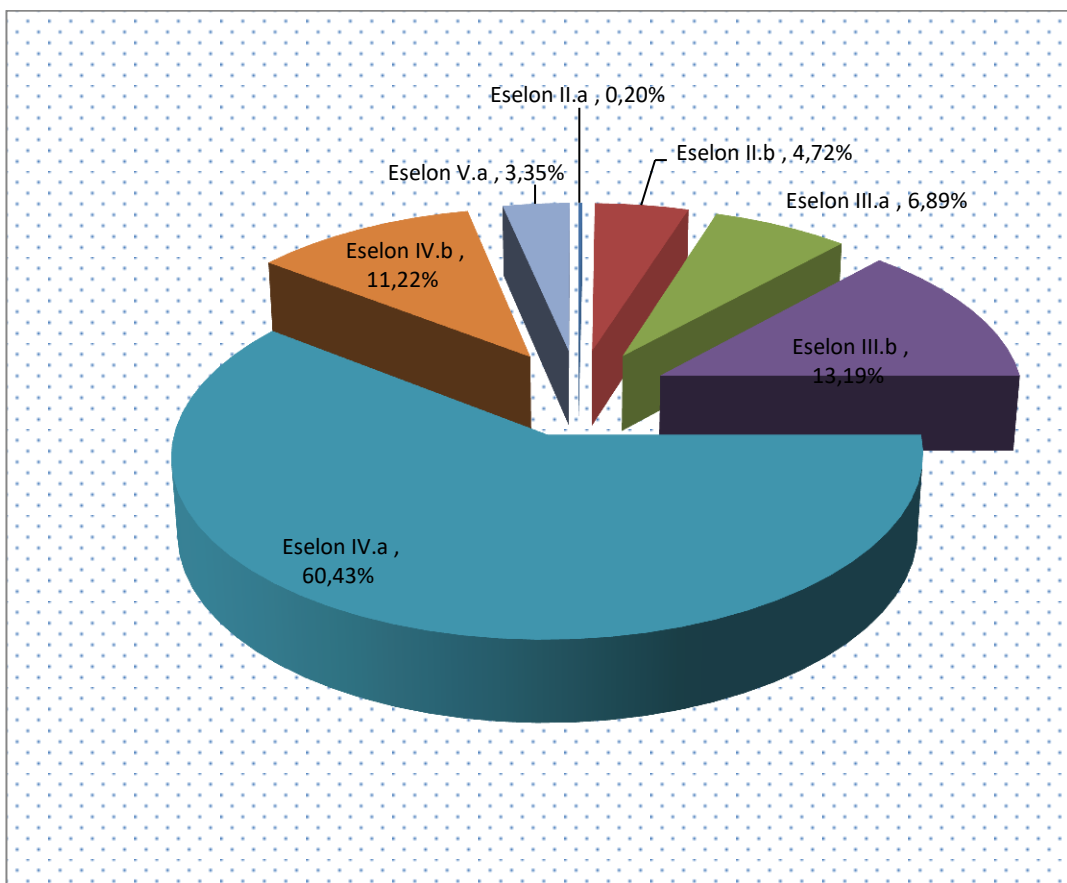
Tabel 4.4 : Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

ESELON	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
Eselon II.a	1	1	1	1	1
Eselon II.b	20	20	20	27	24
Eselon III.a	41	41	41	42	35
Eselon III.b	60	60	60	71	67
Eselon IV.a	295	295	295	324	307
Eselon IV.b	68	68	68	68	57
Eselon V.a	24	23	23	18	17
Total	509	508	508	551	508

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2019



Berikut disajikan diagram prosentase jumlah PNS di Kabupaten Jember menurut Eselon.



Gambar 4.4 : Diagram Persentase Jumlah Rata-Rata PNS Menurut Jabatan Struktural di Kabupaten Jember Tahun 2018

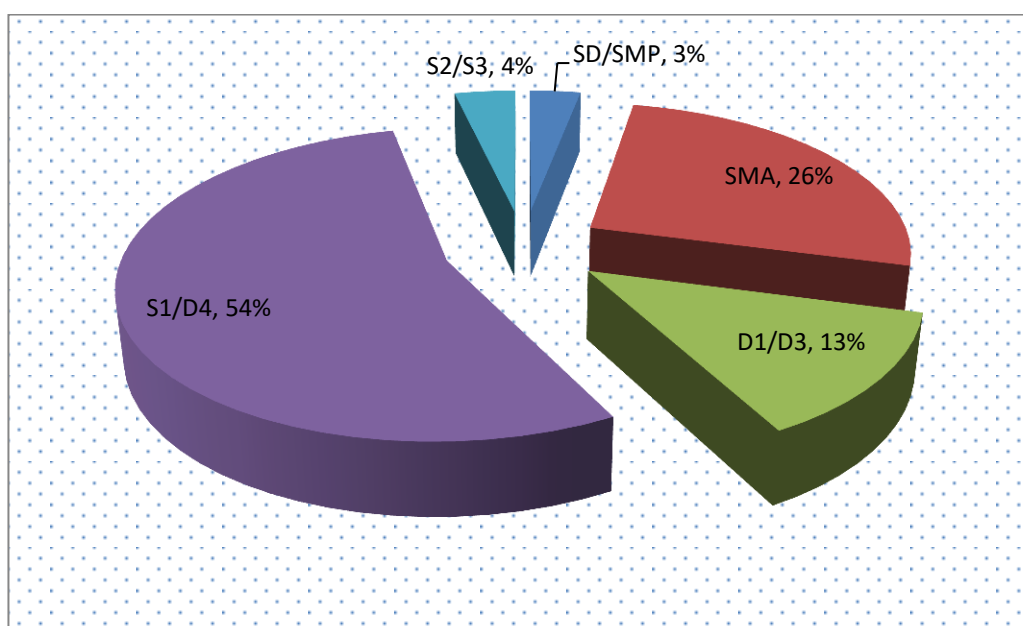
Berdasar gambar diagram diatas terlihat bahwa persentase jumlah rata-rata PNS menurut Jabatan Struktural, 5 tahun terakhir di Kabupaten Jember terbanyak adalah eselon IV a sebesar 60,43%, dan terkecil eselon II a sebanyak 0,20%. Proporsi jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table berikut.



Tabel 4.5 : Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Jembrana menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014 – 2018

Pendidikan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
SD/SMP	167	159	148	129	118
SMA	1.223	1.205	1.133	974	874
D1/D3	699	662	601	498	431
S1/D4	2.245	2.272	1.865	1.881	1.832
S2/S3	145	158	140	150	153
Total	4479	4455	3.887	3.632	3.408

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana, Tahun 2019



Gambar 4.5: Diagram Presentase Rata-Rata PNS Pemerintah Kabupaten Jembrana Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014 - 2018

Berdasar gambar diagram diatas terlihat bahwa persentase jumlah rata-rata PNS menurut Pendidikan, 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Jembrana terbanyak adalah lulusan S1/D4 sebesar 54%, dan terkecil lulusan SD/SMP dan S2/S3 sebesar 4 %.



Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Berikut adalah disajikan tabel jumlah Polisi Pamong Praja, Aparat Linmas, dan capaian kegiatannya tahun 2015 .

Tabel 4.6 : Jumlah Polisi Pamong Praja, Aparat Linmas, dan Capaian Kegiatannya tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Satuan Polisi Pamong Praja	134 orang
2	Aparat Petugas Perlindungan Masyarakat	831 orang
3	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	7 unit
4	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	3 unit
5	Pos Siskamling	250 unit
6	Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam	62 orang
7	Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	60 kasus
8	Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	60 kasus
9	Jumlah Kejadian Kebakaran	28 kasus
10	Jumlah Ketepatan Waktu Tindak Pemadam Kebakaran	28 kasus

Sumber Kesbang Pol Linmas Kabupaten Jember, Tahun 2019

4.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Jember adalah sebuah lembaga legislatif di Kabupaten Jember. Dewan ini terdiri dari 35 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum



terakhir dilaksanakan pada 17 April 2019. Jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Jembrana 35 kursi dimana PDI-Perjuangan menjadi partai mayoritas dengan perolehan 17 kursi, disusul Partai Golkar dengan 6 kursi, dan Partai Demokrat dengan 3 kursi, partai Gerindra 4 kursi, Partai Hanura 1 kursi, partai kebangkitan bangsa 2 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan 1 Kursi. Dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1945/01-A/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Jembrana Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dilantik pada hari Jumat, 6 September 2019. Informasi mengenai Jumlah kursi dan asal partai anggota DPRD kabupaten Jembrana, disajikan pada Tabel 4.7

Tabel 4.7 : Jumlah DPRD Kabupaten Jembrana periode 2019-2024

Partai	Kursi
1. Partai PDI Perjuangan	18
2. Partai Golkar	6
3. Partai Kebangkitan Bangsa	2
4. Partai Gerindra	4
5. Demokrat	3
6. Partai Persatuan Pembangunan	1
7. Partai Hanura	1
Jumlah	35

Sumber: <http://dprd.jembranakab.go.id>

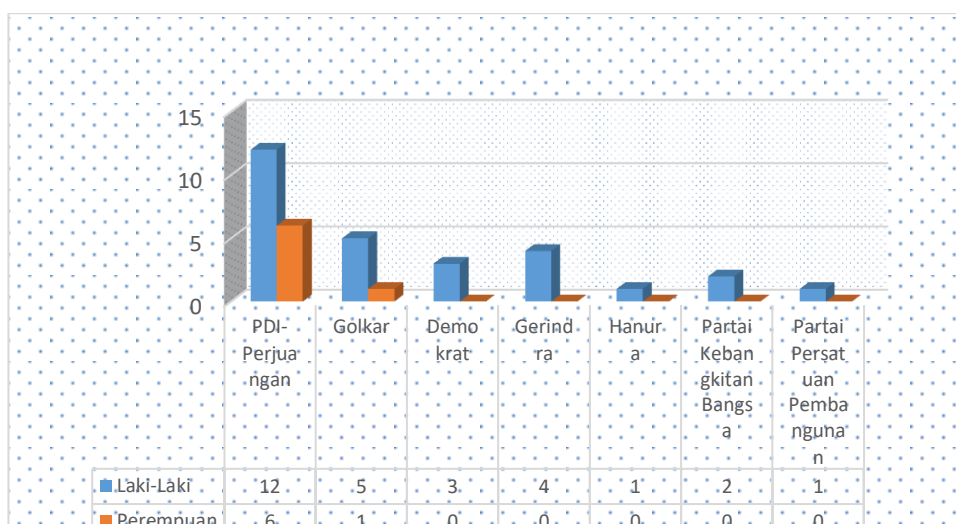
Keanggotaan DPR menurut partai politik dan jenis kelamin, disajikan pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.7.



Tabel 4.8 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jember 2018

No	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PDI-Perjuangan	12	6	18
2	Golkar	5	1	6
3	Demokrat	3	-	3
4	Gerindra	4	-	4
5	Hanura	1	-	1
6	Partai Kebangkitan Bangsa	2	-	2
7	Partai Persatuan Pembangunan	1	-	1
		28	7	35

Sumber: <http://dprd.jembranakab.go.id>



Gambar 4.6: Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2019-2024 Menurut Partai Politik

Dengan jumlah anggota sebanyak 35 orang, DPRD Kabupaten Jember membentuk 3 Komisi, yaitu Komisi A yang membidangi tugas-tugas di bidang Pemerintahan terdiri dari 11 orang, Komisi B yang membidangi tugas-tugas di bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri dari 10 orang, serta Komisi C yang membidangi tugas-tugas di bidang pembangunan terdiri dari 11 orang. Adapun tugas dari tiap-tiap komisi sebagai berikut:



- Komisi A: Bidang Pemerintahan memiliki tugas meliputi: Ketertiban Umum, Kependudukan dan Catatan Sipil, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang-Undangan, Perijinan, Kepegawaian/Aparatur, Pertanahan/Agraria, Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Pendidikan dan Iptek, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, dan Agama.
- Komisi B: Bidang Ekonomi dan Keuangan, memiliki tugas: Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Pertanian (dalam arti luas), Keuangan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perbankan dan Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha, Penanaman Modal, Kesejahteraan Rakyat, Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi, dan Peranan Wanita.
- Komisi C: Bidang Pembangunan memiliki tugas: Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan, Pengairan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Aset Daerah.



4.6 Produk DPRD Kabupaten Jembrana

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 343 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan



daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Tabel 4.9 : Peraturan Daerah (Perda) yang Dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Jembrana Periode 2014-2019

No	Nomor, Tahun Keputusan DPRD	Tanggal Penetapan	Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda
1	Nomor 1 Tahun 2014	5 Agustus 2014	1. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013
2	Nomor 2 Tahun 2014	8 Agustus 2014	2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014
3	Nomor 3 Tahun 2014	28 Agustus 2014	3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
4	Nomor 3 Tahun 2014	30 Desember 2014	4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
5	Nomor 1 Tahun 2015	6 Maret 2015	5. Izin Usaha Jasa Kontruksi
6	Nomor 2 Tahun 2015	11 Juni 2015	6. Pemilihan Perbekel
7	Nomor 3 Tahun 2015	11 Juni 2015	7. Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
8	Nomor 4 Tahun 2015	11 Juni 2015	8. Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Swara FM
9	Nomor 5 Tahun 2015	11 Agustus 2015	9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
10	Nomor 6 Tahun 2015	18 Agustus 2015	10. Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Amertha Jati
11	Nomor 7 Tahun 2015	19 Agustus 2015	11. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014
12	Nomor 8 Tahun 2015	21 Agustus 2015	12. Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten



No	Nomor, Tahun Keputusan DPRD	Tanggal Penetapan	Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda
			Jember TA 2015
13	Nomor 1 Tahun 2016	26 Mei 2016	13. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
14	Nomor 2 Tahun 2016	30 Juni 2016	14. Pelayanan Publik
15	Nomor 3 Tahun 2016	30 Juni 2016	15. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
16	Nomor 4 Tahun 2016	26 Mei 2016	16. Kawasan Tanpa Rokok
17	Nomor 6 Tahun 2016	16 Agustus 2016	17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jember Tahun 2016-2021
18	Nomor 8 Tahun 2016	20 Oktober 2016	18. Urusan Pemerintahan Daerah
19	Nomor 9 Tahun 2016	20 Oktober 2016	19. Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Amertha Jati
20	Nomor 10 Tahun 2016	22 Desember 2016	20. Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
21	Nomor 11 Tahun 2016	23 Oktober 2016	21. Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali
22	Nomor 12 Tahun 2016	23 Oktober 2016	22. Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Jember
23	Nomor 13 Tahun 2016	23 Oktober 2016	23. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
24	Nomor 1 Tahun 2017	19 Mei 2017	24. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
25	Nomor 2 Tahun 2017	13 Juli 2017	25. Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Penanam Modal
26	Nomor 3 Tahun 2017	13 Juli 2017	26. Bangunan Gedung
27	Nomor 4 Tahun 2017	13 Juli 2017	27. Bank Perkreditan Rakyat Jember
28	Nomor 5 Tahun 2017	22 Agustus 2017	28. Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Perkreditan Rakyat Jember



No	Nomor, Tahun Keputusan DPRD	Tanggal Penetapan	Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda
29	Nomor 6 Tahun 2017	23 Oktober 2016	29. Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
30	Nomor 7 Tahun 2017	30 Agustus 2017	30. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2016
31	Nomor 9 Tahun 2017	29 Desember 2017	31. Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
32	Nomor 10 Tahun 2017	29 Agustus 2017	32. Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jember
33	Nomor 1 Tahun 2018	20 Juli 2018	33. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2032
34	Nomor 2 Tahun 2018	20 Juli 2018	34. Desa Wisata
35	Nomor 3 Tahun 2018	24 Agustus 2018	35. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017
36	Nomor 4 Tahun 2018	02 Oktober 2018	36. Badan Permusyawaratan Desa
37	Nomor 5 Tahun 2018	03 Oktober 2018	37. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
38	Nomor 6 Tahun 2018	28 Desember 2018	38. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Sumber : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jember Provinsi
Bali didownload September 2019



BAB V

KONDISI KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER





5.1 Kependudukan



Penduduk merupakan asset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu mereka juga bisa menjadi beban pembangunan jika pemberdayaannya tidak dibarengi dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan. Informasi data kependudukan menjadi kebutuhan dasar dalam melakukan sebuah perencanaan. Proyeksi penduduk beberapa tahun kedepan dapat, tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sesaat saja namun dapat diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi penduduk tersebut bukan merupakan ramalan, tetapi perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi – asumsi tertentu berdasarkan komponen – komponen laju pertumbuhan penduduk.

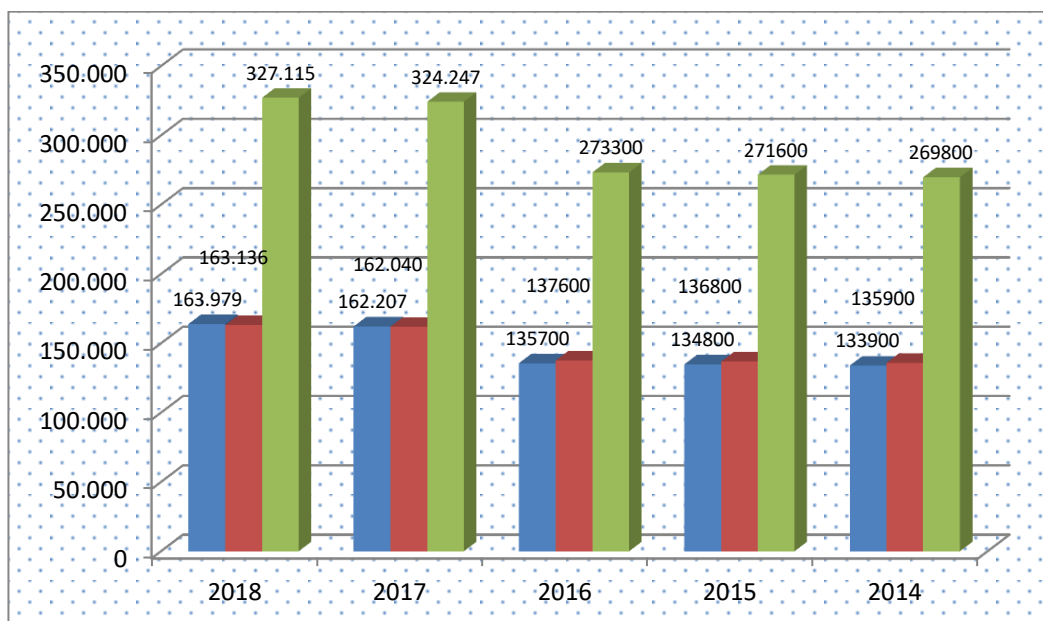
5.1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Data proyeksi proyeksi dari BPS pada tahun 2014 – 2018 jumlah penduduk Kabupaten Jember dengan distribusi sebagai berikut.

Tabel 5.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2018

Tahun	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki	Perempuan	Jumlah	
2018	163.979	163.136	327.115	0,99
2017	162.207	162.040	324.247	0,99
2016	135.700	137.600	273.300	0,99
2015	134.800	136800	271.600	0,99
2014	133.900	135.900	269.800	0,99

Sumber : Dinas Dukcapil dan BPS Kabupaten Jember Tahun 2019



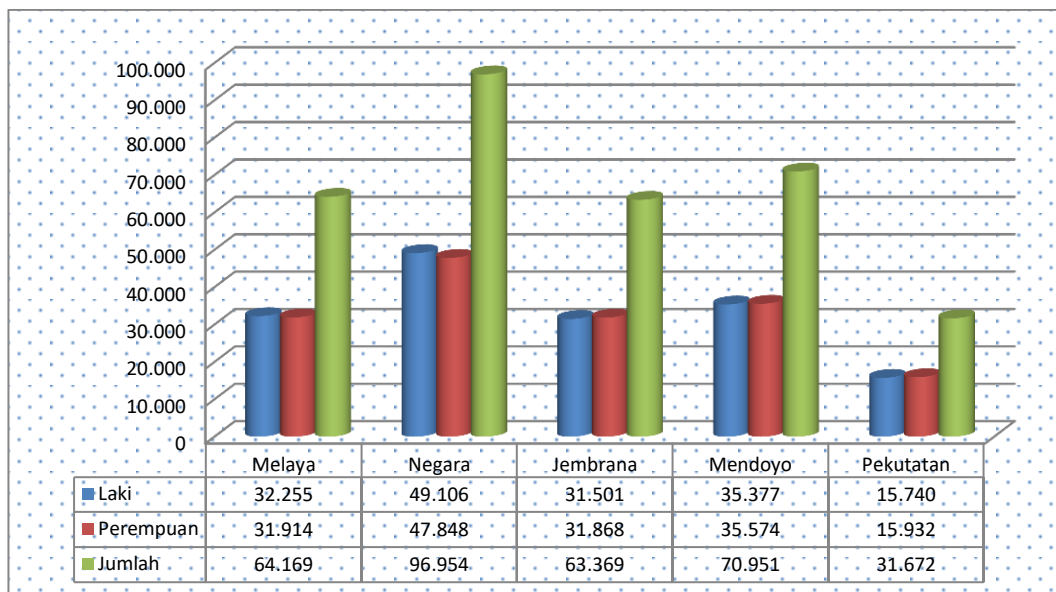
Gambar 5.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2018

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Jember yang dirinci perkecamatan berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak **327.115** jiwa dengan distribusi sebagai berikut:

Tabel 5.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

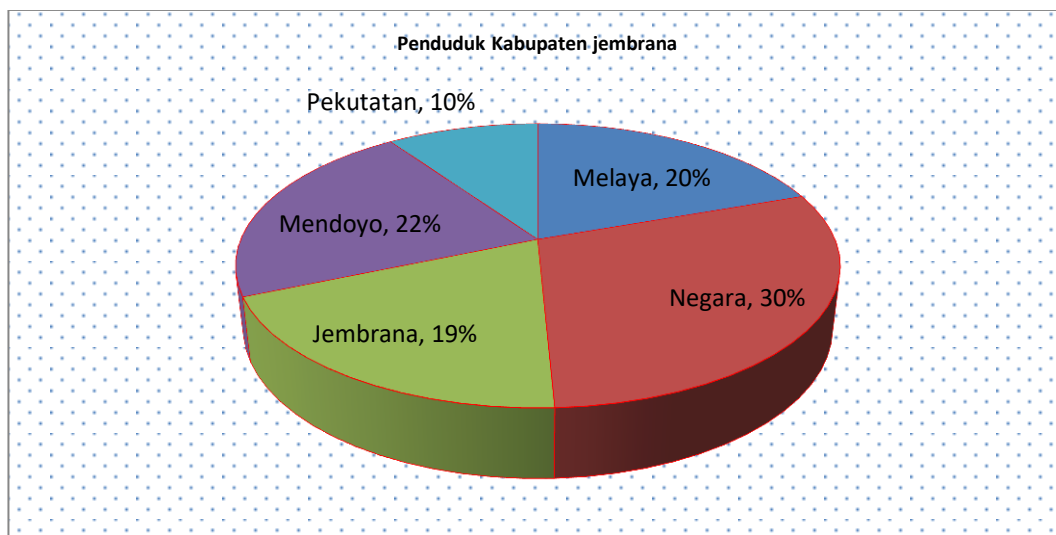
No	Kecamatan	Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Melaya	32.255	31.914	64.169	1,01
2	Negara	49.106	47.848	96.954	1,03
3	Jember	31.501	31.868	63.369	0,99
4	Mendoyo	35.377	35.574	70.951	0,99
5	Pekutatan	15.740	15.932	31.672	0,99
Pemkab Jember		163.979	163.136	327.115	0,99

Sumber : Dinas Dukcapil, Tahun 2019



Gambar 5.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Jemberana Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Jemberana tahun 2018 terlihat diagram prosentase jumlah penduduk perkecamatan di Kabupaten Jemberana tahun 2018 terlihat sebagai berikut.



Gambar 5.3 : Diagram Presentase Jumlah Penduduk Kabupaten Jemberana Per Kecamatan Tahun 2018

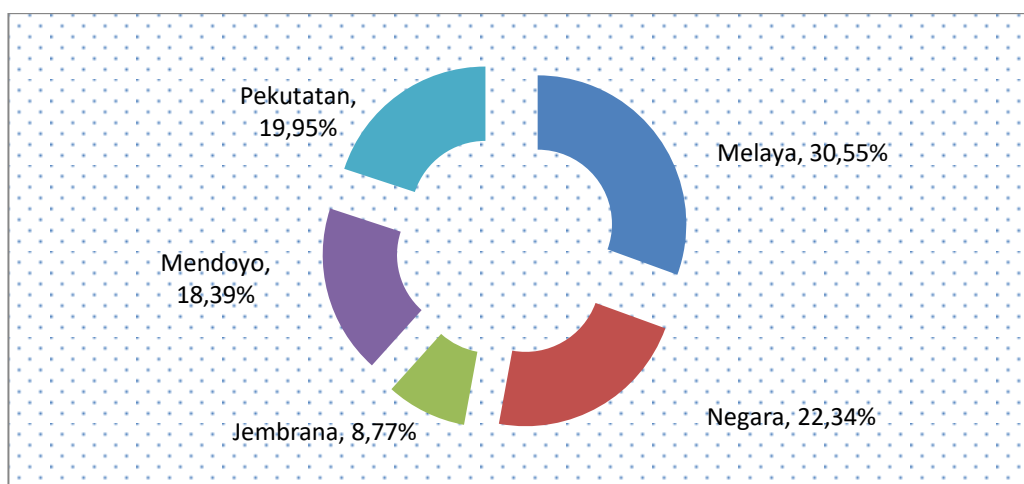
5.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga

Jumlah penduduk berdasarkan kepala keluarga (kk) Kabupaten Jember tahun 2018 adalah 92.256 kk, Kecamatan Melaya memiliki kk terbanyak yaitu sebanyak 28.183 kk (30,55%) dan paling sedikit di Kabupaten Jember sebanyak 8.095 kk (8,77%); rata-rata anggota keluarga di kabupaten Jember tahun 2018 adalah 4 orang. Berikut tabel dan Gambar yang menyajikan jumlah penduduk berdasarkan kk dan rata-rata anggota keluarga di Kabupaten Jember tahun 2018.

Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga Kabupaten Jember Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah KK		Rata-rata Anggota Keluarga
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	
Melaya	96.954	29,64	28.183	30,55	3
Negara	70.951	21,69	20.611	22,34	3
Jember	31.672	9,68	8.095	8,77	4
Mendoyo	64.169	19,62	16.966	18,39	4
Pekutatan	63.369	19,37	18.401	19,95	3
Jumlah	327.115	100	92.256	100	4

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 5.4 : Diagram Presentase Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Berdasarkan Kepala keluarga Per Kecamatan Tahun 2018



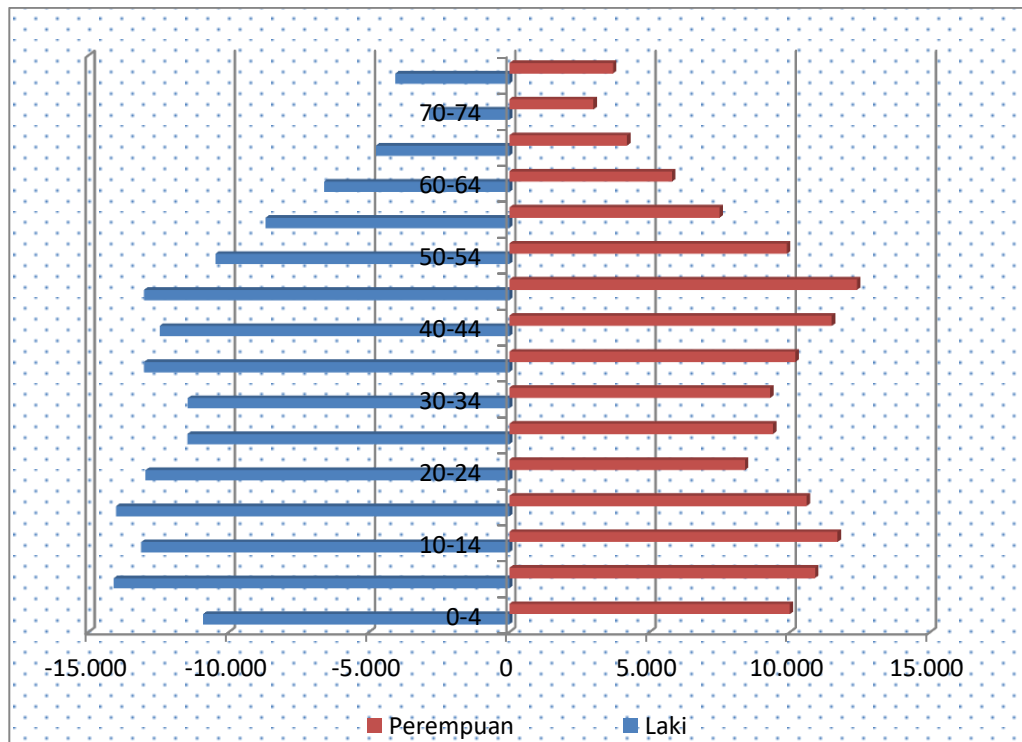
5.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Menurut data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, Kabupaten Jember tahun 2018, kelompok umur tertinggi adalah kelompok umur usia antara 10-14 tahun atau sebanyak 27.193. Dengan melihat kelompok umur tertinggi ini (10-14) merupakan penduduk usia sekolah antara SD-SLTP, dengan demikian membutuhkan perhatian pemerintah untuk memperhatikan fasilitas sekolah. Berikut tabel yang menyajikan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia di Kabupaten Jember tahun 2018.

Tabel 5.4 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia
Kabupaten Jember Tahun 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	10.920	10.107	21.027
5-9	14.093	12.919	27.012
10-14	13.126	12.556	25.682
15-19	14.013	13.180	27.193
20-24	12.964	11.822	24.786
25-29	11.473	11.520	22.993
30-34	11.455	11.607	23.062
35-39	13.023	12.851	25.874
40-44	12.461	12.509	24.970
45-49	13.021	12.639	25.660
50-54	10.473	11.150	21.623
55-59	8.686	9.161	17.847
60-64	6.601	6.741	13.342
65-69	4.755	4.719	9.474
70-74	2.857	3.781	6.638
75+	4.058	5.874	9.932
Total	163.979	163.136	327.115

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2019



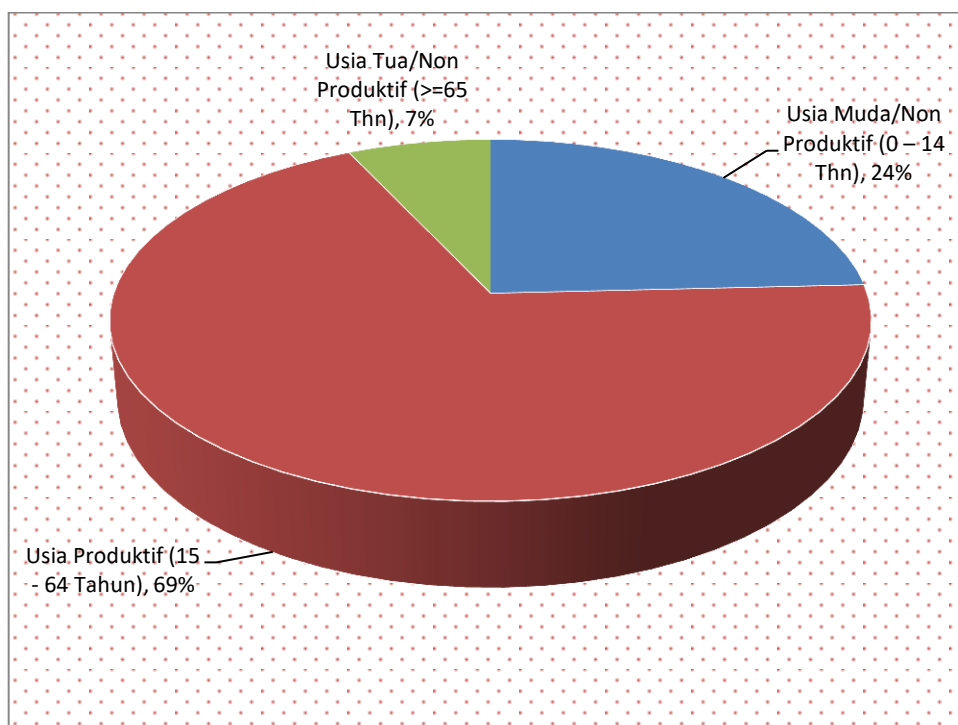
Gambar 5.5 : Diagram Piramida Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2018

Berdasar kategori Kelompok umur Usia Muda, Usia Produktif, dan Usia Tua Umur dari jumlah penduduk Kabupaten Jember bahwa Usia Produktif menjadi terbesar kelompok umur Usia Produktif yakni 68,75%. Sementara yang terkecil adalah Usia Tua yakni 7,02%.

Tabel 5.5 : Jumlah Penduduk Kelompok Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Jember Tahun 2018

Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	(jiwa)	%	(jiwa)	%	(jiwa)	%
Usia Muda/Non Produktif (0 – 14 Thn)	38.139	13,87	35.582	12,94	66.600	24,23
Usia Produktif (15 - 64 Tahun)	114.170	41,53	113.180	41,17	189.000	68,75
Usia Tua/Non Produktif (≥65 Thn)	11.670	4,25	14.374	5,23	19.300	7,02
Total	163.979	59,65	163.136	59,34	274.900	100,00

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember Tahun 2019 dan dianalisis



Gambar 5.6 : Diagram Presentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Jember Tahun 2018

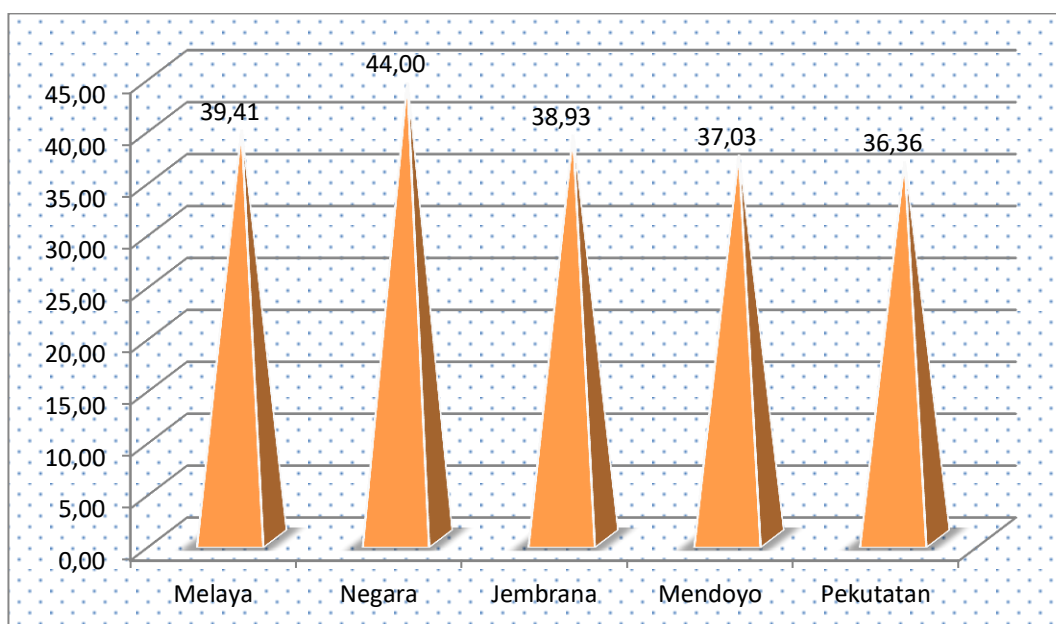
5.1.4 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi untuk mengukur beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Secara keseluruhan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Jember pada tahun 2018 yakni 39,67%. Sementara bila diperbandingkan antar kecamatan, Rasio Ketergantungan tertinggi ada di Kecamatan Negara sebesar 44,00% sementara yang terendah ada di Kecamatan Jember 36,36%.

Tabel 5.6 : Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember 2018

Kecamatan	Usia Produktif (15-64 thn)	Usia Muda (0 – 14 thn)		Usia Tua (≥65 thn)		Jumlah Penduduk	Total Rasio Ketergantungan (%)
		(jiwa)	RK Muda (%)	(jiwa)	RK Tua (%)		
Melaya	49.760	14.633	29,41	4.978	10,00	69.371	39,41
Negara	67.328	23.272	34,57	6.354	9,44	96.954	44,00
Jember	49.046	14.104	28,76	4.989	10,17	68.139	38,93
Mendoyo	58.848	14.936	25,38	6.858	11,65	80.642	37,03
Pekutatan	26.512	6.776	25,56	2.865	10,81	36.153	36,36
Total	251.494	73.721	29,31	26.044	10,36	311,995	39,67

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2019 dan dianalisis



Gambar 5.7 : Diagram Perbandingan Tingkat Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2019

5.1.5 Jumlah Penduduk Berdasar Status Perkawinan

Jumlah penduduk berdasar status perkawinan pada tahun 2018 tertinggi ada di Kecamatan Negara sebesar 49.085 pasangan dan terendah ada di Kecamatan Pekutatan sebesar 16.983 pasangan. Sementara angka



cerai hidup tertinggi di Kecamatan Negara sejumlah 1.370 pasangan dan terendah di Kecamatan pekutatan 376 pasangan.

Tabel 5.7 : Jumlah Penduduk berdasar status perkawinan di Kabupaten Jember 2018

Kecamatan	Status Perkawinan								Jumlah Penduduk
	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	
Melaya	27.683	20,15	32.672	19,20	854	19,04	2.960	19,68	64.169
Negara	42.426	30,88	49.085	28,84	1370	30,54	4.073	27,08	96.954
Jembrana	26.059	18,97	33.492	19,68	875	19,51	2.943	19,57	63.369
Mendoyo	28.375	20,65	37.971	22,31	1011	22,54	3.594	23,90	70.951
Pekutatan	12.843	9,35	16.983	9,98	376	8,38	1.470	9,77	31.672
Total	137.386	100	170.203	100	4.486	100	15.040	100	327.115

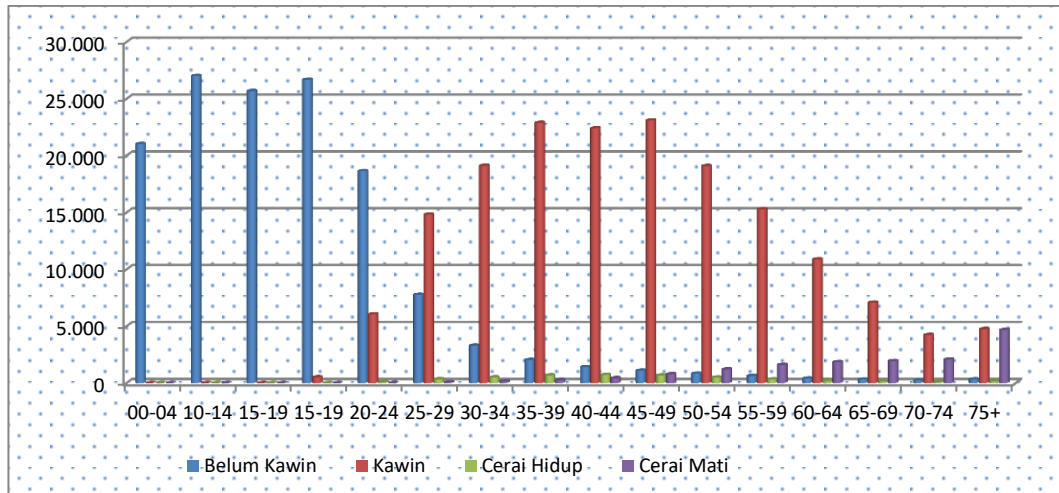
Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2019 dan dianalisis

Berdasar kelompok umur, perkawinan dimulai pada kelompok umur 20-24 tahun, dengan usia tertinggi perkawinan pada usia 45 -49 tahun sebesar 13,57% dan yang kedua usia 35-39 tahun sebesar 13,45%.

Tabel 5.8 : Jumlah Penduduk berdasar status perkawinan menurut Kelompok Umur di Kabupaten Jember 2018

Kelompok Umur	Status Perkawinan								Jumlah Penduduk	
	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati			
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
00-04	21.027	15,31	0	0,00	0	0.00	0	0,00	21.027	6,43
10-14	27.012	19,66	0	0,00	0	0.00	0	0,00	27.012	8,26
15-19	25.682	18,69	0	0,00	0	0.00	0	0,00	25.682	7,85
15-19	26.672	19,41	515	0,30	6	0.00	0	0,00	27.193	8,31
20-24	18.639	13,57	6.047	3,55	90	0.04	10	0,07	24.786	7,58
25-29	7.766	5,65	14.820	8,71	343	0.10	64	0,43	22.993	7,03
30-34	3.295	2,40	19.108	11,23	510	0.14	149	0,99	23.062	7,05
35-39	2.036	1,48	22.889	13,45	682	0.19	267	1,78	25.874	7,91
40-44	1.405	1,02	22.409	13,17	721	0.20	435	2,89	24.970	7,63
45-49	1.097	0,80	23.098	13,57	677	0.16	788	5,24	25.660	7,84
50-54	834	0,61	19.091	11,22	495	0.12	1203	8,00	21.623	6,61
55-59	628	0,46	15.287	8,98	329	0.09	1603	10,66	17.847	5,46
60-64	408	0,30	10.883	6,39	204	0.05	1847	12,28	13.342	4,08
65-69	316	0,23	7.075	4,16	153	0.05	1930	12,83	9.474	2,90
70-74	236	0,17	4.233	2,49	100	0.03	2069	13,76	6.638	2,03
75+	333	0,24	4.748	2,79	176	0.05	4675	31,08	9.932	3,04
Total	137.386	100	170.203	100	4.486	0,00	15.040	100	327.115	100

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2019 dan dianalisis



Gambar 5.9 : Diagram Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Kabupaten Jember Tahun 2018

5.2 Kepemilikan Dokumen

Kepemilikan dokumen kependudukan ini tentu saja tidak hanya penting bagi penduduk yang bersangkutan, tetapi juga penting bagi pemerintah. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya, serta memperkuat database penduduk dan pelayanan publik.

Kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hak warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang khususnya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juga disebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi: Biodata

Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain.

5.2.1 Jumlah Penduduk Ber KTP dan Kepemilikan KK

KTP adalah singkatan dan sebutan yang mudah untuk menyebutkan Kartu Tanda Penduduk yang pasti dimiliki oleh setiap warga negara pada ketentuan tertentu. Hal ini karena kepemilikan KTP



diwajibkan oleh aturan hukum yang berlaku. KTP Kartu Tanda Penduduk ini mempunyai fungsi sebagai simbol atau kartu tanda pengenal penduduk dari suatu negara tertentu, dimana penduduk dapat mempunyai peluang dalam penggunaan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya. KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK

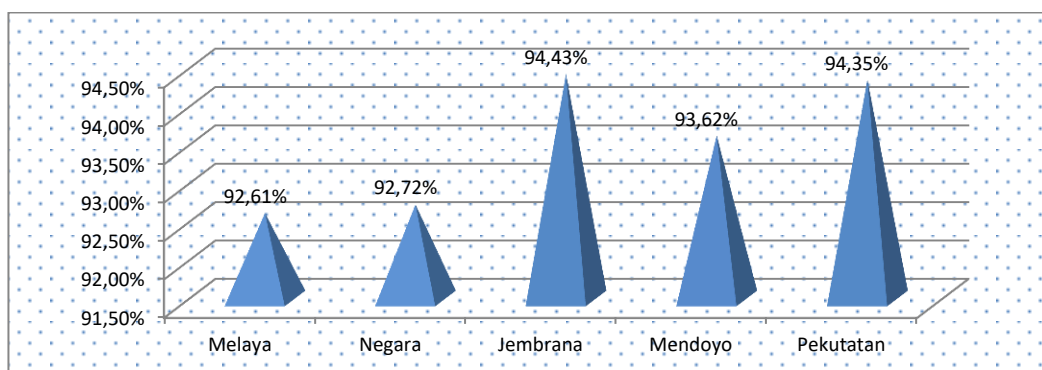


merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Admuduk). Jumlah penduduk wajib KTP sampai dengan Desember tahun 2018 tercatat sebanyak **242.463** orang dan Penduduk yang telah memiliki KTP-EL berjumlah **226.445 orang**. Bila dilihat dari perbandingan antara **Wajib KTP** dengan penduduk yang **Telah Memiliki KTP-EL/Sudah Rakam KTP EL**, terbesar ada di Kecamatan Jember 96,43%, dan terkecil di Kecamatan Melaya 92,61%.

Tabel 5.9 : Jumlah Penduduk yang Sudah Merekam KTP-EL
Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Per Kecamatan
di Kabupaten Jember 2018

Kecamatan	Wajib KTP-el			Sudah Rakam KTP-el			Belum Rakam KTP-el		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Melaya	23.535	23.782	47.317	21.837	21.985	43.822	1.698	1.797	3.495
Negara	35.285	35.026	70.311	32.723	32.472	65.195	2.562	2.554	5.116
Jember	23.225	24.006	47.231	22.596	22.596	44.598	629	1.410	2.633
Mendoyo	26.418	27.330	53.748	24.800	25.521	50.321	1.618	1.809	3.427
Pekutatan	11.718	12.138	23.856	11.139	11.370	22.509	579	768	1.347
Total	120.181	122.282	242.463	112.501	113.944	226.445	7.680	8.338	16.018

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2018



Gambar 5.10 : Diagram Perbandingan Persentase Perbandingan Wajib KTP dengan Sudah Rakam KTP-el, di Kabupaten Jember 2018

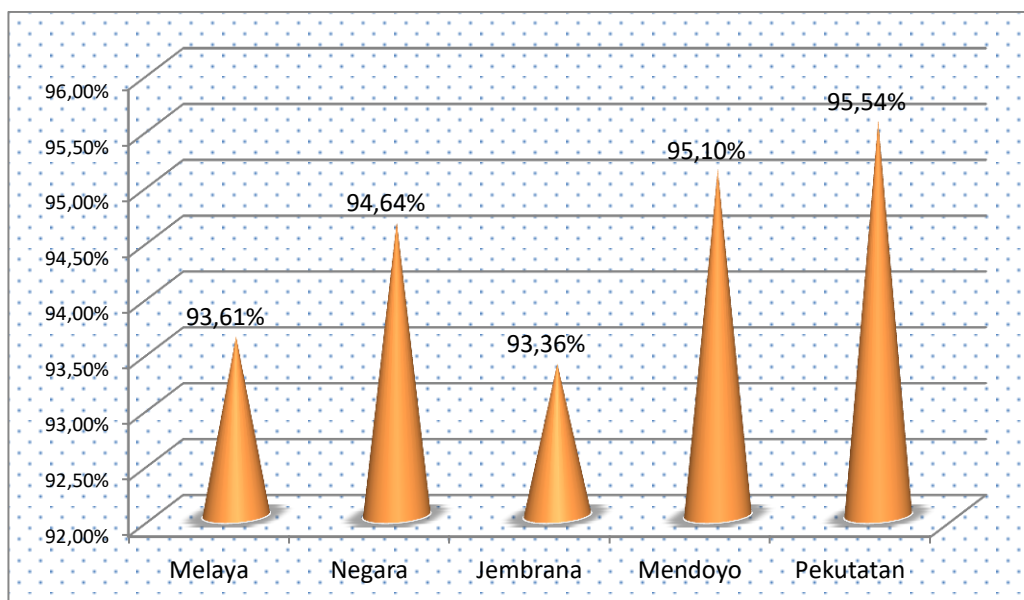
5.2.2 Kepemilikan Kartu Keluarga

Sebagai bagian dari kelengkapan dokumen kependudukan, penduduk Kabupaten Jember yang wajib KK sampai dengan Desember tahun 2018 tercatat sebanyak **87.892** dengan penduduk yang sudah cetak KK sebanyak **87.070**. Bila dilihat dari perbandingan antara **Wajib KK** dengan yang **Sudah Cetak KK**, terbesar ada di Kecamatan Pekutatan 95,54%, dan terkecil di Kecamatan Jember 93,36%.

Tabel 5.10 : Jumlah Wajib KK dan Kepemilikan Kartu KK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan	Wajib KK			Sudah Cetak KK			Belum Cetak KK		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Melaya	15.378	1.588	16.966	14.540	1.342	15.882	838	246	1.084
Negara	25.463	2.720	28.183	24.232	2.440	26.672	1.231	280	1.511
Jember	16.747	1.654	18.401	15.694	1.486	17.180	1.053	168	1.221
Mendoyo	19.061	1.550	20.611	18.236	1.366	19.602	825	184	1.009
Pekutatan	7.478	617	8.095	7.175	559	7.734	303	58	361
Total	84.127	8.129	92.256	79.877	7.193	87.070	4.250	936	5.186

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 5.11 : Diagram Perbandingan Antara Wajib KK dengan Sudah Cetak KK di Kabupaten Jember 2018

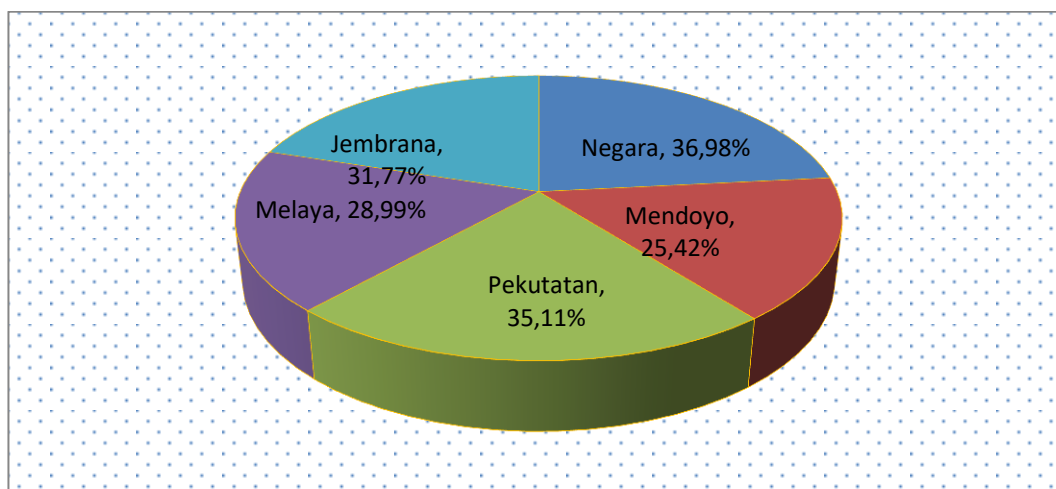
5.2.3 Kepemilikan Akta Perkawinan

Jumlah penduduk status kawin di Kabupaten Jember pada tahun 2018 berjumlah **170.203** jiwa yang terbagi memiliki dan tidak akta perkawinan. Dengan melihat status kepemilikan akta perkawinan, 31,65% dari jumlah penduduk status kawin memiliki kesadaran untuk pembuatan akta perkawinan yaitu sebesar **53,872** pasangan. Bila dilihat dari perbandingan antara penduduk sudah kawin dengan yang sudah berakta, terbesar ada di Kecamatan Negara 36,98%, dan terkecil di Kecamatan Mendoyo 25,42%. Jumlah pasangan nikah berakta dan tidak berakta dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 5.11 : Jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Akta Perkawinan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2018

Kecamatan	Penduduk Status Kawin			Sudah Ber Akta			Belum Ber Akta		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Negara	24.455	24.630	49.085	9.218	8.932	18.150	15.237	15.698	30.935
Mendoyo	18.949	19.022	37.971	4.990	4.661	9.651	13.959	14.361	28.320
Pekutatan	8.422	8.561	16.983	3.043	2.919	5.962	5.379	5.642	11.021
Melaya	16.253	16.419	32.672	4.826	4.644	9.470	11.427	11.775	23.202
Jember	16.697	16.795	33.492	5.454	5.185	10.639	11.243	11.610	22.853
Total	84.776	85.427	170.203	27.531	26.341	53.872	57.245	59.086	116.331

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 5.12 : Diagram Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Jember Tahun 2018

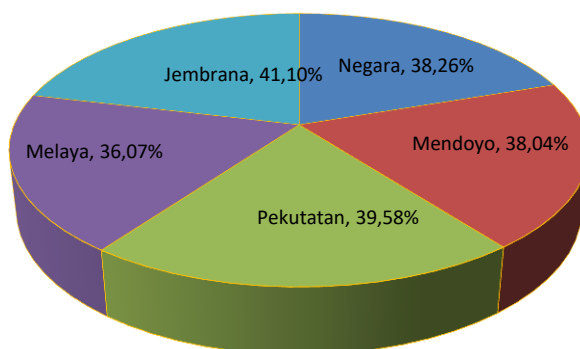
5.2.4 Kepemilikan Akta Kelahiran

Jumlah penduduk di Kabupaten Jember per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 327.115 jiwa dan hanya 38,25 % penduduk yang telah memiliki akta kelahiran yaitu sebesar 125.135 jiwa sedangkan yang tidak memiliki akta kelahiran sebesar 201,980 jiwa. Bila dilihat dari perbandingan antara penduduk dengan yang sudah memiliki Akta Perkawinan, terbesar ada di Kecamatan Jember 41,10%, dan terkecil di Kecamatan Melaya 36,07 %. Jumlah kepemilikan akta kelahiran penduduk Jember Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 5.12 : Jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sudah Ber Akta			Belum Ber Akta		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Melaya	35.377	35.574	70.951	13.862	11.731	25.593	21.515	23.843	45.358
Negara	32.255	31.914	64.169	13.189	11.365	24.554	19.066	20.549	39.615
Jember	15.740	15.932	31.672	6.973	6.045	13.018	8.767	9.887	18.654
Mendoyo	49.106	47.848	96.954	19.594	17.292	36.886	29.512	30.556	60.068
Pekutatan	31.501	31.868	63.369	13.264	11.820	25.084	18.237	20.048	38.285
Total	163.979	163.136	327.115	66.882	58.253	125.135	97.097	104.883	201.980

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 5.13 : Diagram Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Jember Tahun 2018



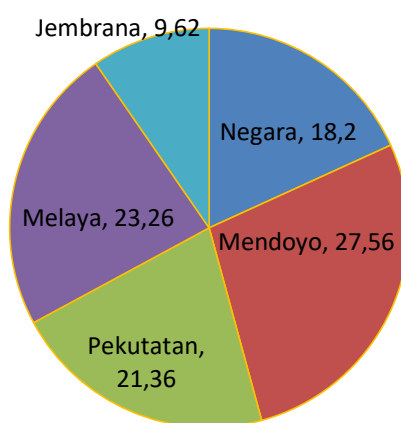
5.2.5 Kepemilikan Akta Kematian

Berdasarkan jumlah akte kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, sampai 31 Desember 2018, jumlah penduduk yang meninggal dan memiliki Akte Kematian sebanyak 11.358 orang, 5.974 orang (52,6%) laki-laki dan 5.384 (47,4%) perempuan. Bila dilihat berdasarkan kecamatan maka kepemilikan akte kematian tertinggi ada di kecamatan Negara 27,56% dan terkecil dikecamatan Pekutatan 9,62%.

Tabel 5.13 : Jumlah Akta Kematian Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2018

Kecamatan	Kepemilikan Akta Kematian					
	L	%	P	%	Jml	%
Melaya	1.060	9,33	1.007	8,87	2.067	18,2
Negara	1.678	14,77	1.452	12,78	3.130	27,56
Jember	1.267	11,16	1.159	10,2	2.426	21,36
Mendoyo	1.393	12,26	1.249	11	2.642	23,26
Pekutatan	576	5,07	517	4,55	1.093	9,62
Total	5.974	52,6	5.384	47,4	11.358	100

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 5.14 : Diagram Persentase Akta Kematian Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2018

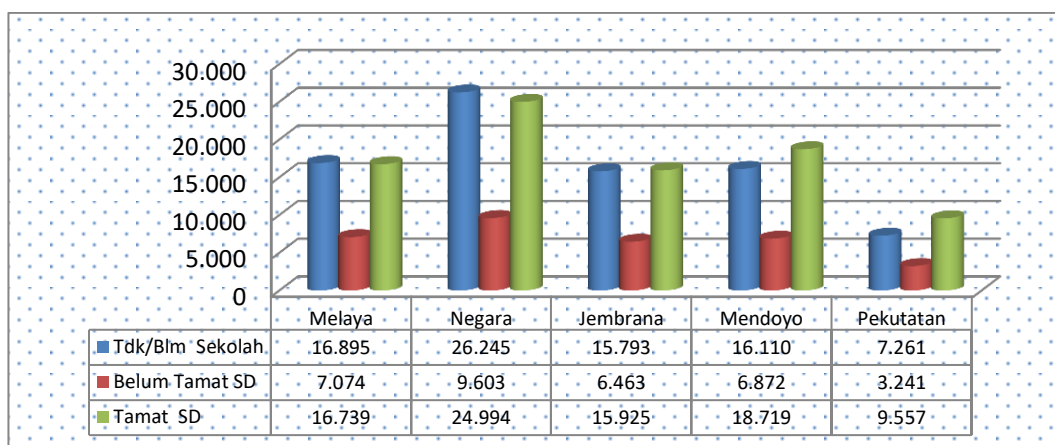
5.3 Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin baik kualitas SDM. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Penduduk tahun 2018, 25,16 % penduduk Jember Tidak/belum sekolah dan 10,17% belum tamat SD, sementara 64,67 % telah menamatkan sekolah. Tamatan sekolah tertinggi yakni Tamat SD sebesar 26,27% dan terkecil tamatan S3 sebesar 0,01%.

Tabel 5.14 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir Per Kecamatan di Kabupaten Jember 2018

Kecamatan	Pendidikan Akhir										Jumlah Penduduk
	Tdk/Blm Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	D1/D2	D3/Sarjana Muta	Tamat S1	Tamat S2	Tamat S3	
Melaya	16.895	7.074	16.739	8.668	11.952	568	633	1.540	92	8	64.169
Negara	26.245	9.603	24.994	11.946	19.529	713	1.001	2.743	174	6	96.954
Jember	15.793	6.463	15.925	6.979	13.974	658	812	2.552	209	4	63.369
Mendoyo	16.110	6.872	18.719	9.111	16.907	629	794	1.722	79	8	70.951
Pekutatan	7.261	3.241	9.557	4.088	6.061	369	320	740	34	1	31.672
Total	82.304	33.253	85.934	40.792	68.423	2.937	3.560	9.297	588	27	327.115

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 5.15 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir Per Kecamatan di Kabupaten Jember 2018

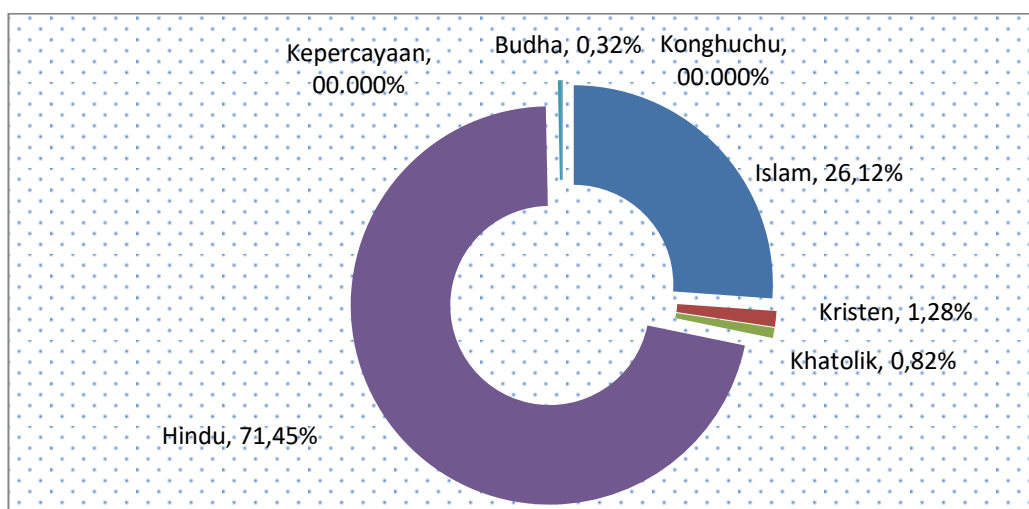
5.4 Penduduk Berdasarkan Agama

Prasarana peribadatan di Kabupaten Jember terdiri dari pura, masjid, gereja dan klenteng/vihara. Penduduk Kabupaten Jember 71,45 % memeluk Agama Hindu. Oleh karenanya pura sebagai fasilitas sarana peribadatan terbesar dibandingkan dengan sarana peribadatan lainnya. Secara keseluruhan di kawasan Kabupaten Jember tersedia 880 unit pura dan sanggah yang tersebar di seluruh kawasan Kabupaten Jember. Sementara 26,12 % penduduk Kabupaten Jember yang beragama Islam telah terlayani oleh 60 unit masjid dan 160 unit mushola.

Tabel 5.15 : Jumlah Penduduk menurut Agama Per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2018

Kecamatan	Agama							Total Penduduk
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan	
Melaya	43.702	1.278	682	50.814	462	14	2	96.954
Negara	5.158	172	30	65.571	20	0	0	70.951
Jember	5.548	55	291	25.762	14	0	2	31.672
Mendoyo	17.736	2.170	1.366	42.817	79	0	1	64.169
Pekutatan	13.310	499	317	48.771	468	1	3	63.369
Jumlah	85.454	4.174	2.686	233.735	1.043	15	8	327.115

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 5.16 : Persentase Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Jember Tahun 2018



Tabel 5.16 : Tempat Peribadatan di Kabupaten Jember Tahun 2018

Kecamatan	Pura	Mesjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Wihara
1. Melaya	129	15	32	13	1	2
2. Negara	147	24	68	9	1	3
3. Jember	159	8	15	6	-	2
4. Mendoyo	255	6	10	4	-	-
5. Pekutatan	190	8	17	3	1	-
Jumlah	880	61	142	35	3	7

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Tahun 2019

5.5 Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk yang besar, bagi pemerintah Kabupaten Jember dalam hal penyediaan lapangan kerja adalah memiliki dua sisi yang berlainan. Di satu sisi, dengan banyaknya jumlah penduduk adalah merupakan sebuah potensi yang dapat digunakan dalam upaya pembangunan daerah. Namun disisi lain, banyaknya jumlah penduduk, merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Jember untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga jumlah penduduk pengangguran dapat ditekan. Selain membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri, selama ini juga telah dilakukan kerjasama dengan luar negeri terkait perekrutan tenaga kerja, seperti misalnya ke Jepang.

4.5.1 Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk produktif yang berusia 15 – 64 Tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Jumlah penduduk usia angkatan kerja di Kabupaten Jember mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan bagi pemerintah Kabupaten Jember dalam menyediakan lapangan pekerjaan



sehingga tercapai kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Jember.

Tabel 5.17 : Penduduk menurut Usia Kerja, Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jember tahun 2015 - 2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Usia Kerja	Angkatan kerja	Penduduk yang Bekerja	Pengangguran Terbuka	
					Jumlah	%
2015	271.600	287.167	146.400	142.086	4.314	1,50
2016	273.300	208.290	144.733	142.434	2.229	1,07
2017	271.600	206.338	163.725	162.665	1.100	0,53
2018	278.100	210.819	163.271	161.024	2.247	1,07

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dalam Kab. Jember dalam Angka 2019

Sementara itu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan penduduk usia kerja di Jember selama tahun 2017 tercatat sebanyak 72,49 %.

Tabel 5.18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Jember, 2014 – 2018

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)
2014	72.49	2.95
2015	70.9	1.59
2016	70,90	1,13
2017	78,62	0,67
2018	77,45	1,38

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dalam Kab. Jember dalam Angka 2019

5.5.2 Penduduk Bekerja

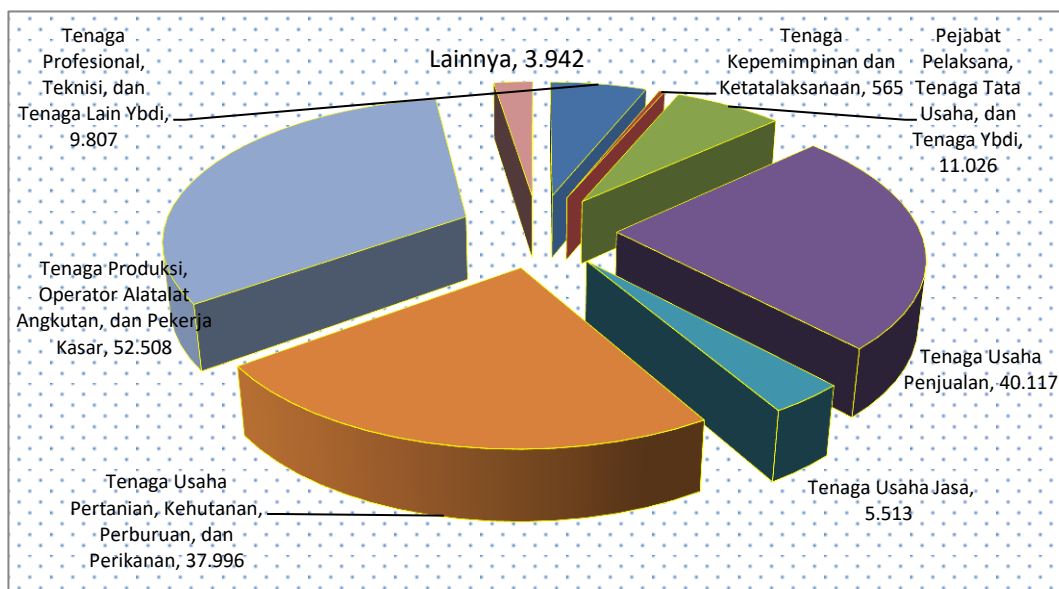
Berdasar kategori penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu menurut jenis pekerjaan, Jenis pekerjaan tertinggi yang digeluti penduduk Kabupaten Jember adalah pada Tenaga Produksi,

Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar sebesar 32,50% disusul terbesar kedua pada Tenaga Usaha Penjualan sebesar 24,80%.

Tabel 5.19 : Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Jember, Tahun 2018

Jenis Pekerjaan	Jumlah
1. Tenaga Profesional, Teknisi, dan Tenaga Lain Ybdi	9.807
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	565
3. Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha, dan Tenaga Ybdi	11.026
4. Tenaga Usaha Penjualan	40.117
5. Tenaga Usaha Jasa	5.513
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	37.996
7. Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar	52.508
8. Lainnya	3.942
Total	162.665

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dalam Kabupaten Jember dalam Angka 2019



Gambar 5.17 : Diagram Persentase Penduduk Kabupaten Jember Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2018

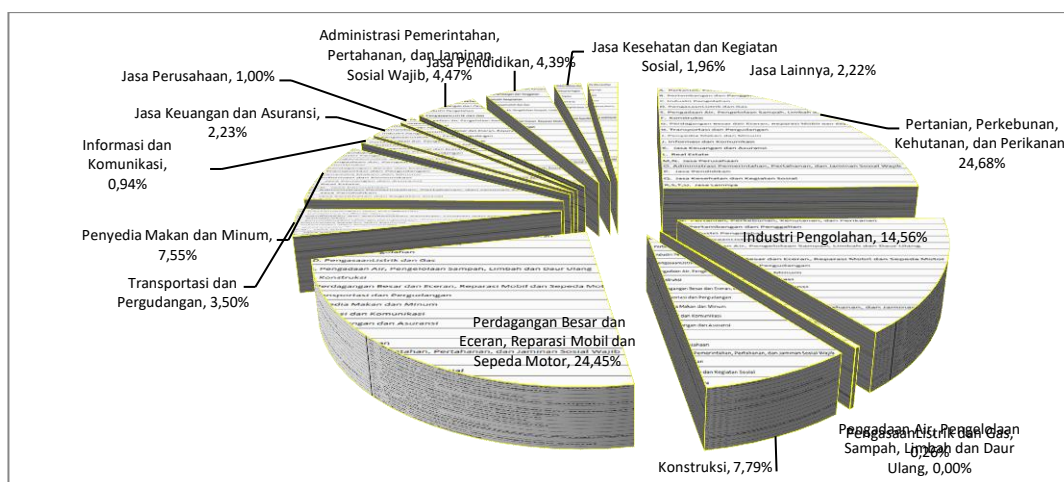


Berdasar Pekerjaan Utama, Penduduk Jember berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu disajikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 5.20 : Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember, 2018

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	25.746	14.000	39.746
B. Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
C. Industri Pengolahan	7.021	16.430	23.451
D. Pengasaan Listrik dan Gas	257	162	419
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	0	0
F. Konstruksi	10.824	1.718	12.542
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.484	20.886	39.370
H. Transportasi dan Pergudangan	5.637	0	5.637
I. Penyedia Makan dan Minum	4.991	7.170	12.161
J. Informasi dan Komunikasi	755	751	1.506
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.134	1.456	3.590
L. Real Estate	0	0	0
M,N. Jasa Perusahaan	1.209	406	1.615
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5.407	1.786	7.193
P. Jasa Pendidikan	2.459	4.605	7.064
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.334	1.825	3.159
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.425	2.146	3.571
TOTAL	87.683	73.341	161.024

Sumber: Survei Angka Kerja Nasional (Sakernas) dalam Kab. Jember dalam Angka 2019



Gambar 5.18 : Diagram Persentase Penduduk Kabupaten Jember Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja berdasarkan Pekerjaan Utama Tahun 2018



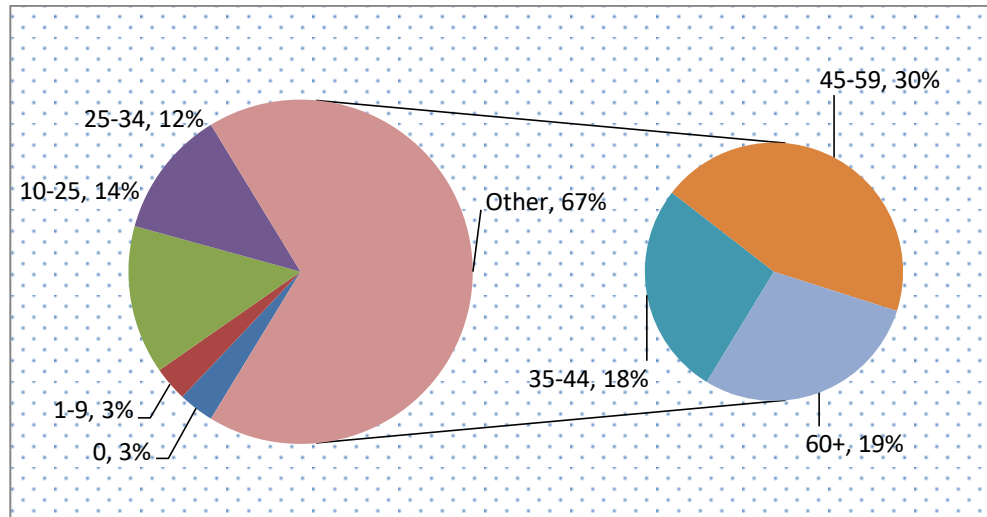
Pekerjaan Utama tertinggi yang digeluti penduduk Kabupaten Jember adalah pada Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan 24,45%; disusul terbesar kedua pada Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,81% dan ketiga adalah pada Industri pengolahan sebanyak 14,56%.

Berdasar Jam Kerja penduduk Jember yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu, Jam Kerja tertinggi penduduk Kabupaten Jember adalah antara 45-59 jam dalam seminggu sebanyak 30 %; disusul terbesar kedua adalah antara 60 jam dalam seminggu sebanyak 19%.

Tabel 5.21 : Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember, 2018

Jam Kerja Seluruhnya	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0	3.288	2.057	5.345
1-9	1.192	4.018	5.210
10-25	9.660	12.711	22.371
25-34	10.418	8.815	19.233
35-44	14.464	14.473	28.937
45-59	32.149	15.844	47.993
60+	15.712	15.423	31.135
TOTAL	87.683	73.341	161.024

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dalam Kab. Jember dalam Angka 2019



Gambar 5.19 : Diagram Persentase Penduduk Kabupaten Jember Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja berdasarkan Jam Kerja Tahun 2018

Berdasar data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Bali yang Berasal dari Jember Januari sampai bulan Desember 2018 tercatat jumlah TKI yakni yang berasal dari Jember yakni laki-laki sebanyak 133 orang dan perempuan sebanyak 146 orang, dengan demikian total keseluruhan berjumlah 279 orang

Tabel 5.22 : Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Bali Yang Berasal dari Jember Tahun 2018

Bulan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Januari	18	2	20
Februari	14	6	20
Maret	19	14	33
April	0	0	0
Mei	21	30	51
Juni	13	25	38
Juli	10	16	26
Agustus	10	12	22
September	4	9	13
Oktober	9	13	22
Nopember	14	9	23
Desember	1	10	11
Jumlah	133	146	279

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Tahun 2019



BAB VI

KONDISI SOSIAL BUDAYA KABUPATEN JEMBER





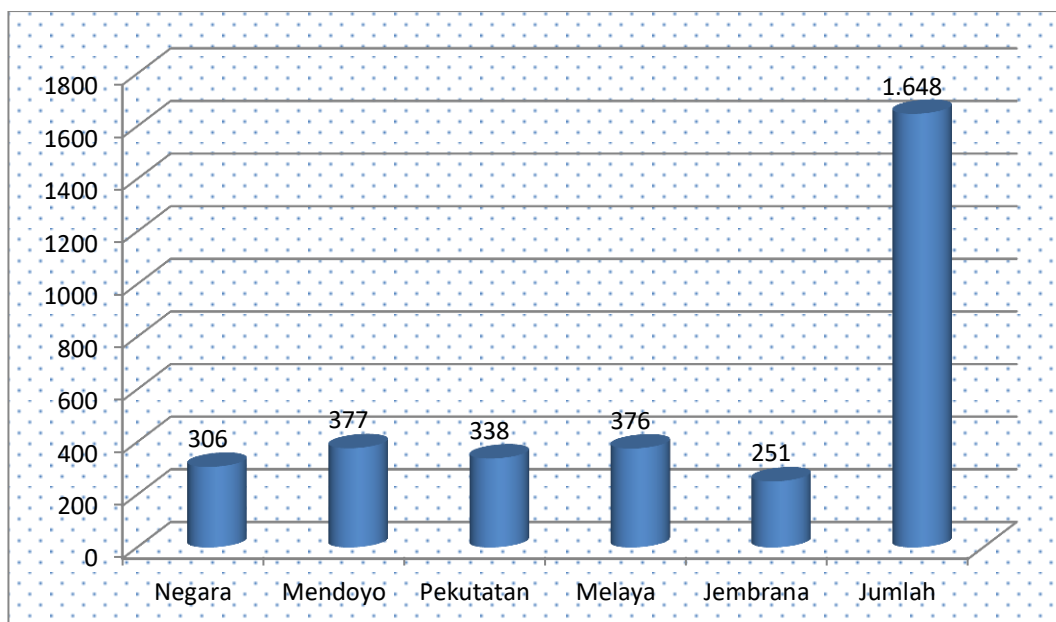
6.1 Satuan Perlindungan Masyarakat

Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) baik di Provinsi maupun Kabupaten/ kota lahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Linmas diharapkan dapat menjadi sarana dalam pengembangan kelembagaan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia, kedepan nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan peran dan kinerjanya serta dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Berikut adalah disajikan tabel Daftar Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jember sampai dengan Tahun 2018, yang menunjukkan sampai dengan tahun 2018 jumlah Linmas Kabupaten Jember sebanyak 1.658 unit tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember. Jumlah Linmas paling banyak berada di Kecamatan Mendoyo sebanyak 377 unit dan paling sedikit berada di Kecamatan Negara 306 unit.

Tabel 6.1 : Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jember
Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah
Negara	306
Mendoyo	377
Pekutatan	338
Melaya	376
Jember	251
Jumlah	1.648
2017	1.648
2016	1.721
2015	1.721
2014	1.663

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember , Tahun 2019



Gambar 6.1 : Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jember Tahun 2018

6.2 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Wilkum Polres Jember jumlah anggota Polres Jember, Babin Kantibmas, dan Pos Polisi adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2 : Data Atau Profil Keamanan/Kantibmas di Wilkum Polres Jember Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Babin Kantibmas	56 Personil
2	Pos Polisi	4 Unit
3	Jumlah Anggota Polres Jember di Luar Babin Kantibmas	831 Personil

Sumber: Data atau Profil Keamanan/ Kantibmas di Wilkum Polres Jember Tahun 2019



Tugas dan Fungsi Pokok sebagai aparat penjaga Pertahanan TNI dalam beberapa tugas ikut mendukung terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Jember. Berikut jumlah personil TNI dari AD dan AU, beserta Veteran yang ada di Kabupaten Jember

Tabel 6.3 : Data Personil TNI AD, TNI AL, dan Veteran di Kabupaten Jember Tahun 2014- 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	TNI AD (Porsenil)	319	492	619	793	793
2	TNI AL (Porsenil)	6	10	6	8	8
3	Veteran (Orang)	130	130	128	67	63

Sumber: Kodim 1617 Jember Tahun 2019

Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jember mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan Data Keamanan/Kantibmas di Wilkum Polres Jember 2018, Jumlah KDRT paling tinggi adalah pada tahun 2015 dengan jumlah sebanyak 6 kasus sedangkan anak-anak di bawah umur yang melakukan tindakan kriminal pada tahun 2018 sebanyak 12anak.

Tabel 6.4 : Jumlah Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Jumlah Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Kriminal Tahun 2014- 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kejadian KDRT	5	6	2	2	3
Jumlah anak dibawah umur yang melakukan tindak kriminal	9	4	3	6	12

Sumber: Data Keamanan/Kantibmas di Wilkum Polres Jember 2019



Sementara berdasar data dari Kantor Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Jumlah Kejadian KDRT dan Jumlah Anak Dibawah Umur yang melakukan Tindak Pidana adalah Sebagai Berikut:

Tabel 6.5 : Jumlah Kasus KDRT dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kasus KDRT	4	7	4	-	2
Jumlah Anak Dibawah Umur yang melakukan Tindak Kriminal	13	18	7	11	-

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, Tahun 2019

Berdasar Data Jumlah Kasus dan Tindak Kriminal di Wilkum Polres Jember, bila diperbandingkan dengan tindak kriminal lainnya dari tahun 2014 hingga 2018 tertinggi adalah Tindak Kriminal Pencurian (lebih detail lihat tabel berikut)

Tabel 6.6 : Jumlah Kasus terdaftar, Jumlah Tindak Kriminal ditangani Polres Jember di Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018.

Kategori	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kasus Terdaftar	565	574	583	522	566
Jumlah Tindak Kriminal yang ditangani	565	574	583	522	566
1. Jumlah Kasus Narkoba	6	9	26	20	17
2. Jumlah Kasus Penebangan Kayu Hutan	19	6	7	10	7
3. Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	13	11	5	8	11
4. Jumlah Kasus Penganiayaan	6	11	8	7	5
5. Jumlah Kasus Pencurian	64	54	30	34	41
6. Jumlah Kasus Penipuan	10	2	9	2	4
7. Jumlah Kasus Perjudian	49	47	60	21	15

Sumber : Kepolisian Resort Jember, 2019

Perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Jember pada tahun 2018 berdasar kriteria Perkara Umum, Jumlah Tindak Kriminal, Jumlah



Tindak Kriminal Tertangani dan Pencurian serta Penyelundupan Kayu, terurai dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6.7 : Jumlah Perkara berdasar kriteria Perkara Umum, Jumlah Tindak Kriminal, Jumlah Tindak Kriminal Tertangani dan Pencurian, di Kabupaten Jember 2018

Uraian	Jumlah Perkara
Perkara Umum	
1. Perkara yang dilaporkan	
a. Pidana	147 Perkara
b. Pedata	274 Perkara
2. Jumlah Perkara terselesaikan	
a. Pidana	147 Perkara
b. Lalu Lintas	274 Perkara
Jumlah Tindak Kriminal	
1. Jumlah Kasus Narkoba	17 Kasus
2. Jumlah Kasus Penganiayaan	7 Kasus
3. Jumlah Kasus Pencurian	41 Kasus
4. Jumlah Kasus Penipuan	4 Kasus
Jumlah Tindak Kriminal yang Tertangani	69 Buah
Pencurian dan Penyelundupan Kayu	
1. Jumlah Kasus	7 Kasus
2. Jumlah Lokasi Pencurian dan Penyelundupan	4 lokasi

Sumber : Kejaksaan Negeri Jember, Tahun 2019

Perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Jember pada bulan tahun 2018 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.8 : Rekapitulasi Data Perkara di Pengadilan Negeri Negara Tahun 2018

Uraian	Jumlah	Satuan
Perkara Umum		
1. Jumlah Perkara Didaftarkan		
a. Pidana	147	Perkara
b. Perdata	274	Perkara
c. Politik dan HAM		
d. Lalu Lintas	11	Perkara
f. Jumlah Kasus Narkoba	917	Perkara



Uraian	Jumlah	Satuan
h. Jumlah Kasus Seksual	1	
i. Jumlah Kasus Penganiayaan	5	Perkara
j. Jumlah Kasus Pencurian	41	Perkara
k. Jumlah Kasus Penipuan	4	Perkara
l. Jumlah Kasus Pemalsuan Uang		
II. Jumlah Perkara terselesaikan		
a. Pidana	147	Perkara
b. Perdata	274	Perkara
c. Politik dan HAM		
d. Lalu Lintas	11	Perkara
f. Jumlah Kasus Narkoba	917	Perkara
h. Jumlah Kasus Seksual	1	
i. Jumlah Kasus Penganiayaan	5	Perkara
j. Jumlah Kasus Pencurian	41	Perkara
k. Jumlah Kasus Penipuan	4	Perkara
III. Jumlah Kasus Tanah yang diselesaikan yang Terdaftar	5	Kasus
IV. Jumlah Kasus Tanah yang diselesaikan	5	Kasus
Kelembagaan		
1. Jumlah Pengadilan Agama	-	buah
2. Jumlah Pengadilan Negeri	13	buah
3. Jumlah Pengadilan Tata Usaha Negara	-	
4. Lembaga Pemasyarakatan	-	buah
5. Kejaksaan Negeri	-	buah

Sumber: Pengadilan Negeri Negara, Tahun 2019

6.2.1 Fasilitas Keamanan

Fasilitas – Fasilitas keamanan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

1) CCTV

Fasilitas keamanan berupa kamera (CCTV) sangat dibutuhkan dalam era teknologi, karena dengan adanya Kamera pemantau maka kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keamanan dapat direkam. Kamera keamanan yang dimiliki Kabupaten Jember sekarang ini adalah:



- a) Kamera pemantauan pintu masuk Gilimanuk, jumlah kamera yang terpasang dipintu masuk pelabuhan Gilimanuk sebanyak 8 titik. Kamera ini dihubungkan secara *real time* pada komputer pemantau di Kantor Bupati.
- b) Kamera pemantauan di lingkungan Kantor Bupati Jember, Jumlah kamera yang terpasang di kantor bupati sebanyak 30 titik. tersebar disetiap sudut dan ruangan lingkup kantor Bupati Jember .
- c) Kamera Pemantauan Pelabuhan Gilimanuk Jumlah 8 Titik.
- d) Kamera Pemantau Lingkungan Kantor Bupati Jumlah 30 Titik

2) Mobil Pemadam Kebakaran

Sampai saat ini jumlah mobil Pemadam Kebakaran yang dimiliki Kabupaten Jember sebanyak 5 buah. Terdiri dari 2 buah Mobil Tangki dengan kapasitas 4000 liter dan 3 buah mobil kecil dengan kapasitas 1500 liter serta Mobil Water Cannon Jumlah 2. Kelima mobil ini selalu siap 24 jam dengan personil dilokasi. Jumlah anggota Pemadam Kebakaran saat ini 30 orang dengan tiap regu berjumlah 6 orang. Fasilitas kelengkapan dalam mobil kebakaran yaitu selang, tabung pemadam, kapak, cangkul, linggis dan besi pengkait. Mekanisme laporan pemadam kebakaran yaitu adanya laporan dari masyarakat kemudian petugas pemadam kebakaran langsung konfirmasi kepada tokoh masyarakat untuk memastikan laporan baru ditindak lanjuti. Kontak pemadam kebakaran melalui Call Center (0365) 44444 dan Posko Pemadam Kebakaran / Posko Kedaruratan (0365) 41113.



6.3 Kesenian, Olah Raga dan Kepemudaan

6.3.1 Kesenian

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jember Tahun 2015 terdapat beberapa jenis kesenian khas Kabupaten Jember. Berikut ditampilkan data jenis dan pusat kesenian di Kabupaten Jember.

Tabel 6.9 : Data Jenis dan Pusat Kesenian di Kabupaten Jember 2018

Jenis Kesenian	Pusat Kesenian
Gong Kebyar	Desa Tegal Cangkring Kec. Mendoyo
Jegog	Desa Sangkaragung Kec. Negara
Joged Bungbung	Desa Pendem Kec. Negara
Tingklik Jegog	Desa Mendoyo Dauhtukad Kec. Mendoyo
Kendang Mebarung	Desa Dangin Tukadaya Kec. Negara

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam www.jembranakab.go.id,

Tabel 6.10 : Data Jenis Kesenian di Kabupaten Jember 2018

Seni Bebali		Seni Balih-Balihan		Seni Lain-lain	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
Angklung	55	Gong Kebyar	82	Samroh	6
Gender Batel	5	Gong Suling	1	Jaranan	3
Baleganjur	86	Kendang Mebarung	9	Hadrah	6
Pesantian	63	Geguntangan	1	Qasidah	4
Kembang Kirang	16	Preret	4	Sanggar Seni	13
		Grant. Pelog	1	Orkes Melayu	1
		Rindik	27	Band	4
		Gong Digidog	5	Gambus	5
		Jegog	66	Burdah	4
		Tingklik Jegog	68	Leko	1
				Berko	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam www.jembranakab.go.id,

Tabel 6.11 : Data Jenis Tari-Tarian di Kabupaten Jember 2018

Tari Wali		Tari Bebal		Tari Balih-Balihan	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
Sanghyang	5	Wayang Wong	2	Drama Gong	6
Baris Upacara	3	Wayang Kulit	12	Joged Bungbung	39
Legong Dedari	1	Barong	10	Janger	1
Rejang	44	Topeng	10	Legong	1
		Arja Sewagati	1	Calon Arang	1
				Bungbung Gebyog	2

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam www.jemberkab.go.id,

Dari sekian banyak sekaa / sanggar yang berkembang di Kabupaten Jember tersebut, terdapat jenis kesenian yang merupakan ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu :

1) Kesenian Jegog

Memanfaatkan bambu yang dirangkai sebagai alat instrumennya yang menghasilkan instrumen/irama yang sangat merdu untuk dinikmati. Jegog pertama kali



berkembang di Banjar Sebul Desa Daging Tukadaya yang diciptakan oleh Kiang Gelinduh. Kesenian Jegog disertai tarian yang biasanya dibawakan oleh beberapa orang remaja putri/putra.

2) Kesenian Joged Bungbung

Kesenian ini juga memakai bambu sebagai alat instrumennya yang disebut Gamelan. Dari segi ukuran Gamelan Joged Bungbung ini lebih



kecil dibandingkan dengan Gamelan Jegog. Kesenian Joged Bungbung ini selalu disertai tarian yang dibawakan oleh remaja putri dengan mengenakan pakaian khas Jember, sehingga menghasilkan tontonan yang sangat menarik.



3) Kesenian Kendang Mebarung

Kesenian ini memanfaatkan Kendang yang sangat besar ukurannya, yang biasanya dimainkan oleh 2 orang untuk masing masing kendang tersebut.

4) Kesenian Bungbung Gebyog

Menggambarkan ibu-ibu rumah tangga yang sedang menumbuk padi. Bungbung Gebyog ini biasanya dibawakan oleh beberapa orang wanita yang sudah berkeluarga. Masing-masing penari membawa sebuah bambu yang menggambarkan sebagai alu untuk menumbuk padi, dari ketukan bambu tersebut dihasilkan irama yang merdu untuk dinikmati.

6.3.2 Olah Raga

Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya menjaga kesehatan masyarakatnya adalah dengan kegiatan olahraga. Dengan olahraga maka akan terbentuk tubuh yang sehat dan





kuat sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas keseharian dengan hasil maksimal. Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan membangun fasilitas olahraga yang dapat digunakan penduduk untuk berolahraga.

Saat ini Kabupaten Jember telah mempunyai beberapa fasilitas lapangan olahraga meliputi lapangan sepak bola, lapangan voley, lapangan tenis meja, dan lapangan bulu tangkis. Kabupaten Jember memiliki 7 Gedung Olahraga yang berada pada masing-masing kecamatan. Jumlah kegiatan olahraga dalam satu tahun yang sering dilaksanakan di Kabupaten Jember adalah kegiatan PORSENI, KOMPETISI, serta lomba-lomba olahraga lainnya yang hampir mencakup 16 cabang olahraga, yang diikuti oleh hampir 16 organisasi olahraga dan 21 organisasi pemuda.

Berikut adalah beberapa fasilitas olahraga yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jember :

1) GOR Kresna Jvara

Gedung Olah Raga (GOR) Kresna Jvara terletak di Desa Batuagung Dusun Sawe Rangsas lebih kurang 2 Km ke arah utara dari Kantor Bupati Jember. GOR dengan kapasitas 6.000 penonton tersebut dibangun pada akhir tahun 2005 dalam rangka mensukseskan Porda Bali VII yang diselenggarakan di Jember. GOR Kresna Jvara dapat digunakan oleh umum dalam rangka menyelenggarakan even Olah Raga atau Pertemuan.

2) Lapangan Sepakbola

Lapangan sepakbola yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember ada tiga, yaitu :



- Stadion Pecangakan terletak di areal Civic Center Jalan Surapati Kecamatan Negara. Stadion ini dilengkapi dengan 2 buah tribun untuk kenyamanan menyaksikan pertandingan. Di Stadion Pecangakan juga terdapat lintasan pacuan kuda yang disewakan untuk umum
- Lapangan Dauharu, Lapangan Dauharu terletak di Kelurahan Dauharu Kecamatan Negara. Lapangan ini difungsikan sebagai lapangan sepak bola. Selain lapangan Sepak Bola di Tanah lapang Dauharu ini juga terdapat Lapangan Basket yang pemanfaatannya sebagian besar oleh Siswa SMA yang ada di kota Negara. Lapangan Dauharu juga disewakan untuk umum
- Lapangan Umum Negara, Terletak di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara. Di Lapangan Umum Negara juga terdapat fasilitas Olah Raga Panjat Tebing.

3) Lapangan Tenis

Lapangan Tenis yang terletak dibelakang Kantor Bupati Jember ini terdiri dari 4 buah lapangan. Lapangan ini direhab/diperbaharui pada akhir tahun 2005 dalam rangka mensukseskan Porda Bali VII yang diselenggarakan di Jember. Meskipun letaknya dilingkungan kantor Bupati, lapangan Tenis ini juga boleh dipergunakan untuk umum.

6.5 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

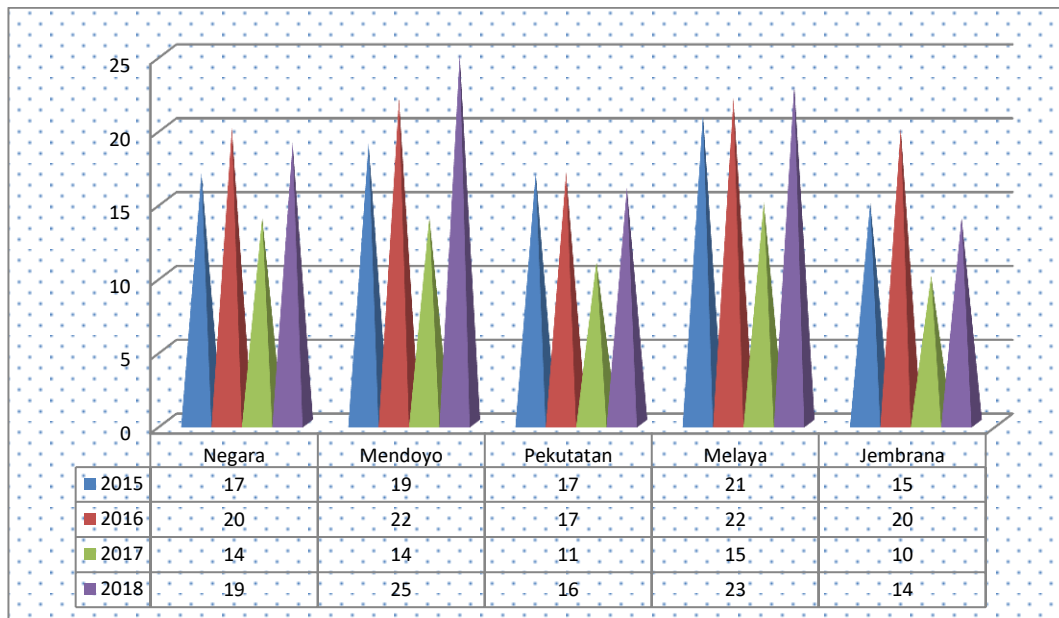
Kondisi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai andil yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga yang sehat menentukan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Berikut disajikan data jumlah PKK Aktif dan Kelompok Binaan di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018



Tabel 6.12 : Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Jember Tahun 2015-2018

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah PKK			
		2015	2016	2017	2018
Negara	10	17	20	14	19
Mendoyo	12	19	22	14	25
Pekutatan	10	17	17	11	16
Melaya	11	21	22	15	23
Jember	8	15	20	10	14
Jumlah	51	89	101	64	97

Sumber : Unit BPMPD dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Tahun 2019



Gambar 6.2 : Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Jember Tahun 2015-2018



BAB VII

KONDISI SUMBER DAYA ALAM



7.1 Pertanian

Temperatur udara yang berkisar antara 20 - 29°C, kelembaban udara berkisar antara 74 - 87 % serta rata-rata curah hujan 2.002 per tahun dan ketinggian tempat antara 0 - 600 m dpl, Kabupaten Jember sangat cocok untuk mengembangkan berbagai komoditas Pertanian.

7.1.1 Komoditas Tanaman Pangan

Beberapa tahun ke depan pertanian masih tetap menjadi tumpuan perekonomian Jember. Tidak sedikit kalangan praktisi yang beranggapan bahwa pertanian bisa menjadi pilar pendukung bagi perekonomian Bali secara umum. Komoditas pangan merupakan salah satu komoditas strategis, karena erat kaitannya dengan upaya stabilitas Ketahanan Nasional. Pengadaan pangan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, serta sesuai persyaratan gizi, selalu menjadi perhatian Pemerintah dan masyarakat sesuai UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan PP Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.



Beberapa komoditas tanaman pangan yang ada di Jember, antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Di tahun 2018 produksi padi sebanyak 75.318,8 ton, Jagung 1.761,70 ton, Kedelai 1.411,30 ton, produksi ubi kayu sebanyak 57,6 ton dan ubi

jalar 40,32 ton . Komoditas tanaman pangan yang merupakan kebutuhan utama, yang sering disebut Bama (Bahan Makanan Utama), terdiri dari : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu. Data komoditas tanaman pangan di Kabupaten Jember Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1 : Data Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Jember Tahun 2018

Jenis Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ton)	Keterangan
Padi	12.312,20	12.333,20	75.318,8	61,07	Gabah Kering Giling (GKG)
Jagung	545	250,5	545	1.761	Pipilan Kering
Kedelai	1.125	1.058	1.411,30	14.17	Biji Kering
Kacang Tanah	64,70	59	92,700	15,72	Biji Kering
Kacang Hijau	206	206	92,70	9,81	Biji Kering
Ubi Kayu	12	3	192,19	57,6	Ubi Basah
Ubi Jalar	3	3	40,32	134,4	Ubi Basah

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018

Dengan melihat luasan lahan untuk produksi komoditas tanaman pangan di Kabupaten Jember tahun 2018, yang paling banyak dihasilkan adalah jenis komoditas padi dengan luasan lahan 12.312,20 Ha dengan hasil produksi gabah sebesar 75.318,8 ton, kedua adalah Kedelai dengan luasan lahan 1.125 Ha dengan hasil produksi sebesar 1.411,3 ton ubi kayu dan ubi jalar, produksinya hanya ada di Kecamatan Melaya dan sedikit. Adapun data komoditas tanaman pangan tersebut lima tahun terakhir di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1) Komoditas Padi

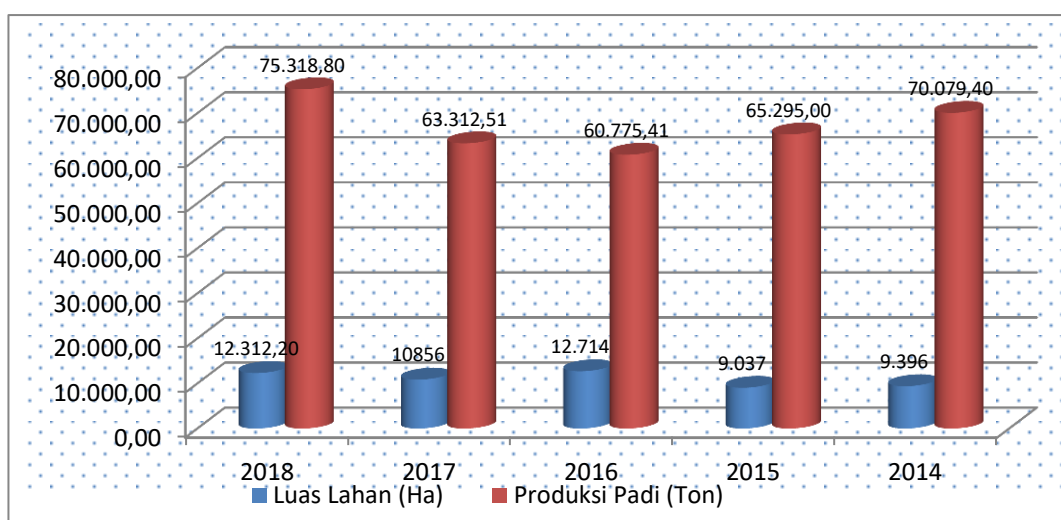
Secara umum produksi padi dihasilkan di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Produksi padi paling banyak adalah pada tahun

2018 dengan jumlah produksi 75.318,8 Ton dengan luas tanam sebesar 12.333,20 Ha. Komoditas Padi pada tahun 2018, terbesar dibudidayakan di Kecamatan Mendoyo dengan luasan lahan 3.741 Ha dan hasil produksi 24.550,1 ton. Sementara yang terkecil di Kecamatan Pekutatan dengan luasan budidaya 978 Ha dengan hasil produksi 7.108,5 ton.

Tabel 7.2 : Komoditas Padi di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Kecamatan		Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Ton)
Melaya		2.583	2.081	12.708,6	61,07
Negara		3.270	3.365	20.550,0	61,07
Jember		1.740,20	1.703,20	10.401,4	61,07
Mendoyo		3.741	4.020	24.550,1	61,07
Pekutatan		978	1.164	7.108,5	61,07
Tahun	2018	12.312,20	12.333,20	75.318,8	61,07
	2017	10.856	10.614	63.312,51	59,65
	2016	12.714	9.471	60.775,41	64,17
	2015	9.037	9.784	65.295,00	66,74
	2014	9.396	10.194	70.079,40	68,75

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.1 Komoditas Padi di Kabupaten Jember tahun 2014-2018



2) Komoditas Jagung



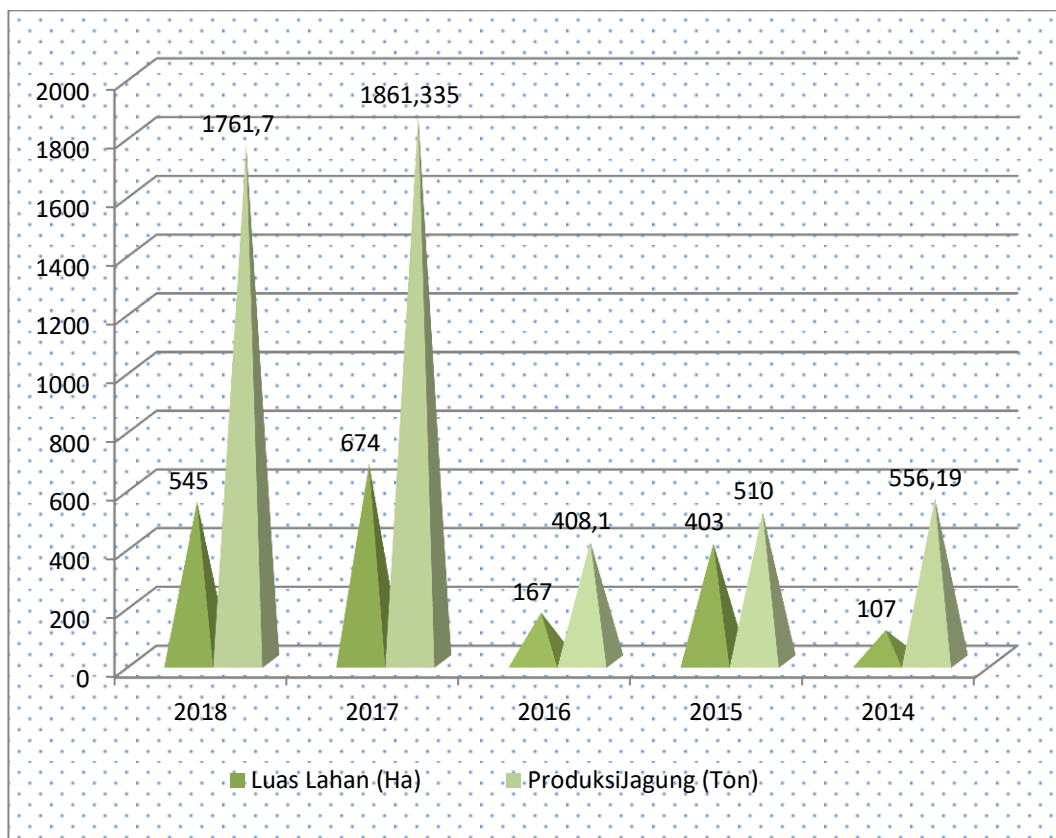
Produksi palawija khususnya jagung, menunjukkan peningkatan peningkatan dari tahun ke tahun. Pertambahan jumlah penduduk dan program perbaikan gizi masyarakat melalui diversifikasi pola makanan, mendorong permintaan jagung. Selain komoditi jagung sebagai bahan baku industri dalam negeri semakin meningkat dengan banyaknya industri makanan ternak, industri minyak jagung dan produk ethanol, dimana varietas jagung hibrida mempunyai kelebihan dari jagung komposit yaitu produksinya 25-30% lebih tinggi, tahan rebah, penyakit dan kekeringan serta berumur pendek.

Perkembangan Tanaman Jagung di Kabupaten Jember berfluktuasi dari tahun 2014 sampai dengan 2018, seiring dengan perkembangan peternakan di kabupaten jember yang cukup pesat maka kebutuhan akan pakan ternak cenderung meningkat, selain diisi oleh hijauan ternak, kebutuhan pakan ternak juga didapatkan dari hasil tanaman jagung utamanya batang dan daunnya. Hal ini berdampak pada produksi jagung, karena petani lebih banyak menjual tanaman jagung dibandingkan dengan hasil buahnya. Adapun perkembangan Jagung di Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7.3 : Komoditas Jagung di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Ton)
Melaya	217,5	77,5	545,0	70,33
Negara	30	31	218,0	70,33
Jember	5	5	35,1	70,33
Mendoyo	47,5	47	330,5	70,33
Pekutatan	245	90	632,9	70,33
Tahun	2018	545	250,5	1.761,70
	2017	674	285	1.861,34
	2016	167	76	408,10
	2015	403	102	510,00
	2014	107	140	556,19

Profil Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.2 Komoditas Jagung di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

3) Komoditas Kedelai



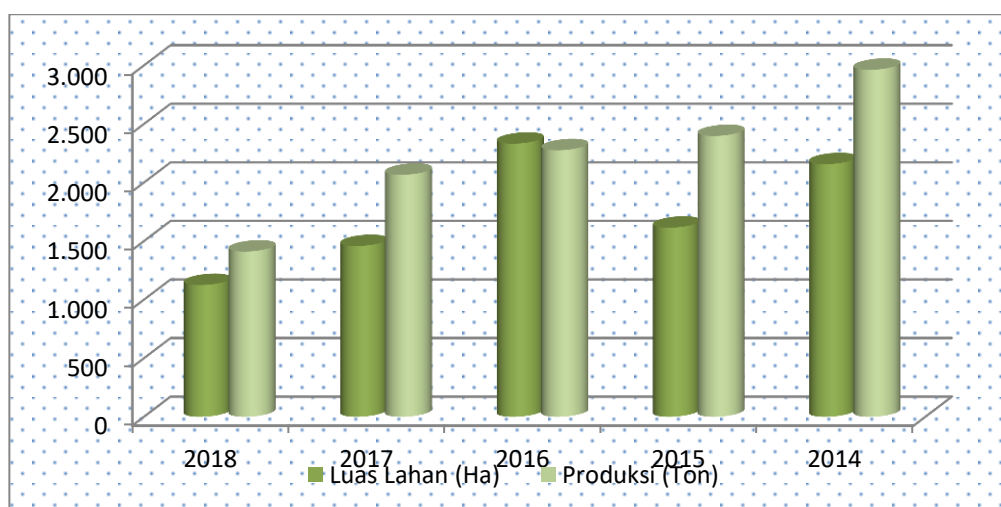
Produksi kedelai tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Luas areal tanam kedelai pada tahun 2018 seluas 1.125 Ha, areal panen 1.058 Ha, hasil produksi 1.411,30 ton, produktivitas 13,34

Kw/Ha, produktivitas Rata-rata yakni 13,34 Kw/Ton sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 14,17 Kw/Ton.

Tabel 7.4 Komoditas Kedelai di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Kecamatan		Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Ton)
Melaya		247	187	249,4	13,34
Negara		470	470	626,9	13,34
Jembrana		123	123	164,0	13,34
Mendoyo		253	246	328,1	13,34
Pekutatan		32	32	42,6	13,34
Tahun	2018	1.125	1.058	1.411,30	13,34
	2017	1..458	1.475	2.066,28	14,17
	2016	2.332	1.919	2.275,93	11,86
	2015	1.615	1.630	2.397,70	14,71
	2014	2.157	1.792	2.962,85	16,53

Sumber : Profil Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.3 Komoditas Kedelai di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018



4) Kacang Tanah dan Kacang Hijau

Produksi kacang tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten



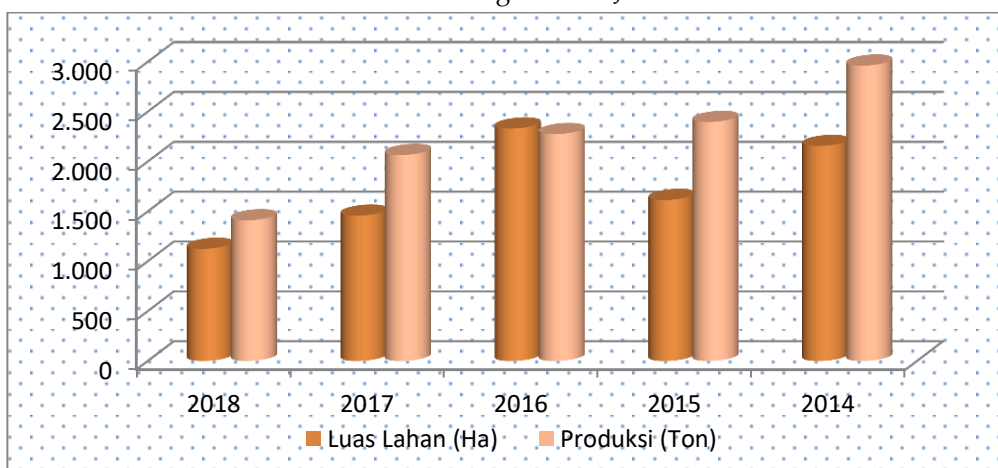
Jember. Luas areal tanam kacang tanah pada tahun 2018 seluas 61,70 Ha, areal panen 59 Ha, hasil produksi 92.700 ton, produktivitas 13,34 Kw/Ha, produktivitas Rata-rata

yakni 15,72 Kw/Ton.

Tabel 7.5 : Komoditas Kacang Tanah di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Tahun 2014-2018					
Kecamatan		Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Ton)
Melaya		-	-	-	-
Negara		-	-	-	-
Jembrana		49,70	39	61,300	15,72
Mendoyo		15	20	31,400	15,72
Pekutatan		-	-	-	-
Tahun	2018	64,70	59	92,700	15,72
	2017	80	73	105,397	14,44
	2016	146	151	222,121	14,71
	2015	77	72	127,000	17,64
	2014	40	48	65,600	13,66

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.4 Komoditas Kacang Tanah di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Produksi kacang tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember.



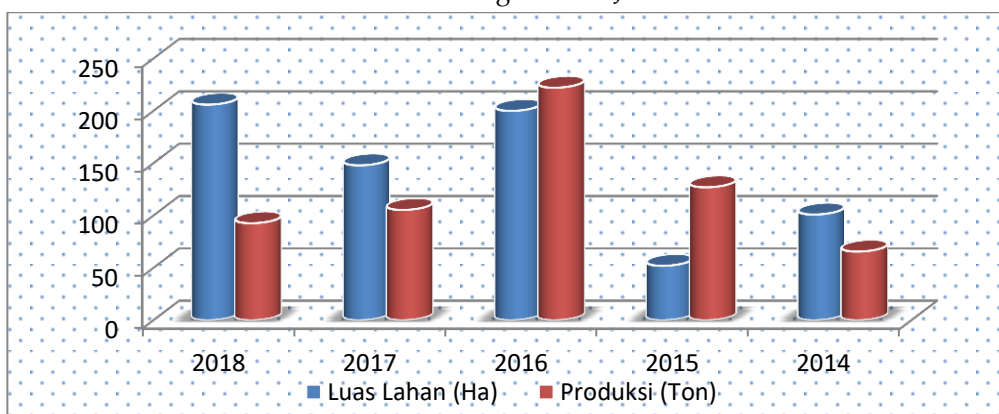
Luas areal tanam kacang hijau pada tahun 2018 seluas 506 Ha, areal panen 206 Ha, hasil produksi 92.70 ton, produktivitas 9,81 Kw/Ha. Adapun perkembangan Kacang Hijau di Kabupaten Jember dapat dilihat

pada table berikut :

Tabel 7.6 : Komoditas Kacang Hijau di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Ton)
Melaya	110	110	107,9	9,81
Negara	26	26	25,5	9,81
Jember	5	5	4,9	9,81
Mendoyo	65	65	63,7	9,81
Pekutatan	-	-	-	-
Tahun	2018	206	206	92,70
	2017	148	152	105,40
	2016	200	195	222,12
	2015	52	52	127,00
	2014	101	51	65,60

Sumber : Profil Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.6 : Komoditas Kacang Hijau di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018



5. Ubi Kayu dan Ubi Jalar

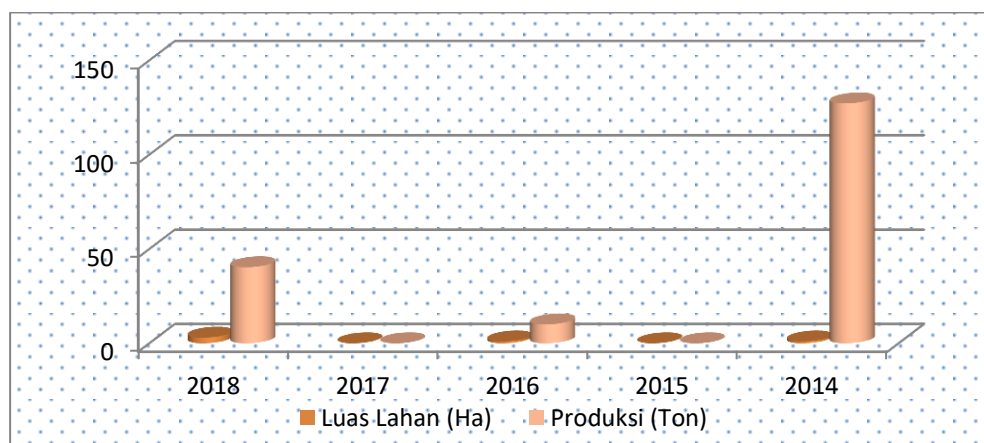


Produksi ubi kayu di wilayah Kabupaten Jember untuk tahun 2018 hanya ada di Kecamatan Melaya. Luas areal tanam Ubi kayu pada tahun 2018 seluas 12 Ha, areal panen 3 Ha, hasil produksi 192,19 ton, produktivitas 57,6 Kw/Ha. Adapun perkembangan ubi kayu di Kabupaten Jember dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 7.7 : Komoditas Uji Kayu di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Kecamatan		Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Ton)
Melaya		12	3	192,19	57,6
Negara		-	-	-	-
Jember		-	-	-	-
Mendoyo		-	-	-	-
Pekutatan		-	-	-	-
Tahun	2018	12	3	192,19	57,6
	2017	16	14	333,21	466,496
	2016	9	10	177,65	177,70
	2015	9	36	125,56	452,00
	2014	10	10	120,30	120,30

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.6 : Komoditas Ubi Kayu di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Tanaman Ubi Jalar



Produksi ubi jalar di wilayah Jember untuk tahun 2018 hanya ada di Kecamatan Melaya.

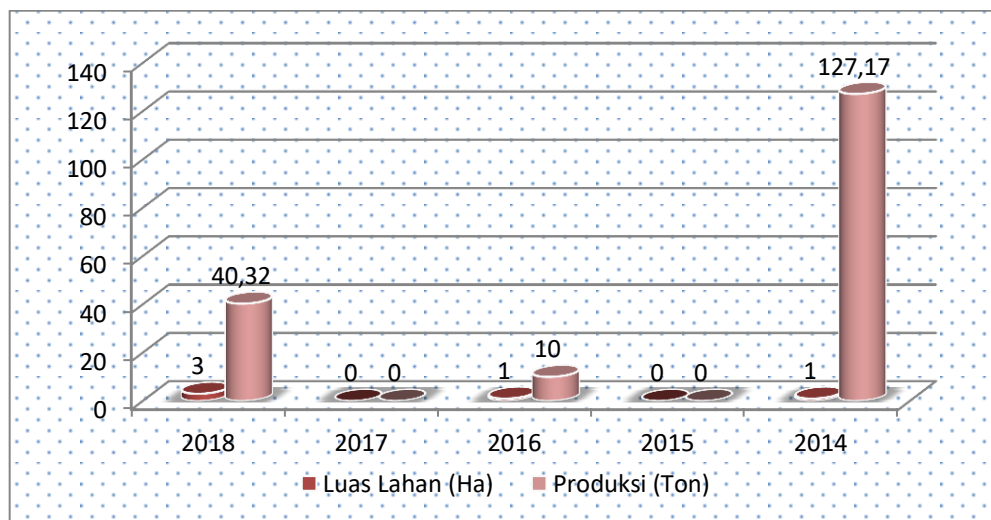
Luas areal tanam Ubi jalar pada tahun 2018 seluas 3 Ha, areal panen 3 Ha, hasil produksi

40,32 ton, produktivitas 134,4 Kw/Ha, Adapun perkembangan ubi jalar di Kabupaten Jember dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 7.8 : Komoditas Ubi Jalar di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Kecamatan		Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ton)
Melaya		3	3	40,32	134,4
Negara		-	-	-	-
Jember		-	-	-	-
Mendoyo		-	-	-	-
Pekutatan		-	-	-	-
Tahun	2018	3	3	40,32	134,4
	2017	-	-	-	-
	2016	1	1	10,00	100,00
	2015	-	-	-	-
	2014	1	1	127,17	1271,7

Sumber : Profil Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.7 : Komoditas Ubi Jalar di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

7.1.2 Komoditas Hortikultura

Tanaman yang termasuk dalam Komoditas Hortikultura terdiri dari komoditas sayuran dan buah-buahan semusim, komoditas buah-buahan dan sayuran tahunan, Tanaman biofarmaka (tanaman obat) dan tanaman hias. Pada Sub Sektor Hortikultura yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Jember yaitu tanaman semangka dimana setiap tahun terus dikembangkan dan telah mampu memenuhi kebutuhan lokal, regional dan nasional. Komoditas buah-buahan lainnya yang ada di Jember disajikan dalam profil ini antara lain : Jenis tanaman buah-buahan tahunan seperti : mangga, durian, pepaya, pisang dan rambutan. Sedangkan yang digolongkan dalam sayuran : kacang panjang, cabe dan ketimun.



Data komoditas tanaman pangan di Kabupaten Jember Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.9 : Data Komoditas Tanaman Hortikultura
di Kabupaten Jember Tahun 2018

Jenis Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg/Ton)	Keterangan
Semangka	544	554	6.903,3	124,61	Buah Segar
Melon	22	22	256,4	116,59	Buah Segar
Cabe Merah	9	6	20,9	23,33	Buah Segar
Cabe Rawit	9	14	44,100	31,57	Buah Segar
Mentimun	3	3	29	96,67	Buah Segar
Terong	1	1	0,5	5	Buah Segar
Kacang Panjang	3	2	18,6	93,0	Buah Segar

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018

Data komoditas tanaman Hortikultura tersebut lima tahun terakhir di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1) Semangka



Buah semangka berbentuk bulat/lonjong dengan warna kulit luar berwarna hijau. Jika sudah masak, dalam buah semangka berwarna merah dan banyak biji yang menempel. Biji semangka berbentuk pipih lonjong dengan ukuran panjang sekitar 1 cm dan lebar sekitar 0,5 cm. Daun semangka berukuran cukup besar, berlekuk-lekuk tepinya, berwarna hijau dan bunga berwarna kuning. Semangka merupakan tanaman buah berupa herba yang tumbuh merambat. Tanaman ini berasal Afrika, kemudian berkembang dengan pesat ke berbagai negara baik di daerah tropis maupun subtropis, seperti: Afrika Selatan, Cina, Jepang, dan Indonesia. Tanaman semangka bersifat semusim, tergolong cepat berproduksi karena umurnya hanya sampai 6 bulan.

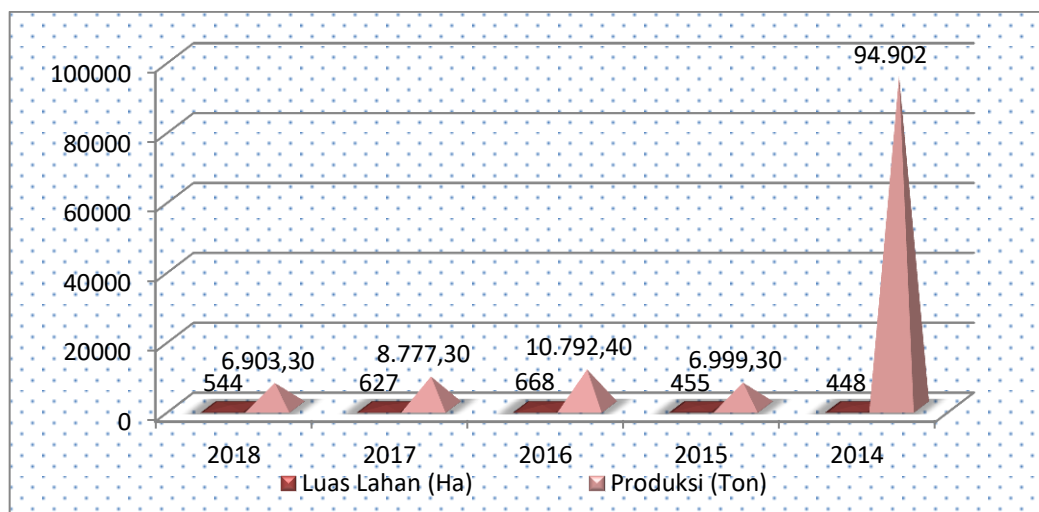
Tanaman semangka dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai buah segar, tetapi ada yang memanfaatkan daun dan buah semangka muda untuk bahan sayur-mayur. Biji semangka bisa diolah menjadi makanan ringan yang disebut “kuwaci” (disukai masyarakat sebagai makanan ringan). Kulit semangka juga dibuat asinan/acar seperti buah mentimun atau jenis labu-labuan lainnya. Perkembangan produksi tanaman semangka 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 7.10 : Komoditas Semangka di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Kecamatan		Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ton)
Melaya		71	61	760,1	124,61
Negara		339	359	4.473,4	124,61
Jember		27	27	336,4	124,61
Mendoyo		77	77	959,4	124,61
Pekutatan		30	30	373,8	124,61
Tahun	2018	544	554	6.903,3	124,61
	2017	627	590	8.777,3	148,77
	2016	668	157,78	10.792,4	157,78
	2015	455	381	6.999,3	183,71
	2014	448	448	94.902	218,3

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.8 : Komoditas Semangka di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

2) Melon



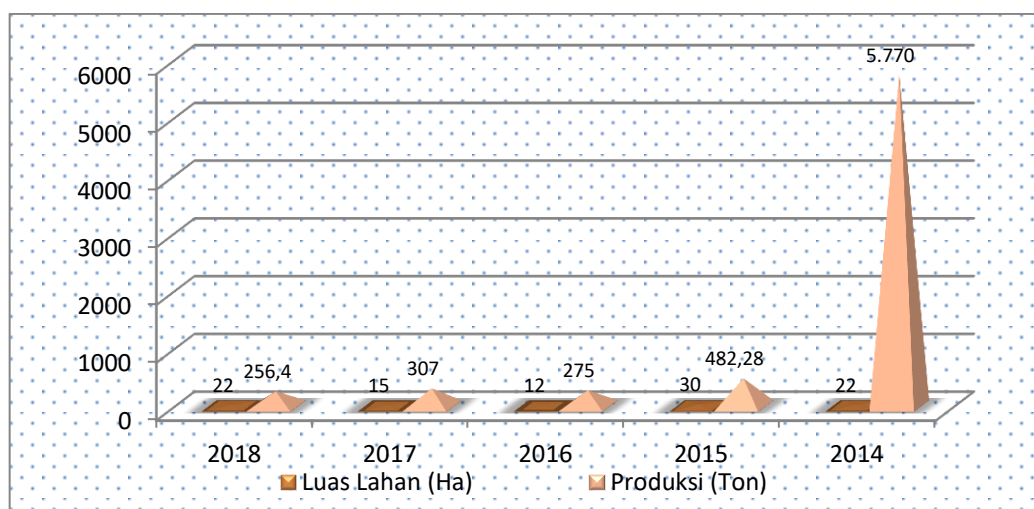
Budidaya melon menunjukkan prospek menjanjikan dikarenakan harga jual yang cukup tinggi dibanding tanaman hortikultura lainnya. namun untuk budidaya tanaman melon ini banyak faktor yang harus diperhatikan salah satunya

faktor tanah yang tidak gembur, kurangnya unsur hara terutama unsur hara mikro dan makro, faktor cuaca dan iklim, faktor hama dan penyakit tanaman serta faktor pemeliharaan jika tidak diperhatikan maka keuntungan akan menurun bahkan bisa merugi, sehingga dikelompokkan dalam tanaman budidaya yang tergolong sulit. Perkembangan produksi tanaman melon 5 (lima) tahun terakhir pada tabel berikut :

Tabel 7.11 : Komoditas Melon di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ton)
Melaya	-	-	-	-
Negara	22	22	256,4	116,59
Jember	-	-	-	-
Mendoyo	-	-	-	-
Pekutatan	-	-	-	-
Tahun	2018	22	256,4	116,59
	2017	15	307,00	204,67
	2016	12	275,00	250,00
	2015	30	482,28	160,76
	2014	22	5.770	28,85

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.9 : Komoditas Melon di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

3). Komoditas Sayuran

Perkembangan produksi komoditas sayuran dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel- tabel berikut ini :

Cabe Besar, merupakan salah satu jenis komoditas tanaman



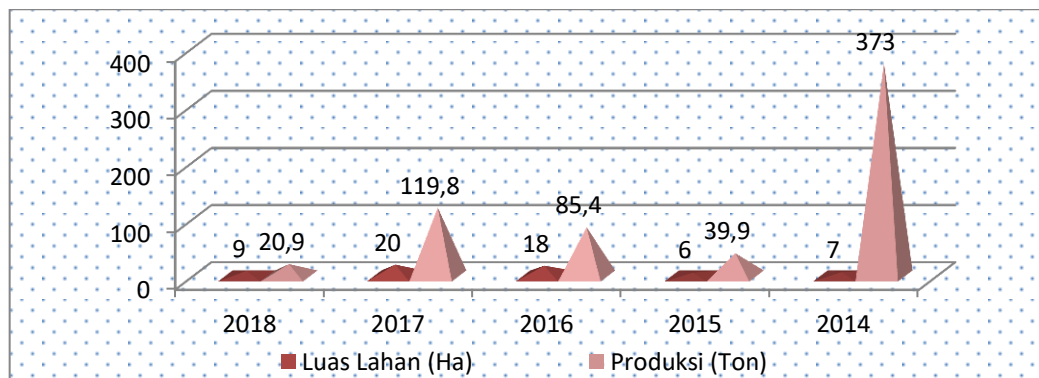
hortikultura yang penting di Indonesia.

Secara umum, ada tiga golongan cabe besar, yakni cabe merah besar, cabe merah keriting, dan cabai hijau.

Tabel 7.12 : Komoditas Cabe Merah di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ton)
Melaya	-	-	-	-
Negara	5	2	4,6	23,33
Jember	1	1	2,4	23,33
Mendoyo	2	3	6,9	23,33
Pekutatan	-	-	-	-
Tahun	2018	9	6	20,9
	2017	20	14	119,8
	2016	18	12	85,40
	2015	6	6	39,9
	2014	7	7	373

Sumber : Profil Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.12 : Komoditas Cabe Merah di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Cabai rawit atau cabai kethur, populer sebagai bumbu masakan



di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Cabe Rawit dibudidayakan hanya pada tahun 2017 dan 2018.

Tabel 7.13 : Komoditas Cabe Rawit di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Kecamatan		Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ton)
Melaya		7	5	15,70	31,57
Negara		1	3	9,40	31,57
Jember		5	5	15,70	31,57
Mendoyo		1	1	3,157	31,57
Pekutatan		-	-	-	-
Tahun	2018	9	14	44,100	31,57
	2017	16	11	45,000	40,91
	2016	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018

Mentimun / timun atau ketimun merupakan tumbuhan sayuran



yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Tahun 2018 tumbuhan ini dibudidayakan di Kecamatan Jember dan Kecamatan Negara.

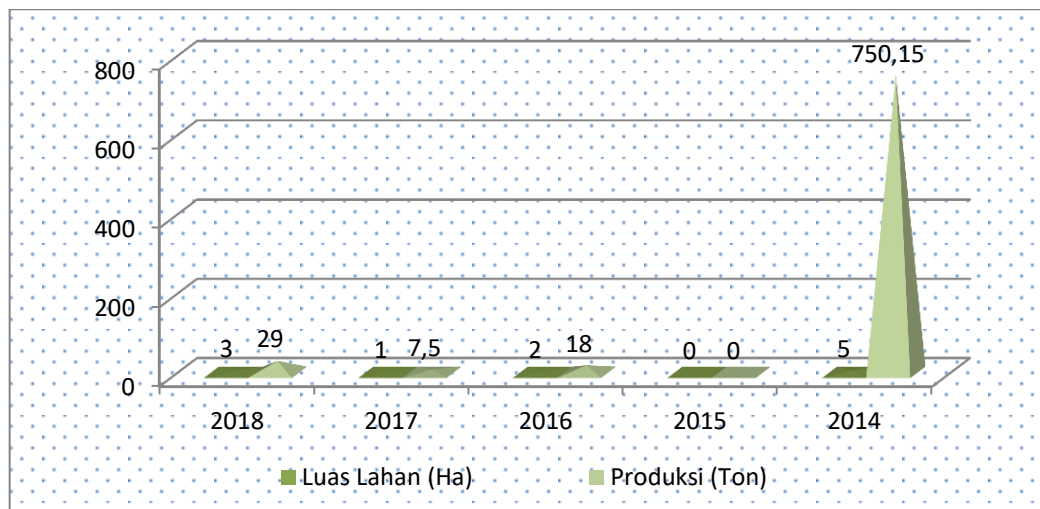
Tabel 7.14 : Komoditas Mentimun di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ton)
Melaya	-	-	-	-
Negara	1	1	9,7	96,67
Jember	2	2	19,3	96,67
Mendoyo	-	-	-	-
Pekutatan	-	-	-	-



Kecamatan		Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ton)
Tahun	2018	3	3	29	96,67
	2017	1	1	7,5	75
	2016	2	2	18,00	90,00
	2015	-	-	-	-
	2014	5	5	750,15	1500,3

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.13 : Komoditas Mentimun di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Terong, merupakan jenis sayuran yang dibudidayakan di Kecamatan



Negara dalam 5 (lima) tahun terakhir. Perkembangan komoditas Terong dapat dilihat pada Tabel berikut.

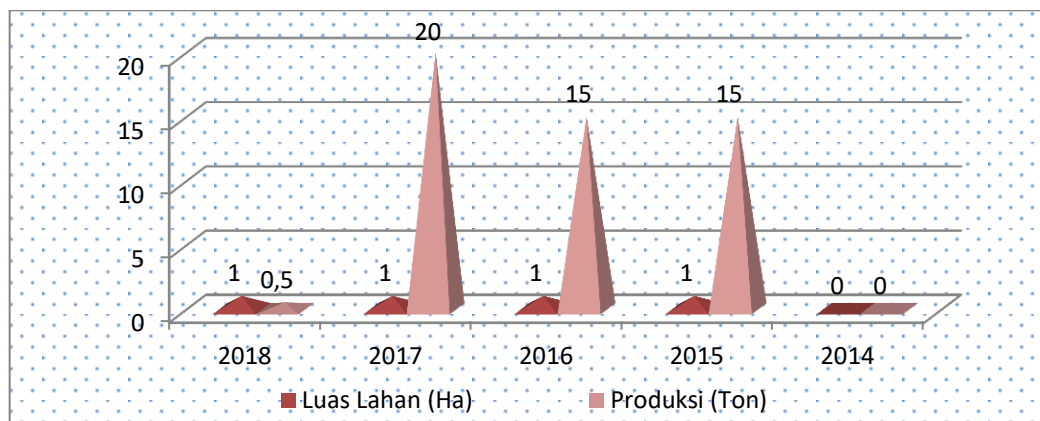
Tabel 7.15 : Komoditas Terong di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ton)
Melaya	-	-	-	-
Negara	1	1	0,5	5
Jember	-	-	-	-
Mendoyo	-	-	-	-
Pekutatan	-	-	-	-



Kecamatan		Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ton)
Tahun	2018	1	1	0,5	5
	2017	1	1	20	200
	2016	1	1	15	150
	2015	1	1	15	150
	2014	-	-	-	-

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.14 : Komoditas Terong di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Tanaman Kacang Panjang merupakan salah satu tanaman yang sangat mudah di budidayakan. Tanaman kacang panjang ini masih berfamily dengan tanaman polong polongan atau kacang-kacangan. Tanaman ini hidup merambat dan juga memiliki buah kacang panjang lunak dan berwarna hijau.

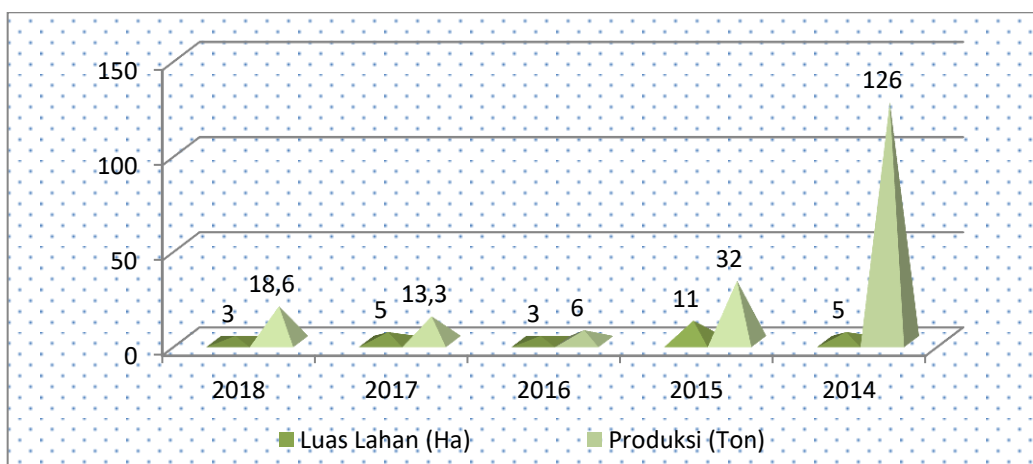


Tabel 7.16 : Komoditas Kacang Panjang di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ton)
Melaya	-	-	-	-
Negara	-	-	-	-
Jember	3	2	18,6	93,0
Mendoyo	-	-	-	-
Pekutatan	-	-	-	-

Kecamatan		Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ton)
Tahun	2018	3	2	18,6	93,0
	2017	5	5	13,3	26,6
	2016	3	3	6	20
	2015	11	11	32	29,29
	2014	5	5	126	252

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.15 : Komoditas Kacang Panjang di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Bawang merah adalah salah satu bumbu masak utama dunia yang



berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik sub-tropis maupun tropis. Komoditas ini be,um potensi di Kabupaten Jember, karena

hanya muncul dibudidayakan dalam 2 (dua) tahun terakhir, di Kecamatan Negara



Tabel 7.17 : Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Kecamatan		Luas Lahan (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ton)
Melaya		-	-	-	-
Negara		2	2	30,80	102,67
Jember		-	-	-	-
Mendoyo		-	-	-	-
Pekutatan		-	-	-	-
Tahun	2018	2	2	30,80	102,67
	2017	2	2	57,50	11,500
	2016	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018

4) Komoditas Buah-buahan

Adapun Perkembangan produksi komoditas Buah-buahan dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel- tabel berikut ini:

(1). Mangga, Durian dan Pisang

Tabel 7.18 : Komoditas Mangga, Durian dan Pisang
di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Kecamatan		Mangga		Durian		Pisang	
		Jumlah Pohon	Produksi (Ton)	Jumlah Pohon	Produksi (Ton)	Jumlah Pohon	Produksi (Ton)
Pekutatan		-	-	1.000	67,000	325.000	8775,000
Mendoyo		514	30,840	4.212	282,204	1.725	46,570
Jember		81	4,860	143	9,581	1.172	31,640
Negara		800	48,000	500	33,500	12.742	344,030
Melaya		-	-	850	56,950	92.808	2505,810
Tahun	2018	1.395	83,700	6.705	449,235	433.477	11703,870
	2017	37.884	1494,900	2.166	229,200	568.924	38849,400
	2016	55.155	3.759,9	19.906	2.202,900	738.247	23.265,100
	2015	40.833	4.351	16.256	514,700	404.947	23.053,000
	2014	135.750	3.801,62	32.174	793,310	853.411	19.769,300

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Tabel 7.19 : Komoditas Pepaya, Nenas dan Sawo di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Kecamatan		Pepaya		Nenas		Sawo	
		Jumlah Pohon	Produksi (Ton)	Jumlah Pohon	Produksi (Ton)	Jumlah Pohon	Produksi (Ton)
Pekutatan		-	-	14.275	42,820	225	12,370
Mendoyo		132	10,290	672	2,010	317	17,430
Jembrana		-	-	77	0,230	54	2,970
Negara		500	39,000	-	-	-	-
Melaya		60	-	10.150	30,450	1.333	73,310
Tahun	2018	692	49,290	25.174	75,520	1.929	106,090
	2017	650	58,500	10.041	12,400	1.953	73,500
	2016	1.677	146,400	65.006	214,100	3.337	213,600
	2015	1.589	66,900	68.150	106,400	1.090	104,600
	2014	11.682	79,500	144.025	126,740	7.059	231,160

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018

Tabel 7.20 : Komoditas Jeruk Keprok, Rambutan dan Alpukat
di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Kecamatan		Jeruk Keprok		Rambutan		Alpukat	
		Jumlah Pohon	Produksi i (Ton)	Jumlah Pohon	Produksi (Ton)	Jumlah Pohon	Produksi (Ton)
Pekutatan		-	-	495	41,080	-	-
Mendoyo		-	-	6.525	541,570	90	6,750
Jembrana		-	-	793	65,810	17	1,275
Negara		-	-	535	44,400	-	-
Melaya		25.000	425,000	22.277	1848,990	-	-
Tahun	2018	25.000	425,000	30.625	2541,870	107	8,025
	2017	26.250	849,600	562	41,000	29	2,900
	2016	27.195	893,400	27.782	3.021,800	170	8,600
	2015	1.136	31,000	43.369	5.577,800	81	2,400
	2014	2.362	13,210	55.512	8211,900	293	7,500

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Tabel 7.21 : Komoditas Duku, Jambu Air dan Jambu Biji
di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Kecamatan	Duku		Jambu Air		Jambu Biji		
	Jumlah Pohon	Produksi (Ton)	Jumlah Pohon	Produksi (Ton)	Jumlah Pohon	Produksi (Ton)	
Pekutatan	315	5,670	-	-	-	-	
Mendoyo	610	10,980	-	-	513	28,728	
Jembrana	425	7,650	22	1,298	67	3,752	
Negara	-	-	-	-	-	-	
Melaya	-	-	-	-	1.200	67,200	
Tahun	2018	1.350	24,300	22	1,298	1.780	99,680
	2017	-	-	130	3,000	638	17,200
	2016	8.456	430,800	737	31,700	6.242	113,100
	2015	8.175	144,700	267	4,600	6.102	82,200
	2014	7.662	424,179	1.799	57,624	6.164	90,723

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018

Tabel 7.22 : Komoditas Salak, Sirsak, dan Manggis
di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Kecamatan		Salak		Sirsak		Manggis	
		Jumlah Pohon	Produksi (Ton)	Jumlah Pohon	Produksi (Ton)	Jumlah Pohon	Produksi (Ton)
Pekutatan		1.006	20,120	-	-	2.000	140,000
Mendoyo		744	14,880	30	0,360	1.213	84,910
Jembrana		-	-	-	-	115	8,050
Negara		-	-	-	-	10	0,700
Melaya		1.250	25,000	95	1,140	1.250	87,500
Tahun	2018	3.000	60,000	125	1,500	4.588	321,160
	2017	1.094	21,700	4	0,100	210	11,000
	2016	11.746	148,500	5.357	33,000	7.648	118,300
	2015	1.650	6,400	6.125	84,100	-	-
	2014	14.940	51,685	12.125	124,600	-	-

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018

Tabel 7.23 : Komoditas Belimbing, Nangka, Melinjo dan Sukun di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Kecamatan		Duku		Jambu Air		Jambu Biji	
		Jumlah Pohon	Produksi (Ton)	Jumlah Pohon	Produksi (Ton)	Jumlah Pohon	Produksi (Ton)
Melaya		100	3,300	-	-	-	-
Negara		125	4,125	529	69,820	10	0,730
Jembrana		75	2,475	101	13,330	5	0,360
Mendoyo		-	-	-	-	-	-
Pekutatan		70	2,310	-	-	-	-
Tahun	2018	370	12,210	630	83,160	15	1,090
	2017	152	6,384	613	40,885	4	0,200
	2016	192	19,200	207	36,800	14	2,300

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018

7.2 Perkebunan

Melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember, komoditas yang dibina dalam Bidang Perkebunan terdapat beberapa jenis tanaman yang dibina antara lain Kakao, Cengkeh, Panili, Kopi Robusta, Kelapa Dalam, Kelapa Genjah, Kelapa Deres, Kelapa Hibrida dan kapok.



Perkebunan mempunyai kedudukan yang strategis dalam pengembangan sektor pertanian di Jember. 18,08 % luas lahan di Jember digunakan untuk perkebunan yang bersifat perkebunan rakyat.

Peningkatan kualitas dan produksi hasil-hasil perkebunan adalah salah satu tujuan pembangunan sub sektor perkebunan.

Melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember, di Bidang Perkebunan terdapat beberapa jenis komoditas / tanaman yang dibina antara lain Kelapa Dalam, Kelapa Genjah, Kopi Robusta, kopi Arabika, Cengkeh, Kakao, dan beberapa pengembangan tanaman tembakau. Dari komoditas tersebut diatas yang menjadi komoditi Unggulan dalam bidang Perkebunan di Kabupaten Jember adalah Komoditi Kakao. Adapun data-data Luas Areal data komoditi tanaman perkebunan di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 7.24 : Perkembangan Luas areal Dan Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Kabupaten Jember

No	Komoditas	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Kakao	6,258.61	3,000.32	2,741.46	2,849.79	2,875.43	2,604.60
2	Kelapa Dalam	17,074.75	18,878.003	15,155.542	17,634.537	17,746.15	16,464.25
3	Kelapa Genjah	444.06	250.446	241.184	233.720	235.32	263.38
4	Kopi Robusta	1,216.75	275.733	289.168	285.993	258.56	227.80
5	Cengkeh	3,446.85	785.363	691.931	682.853	646.49	604.65
6	Panili	46.67	0.963	0.024	0.037	0.022	0.158
7	Tembakau	8.50	8.32	18.700	14.970	12.00	-
8	Pala	1,229.78	13.61	9.47	7.90	9.81	9.13
9	Nilam	10.00	15.00	0.00	-	-	-

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018

7.2.1 Komoditas Kelapa



"Kelapa" adalah salah satu komoditi andalan Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki perkebunan kelapa yang paling luas di Bali dan masih berpeluang



untuk dikembangkan lagi. komoditi kelapa dalam luas arealnya mencapai 17.313,48 ha pada tahun 2018 dengan hasil buah kelapa sebanyak 14.438,91 Ton.

Tabel 7.25 : Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Kelapa Dalam di Kabupaten Jember, Tahun 2018

Kecamatan	Luas (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg)	Pemilik (Ruta)
	Tanaman Muda	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak			
Melaya	100.00	3,185.50	316.50	3,602	4,011	245,793
Negara	140.00	3,129.00	217.00	3,486	3,553	551,246
Jember	140.00	1,764.00	180.00	2,084	1,780	112,635
Mendoyo	356.72	6,072.83	457.45	6,887	5,607	349,955
Pekutatan	260.48	653.27	102.00	1,016	2,293	101,400
2018	997.20	14,804.60	1,272.95	16,464.25	1,112	17,244
2017	897,00	14.904,00	1 273,00	12 961,38	870	17 244
2016	1 012,55	14.789,25	1 272,95	17 634,54	1 192	17 244
2015	661.80	15.007.00	1,272.95	15,155.54	1,010.00	16,530.00
2014	668,55	15.969,25	86.95	18,878.00	1,182.00	16,530.00
Bentuk Hasil : Kopra						

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018

Tabel 7.26 : Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Kelapa Deres di Kabupaten Jember, Tahun 2018

Kecamatan	Luas (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg)	Pemilik (Ruta)
	Tanaman Muda	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak			
Melaya	19.50	22.50	0.40	42.40	18.56	825
Negara	40.00	55.70	-	95.70	55.59	998
Jember	-	32.50	-	32.50	23.19	713
Mendoyo	20.00	83.95	-	103.95	86.71	1,033
Pekutatan	-	80.81	-	80.81	79.34	982
2018	79.50	275.46	0.40	355.36	263.38	956
2017	-	99,68	4,00	660,53	6 627	772
2016	-	97,68	6,00	647,65	6 630	772
2015	-	99.68	4.00	659.02	6,611.00	772.00
2014	-	99.68	4.00	601.77	6,037.00	772.00
Bentuk Hasil : Kopra						

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2019

Tabel 7.27 : Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Kelapa Hybrida di Kabupaten Jember, Tahun 2018

Kecamatan	Luas (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg)	Pemilik (Ruta)
	Tanaman Muda	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak			
1. Melaya	-	12,10	-	10,13	837	104
2. Negara	-	61,40	-	49,00	798	60
3. Jember	-	16,00	-	11,43	714	74
4. Mendoyo	-	37,30	-	32,94	883	335
5. Pekutatan	-	13,00	-	10,67	821	116
Jumlah 2018	-	12,10	-	10,13	837	104
2017	-	139,80	-	114,17	817	689
2016	-	140,00	-	106,46	760	689
2015	-	139,80	-	107,13	766	5,381
2014	-	139,80	-	117,25	839	5,381
Bentuk Hasil : Kopro						

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember dan Jember Dalam Angka Tahun 2018

7.2.2 Komoditas Kakao



Komoditas yang paling menguntungkan bagi petani untuk dikembangkan, mempunyai prospek pasar, serta sifat-sifat unggul lainnya seperti luas areal dan animo petani. Tergolong dalam komoditas unggulan adalah Kakao. Pada tahun

2018 jumlah produksi Kakao sebanyak 2.875,43 Ton. Tanaman kakao sedang berkembang pesat di Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember sudah memiliki bangunan sebagai pabrik pengolahan biji kakao.



Tabel 7.28: Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Kakao di Kabupaten Jember, Tahun 2018

Kecamatan	Luas (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg)	Pemilik (Ruta)
	Tanaman Muda	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak			
1. Melaya	168.90	1,217.73	549.80	723.52	594	3,627
2. Negara	64.29	361.96	118.43	191.63	529	1,981
3. Jember	71.82	362.62	124.56	204.14	563	588
4. Mendoyo	156.96	1,564.14	422.91	985.21	630	4,725
5. Pekutatan	85.94	851.52	137.03	500.09	587	2,119
Jumlah 2018	547.91	4,357.97	1,352.73	2,604.60	598	13,040
2017	624,63	4 281,25	1 352,73	2 875,43	672	13 040
2016	624,63	4 281,25	1 352,73	2 849,79	666	13 040
2015	624,62	4 281,24	1 164,47	2 741,46	640	12 804
2014	932,77	4 490,94	803,25	3 000,32	668	13 040

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember dan Jember Dalam Angka Tahun 2018

7.2.3 Komoditas Kopi, Cengkeh, dan Panili

Selain Komoditas Kelapa dan Kakao, Kopi, Cengkeh, dan Panili yang tak kalah untuk potensial dikembangkan dan memiliki peluang ekspor yang tinggi di Jember.

Tabel 7.29 : Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Kopi Robusta di Kabupaten Jember, Tahun 2018

Kecamatan	Luas (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg)	Pemilik (Ruta)
	Tanaman Muda	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak			
1. Melaya	-	55.50	11.95	11.97	216	422
2. Negara	16.15	44.90	3.60	8.69	194	1,093
3. Jember	26.14	66.99	15.39	18.00	269	1,045
4. Mendoyo	37.95	648.80	92.65	174.14	268	3,307
5. Pekutatan	9.50	182.50	-	15.00	82	710
Jumlah 2018	89.75	998.69	123.59	227.80	228	6,577
2017	624,63	4 281,25	1 352,73	2 875,43	672	13 040
2016	624,63	4 281,25	1 352,73	2 849,79	666	13 040
2015	624,62	4 281,24	1 164,47	2 741,46	640	12 804
2014	932,77	4 490,94	803,25	3 000,32	668	13 040

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember dan Jember Dalam Angka Tahun 2018



Tabel 7.30 : Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Cengkeh di Kabupaten Jember, Tahun 2018

Kecamatan	Luas (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg)	Pemilik (Ruta)
	Tanaman Muda	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak			
1. Melaya	4.00	69.25	86.85	129	844	7,390
2. Negara	75.00	203.00	39.00	83	889	8,575
3. Jember	45.50	458.50	35.00	208	1,220	10,675
4. Mendoyo	-	1,789.05	64.65	221	3,934	35,711
5. Pekutatan	43.50	489.50	16.80	178	1,693	12,915
Jumlah 2018	168.00	3,009.30	242.30	604.65	201	8,580
2017	47,50	3 009,30	390,30	646,49	215	8 659
2016	167,50	3 009,55	269,80	682,86	227	8 659
2015	167,50	3 009,55	242,30	691,93	230	8 659
2014	15,20	3 235,85	195,80	785,36	243	8 659

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember dan Jember Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 7.31 : Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Pemilik Tanaman Panili di Kabupaten Jember, Tahun 2018

Kecamatan	Luas (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg)	Pemilik (Ruta)
	Tanaman Muda	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Tua/Rusak			
1. Melaya	0.10	2.85	6.20	0.040	14	116
2. Negara	-	1.25	4.91	0.028	22	70
3. Jember	-	2.52	2.15	0.020	8	65
4. Mendoyo	-	-	15.90	0.060	15	205
5. Pekutatan	-	2.91	3.88	0.010	3	170
Jumlah 2018	0.10	13.63	33.04	0.158	12	626
2017	-	13,63	33,04	0,022	9	626
2016	-	12,03	34,64	0,040	1	865
2015	-	12,03	34,64	0,020	1	865
2014	19,40	41,32	15,50	0,960	23	917

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember dan Jember Dalam Angka Tahun 2018

.3 Peternakan

Daerah potensial sebagai kawasan peternakan di Kabupaten Jember berkisar 32.421 Ha atau sekitar 38.51 % dari luas Wilayah Kabupaten Jember, yang terdiri dari daerah persawahan, perkebunan, tegalan dan lain sebagainya. Berbagai pepohonan seperti waru, bunut, nangka, rumput gajah rumput raja, rumput setaria dan rumput lapangan dapat tumbuh subur sebagai pakan ternak. Dengan kondisi yang demikian berbagai potensi ternak dapat berkembang di Kabupaten Jember yang terdiri dari ternak besar, kecil dan unggas.

7.3.1 Komoditas Peternakan



Untuk memudahkan dalam pendataan dan penerapan skala prioritas dalam perencanaan, komoditas yang dikelola di Bidang Peternakan Kabupaten Jember di kelompokkan menjadi 4 (empat)

kelompok yaitu :

- a. **Komoditas Strategis** adalah komoditas yang memegang kendali motivasi manusia yang paling mendasar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pakan hewani dari daging dan telur. Termasuk dalam komoditas strategis adalah Ayam Buras dan Ayam Ras Petelur
- b. **Komoditas Andalan** adalah komoditas yang dikembangkan di Kabupaten Jember sesuai dengan Agro Ekosistem (AES) dan menjadi komoditas sebagai penghasilan utama peternak. Termasuk dalam komoditas andalan adalah sapi, babi dan Ayam Broiler.
- c. **Komoditas Unggulan** adalah salah satu dari komoditas andalan yang paling menguntungkan untuk dikembangkan, mempunyai



prospek pasar, SDA yang cukup dan sifat-sifat unggul karakteristik. Seperti ternak sapi bali.

- d. **Komoditas Binaan** adalah komoditas yang terinventarisasi di Bidang Peternakan Kabupaten Jember. Termasuk di dalamnya adalah ternak kerbau, kambing, kuda, itik dan aneka ternak.

7.3.2 Perkembangan Ternak

Jumlah populasi ternak di tahun 2018 dari hasil pendataan Registrasi Ternak di Kabupaten Jember oleh para petugas peternakan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| a. Sapi | : | 31.252 ekor |
| b. Kerbau | : | 930 ekor |
| c. Kuda | : | 16 ekor |
| d. Kambing | : | 6.325 ekor |
| e. Babi Landrace Per | : | 14.444 ekor |
| f. Babi Sadle Back | : | 3.452 ekor |
| g. Babi Bali | : | 4.930 ekor |
| h. Ayam Ras Petelor | : | 35.925 ekor |
| i. Ayam Ras Pedaging | : | 806.801 ekor |
| j. Ayam Buras | : | 152.625 ekor |
| k. Itik | : | 47.761 ekor |
| l. Aneka Ternak | : | dengan rincian : |
| - Angsa | : | 167 ekor |
| - Merpati | : | 3.817 ekor |
| - Kalkun | : | 9 ekor |
| - Kelinci | : | 180 ekor |
| - Puyuh | : | 64 ekor |
| - Anjing | : | 24.596 ekor |

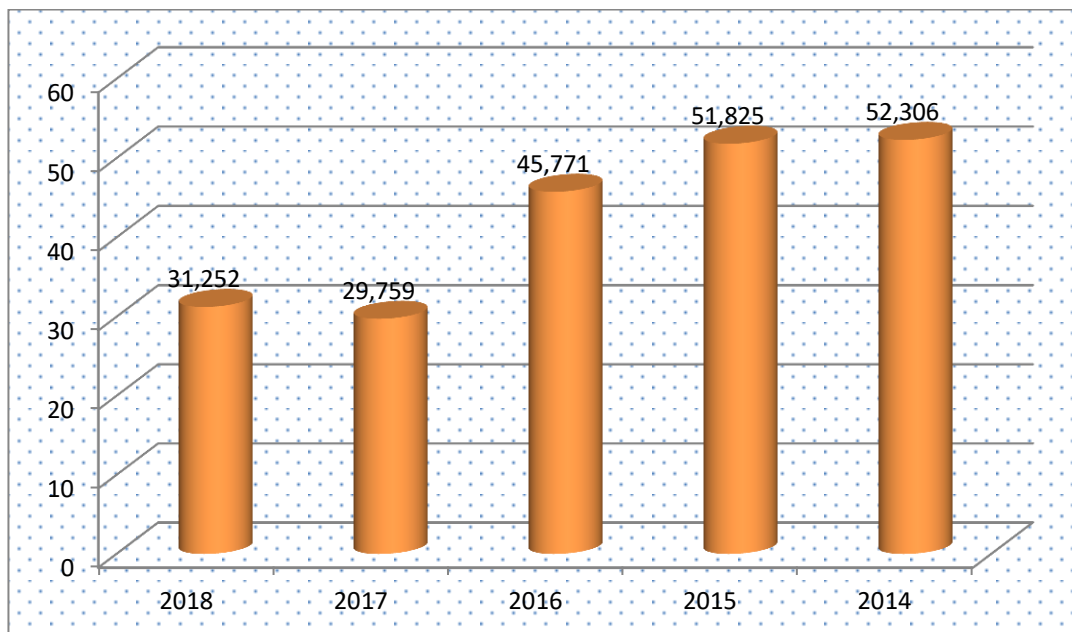
Gambaran lebih jelas perkembangan populasi per Kecamatan selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Tabel-tabel dibawah ini. Sementara itu, potensi areal untuk penanaman HMT adalah $\pm$ seluas : 32.687 Ha (38.82 %) dari luas wilayah Kabupaten Jember, dengan rincian: Lahan Sawah : 6.836 Ha (20.92 %) dan Lahan Pertanian Bukan Sawah seluas 25.851 Ha (79.08 %)

Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Jember disajikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 7.32 : Perkembangan Populasi Sapi Bali di Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

(ekor)												
Kecamatan	Sapi Bali Jantan					Sapi Bali Betina					Jumlah	
	Anak	Muda	Dewasa	Kebiri	Jumlah	Anak	Muda	Dewasa				Jumlah
								2-4 Tahun	5-6 Tahun	> 6 Tahun		
1. Melaya	902	358	390	3	1,653	1,269	820	1,574	4,217	2,838	10,718	12,371
2. Negara	490	225	258	6	979	663	883	1,633	2,045	1,432	6,656	7,635
3. Jembrana	400	144	227	13	784	650	438	1,223	1,156	1,164	4,631	5,415
4. Mendoyo	178	58	148	2	386	249	225	765	696	577	2,512	2,898
5. Pekutatan	155	91	89	2	337	330	362	534	626	744	2,596	2,933
Jumlah 2018	2,125	876	1,112	26	4,139	3,161	2,728	5,729	8,74	6,755	27,113	31,252
2017	2,329	883	970	39	4,221	3,488	3,066	5,101	7,913	5,97	25,538	29,759
2016	5,687	3,338	1,968	-	10,993	6,37	6,847	7,896	8,008	5,657	34,778	45,771
2015	6,751	3,326	2,292	-	12,369	7,126	9,787	8,28	8,368	5,895	39,456	51,825
2014	7,081	3,322	2,634	-	13,037	7,205	9,71	8,205	8,05	6,099	39,269	52,306
Pertumbuhan rata-rata (%)	-10.64											

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember , Tahun 2018



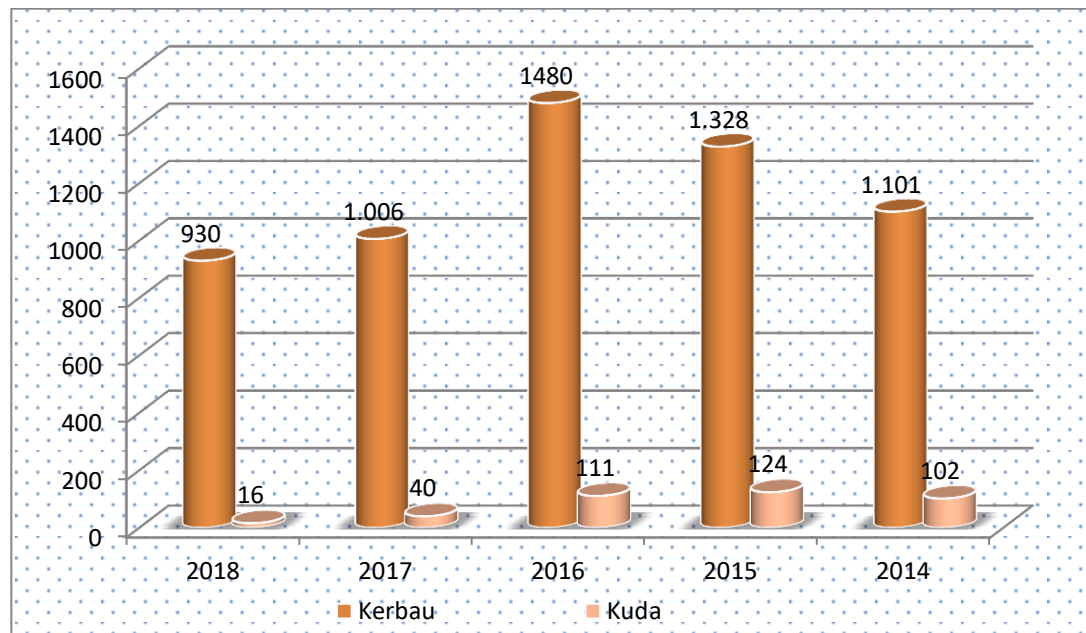
Gambar 7.13 : Perkembangan Populasi Sapi Bali di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Tabel 7.33 : Perkembangan Populasi Kerbau dan Kuda di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

(ekor)

Kecamatan	Kerbau Jantan					Kerbau Betina						Jumlah	Kuda		
	Anak	Muda	Dewasa	Kebiri	Jumlah	Anak	Muda	Dewasa			Jumlah		Jantan	Betina	Jumlah
								2-4 Tahun	5-6 Tahun	> 6 Tahun					
1. Melaya	4	47	168	6	225	8	4	22	8	66	108	333	2	-	2
2. Negara	2	36	74	74	186	-	6	14	25	13	58	244	6	-	6
3. Jembrana	-	18	75	8	101	1	2	2	7	4	16	117	4	-	4
4. Mendoyo	4	26	105	13	148	3	9	27	16	18	73	221	4	-	4
5. Pekutatan	2	1	2	-	5	3	-	5	1	1	10	15	-	-	-
Jumlah 2018	12	128	424	101	665	22	21	70	57	102	265	930	16	-	16
2017	9	128	304	212	653	22	41	109	100	81	353	1,006	40	-	40
2016	85	210	239	420	954	49	97	112	156	112	526	1,48	111	-	111
2015	83	232	169	375	859	28	102	86	148	105	469	1,328	124	-	124
2014	45	115	184	327	671	43	93	71	118	105	430	1,101	102	-	102
Pertumbuhan rata-		-1,88											-80,37		

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



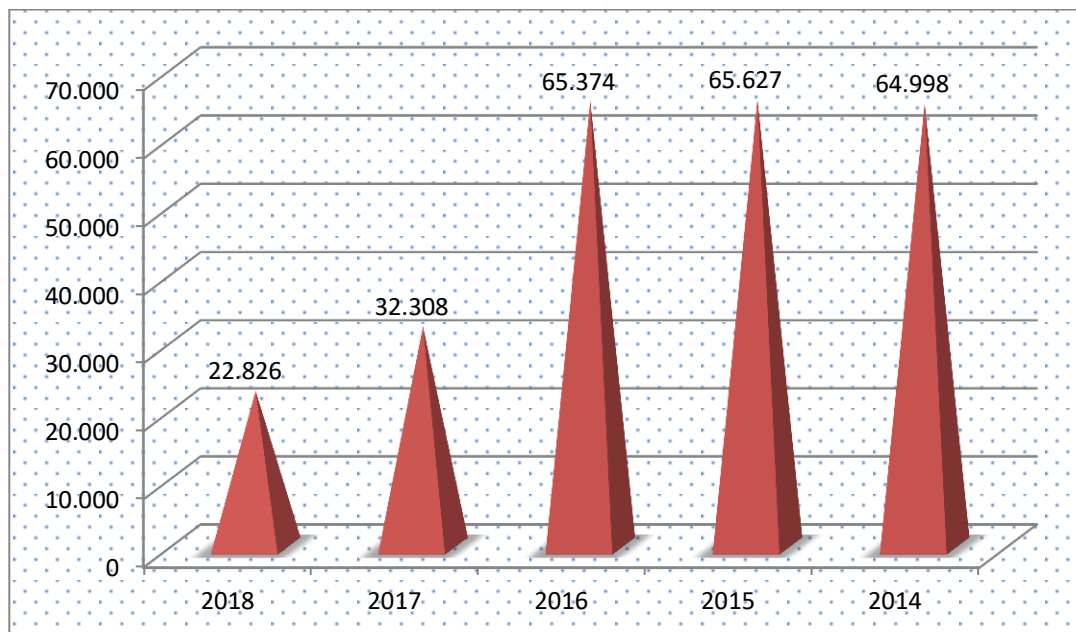
Gambar 7.14 : Perkembangan Populasi Kerbau dan Kuda di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Tabel 7.34 : Perkembangan Populasi Babi di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

(ekor)

Kecamatan	Bali, Babi Sandle Back Peranakan dan Babi Landrace Babi Persilangan							Jumlah
	Pejantan	Jantan Muda	Kebiri	Induk	Betina Muda	Kucit		
						Jantan	Betina	
1. Melaya	119	1.721	669	1.454	2.221	1.34	1.493	9.017
2. Negara	67	381	2.099	834	1.413	1.113	1.584	7.491
3. Jembrana	19	215	413	308	457	219	272	1.903
4. Mendoyo	50	313	837	427	778	482	699	3.586
5. Pekutatan	12	61	226	51	196	118	165	829
Jumlah 2018	267	2.691	4.244	3.074	5.065	3.272	4.213	22.826
2017	296	2.841	6.276	3.544	6.462	5.83	7.059	32.308
2016	408	1.677	15.686	4.923	9.131	17.365	16.184	65.374
2015	365	1.766	16.103	5.208	9.252	17.062	15.871	65.627
2014	370	1.682	16.834	5.348	9.646	15.024	16.094	64.998
Pertumbuhan rata-rata (%)		-19,84						

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



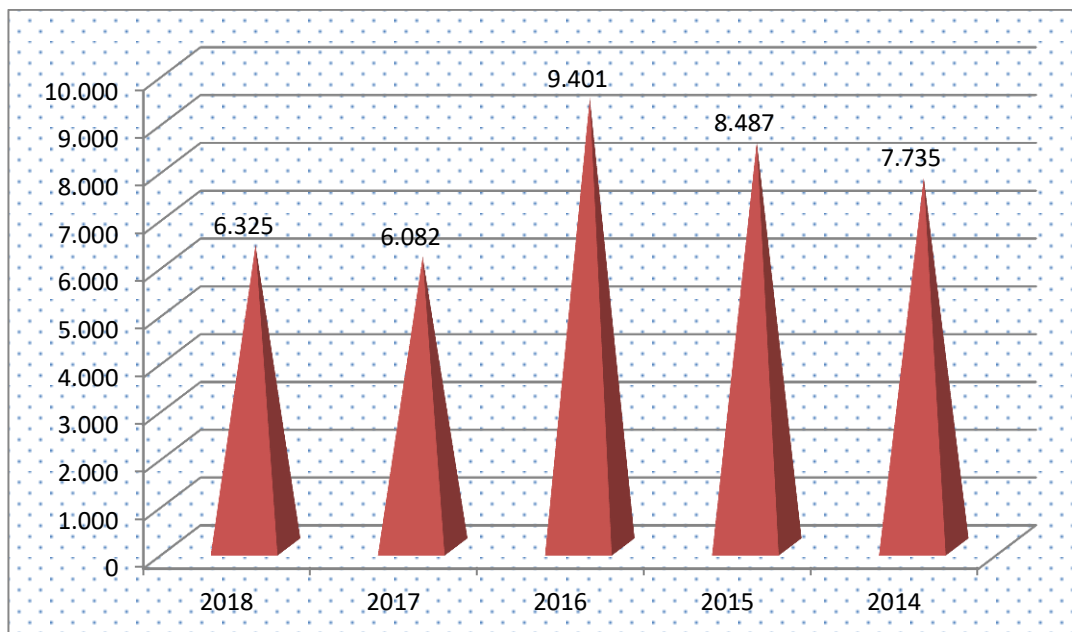
Gambar 7.16 : Perkembangan Populasi Babi
di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Tabel 7.35 : Perkembangan Populasi Kambing di Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

(ekor)

Kecamatan	Kambing						Jumlah
	Kacang			Peranakan Ettawa			
	Jantan	Betina	Jumlah	Jantan	Betina	Jumlah	
1. Melaya	86	220	306	104	323	427	733
2. Negara	261	716	977	165	401	566	1.543
3. Jembrana	70	197	267	117	479	596	863
4. Mendoyo	79	291	370	336	1.321	1.657	2.027
5. Pekutatan	42	68	110	349	700	1.049	1.159
Jumlah 2018	538	1.492	2.03	1.071	3.224	4.295	6.325
2017	387	904	1.291	1.296	3.495	4.791	6.082
2016	370	902	1.272	2.36	5.769	8.129	9.401
2015	531	1.032	1.563	2.105	4.819	6.924	8.487
2014	513	980	1.493	2.373	3.869	6.242	7.735
Pertumbuhan rata-rata	-2,70						

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



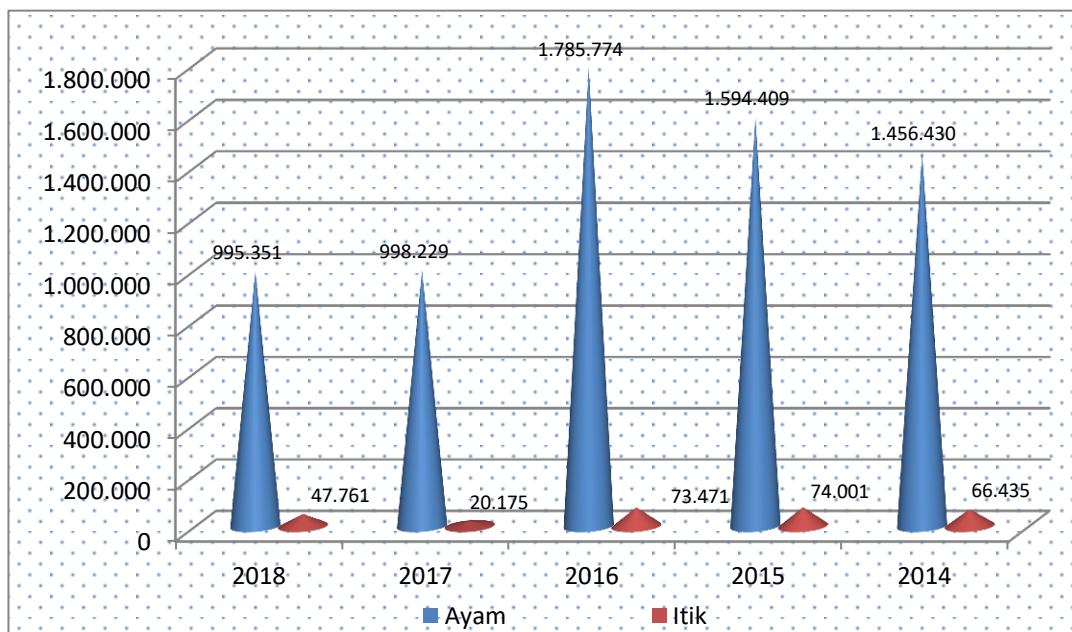
Gambar 7.17 : Perkembangan Populasi Kambing di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Tabel 7.36 : Perkembangan Populasi Ayam dan Itik di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

(ekor)

Kecamatan	Ayam				Itik			
	Bukan Ras	Ras Petelur	Ras Pedaging	Jumlah Ayam	Bali	Kakhi Campbell	Manila/ Kuir	Jumlah Itik
1. Melaya	43.528	15.472	470.643	529.643	1.518	-	148	1.666
2. Negara	31.258	14.122	83.524	128.904	691	24	366	1.081
3. Jember	21.949	607	25.081	47.637	12.012	30	249	12.291
4. Mendoyo	39.14	4.42	205.12	248.68	31.676	-	329	32.005
5. Pekutatan	16.75	1.304	22.433	40.487	677	-	41	718
Jumlah 2018	152.625	35.925	806.801	995.351	46.574	54	1.133	47.761
2017	243.028	28.58	726.621	998.229	18.144	43	1.988	20.175
2016	619.174	38.5	1.128.100	1.785.774	26.837	39.65	6.984	73.471
2015	637.309	36	921.1	1.594.409	27.288	39.65	7.063	74.001
2014	651.43	18	787	1.456.430	28.322	30.455	7.658	66.435
Pertumbuhan rata-rata (%)	-7,95				18,72			

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



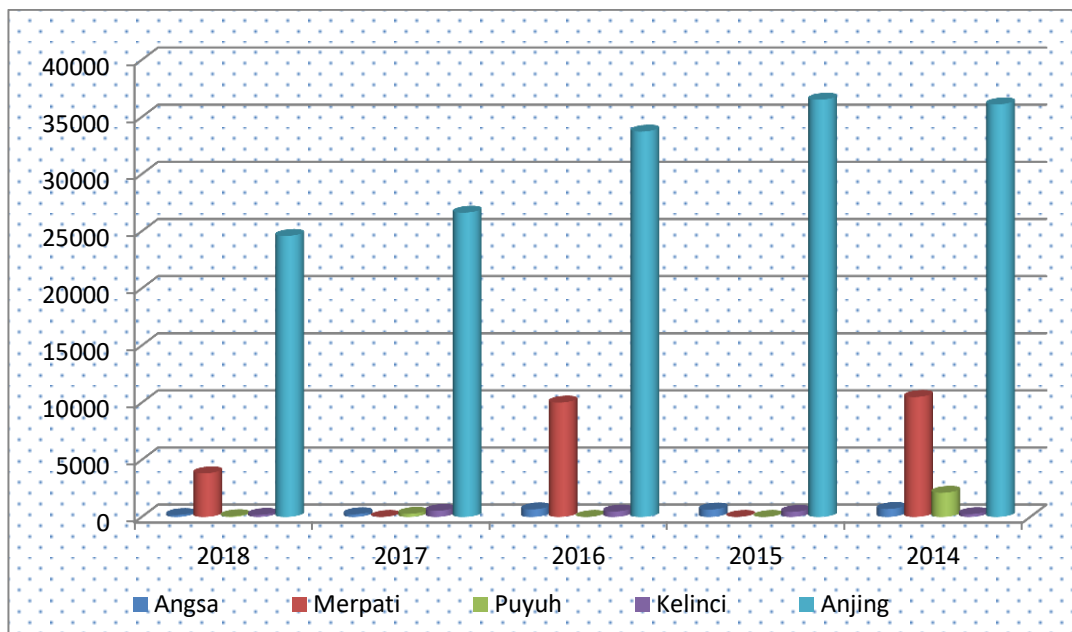
Gambar 7.18 : Perkembangan Populasi Ayam dan Itik di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Tabel 7.37 : Perkembangan Populasi Aneka Ternak di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

(ekor)

Kecamatan	Aneka Ternak					
	Angsa	Merpati	Kalkun	Puyuh	Kelinci	Anjing
1. Melaya	63	762	-	2	39	6.35
2. Negara	39	861	2	60	14	5.353
3. Jember	33	772	-	2	15	3.786
4. Mendoyo	31	1.354	3	-	96	5.611
5. Pekutatan	1	68	4	-	16	3.496
Jumlah 2018	167	3.817	9	64	180	24.596
2017	239	4.03	15	276	534	26.631
2016	664	10.007	4	3.1	476	33.724
2015	647	10.32	-	3.1	445	36.517
2014	698	10.498	-	2.114	246	36.105

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



Gambar 7.20 : Perkembangan Populasi Aneka Ternak di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Tabel 7.38 : Kepadatan Ternak Per Km² di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Komoditas						
		Sapi	Kerbau	Kuda	Babi	Kambing	Ayam	Itik
1. Melaya	197,19	62,74	1,69	0,01	45,73	3,72	2.685,95	8,45
2. Negara	126,5	60,36	1,93	0,05	59,22	12,2	1.019,00	8,55
3. Jember	93,97	57,62	1,25	0,06	20,25	9,18	506,94	130,8
4. Mendoyo	294,49	9,84	0,75	0,01	12,18	6,88	844,44	108,68
5. Pekutatan	129,65	22,62	0,12	-	6,39	8,94	312,28	5,54
Jumlah 2018	841,8	37,13	1,1	0,02	27,12	7,51	1.182,41	56,74
2017	841,8	35,35	1,2	0,05	38,38	7,22	1.18.83	23,97
2016	841,8	61,56	1,58	0,18	77,71	11,17	2.121,38	87,28
2015	841,8	62,34	1,31	0,19	77,96	10,44	1.894,05	87,91
2014	841,8	61,79	1,2	0,14	77,21	9,19	1.730,14	78,92

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018

7.3.3 Produksi Ternak

Produksi Terbak meliputi : daging terutama dihasilkan dari jenis ternak sapi, babi, dan ayam Telur dihasilkan oleh Unggas (ayam dan itik) , Masing-masing disajikan pada Tabel Berikut.

Tabel 7.39 : Produksi Daging di Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

(Ton)

Kecamatan	Produksi Daging							
	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
1. Melaya	1.529,14	40,77	25,55	783,09	45,05	7,66	600,58	0,82
2. Negara	1.190,60	31,56	118,51	1.487,77	32,35	6,99	284,15	0,54
3. Jember	669,33	14,33	111,32	1.410,90	22,72	0,3	204,32	6,08
4. Mendoyo	358,21	27,06	31,59	1.293,68	40,51	2,19	340,98	15,84
5. Pekutatan	362,54	1,84	23,22	983,32	17,34	0,65	167,24	0,36
Jumlah 2018	4.109,82	115,55	310,17	5.958,76	157,97	17,78	1.597,27	23,64
2017	3.979,51	123,18	12,96	432,73	251,53	14,15	719,35	9,99
2016	5.847,37	198,11	20,04	944,56	641,05	18,56	908,92	36,37
2015	6.405,89	164,12	18,69	87,74	713,29	13,77	653,2	27,56
2014	6.465,36	136,09	16,48	870	713,3	13,76	653,21	27,57

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018

Tabel 7.40 : Produksi Telur di Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

(Ton)

Kecamatan	Telur			
	Ayam Buras	Ayam petelur	Itik	Jumlah
1. Melaya	31.32	122.28	8.96	162.56
2. Negara	21.51	111.61	5.81	138.93
3. Jember	15.12	4.80	66.11	86.02
4. Mendoyo	26.96	34.93	172.14	234.03
5. Pekutatan	11.54	10.31	3.86	25.70
Jumlah 2018	106.44	283.92	256.88	647.24
2017	167.31	225.87	108.51	501.69
2016	619.17	37.50	73.47	730.14
2015	438.50	181.87	397.99	1018.36
2014	0.20	142.38	357.31	499.89
Pertumbuhan rata-rata (%)		18,28		

Sumber : Profile Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Jember Tahun 2018



7.4 Kehutanan

Secara kondisi, Bali merupakan Ekosistem Pulau maka didalam manajemen Pengelolaan Ekosistem harus berorientasi pada **"Satu Kesatuan Manajemen"** yaitu pengelolaan DAS Unda Anyar. Satu Kesatuan Manajemen mengandung arti bahwa, sistem pengelolaan hutan disetiap wilayah kabupaten memiliki keterkaitan dan kesinambungan dengan pengelolaan hutan di wilayah kabupaten lain. Pengelolaan Hutan tidak dapat dilaksanakan secara parsial karena ekosistem tidak dipisahkan oleh batas administratif, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam kelestarian hutan. Skala prioritas pengelolaan Hutan di Bali menekankan pada 3 hal pokok, dimana prinsip yang utama yaitu prinsip Ekologi, kemudian prinsip Sosial selanjutnya berorientasi Ekonomi, baik ekonomi daerah maupun ekonomi masyarakat penyanggah hutan. Atas prinsip pengelolaan tersebut, maka luas hutan yang berfungsi perlindungan yaitu Hutan Lindung dan Hutan Konservasi memiliki porsi luasan yang lebih besar.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.632,86 km², sedangkan luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali adalah 127.271,01 Ha atau 23,20 % dari luas Pulau Bali yang terdiri dari 22 Kelompok Hutan dan 29 Register Tanah Kehutanan (RTK). Dari seluruh luas kawasan hutan di Bali 93 % memiliki fungsi konservasi terhadap tanah atau sebagai fungsi hidroorologis. Tipe hutan yang tumbuh di Provinsi Bali sebagian besar tipe hutan hujan tropik. Selain ditumbuhi flora yang beraneka ragam. Pulau Bali memiliki fauna khas endemik yaitu Burung Jalak Bali yang habitatnya terdapat di Kawasan Taman Nasional Bali Barat, dimana sebagian dari kawasan ini berada di wilayah administrasi Kabupaten Jember. Karena kekhasannya, burung ini kemudian dijadikan sebagai maskot Provinsi Bali.



Kawasan Hutan di Kabupaten Jembrana berada pada kelompok Hutan Yeh Leh - Yeh Lebah (RTK 12) seluas 2.813,00 Ha dan Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19) seluas 38.494,27 Ha. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Jembrana adalah 41.307,27 Ha atau 7,48 % dari Luas Pulau Bali; atau 31,61 % dari luas Kawasan Hutan Pulau Bali; atau 49,07 % dari luas daratan Kab. Jembrana. Kawasan Hutan hampir 80,471 % berupa Kawasan fungsi Lindung.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana kawasan tersebut disepakati dipertahankan sebagai Penyangga Sistem Kehidupan wilayah dibawahnya atau daerah hilir. Dalam pembangunan sektor ekonomi, pertanian sebagai tulang punggung pembangunan bidang ekonomi sangat tergantung pada kondisi tata lingkungan dan tata air serta kelestarian ekosistem wilayah hulu sebagai sarana pendukung produksi. Oleh sebab itu kelestarian wilayah hulu mutlak dipertahankan. Kondisi saat ini diperkirakan sekitar 30 - 40 % Hutan di wilayah hulu Jembrana dalam keadaan rusak akibat adanya usaha illegal perubahan fungsi terhadap keberadaan fungsi Hutan tersebut, hal ini terjadi sebagian besar pada Hutan fungsi lindung di Jembrana. Menurut fungsinya kawasan hutan di Provinsi Bali terbagi atas :

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| 1) Hutan Lindung | : | 95.766,06 Ha |
| 2) Hutan Produksi Tetap | : | 1.907,10 Ha |
| 3) Hutan Produksi Terbatas | : | 6.719,26 Ha |
| 4) Hutan Cagar Alam | : | 1.762,80 Ha |
| 5) Taman Wisata | : | 4.154,40 Ha |
| 6) Taman Nasional Bali Barat | : | 15.587,89 Ha |
| 7) Taman Hutan Raya Ngurah Rai | : | 1.373,50 Ha |

Berdasarkan pembagian fungsi kawasan hutan tersebut, 35% kawasan Hutan Lindung berada di Kabupaten Jembrana. Kemudian, 35%

Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Bali juga berada di Kabupaten Jember. Disamping kawasan tersebut, ekosistem di Jember memiliki kekhasan yang tidak dimiliki di kabupaten lain, yaitu ekosistem Taman Nasional Bali Barat (32% berada di wilayah Jember).

Kawasan Hutan Jember didominasi oleh dataran tinggi berupa pegunungan yang termasuk sebagai Kawasan Hutan fungsi Lindung. Di bagian utara wilayah Kabupaten Jember mempunyai morfologi dan fisiografi pegunungan yang dibentuk oleh deretan pegunungan Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Ketinggian tempat bervariasi antara 250 – 700 m dpl. Sedangkan di bagian selatan wilayah Kabupaten Jember topografinya relatif datar hingga bergelombang, ketinggian tempat ini berkisar antara 1 – 250 m dpl. Sedangkan di bagian selatan terdiri atas dataran rendah berupa Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Savana, dan Hutan Mangrove dan Pantai.

Tabel 7.41 : Titik ketinggian Tempat di Kabupaten Jember

Kecamatan	Terendah (dpl)	Lokasi	Tertinggi (dpl)	Lokasi
Melaya	3	Gilimanuk, Melaya, Nusa Sari, Ekasari	699	Manistutu, Melaya
Negara	1	Cupel, Pengambengan, Loloan Barat, Lelateng, Baluk, Brangbang	585	Baler Bale Agung
Jember	1	Perancak, Loloan Timur, Timur, Yeh Kuning, Air Kuning	483	Dangin Tukaddaya
Mendoyo	1	Tegalcangkring, Penyaringan, Yeh Embang Kauh, Yeh Embang, Yeh Embang Kangin	700	Yeh Embang, Yeh Embang Kauh, Yeh Embang Kangin
Melaya	1	Pengeragoan	669	Pengeragoan

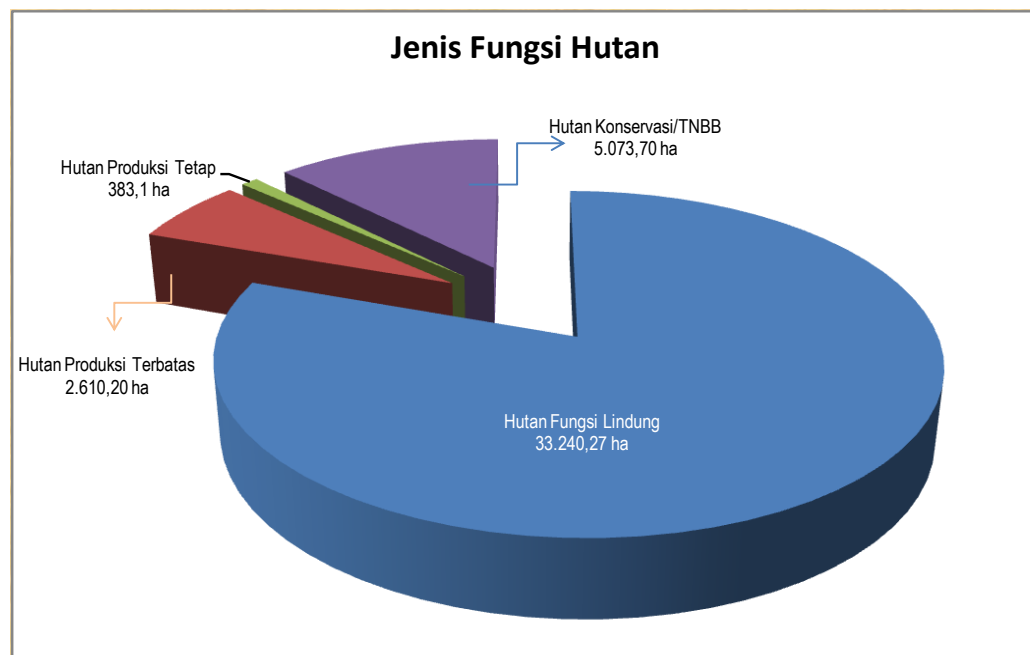
Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2018

Kawasan Hutan di Kabupaten Jember berada pada kelompok Hutan Yeh Leh Yeh Lebah (RTK 12) seluas 2.813,00 Ha dan Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19) seluas 38.494,27 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.42 ; Luas Hutan Di Kabupaten Jember Menurut Fungsinya

No.	Jenis Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan Fungsi Lindung	33.240,27	80,471
2.	Hutan Produksi Terbatas	2.610,20	6,319
3.	Hutan Produksi Tetap.	383,10	0,927
4.	Hutan Konservasi/TNBB	5.073,70	12,283
	Jumlah	41.307,27	

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019



Gambar 7.20 : Luas Hutan Di Kabupaten Jember Menurut Fungsinya

Tabel 7.43 : Luas Kawasan Hutan berdasarkan Fungsinya per Kecamatan

No	Kecamatan	Kelompok Hutan	No. RTK		Fungsi Hutan (Ha)			Jumlah
				Hutan Lindung	Hutan Produksi		Tanah Negara	
					Tetap	Terbatas		
1	Melaya	Bali Barat	19	7.945,50	383,10	2.610,20	5.339,00	16.277,80
2	Negara	Bali Barat	19	2.778,00	-	-	-	2.778,00
3	Mendoyo	Bali Barat	19	16.851,47	-	-	-	16.851,47
4	Pekutatan	Bali Barat	19	2.813,00	-	-	-	2.813,00
		Yeh Leh-Yeh Lebah	12	2.587,00	-	-	-	2.587,00
Jumlah				32.974,97	383,10	2.610,20	5.339,00	41.307,27

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019

Wilayah Kabupaten Jember terbagi dalam 2 wilayah Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS yaitu :

Tabel 7.44 : Pembagian wilayah pengelolaan DAS

SWP DAS	Kecamatan	Luas (ha)	Total Luas (ha)
Klatikan Lubang	Melaya	17.138	46.963
	Negara	22.047	
	Mendoyo	7.778	
Bilik Poh Gumbrih	Mendoyo	21.621	33.913
	Pekutatan	12.292	

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019

Tabel 7.45 : Pembagian Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

No.	SWP DAS	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Klatikan Lubang	a. Melaya	
		- Blimbingari	425,00
		- Candikusuma	679,00
		- Ekasari	1.395,00
		- Gilmanuk	3.169,00
		- Manistutu	1.908,00
		- Melaya	6.074,00
		- Nusasari	788,00
		- Tukadaya	1.367,00
		- Tuwed	890,00
		- Warnasari	443,00
		Jumlah	17.138,00



No.	SWP DAS	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
		b. Negara	
		- Air Kuning	271,00
		- Baler Bale Agung	997,00
		- Banjar Tengah	1.055,00
		- Banjar Tengah	498,00
		- Banyubiru	939,00
		- Batu Agung	1.878,00
		- Berangbang	3.913,00
		- Budeng	596,00
		- Cupel	640,00
		- Dangin Tukadaya	1.848,00
		- Dauh Waru	1.076,00
		- Kaliakah	1.799,00
		- Lelateng	629,00
		- Loloan Barat	147,00
		- Loloan Timur	434,00
		- Pendem	1.972,00
		- Pengambangan	1.030,00
		- Perancak	374,00
		- Sangkar Agung	527,00
		- Tegal Badeng Barat	402,00
		- Tegal Badeng Timur	601,00
		- Yeh Kuning	421,00
J u m l a h			22.047,00
		c. Mendoyo	
		- Delodberawah	120,00
		- Mendoyo Dangin Tukad	314,00
		- Mendoyo Dauh Tukad	1.931,00
		- Pergung	1.751,00
		- Poh Santen	3.050,00
		- Tegalcangkring	612,00
J u m l a h			7.778,00
T o t a l (1)			46.963,00
2.	Biluk Poh Gumbrih	a. Mendoyo	
		- Delodberawah	149,00
		- Penyaringan	5.062,00
		- Pergung	349,00
		- Tegalcangkring	1.622,00
		- Yeh Embang	3.549,00
		- Yeh Embang Kangin	4.579,00
		- Yeh Embang Kauh	2.031,00
		- Yeh Sumbul	4.280,00
J u m l a h			21.621,00
		b. Pekutatan	
		- Asah Duren	613,00
		- Gumbrih	1.627,00



No.	SWP DAS	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
		- Manggis Sari	895,00
		- Medewi	677,00
		- Pangyangan	1.179,00
		- Pekutatan	1.662,00
		- Pengeragoan	2.091,00
		- Pulukan	3.548,00
J u m l a h			12.292,00
T o t a l (2)			33.913,00
T o t a l (1 + 2)			80.876,00

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019

Penggunaan lahan di DAS Biluk Poh Gumbrih dan Sub DAS Klatakan Lubang dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 7.46 : Pengelolaan DAS di Biluk Poh Gumbrih dan Sub DAS Klatakan Lubang

SWP Das	Biluk Poh Gumbrih	Klatakan Lubang
Hutan Lahan Kering Primer	16.499	11.713
Hutan Lahan Kering Sekunder	18.902	6.225
Hutan Mangrove Primer	-	94
Hutan Tanaman	-	1.064
Lahan Pertanian Campuran	6.325	17.715
Lahan Pertanian Kering	245	3.141
Pemukiman	101	1.090
Perkebunan	3.896	1.793
Sawah	1.760	3.863
Semak/belukar	143	-
Lahan Terbuka	-	81
Tambak	-	20
Savana	-	74
Tubuh Air	-	119

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019



7.4.1 Degradasi Kawasan Hutan Di Jember

Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Jember dilatarbelakangi sejarah kehutanan di Kabupaten Jember itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada masa dekade lampau sekitar Tahun 1970-an, jauh sebelum program Pemetaan, Penunjukkan, Penataan Batas, dan Penetapan Kawasan Hutan Negara masyarakat Penyanding Hutan telah melakukan kegiatan pemanfaatan Hutan yg akan ditetapkan sebagai Hutan Negara (sejak 1940-an). Antara kurun waktu 1970 s/d 1985, hasil dari kegiatan pemanfaatan Hutan secara illegal berupa Kopi, juga dilakukan pemungutan retribusi sebagai sumber PAD oleh Pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya dilakukan proses Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), TGH Padu Serasi Kawasan Hutan Tetap dengan dasar Rencana Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Jember.

Selanjutnya pada dekade euforia Reformasi (pasca Tahun 1998), sebagian Kawasan Hutan Lindung dialihfungsikan dan dikerjakan secara illegal menjadi areal penanaman tanaman budidaya produktif, dengan dalih Sosial, Ekonomi, dan Politis. Sedangkan konsep Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada saat itu juga belum mantap. Jenis tanaman yang diusahakan antara lain coklat, kopi, cengkeh, pisang, durian, nangka, dan lain-lain. Kondisi tersebut telah menjadi sumber isu kecemburuan sosial bagi kelompok masyarakat lainnya yang berdampak pada pembenaran terhadap apa yang dilakukan tidak begitu salah. (*studi kasus RTK 12 dan 19 RPH Pulukan*).

Degradasi Kawasan Hutan di Kabupaten Jember ditandai dengan munculnya Hutan Sekunder sebagaimana tabel di bawah. Berdasarkan tabel di bawah, diperkirakan sekitar 12.193,31 ha lahan Kawasan Hutan di Jember pernah atau sedang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh

illegal logging, perambahan/pengawenan, kebakaran hutan, pengembalaan liar, dan kerusakan oleh daya-daya alam lainnya. Kerusakan Kawasan Hutan tersebut, sebagian besar disebabkan oleh perilaku perambahan/pengawenan, pengembalaan ternak, dan illegal logging.

Tabel 7.47 : Kondisi Penutupan Lahan Kawasan Hutan Kabupaten Jember

Kelas Penutupan Lahan	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi Tetap (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)
Hutan Lahan kering primer	19.139,48	0,05	-
Hutan Lahan kering sekunder	12.193,31	40,63	392,81
Hutan Tanaman	-	259,85	234,80
Semak/Belukar	120,42	-	1.917,25
Perkebunan	10,95	-	-
Pemukiman	7,07	-	8,81
Tubuh Air	0,20	1,77	-
Pertanian Lahan kering	174,65	43,73	36,31
Pertanian Lahan kering campur	1.327,82	36,04	20,22
Sawah	1,08	1,03	-
Jumlah	32.974,97	383,10	2.610,20

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019

7.4.2 Potensi Flora Dan Fauna

Kabupaten Jember khususnya Kawasan Hutannya memiliki berbagai macam kekayaan Sumber Daya Alam Hayati yang sangat besar. Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah habitat asli Burung Jalak Bali yang tergolong langka dan juga menjadi daerah persinggahan dari imigrasi kawanan burung.



Tabel 7.48 : Daftar Satwa Yang Terdapat di Kabupaten Jember

No.	Jenis	Nama Latin	Penyebaran	Keterangan
A.	Mamalia			
1	Banteng	<i>Bos sondaicus</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
2	Rusa	<i>Cervus spp</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
3	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
4	Kucing Hutan	<i>Felis bengalensis</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
5	Landak	<i>Hystrixbrachyura</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
6	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
7	Babi Hutan	<i>Babyrausa babyrausa</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
8	Kera Hitam/ Lutung	<i>Trachypithecus auratus</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
B.	Aves			
9	Jalak Bali	<i>Leucopsar rotschildi</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
10	Jalak Putih	<i>Sturnus melaneptorus</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
11	Elang Bendol	<i>Haliatur indicus</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
12	Elang Brontok	<i>Spizaetus cirrtatus</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
13	Elang Ular	-	TN Bali Barat	Dilindungi
14	Elang Australia	-	TN Bali Barat	Dilindungi
15	Alap-alap	<i>Accipitridae</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
16	Julang/Rangkong	<i>Rhyticeros undulatus</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
17	Beo	<i>Gracula religiosa</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
18	Kuntul Karang	<i>Enggreta sacra</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
19	Kuntul	<i>Enggreta spp</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
20	Burung Kipas	<i>Rhipidura javanica</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
21	Raja Udang	<i>Aclidinide</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
22	Puyuh	<i>Turnik sylvanica</i>	TN Bali Barat	Tidak dilindungi
23	Pelatak	<i>Piciclae</i>	TN Bali Barat	Dilindungi
C.	Reptil			
24	Penyu Belimbing	<i>Dermochelys coriacea</i>	Perancak, Air Kuning	Dilindungi
25	Penyu Sisik	<i>Eretmochelys imbricita</i>	Perancak, Air Kuning	Dilindungi
26	Penyu Hijau	<i>Chelonia midas</i>	Perancak, Air Kuning	Dilindungi
27	Penyu Lekang	<i>Lepidochelys clivacea</i>	Perancak, Air Kuning	Dilindungi
28	Burung Srigunting	<i>Dicruridae</i>	Perancak, Air Kuning	Dilindungi

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019

Sedangkan jenis flora yang ada di Kabupaten Jember antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.49 : Kekayaan flora di Kabupaten Jember

No.	Jenis	Nama Latin	Penyebaran
1.	Kepah	<i>Sterculia foetida</i>	Hutan Lindung
2.	Bungur	<i>Lagerstromia speciosa</i>	Hutan Lindung
3.	Ceremai	<i>Phyllanthus acidus</i>	Hutan Lindung
4.	Pangi	<i>Pangium adule</i>	Hutan Lindung
5.	Kleco	<i>Dyospyros ambryopteria</i>	Hutan Lindung
6.	Mundu	<i>Garcinia mulnis</i>	Hutan Lindung
7.	Kawista	<i>Ferrenia lucida</i>	Hutan Lindung
8.	Sentul/Kecapi	<i>Sandoricum koetjapi</i>	Hutan Lindung
9.	Sawo Kecil	<i>Manilkara kauki</i>	Hutan Lindung
10.	Sawo durian	<i>Cryosophylum cainito</i>	Hutan Lindung
11.	Ganetri	<i>Elaeocarpus cainito</i>	Hutan Lindung
12.	Klerak/rerak	<i>Sapndus rarak</i>	Hutan Lindung
13.	Pule	<i>Alstonia scholaris</i>	Hutan Lindung
14.	Kepuh/Randu Alas	<i>Bombax malaborium</i>	Hutan Lindung
15.	Ki Malaka	<i>Phyllanthus emblica</i>	Hutan Lindung
16.	Wangkal/Weru	<i>Albizia precera</i>	Hutan Lindung
17.	Bayur	<i>Pterospermum diversifolium</i>	Hutan Lindung
18.	Matoa	<i>Pometia pinata</i>	Hutan Lindung
19.	Buni	<i>Antidesma bunisus</i>	Hutan Lindung
20.	Kenari Babi	<i>Canarium decumarum</i>	Hutan Lindung
21.	Sonokeling	<i>Dalbergia latifolia</i>	Hutan Lindung
22.	Cendana	<i>Santalum album</i>	Hutan Lindung
23.	Nagasari	<i>Mesua ferica</i>	Hutan Lindung
24.	Jeruk kinkit	<i>Tripasia trifolia</i>	Hutan Lindung
25.	Kesambi	<i>Scheiliseria oleosa</i>	Hutan Lindung
26.	Kecibeling	<i>Hemigraphis alternata</i>	Hutan Lindung
27.	Banglo	<i>Zingiber cassumunar</i>	Hutan Lindung
28.	Ganyong	<i>Canna edulis</i>	Hutan Lindung
29.	Kentang Jawa	<i>Callus tuberosus</i>	Hutan Lindung
30.	Suweg	<i>Amorphalus campanalatus</i>	Hutan Lindung
31.	Jenis-jenis temu	<i>Curcuma spp</i>	Hutan Lindung
32.	Katuk	<i>Sauropus androgyras</i>	Hutan Lindung
33.	Kelor	<i>Moringa oliefera</i>	Hutan Lindung
34.	Kluwih	<i>Artocarpus altelis</i>	Hutan Lindung
35.	Selada Air	<i>Hasturtium officinale</i>	Hutan Lindung



No.	Jenis	Nama Latin	Penyebaran
36.	Semanggi	<i>Marselia oreonata</i>	Hutan Lindung
37.	Kemiri	<i>Aleurites mellacana</i>	Hutan Lindung
38.	Pala	<i>Myristica fragrans</i>	Hutan Lindung
39.	Pandan wangi	<i>Pandanus amayllifolius</i>	Hutan Lindung
40.	Bambu betung	<i>Dendrocalamus amaryllifolius</i>	Hutan Lindung
41.	Cempaka gondok	<i>Michelia sp</i>	Turus Jalan
42.	Cempaka kuning	<i>Michelia champaka</i>	Turus Jalan
43.	Cempaka putih	<i>Michelia alba</i>	Turus Jalan
44.	Sandat	<i>Canarium douratum</i>	Hutan Lindung
45.	Kemuning	<i>Murraya paniculata</i>	Hutan Lindung
46.	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>	Hutan Lindung
47.	Badung	<i>Garcinia sp</i>	Hutan Lindung
48.	Majegau	<i>Dysoxylum densiflorum</i>	Hutan Lindung
49.	Tanjung	<i>Mimosops elengii</i>	Hutan Lindung
50.	Cemara pandak	<i>Podocarpus imbricatus</i>	Hutan Lindung
51.	Pala Jiwa	<i>Eugenia sp</i>	Hutan Lindung
52.	Purna Jiwa	<i>Eugenia sp</i>	Hutan Lindung
53.	Utu	<i>Paratocarpus sp</i>	Hutan Lindung
54.	Kepundung	<i>Baccaurea</i>	Hutan Lindung
55.	Bambu hitam	<i>Gigantochloa atter</i>	Hutan Lindung
56.	Bambu kuning	<i>Bambusa vulgaris</i>	Hutan Lindung
57.	Kayu Suar	<i>Albizia sp</i>	Hutan Lindung
58.	Kepelan	<i>Stelechocharpus burahol</i>	Hutan Lindung
59.	Wani	<i>Mangifera caesia</i>	Hutan Lindung
60.	Kluwih	<i>Artocarpus altelis</i>	Hutan Lindung
61.	Bunut	<i>Ficus indica</i>	Hutan Lindung
62.	Waru	<i>Hibiscus tiliacculus</i>	Hutan Lindung
63.	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>	Hutan Lindung
64.	Jati	<i>Tectona grandis</i>	Hutan Lindung
65.	Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i>	Hutan Lindung
66.	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>	Hutan Lindung
67.	Kejimas		Hutan Lindung
68.	Trembesi	<i>Samanea saman</i>	Turus jalan
69.	Bentawas		Tukadaya
70.	Glodok		Turus jalan
71.	Ketapang	<i>Terminalia catapa</i>	Pantai
72.	Nipah		Budeng
73.	Pandan laut		Penyaringan, Cupel
74.	Nyamplung	<i>Barringtonia speciosa</i>	Cupel, Perancak
75.	Dapdap laut		Cupel, Perancak
76.	Waru Lengis		Cupel, Perancak

No.	Jenis	Nama Latin	Penyebaran
77.	Api-api	<i>Avicenia marina</i>	Perancak, Tuwed, Gilimanuk
78.	Bakau	<i>Rhizophora apiculata</i>	Perancak, Tuwed, Gilimanuk
79.	Bakau	<i>Rhizophora mucronata</i>	Perancak, Tuwed, Gilimanuk
80.	Bakau	<i>Rhizophora stylosa</i>	Perancak, Tuwed, Gilimanuk
81.	Ceriops	<i>Ceriops decandra</i>	Perancak, Tuwed, Gilimanuk
82.	Kwanitan		Hutan Lindung
83.	Kayu hitam	<i>Dyospyros sebbica</i>	Melaya

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019

7.4.3 Kekritisan Lahan

Sesuai SK Gubernur Bali Nomor : 1030/02-C/HK/2014 tentang Luasan Lahan Kritis di Provinsi Bali Tahun 2013, lahan kritis di Provinsi Bali seluas 44.669,78 hektar, dimana seluas 16.323,68 hektar berada di Dalam Kawasan Hutan dan 28.346,10 hektar berada di Luar Kawasan Hutan. Selanjutnya, berdasarkan laporan review lahan kritis di Wilayah DAS Unda Anyar / Provinsi Bali Tahun 2013, tingkat kekritisan lahan di Kabupaten Jember Tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel 7.50 : Tingkat Kekritisan Lahan di Kabupaten Jember

Tingkat Kekritisan	Kawasan Hutan (Ha)			Luar Kawasan Hutan (Ha)			Jumlah (Ha)
	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Jumlah	Hutan Lindung	Budidaya Pertanian	Jumlah	
Tidak Kritis	23.879,82	142,11	24.021,93	-	31.712,62	31.712,62	55.734,55
Potensial Kritis	9.572,59	307,49	9.880,08	-	9.187,63	9.187,63	19.067,71
Agak Kritis	4.633,22	2160,6	6.793,82	-	2.200,82	2.200,82	8.994,64
Kritis	-	383,1	383,10	-	-	-	383,10
Sangat Kritis	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	38.085,63	2.993,30	41.078,93	0,00	43.101,07	43.101,07	84.180,00

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019

7.4.4 Penghijauan Di Luar Kawasan Hutan

Untuk memperkecil luasan lahan kritis termasuk mangrove, pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan berbagai kegiatan reboisasi dan penghijauan, antara lain melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Gerakan Penanaman Nasional (Gerakan Penanaman 1 Milyar Pohon, *One Man One Tree* dan sebagainya), serta kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBD Kabupaten Jember. Kegiatan penghijauan di luar kawasan hutan di Kabupaten Jember tahun 2015, telah dilaksanakan seluas 1.629 hektar, dengan jumlah tanaman sebanyak 460.600 pohon. Dengan demikian, kekritisan lahan yang termasuk dalam kategori kritis, agak kritis dan potensial kritis di Kabupaten Jember dapat ditekan menjadi 54,93% atau seluas 6.783 hektar, sehingga luas lahan potensial kritis di Kabupaten Jember menjadi 5.566 hektar dari luas lahan potensial kritis 12.350 hektar. Data kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Jember pada tabel berikut.

Tabel 7.51 : Data Kegiatan Reboisasi Dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Jember

TAHUN	Luas PK/AK (hektar)	Rehabilitasi LK/PK/AK (hektar)	Prosentase Penurunan Tahun Berjalan (%)	Prosentase Penurunan Tahun Berjalan (%)	Keterangan
2008	12.350,00	99,76	0,81	0,81	Data Luas Lahan Kritis Prov. Bali (BPDAS Unda Anyar)
2009	12.250,24	573,76	4,68	5,45	
2010	11.676,48	1.783,00	15,27	19,89	
2011	9.893,48	2.885,00	29,16	43,25	
2012	7.008,48	2.181,00	31,12	60,91	
2013	11.388,45	2.873,98	25,24	25,24	Review Data Luas Lahan Kritis Prov. Bali (BPDAS Unda Anyar)
2014	8.514,47	1.319,13	15,49	36,82	
2015	7.195,34	1.629,00	22,64	51,12	
2016	5.566,34				
Jumlah		13.344,63			

Ket : LK = Lahan Kritis, PK = Potensial Kritis, AK = Agak Kritis

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Tahun 2019



7.4.5 Hutan Mangrove



Mangrove merupakan komunitas tumbuhan berkayu yang toleran terhadap air asin yang tumbuh terutama sepanjang daerah pantai terlindung, khususnya sepanjang teluk atau di dalam estuaria atau laguna. Ekosistem mangrove sebagai salah satu ekosistem pesisir memiliki peran ekologis/biologis, ekonomi, pariwisata dan fisik. Selain itu, Mangrove juga menghasilkan berbagai produk yaitu kayu, bahan pewarna, makanan, madu, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain.

Potensi hutan mangrove di Kabupaten Jember banyak terdapat di wilayah Perancak, Tuwed, Budeng, Loloan Timur, dan Gilimanuk. Perancak, Budeng, Loloan Timur merupakan kawasan yang berada di luar dan dalam kawasan hutan. Kawasan-kawasan ini sebagian merupakan kawasan hutan tetapi belum ditetapkan atau dikukuhkan menjadi kawasan hutan dan sebagian lagi berada di luar kawasan hutan. Sedangkan kawasan Mangrove Tuwed merupakan kawasan mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan.



Pada tahun 2008 sebagian kawasan hutan mangrove tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Tetap melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.439/Menhut/II/2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang Penunjukkan Tanah Pengganti seluas 44,00 Ha sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi produksi yang terletak di Desa Loloan Timur dan Desa Budeng Kecamatan Negara, Kabupaten Jember. Kawasan tersebut merupakan hasil tukar menukar lahan kawasan hutan untuk pengembangan pariwisata oleh PT. Bali Turtle Island Development

(PT. BTID) yang terletak di Pulau Serangan Kota Denpasar sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Kehutanan Nomor : S.480/Menhut-VII/2004 tanggal 19 Oktober 2004, Nomor : S.682/Menhut/VII/2006 tanggal 3 Nopember 2006, dan Nomor S.772/Menhut-II/2007 tanggal 27 Nopember 2007. Berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan antara Departemen Kehutanan dengan PT. BTID Nomor : 11/VII/KP/2008 tanggal 7 April 2008 PT. BTID telah menyerahkan tanah seluas 84,20 Ha yang terdiri atas 44,00 Ha berada di Kabupaten Jember dan 40,20 Ha terletak di Kabupaten Karangasem.

Perkiraan penyebaran dan luasan hutan mangrove di Kabupaten Jember tahun 2012 adalah seluas 968,50 hektar yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kecamatan Melaya memiliki hutan mangrove terluas, yaitu 488,50 hektar atau 50,44% dari luas hutan mangrove di Kabupaten Jember. Data luas hutan mangrove di Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel.



Keanekaragaman jenis mangrove dibedakan menurut tingkatannya. Untuk tingkatan pohon, jumlah jenis mangrove di kawasan Perancak dan Tuwed ditemukan sebanyak 9 jenis. Jenis yang paling dominan adalah *Sonneratia alba*. Berdasarkan besarnya nilai indeks nilai penting vegetasi, secara berurutan dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah *Sonneratia alba*, *Rhizophora apiculata*, *Avicennia marina*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Rhizophora stylosa*, *Rhizophora mucronata*, *Ceriops decandra*, *Ceriops tagal* dan *Excoecaria agallocha*.

Jumlah jenis yang ditemukan dari kegiatan inventarisasi di Teluk Gilimanuk, Taman Nasional Bali Barat, untuk tingkatan pohon sejumlah 14 jenis. Terdapat dua jenis vegetasi mangrove yang paling dominan, yaitu *Ceriops tagal* dan *Rhizophora apiculata*. Berdasarkan besarnya nilai

indeks nilai penting vegetasi, dari yang terbesar sampai terkecil, secara berurutan adalah *Rhizophora apiculata*, *Ceriops tagal*, *Avicennia marina*, *Lumnitzera racemosa*, *Excoecaria agallocha*, *Rhizophora mucronata*, *Bruguiera cylindrica*, *Rhizophora stylosa*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Avicennia officinalis*, *Rhizophora lamarckii* dan *Avicennia lanata*.

Tabel 7.52 : Penyebaran dan Luasan Hutan Mangrove di Kabupaten Jember

NO.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LUAS (hektar)	KETERANGAN
1	MELAYA	Tuwed	44,50	Sedang
		Candikusuma	100,00	Sedang
		Melaya	15,00	Sedang
		Gilimanuk	329,00	Lebat / TNBB
	Jumlah		488,50	
2	JEMBRANA	Sangkaragung	5,00	Jarang
		Perancak	100,00	Sedang
		Budeng	67,00	Jarang
		Loloan Timur	18,00	Jarang
		Delod Berawah	45,00	Sedang
		Air Kuning	20,00	Jarang
		Yeh Kuning	15,00	Jarang
	Jumlah		270,00	
3	NEGARA	Cupel	35,00	Jarang
		Pengambengan	55,00	Jarang
		Lelateng	50,00	Jarang
	Jumlah		140,00	
4	MENDOYO	Penyaringan	5,00	Jarang
		Yehembang	25,00	Jarang
	Jumlah		30,00	
5	PEKUTATAN	Medewi	10,00	Jarang
		Pulukan	15,00	Jarang
		Pangyanan	15,00	Jarang
	Jumlah		40,00	
TOTAL			968,50	

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan, Tahun 2019

Menurut BP DAS Unda Anyar, berdasarkan transformasi NDVI dari citra landsat kerapatan tajuk mangrove di wilayah blok Perancak dan Tuwed terdiri dari tajuk dengan kerapatan jarang seluas 18 Ha, tajuk dengan kerapatan sedang seluas 77 Ha dan tajuk dengan kerapatan lebat seluas 49,5 Ha. Tingkat kekritisian hutan mangrove di Perancak dan Tuwed terdiri dari kategori rusak seluas 29,5 ha dan tidak rusak 115 ha.

Lokasi mangrove yang mengalami kerusakan yaitu Banyubiru, Budeng, Perancak, Sangkar Agung dan Tuwed. Kerapatan tajuk mangrove di wilayah Teluk Gilimanuk terdiri dari tajuk dengan kerapatan jarang seluas 293 Ha dan tajuk dengan kerapatan sedang seluas 36 Ha. Tingkat kekritisian hutan mangrove di kawasan ini yang termasuk ke dalam Kabupaten Jember terdiri dari kategori rusak seluas 34 ha (17,57%) dan tidak rusak 183,00 ha (82,43%).

Degradasi pada Hutan Mangrove di Kabupaten Jember berkaitan dengan masalah, antara lain :

- Konversi Kawasan Hutan Mangrove menjadi berbagai peruntukan seperti tambak, pemukiman dan kawasan industri kurang terkendali.
- Penebangan Mangrove untuk kayu bakar dan penggunaan lainnya.
- Pencemaran akibat buangan limbah minyak, industri dan rumah tangga terutama di Desa Perancak, Pengambengan dan Cupel.

7.5 Perikanan

Pengertian perikanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 27, paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Selain itu, disebutkan dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, kewenangan urusan kelautan dan perikanan kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- 1) Sub urusan perikanan tangkap, terdapat 2 (dua) kewenangan kabupaten/kota, yaitu pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- 2) Sub urusan perikanan budidaya, terdapat 3 (tiga) kewenangan kabupaten/kota, yaitu penerbitan IUP (Ijin Usaha Perikanan) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, serta pengelolaan pembudidayaan ikan.

Presiden telah menyatakan bahwa **Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa**. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipungguni, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” serta “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah

- (1) Pertumbuhan
- (2) Pemerataan, dan
- (3) Modernisasi.

Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Kawasan sempadan pantai berdasarkan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2012-2032, meliputi seluruh pantai kabupaten sepanjang kurang lebih 93,6 kilometer, seluas kurang lebih 936 hektar atau 1,54% dari luas wilayah kabupaten. Semua kecamatan di Kabupaten Jember merupakan wilayah pesisir dimana seluruhnya mempunyai pantai. Secara detail, luas desa-desa pantai di wilayah pesisir Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 7.53 : Luas Desa Pantai di Wilayah Pesisir Kabupaten Jember

No	Desa Pantai	Luas (Ha)	No	Desa Pantai	Luas (Ha)
A	Kec. Melaya	13.492	D	Kec. Mendoyo	17.799
1	Gilimanuk	5.061	1	Dlod Berawah	269
2	Melaya	6.074	2	Penyaringan	5.112
3	Nusasari	788	3	Yeh Embang	3.549
4	Candikusuma	679	4	Yeh Embang Kangin	4.579



No	Desa Pantai	Luas (Ha)	No	Desa Pantai	Luas (Ha)
5	Tuwed	890	5	Yeh Sumbul	4.290
B	Kec. Negara	4.066	E	Kec. Pekutatan	11.457
1	Banyubiru	939	1	Medewi	677
2	Baluk	1.055	2	Pulukan	3.548
3	Cupel	640	3	Pekutatan	1.662
4	Tegalbadeng Barat	402	4	Pangyangan	1.179
5	Pengambengan	1.030	5	Gumbrih	1.627
C	Kec. Jembrana	1.066	6	Pengeragoan	2.764
1	Perancak	374	Jumlah		47.880
2	Air Kuning	271			
3	Yeh Kuning	421			

Sumber : Rencana Strategis WP3K Kabupaten Jember Tahun 2013-2032

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah Laut kurang lebih 604,24 Km² merupakan penghasil ikan laut terbesar di Provinsi Bali, pantai yang terbentang di bagian selatan Kabupaten Jember mulai dari Desa Pengeragoan sampai ke wilayah paling barat Kabupaten Jember yaitu Gilimanuk. Penduduk yang menetap di sepanjang pantai ini mengandalkan mata pencaharian sebagai Nelayan, baik tradisional atau semi modern.

Karakter garis pantai di Kabupaten Jember terdiri dari pantai berpasir hitam/kelabu, pantai bermangrove, pantai berpasir dan kerakal serta pantai berkerakal dan bongkah. Tipologi garis pantai Kabupaten Jember sebagian besar merupakan pantai berpasir hitam/kelabu, yaitu mencapai 57,34 km (68,67%). Pantai berpasir hitam/kelabu dengan relief yang cukup datar terdapat mulai dari Kelurahan Gilimanuk sampai Desa Yeh Embang Kangin. Pantai berpasir dan kerakal panjangnya 11,93 km, terutama terdapat di Kecamatan Pekutatan yaitu Desa Pekutatan, Pangyangan dan Gumbrih. Pantai berkerakal dan berbongkah panjangnya 4,60 km, juga terdapat terdapat di Kecamatan Pekutatan yaitu Desa Pengeragoan, Pulukan dan Medewi. Pantai bermangrove terdapat di

Teluk Gilimanuk sepanjang 7,28 km. Sedangkan pantai lainnya yaitu pantai bertembok, panjangnya 2,35 km terdapat di Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan serta di Desa Tegal Badeng Barat dan Desa Cupel.

Tabel 7.54 : Tipe Pantai di wilayah Kabupaten Jember

No	Kecamatan	Tipe Pantai					Jumlah
		Berpasir Hitam	Berman grove	Berpasir & Kerakal	Kerakal & Bongkah	Lain	
1	Pekutatan	-	-	10,56	4,43	-	14,99
2	Mendoyo	14,52	-	1,37	0,17	-	16,06
3	Jember	7,34	-	-	-	-	7,34
4	Negara	10,98	-	-	-	2,15	13,13
5	Melaya	24,50	7,28	-	-	0,20	31,98
	Jumlah	57,34	7,28	11,93	4,60	2,35	83,50

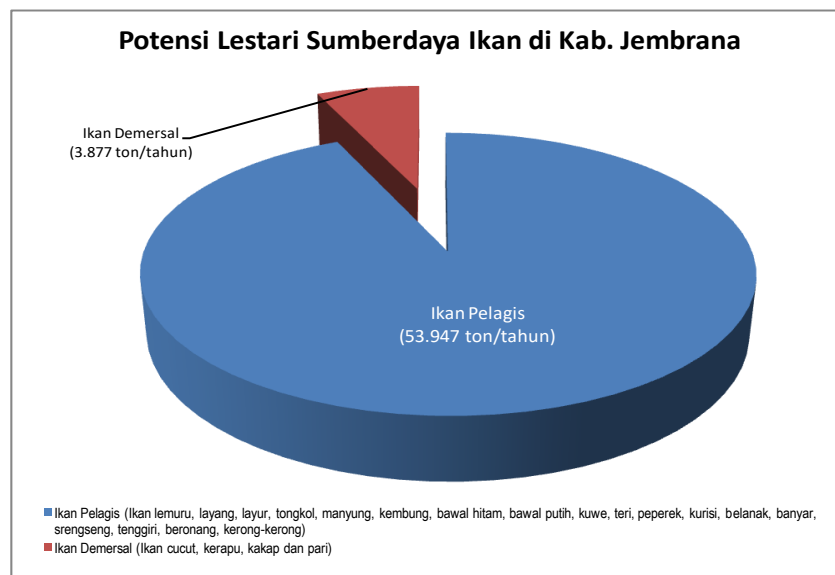
Sumber : Rencana Strategis WP3K Kabupaten Jember Tahun 2013-2032.

7.5.1 Potensi Perikanan

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah Laut kurang lebih 604,24 Km² merupakan penghasil ikan laut terbesar di Provinsi Bali, pantai yang terbentang di bagian selatan Kabupaten Jember mulai dari Desa Pengeragoan sampai ke wilayah paling barat Kabupaten Jember yaitu Gilimanuk. Penduduk yang menetap di sepanjang pantai ini mengandalkan mata pencaharian sebagai Nelayan, baik tradisional atau semi modern. Ruang laut adalah wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut kabupaten yang berdekatan.

Luas estimasi sebaran terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Jember, menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (2011), yaitu 868 ha, terdapat di Teluk Gilimanuk seluas 124,8 ha dan di Melaya seluas 743,2 ha. Sebaran terumbu karang di

Kecamatan Melaya terdapat di perairan Gilimanuk sampai Candikusuma. Sedangkan luas padang lamun yang telah teridentifikasi di wilayah pesisir Kabupaten Jember yaitu 127 ha, terdapat di Teluk Gilimanuk. Menurut Sudiarta dan Sudiarta (2011), persentase tutupan lamun di Teluk Gilimanuk hanya 9,78%. Berdasarkan atas persentase penutupan lamun tersebut maka dapat ditentukan bahwa status kondisi ekosistem padang lamun di Teluk Gilimanuk termasuk kondisi buruk/miskin. Padang lamun di Teluk Gilimanuk terdiri dari 4 jenis yaitu *Halodule uninervis*, *Enhalus acoroides*, *Halophila ovalis* dan *Thalassia hemprichii*.



Gambar 7.21 : Potensi Lestari Sumberdaya Ikan di Kabupaten Jember

Potensi lestari sumberdaya ikan di wilayah perairan Kabupaten Jember sebesar 56.947 ton/tahun, terdiri dari ikan pelagis 53.947 ton/tahun dan ikan demersal 3.877 ton/tahun. Potensi perikanan laut Kabupaten Jember didukung oleh sumber daya ikan di perairan Selat Bali dan perairan Samudera Hindia. Selain itu, perikanan tangkap juga didukung oleh perairan pantai. Wilayah perairan Selat Bali dengan luas area sekitar 2,500 km², sedangkan luas perairan laut ± 604,24 km². Perairan



Selat Bali mengandung sumber daya ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu ikan lemuru (*Sardinella lemuru*). Ikan lemuru memiliki kemampuan bermigrasi yang kuat dan terlihat dalam gerombolan (*schooling*) di daerah pesisir pada kedalaman kurang dari 60 m, (Merta, 2003). Distribusi ikan lemuru ditemukan hampir di seluruh Selat Bali.

Potensi perikanan perairan umum yang utama di Kabupaten Jember adalah perairan waduk/bendungan/bendung dan sungai. Potensi sumber daya ikan perikanan perairan umum yaitu ikan mas, nila, lele, mujair, tawes, gabus dan ikan lainnya. Perairan waduk/bendungan yang terdapat di Kabupaten Jember yaitu Waduk Palasari dan Bendungan Benel di Kecamatan Melaya. Selain itu, potensi perikanan perairan umum juga didukung oleh beberapa bendung lainnya. Sedangkan sungai-sungai potensial penunjang kegiatan perikanan tangkap yaitu:

- a. Kecamatan Negara dan Jember: Tukad Berangbang, Tukadaya, Tukad Kaliakah, Tukad Ijogading, Tukad Gayung, Tukad Titis, Tukad Budeng, dan Tukad Susul.
- b. Kecamatan Mendoyo: Tukad Mendoyo, Tukad Petapan, Tukad Biluk Poh, Tukad Yeh Buah, Tukad Yeh Embang, Tukad Yeh Sumbul, dan Tukad Satang.
- c. Kecamatan Pekutatan: Tukad Medewi, Tukad Pulukan, Tukad Yeh Lebah, Tukad Pangyangan, Tukad Gumbrih, Tukad Pengeragoan, dan Tukad Yeh Leh.

7.5.2 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Jember tahun 2018 terdiri atas produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. dengan capaian

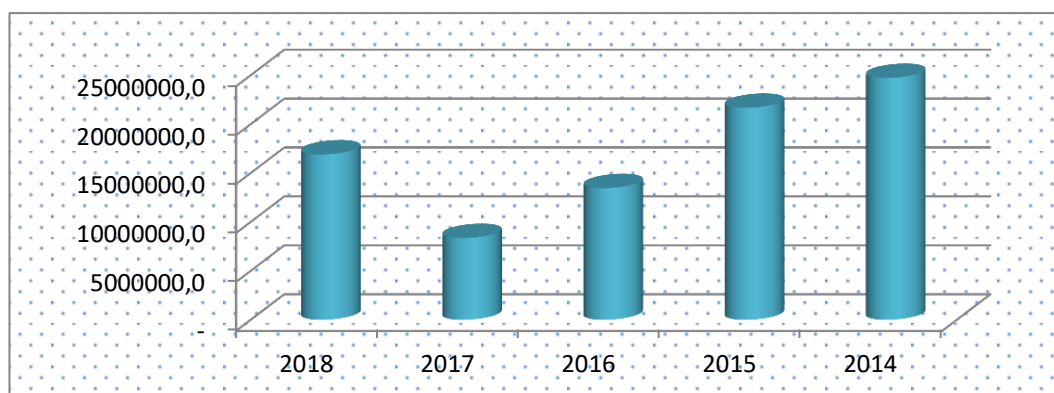
produksi sebesar 18.907.289 ton (102%), meningkat dibandingkan tahun 2017 atau 8.357.318 ton. Hal ini disebabkan karena secara umum, kondisi alam / cuaca di Kabupaten Jember mendukung untuk melakukan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Data perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Jember dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2014-2018) secara trendline mengalami peningkatan, dimana produksi tertinggi berada di Kecamatan Negara, yaitu sebesar 18.217.521 ton (72%), sedangkan produksi terendah berada di Kecamatan Mendoyo sebesar 276 ton (6%). Data dan grafik perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Jember dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7.55 : Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018 (Ton)

Kecamatan	Perikanan Laut		Perikanan Dataran				Jumlah
	Penangkapan	Budidaya	Penangkapan Perairan Umum	Tambak	Air Tenang	Air Deras	
1. Melaya	702.100	2.420	6.070	231.550	273.066	-	1.215.206
2. Negara	11.496.049	-	1.100	625.697	94.675	-	12.217.521
3. Jember	1.061.500	-	870	311.537	33.450	-	1.407.357
4. Mendoyo	458.200	-	1.240	156.550	338.912	-	954.902
5. Pekutatan	555.900	-	1.827	328.680	204.154	21.742	1.112.303
Jumlah 2018	14.273.749	2.420	11.107	1.654.014	944.257	21.742	16.907.289
Tahun	2017	6.404.374	-	5.077	1.469.239	458.414	8.357.814
	2016	10.422.500	-	-	2.675.667	363.310	13.461.477
	2015	19.999.365	-	-	1.371.620	296.898	21.667.883
	2014	21.655.401	-	-	1.716.000	1.329.600	24.721.001

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Jember, Tahun 2018



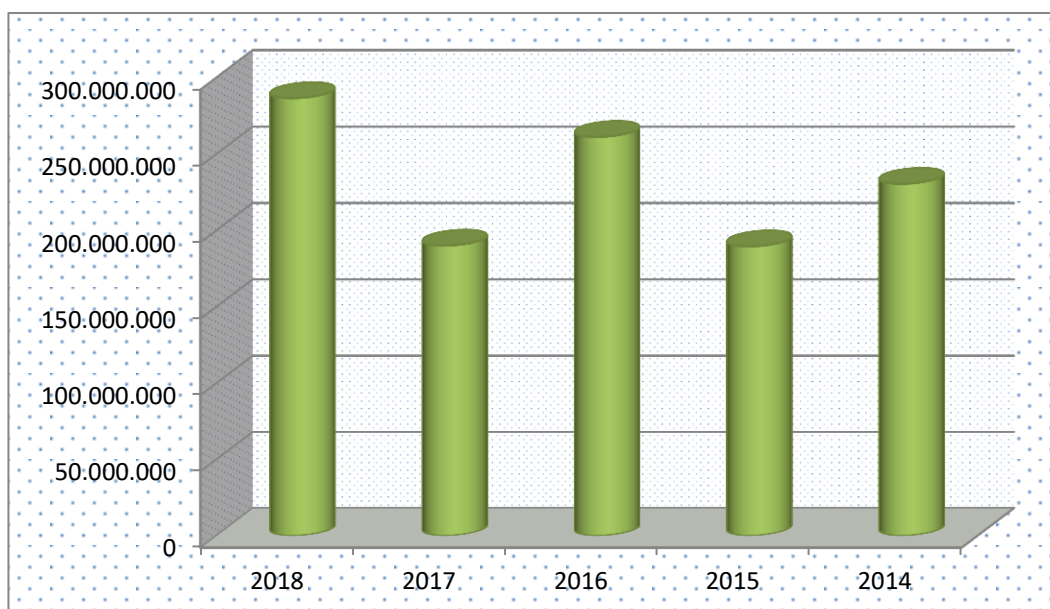
Gambar 7.22 : Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

Nilai produksi perikanan di Kabupaten Jember pada tahun 2018 sebesar Rp. 286.654.231,-, dimana terjadi peningkatan sebesar 51% (Rp92.525.509) dibandingkan dengan tahun 2017. Perkembangan nilai produksi perikanan di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.56 : Perkembangan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018 (Rp000)

Kecamatan		Perikanan Laut		Perikanan Daratan			Jumlah	
		Penangkapan	Budidaya	Penangkapan Perairan Umum	Tambak	Air Tenang		Air Deras
1. Melaya		12.834.475	193.600	121.400	15.050.750	6.169.800	-	34.370.025
2. Negara		100.747.866	-	22.000	40.425.955	1.806.750	-	143.002.571
3. Jembrana		22.991.145	-	17.400	20.249.905	889.500	-	44.147.950
4. Mendoyo		9.169.865	-	24.800	10.175.750	8.038.465	-	27.408.880
5. Pekutatan		10.575.045	-	36.540	21.364.200	5.258.620	490.400	37.724.805
Jumlah 2018		156.318.396	193.600	222.140	107.266.560	22.163.135	490.400	286.654.231
Tahun	2017	82.652.907	-	101.540	95.630.535	11.329.540	414.200	190.128.722
	2016	84.241.783	-	-	168.663.000	8.396.610	-	261.303.409
	2015	115.403.055	-	-	68.117.355	6.132.766	-	189.655.191
	2014	101.727.107	-	-	107.742.500	20.826.350	300.000	230.597.971

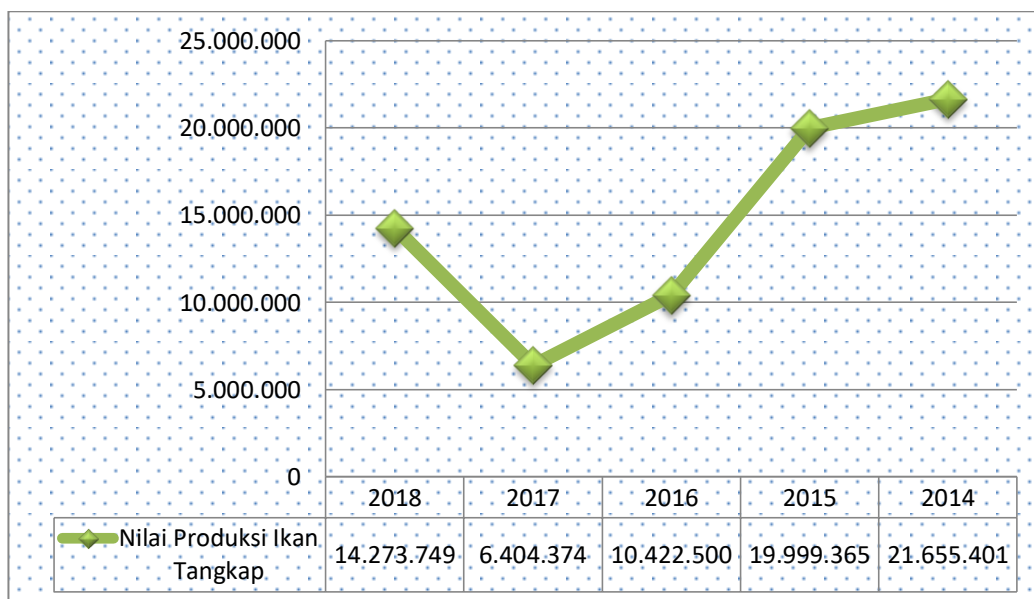
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Jember, Tahun 2017



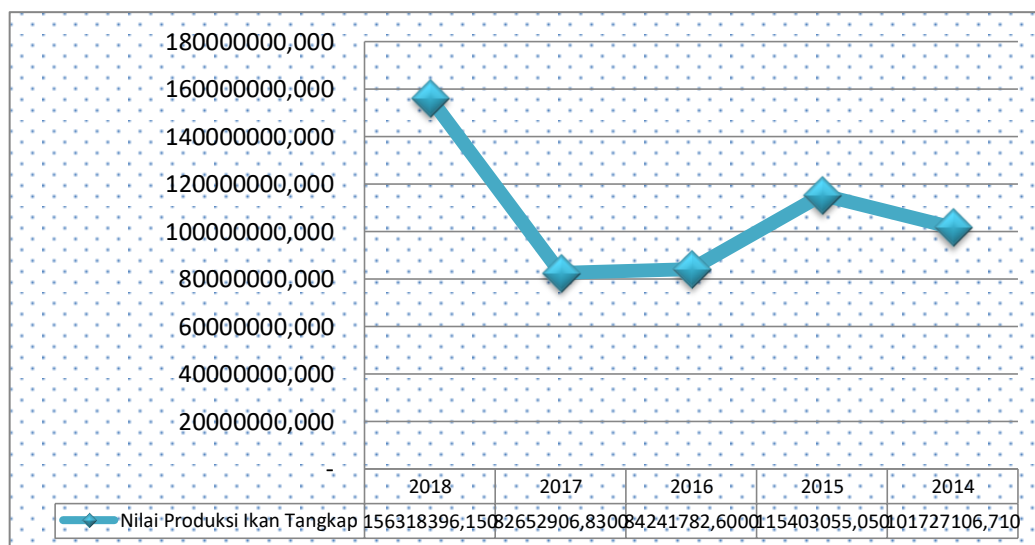
Gambar 7.23 : Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

7.5.3 Perikanan Tangkap

Kondisi perikanan tangkap di Kabupaten Jember pada tahun 2018 produksinya 14.273.749 ton dengan nilai Rp156.318.396,15,- mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 122,88% (6.404.374 ton) dengan nilai produksi Rp82.652.906,83. Data produksi dan Nilai produksi perikanan tangkap dari tahun 2014-2018 dilihat pada Gambar berikut ini.

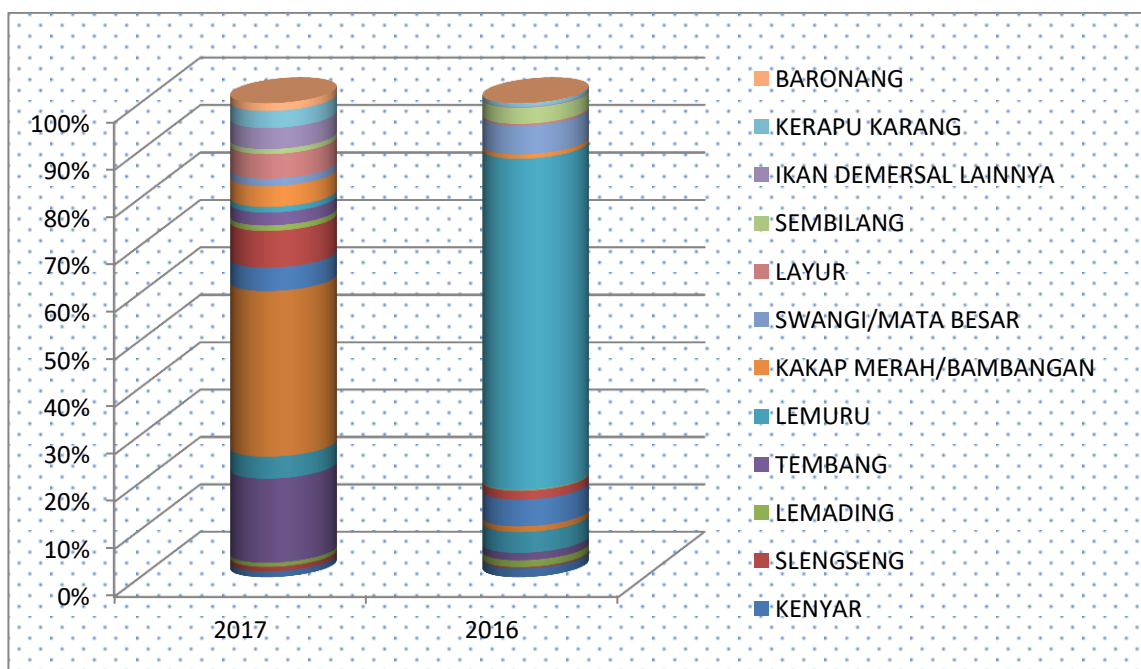


Gambar 7.24 : Grafik Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018



Gambar 7.25 : Grafik Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

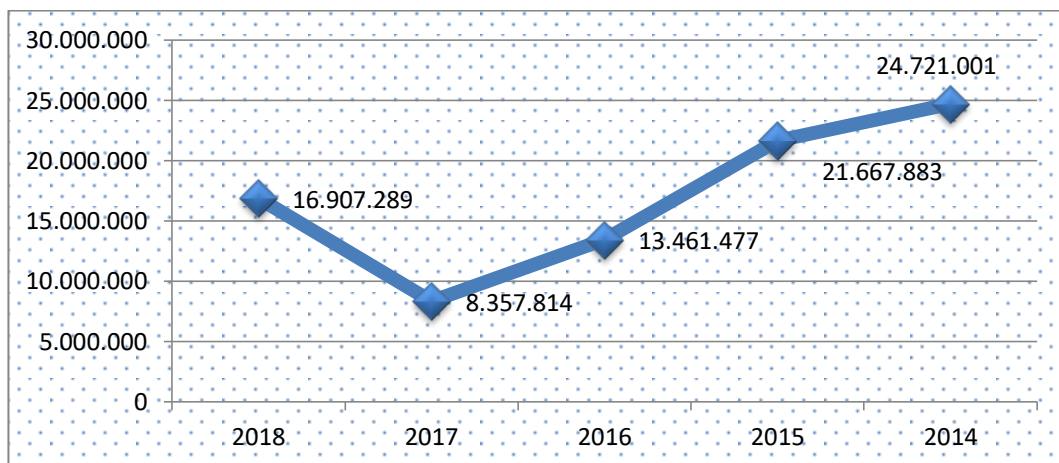
Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Jember dalam 5 (lima) tahun terakhir 2014 – 2019 didominasi oleh ikan lemuru, yaitu sebanyak 65,75%,- Alat tangkap yang dominan dipergunakan oleh nelayan di Kabupaten Jember adalah jaring pukat cincin / *purse seine*, dengan nama lokal “jaring *slerek*”. Kegiatan penangkapan ikan dengan *purse seine* dilakukan dengan pola “memburu ikan” (gadangan) dimana operasi penangkapan ikan dilakukan dengan metode “*Two boat system*” dan pola kerja harian (*one day trip*). Berikut adalah grafik produksi perikanan tangkap di Kabupaten Jember tahun 2017 dan 2018 per jenis ikan, yang menunjukkan untuk tahun 2016 ikan lemuru yang mendominasi sekitar 68,60%, selanjutnya tahun 2017 paling banyak adalah ikan tongkol sekitar 34,94%.



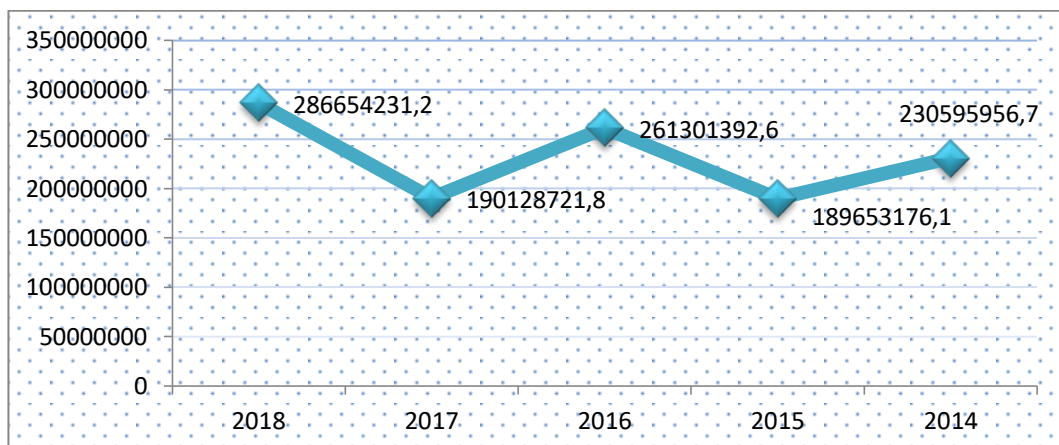
Gambar 7.25: Grafik Produksi Perikanan Tangkap per jenis Ikandi Kabupaten Jember Tahun 2016-2017

7.5.4 Perikanan Darat

Perikanan Darat adalah merupakan perikanan budidaya, nilai perikanan budidaya di Kabupaten Jember pada tahun 2018 adalah Rp 286.654.231,15 meningkat 51% dibandingkan tahun 2017 adalah 190.128.721,83 . Hal ini terjadi karena pada tahun 2018 di terjadi panen raya di kolam ikan, dimana panen tersebut merupakan panen dari bantuan bibit ikan Pemkab Jember Secara *trendline*, realisasi produksi dan nilai produksi perikanan budidaya dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 7.26 : Grafik Produksi Perikanan Darat di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018



Gambar 7.27 : Grafik Nilai Produksi Perikanan Darat di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Jember, terdiri atas perikanan tambak dan perikanan air tenang / kolam.

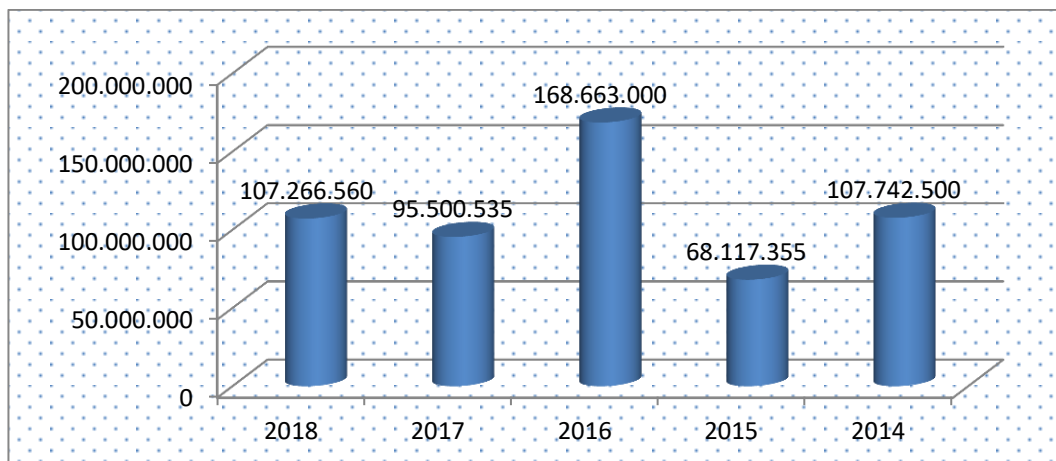
1) Perikanan Tambak

Produksi ikan tambak di Kabupaten Jember tahun 2018 sebanyak 1.654.014 kg, yang hampir seluruhnya terdiri udang putih dengan nilai sebesar Rp107.266.560.000,- Terjadi peningkatan produksi disbanding tahun 2017 sebesar 184.775 kg (12,58%). Demikian juga dengan nilainya, terjadi peningkatan sebesar Rp. 11.766.025.000,- (12,32%). Data dan grafik produksi serta nilai produksi perikanan tambak di Kabupaten Jember tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik dibawah ini.

Tabel 7.57 : Perkembangan Produksi Perikanan Tambak di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Kecamatan	Jenis Ikan (Kg)						Jumlah
	Kerapu	Bandeng	Nila	Ikan Lainnya	Udang Windu	Udang Putih / Vaname	
1. Melaya	-	-	-	-	-	231.550,00	231.550,00
2. Negara	-	-	5.430,00	-	-	620.267,00	625.697,00
3. Jember	-	-	-	-	-	311.537,00	311.537,00
4. Mendoyo	-	-	-	-	-	156.550,00	156.550,00
5. Pekutatan	-	-	-	-	-	328.680,00	328.680,00
Jumlah 2018	-	-	5.430,00	-	-	1.648.584,00	1.654.014,00
Tahun	2017	-	-	-	-	1.469.239,00	1.469.239,00
	2016	2.654,00	500,00	-	-	2.672.513,00	2.675.667,00
	2015	2.750,00	31.700,00	8.000,00	3.750,00	1.325.420,00	1.371.620,00
	2014	-	74.000,00	-	-	1.642.000,00	1.716.000,00

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2019

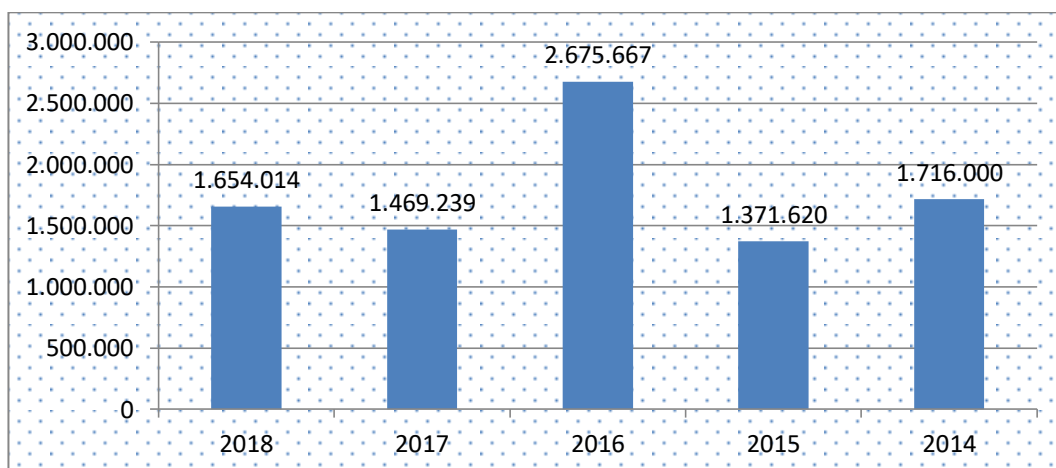


Gambar 7.28 : Grafik Produksi Perikanan Tambak di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Tabel 7.58 : Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Tambak di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Kecamatan	Jenis Ikan (Rp000)						Jumlah
	Kerapu	Bandeng	Nila	Ikan Lainnya	Udang Windu	Udang Putih / Vaname	
1. Melaya	-	-	-	-	-	15.050.750,00	15.050.750,00
2. Negara	-	-	108.600,00	-	-	40.317.355,00	40.425.955,00
3. Jember	-	-	-	-	-	20.249.905,00	20.249.905,00
4. Mendoyo	-	-	-	-	-	10.175.750,00	10.175.750,00
5. Pekutatan	-	-	-	-	-	21.364.200,00	21.364.200,00
Jumlah 2018	-	-	108.600,00	-	-	107.157.960,00	107.266.560,00
Tahun	2017	-	-	-	-	95.500.535,00	95.500.535,00
	2016	37.096.000,00	7.500,00	-	-	131.559.500,00	168.663.000,00
	2015	233.750,00	487.000,00	136.000,00	205.500,00	67.055.105,00	68.117.355,00
	2014	-	925.000,00	-	-	106.817.500,00	107.742.500,00

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2019



Gambar 7.29 : Grafik Nilai Perikanan Tambak di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

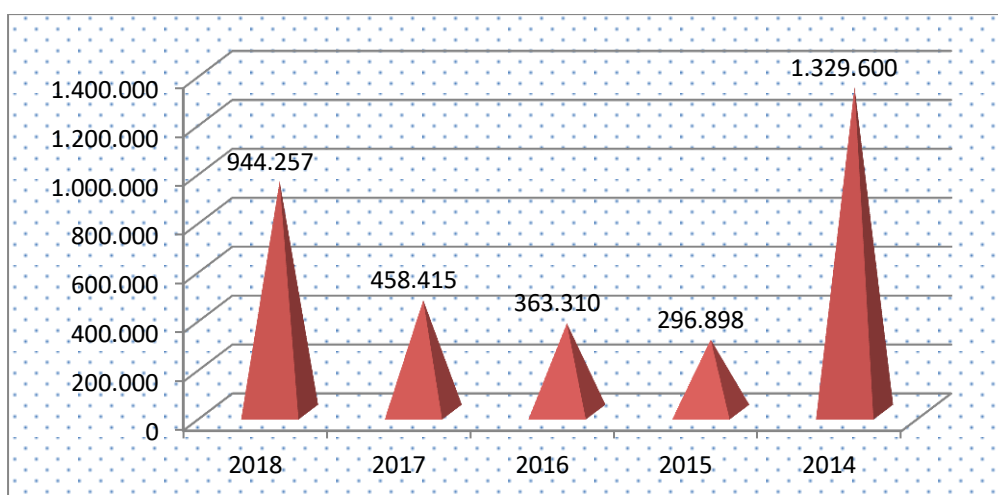
2) Perikanan Air Tenang / Kolam

Produksi ikan kolam di Kabupaten Jember tahun 2018 sebesar 944.257,00 kg yang terdiri atas ikan nila, gurame, lele, mas kaper, serta ikan lainnya (bawal). Terjadi peningkatan produksi sebesar 485,482 kg (106%) dibandingkan tahun 2017. Demikian juga dengan nilai produksi ikan kolam air tenang tahun 2018 meningkat sebesar Rp10.833.595.000,- (96%) dibandingkan tahun 2017, nilai produksinya Rp 11.392.540.000,- Secara rinci pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 7.59 : Perkembangan Produksi Perikanan Air Tenang/Kolam di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Kecamatan	Jenis Ikan (Kg)							Jumlah
	Maas/ Kaper	Bawal	Nila	Gurame	Lele	Patin	Ikan lainnya	
1. Melaya	-	4.147,00	49.086,00	119.773,00	97.850,00	2.210,00	-	273.066,00
2. Negara	-	-	-	25.775,00	68.900,00	-	-	94.675,00
3. Jember	-	-	-	25.850,00	7.600,00	-	-	33.450,00
4. Mendoyo	9.120,00	30.100,00	150.000,00	123.880,00	13.955,00	11.857,00	-	338.912,00
5. Pekutatan	9.860,00	-	80.000,00	109.894,00	4.400,00	-	-	204.154,00
Jumlah 2018	18.980,00	34.247,00	279.086,00	405.172,00	192.705,00	14.067,00	-	944.257,00
Tahun	2017	-	38.220,00	7.600,00	271.534,00	110.820,00	30.241,00	458.415,00
	2016	-	2.050,00	21.850,00	251.620,00	86.990,00	800,00	363.310,00
	2015	-	-	66.451,00	136.087,00	82.544,85	11.815,00	296.897,85
	2014	400,00	-	520.300,00	681.100,00	127.800,00	-	1.329.600,00

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2019



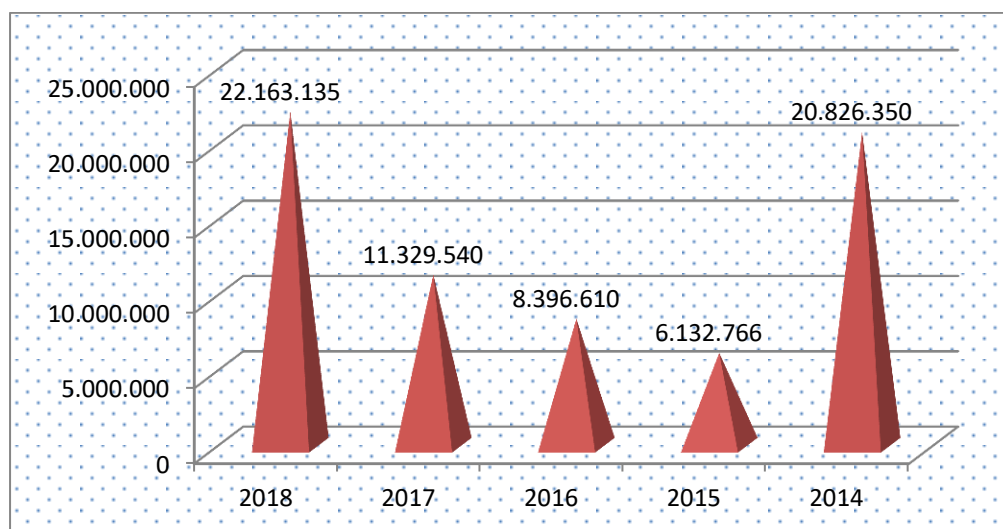
Gambar 7.30 : Grafik Produksi Perikanan Air tenang/Kolam di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018



Tabel 7.60 : Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Air Tenang/Kolam di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Kecamatan	Jenis Ikan (Rp000)							Jumlah
	Maas/ Kaper	Bawal	Nilu	Gumae	Lele	Patin	Ikan lainnya	
1. Melaya	-	82.940,00	981.720,00	3.593.190,00	1.467.750,00	44.200,00	-	6.169.800,00
2. Negara	-	-	-	773.250,00	1.033.500,00	-	-	1.806.750,00
3. Jember	-	-	-	775.500,00	114.000,00	-	-	889.500,00
4. Mendoyo	273.600,00	602.000,00	3.000.000,00	3.716.400,00	209.325,00	237.140,00	-	8.038.465,00
5. Pekutatan	295.800,00	-	1.600.000,00	3.296.820,00	66.000,00	-	-	5.258.620,00
Jumlah 2018	569.400,00	684.940,00	5.581.720,00	12.155.160,00	2.890.575,00	281.340,00	-	22.163.135,00
Tahun	2017	-	764.400,00	152.000,00	8.146.020,00	1.662.300,00	604.820,00	11.329.540,00
	2016	-	29.400,00	419.790,00	6.425.060,00	1.521.160,00	1.200,00	8.396.610,00
	2015	-	-	1.168.369,00	3.341.463,00	1.383.889,00	-	6.132.766,00
	2014	8.000,00	-	3.113.250,00	15.660.300,00	2.044.800,00	-	20.826.350,00

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2019



Gambar 7.31 : Grafik Nilai Produksi Perikanan Air Tenang/Kolam di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

3) Perikanan Kolam Air Deras

Mulai tahun 2017 Kabupaten Jember memiliki produksi perikanan kolam air deras di Kecamatan Pekutatan yang terdiri dari Ikan Mas/Karper dan Nilu. Produksi ikan kolam air deras di Kabupaten Jember tahun 2018 sebesar 21.742 kg dengan nilai Rp490.400.000, terjadi peningkatan produksi sebesar 1,030 kg (5%) dibandingkan

tahun 2017 dengan peningkatannya sebesar 18%. Secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 7.61 : Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Kolam Air Deras di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Kecamatan	Perikanan Kolam Air Deras					
	Produksi Mas/ Kaper (Kg)	Nilai Produksi Mas Kaper (Rp000)	Produksi Nila (Kg)	Nilai Produksi Nila (Rp000)	Jumlah (Kg)	Jumlah (Rp000)
1. Melaya	-	-	-	-	-	-
2. Negara	-	-	-	-	-	-
3. Jember	-	-	-	-	-	-
4. Mendoyo	-	-	-	-	-	-
5. Pekutatan	5.556	166.680	16.186	323.720	21.742	490.400
Jumlah 2018	5.556	166.680	16.186	323.720	21.742	490.400
Tahun 2017	-	-	20.712	414.200	20.712	414.200

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Tahun 2019

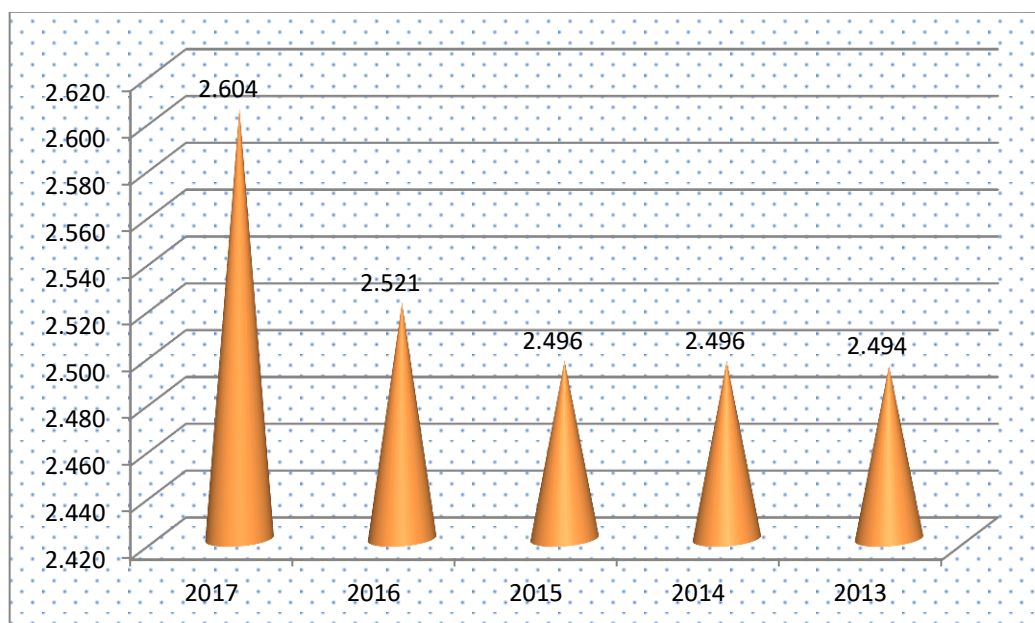
7.5.5 Armada Perikanan

Pada tahun 2017 jumlah perahu dan kapal penangkap ikan di Kabupaten Jember sebanyak 2.506 unit, yang terdiri atas 2.604 unit (98,32%) perahu dengan motor tempel, 9 unit (0,40%) kapal motor, serta 32 unit (1,28%) jukung/perahu tanpa motor. Kapal penangkap ikan di Kabupaten Jember didominasi oleh kapal/perahu dengan motor tempel dengan alat tangkap *purse seine*. Dalam SKB Gubernur Jawa Timur dan Bali, disebutkan bahwa izin penangkapan ikan dengan *purse seine* di Selat Bali ditetapkan 273 unit, dimana 190 unit dari Jawa Timur dan 83 unit dari Bali. Ukuran perahu maksimal 30 GT. Data jumlah perahu dan kapal penangkap ikan di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 7.62 : Perkembangan Jumlah Kapal Penangkap Ikan dan Perahu di Kabupaten Jember Tahun 2013 – 2017

Kecamatan		Perahu Kapal Motor				Jumlah
		Kapal Motor	Motor Tempel	Jumlah	Perau tanpa Motor/Jukung	
1. Melaya		1	318	319	0	319
2. Negara		0	1046	1046	19	1.065
3. Jembrana		8	645	653	5	658
4. Mendoyo		0	131	131	0	131
5. Pekutatan		0	407	407	24	431
Jumlah 2017		9	2547	2.556	32	2.604
Tahun	2016	9	2489	2.489	32	2.521
	2015	10	2464	2.464	32	2.496
	2014	10	2464	2.464	32	2.496
	2013	9	2462	2.462	32	2.494

Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2018



Gambar 7.32 : Grafik Jumlah Kapal penangkap Ikan di Kabupaten Jember Tahun 2013-2017

7.5.6 Nelayan

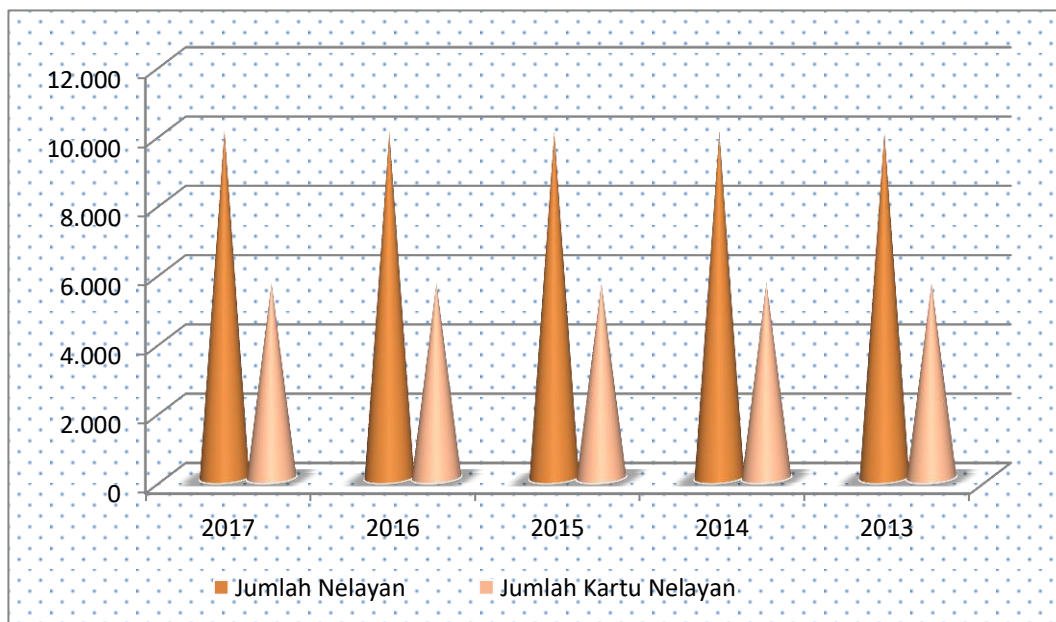
Jumlah nelayan di Kabupaten Jember pada tahun 2017 sebanyak 10.073 orang, yang terdiri atas nelayan utama sebanyak 7.526 orang (74,71%) dan nelayan sambilan sebanyak 2.547 orang (25,28%). Nelayan

yang sudah memiliki kartu nelayan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 5.662 orang (56,21%). Berikut adalah data jumlah nelayan di Kabupaten Jember.

Tabel 7.63 : Perkembangan Jumlah Nelayan dan Pemilik Kartu Nelayan di Kabupaten Jember Tahun 2013 – 2017

Kecamatan		Nelayan			Kartu Nelayan
		Penuh	Sambilan	Jumlah	
1. Melaya		521	623	1.144	795
2. Negara		5.047	7.044	12.091	2.277
3. Jembrana		1.283	1.532	2.815	2.095
4. Mendoyo		163	215	378	119
5. Pekutatan		512	608	1.120	376
Jumlah 2017		7.526	2.547	10.073	5.662
Tahun	2016	7.526	2.496	10.022	5.662
	2015	7.526	2.496	10.022	5.662
	2014	7.526	2.496	10.022	5.662
	2013	7.526	2.496	10.022	5.662

Sumber : Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2018



Gambar 7.33 : Grafik Jumlah Nelayan dan Kartu Nelayan



BAB VIII

KONDISI INFRASTRUKTUR KABUPATEN JEMBER





8.1 Listrik

Secara umum pelayanan dan keterjangkauan listrik di Kabupaten Jembrana sudah sampai masuk ke desa-desa terpencil. Penyebaran dan pendistribusian aliran listrik



sudah dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Penyaluran listrik diupayakan kedepan akan terus ditingkatkan melalui rancangan dan rencana pemerintah untuk membuat dan menambah gardu listrik di setiap kecamatan. Setiap tahun jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan, demikian pula dengan jumlah daya tersambung. Jumlah pelanggan listrik dan daya tersambung tahun 2018 di Kabupaten Jembrana sebagai berikut.

Tabel 8.1 : Pelanggan Listrik dan Daya Terpasang Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Jembrana Tahun 2014 - 2018

Jenis Konsumen	Jumlah Pelanggan	Daya Terpasang (VA)
1. Rumah Tangga/ <i>Households</i>	69 475	107 453 080
2. Usaha, Perhotelan/ <i>Business, Hotel</i>	4 287	21 017 300
3. Sosial / <i>Social</i>	1 916	4 491 500
4. Perkantoran/ <i>Office</i>	240	3 826 850
5. Industri/Industry	84	15 664 350
6. Penerangan Jalan Umum/ <i>Ligth of Public Road</i>	213	1 419 130
7. Layanan Khusus	946	701 050
Jumlah/Total (2018)	69 475	107 453 080
2017	66 811	91 049 105
2016	74 606	97 049 105
2015	71 160	87 931 799
2014	66 006	81 850 805

Sumber : Kabupaten Jembrana Dalam Angka, tahun 2019



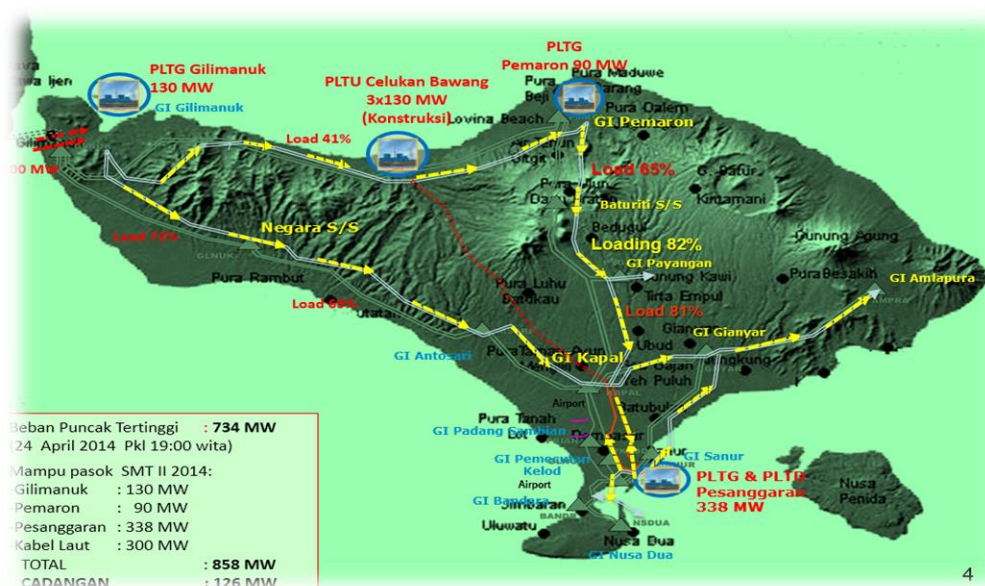
Tabel 8.2 : Jumlah Pelanggan, Kwh Terjual dan Daya Tersambung
Kabupaten Jembrana, 2014-2018

Tahun	Jumlah Pelanggan	Listrik Terjual (Kwh)	Nilai (juta Rp)
2014	66 006	122 631 575	93 369,31
2015	71 160	130 064 550	97 078,75
2016	74 606	159 275 267	156 217,41
2017	66 811	119 667 464	136 176,61
2018	69 475	218 711 363	258 069,00

Sumber: PT PLN (Persero) Distribusi Bali Rayon Negara, Tahun 2019, pada Kab. Jembrana Dalam Angka, Tahun 2019

Jaringan Listrik di Kabupaten Jembrana sebagai berikut :

- PLTG Pesanggaran = 150 MVA.
- PLTG Gilimanuk = 130 MVA.
- PLTGU Pemaron = 80 MVA.
- Interkoneksi Jawa Bali = 200 MVA.
- Gardu Induk = 2 Buah.
- Gardu Distribusi = 372 Buah.



Gambar 8.1 : Distribusi Penyaluran Listrik di Provinsi Bali



8.2 Air Bersih

Ketersediaan air disamping untuk kepentingan pertanian, juga sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan air di Kabupaten Jember sampai saat ini cukup berlimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jember. Namun pemerintah tetap terus berupaya untuk mencari alternatif lain dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih di masa yang akan datang. Seiring dengan perkembangan dan jumlah penduduk yang terus bertambah dan berkembang, pemerintah Kabupaten Jember membuat terobosan dengan pengolahan air laut menjadi air minum. Terobosan ini adalah antisipasi jangka panjang pemerintah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya krisis air di masa yang akan datang.

Berbagai sumber air minum yang saat ini telah diusahakan oleh pemerintah dan masyarakat Jember antara lain dengan memanfaatkan air permukaan, Sumur bor dan mata air. Data dari pelanggan PDAM Kabupaten Jember Tahun 2018, jumlah pelanggan sebanyak 24.046 pelanggan, pemakaian air yang terjual 4 771 010m³, dengan beberapa sumber air minum yang telah diusahakan adalah sebagai berikut: air Permukaan sebanyak 4; sumur bor sebanyak 32 dan mata air sebanyak 3 untuk melayani pelanggan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.3 : Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan di Kabupaten Jember, 2018

Jenis Konsumen	Jumlah Pelanggan	Air yang Disalurkan	
		Volume (m3)	Nilai (Ribu Rp)
Sosial			
Umum	70	13 074	31 552 200
Khusus	270	54 703	197 087 400
Non Niaga			
Rumah Tangga	22 378	4 096 064	13 730 975 750
Instansi Pemerintah	654	430 053	2 159 046 200



Jenis Konsumen	Jumlah Pelanggan	Air yang Disalurkan	
		Volume (m3)	Nilai (Ribu Rp)
Niaga			
Kecil	604	118 702	802 643 600
Besar	54	36 555	349 029 700
Industri			
Kecil	2	-	2 160 000
Besar	13	5 058	68 420 850
Industri			
Pelabuhan	1	16 801	264 345 750
Tahun 2018	24 046	4 771 010	17 605 261 450
2017	23 574	4 673 902	17.088.125.850
2016	23 035	4 686 243	15 443 879 000
2015	22 275	4 525 731	14 527 295 750
2014	21 526	4 498 540	14 287 616 050

Sumber: PDAM Kab. Jember, pada Jember Dalam Angka, tahun 2019

Tabel 8.4 : Jumlah Sumber Air yang Digunakan PDAM Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Kecamatan	Air Permukaan		Sumur Bor		Mata Air	
	Jml	Kapasitas Produksi (Liter/detik)	Jml	Kapasitas Produksi (Liter/detik)	Jml	Kapasitas Produksi (Liter/ detik)
1. Melaya	-	-	10	66	-	-
2. Negara	1	2	15	109	-	-
3. Jember	-	-	-	-	-	-
4. Mendoyo	4	11	3	17	3	17
5. Pekutatan	1	8	4	20	-	-
Jumlah	6	21	32	212	3	17
2017	6	21	32	212	3	17
2016	6	22	33	219	3	17
2015	4	9	33	211	5	30
2014	5	40	28	390	3	42
2013	6	55	27	388	3	45

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Jember



8.3 Persampahan

Sumber utama timbunan sampah di kawasan perencanaan yaitu sampah domestik (rumah tangga) dan sampah non domestik meliputi sampah intitusional (sekolah, kantor, dll), sampah komersial (pasar, toko, dll), sampah aktivitas perkotaan (penyapuan jalan, lapangan, dll), sampah klinik, sampah industri, sampah konstruksi, dan lain sebagainya. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Negara dikelola langsung oleh masyarakat secara perorangan atau berkelompok. Secara perorangan sampahnya dikelola dengan cara membakar, menanam, ataupun mengupah seseorang dengan peralatan angkutnya untuk membuang sampah ke tempat penimbunan sampah yang telah disediakan.

Tabel 8.5 : Volume Penanganan Sampah di Kabupaten Jember
Tahun 2014 - 2018

No	Pelayanan	Tingkat Pelayanan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Luas daerah pelayanan (Km ²)	480.74	480.74	480.74	23.302	430.4
2	Luas daerah pelayanan terhadap luas perkotaan (%)	75,72	75,72	75,72	75,72	75,72
3	Jumlah penduduk terlayani (jiwa)	188.948	174.911	180.467	96.237	211.040
4	Jumlah penduduk terlayani terhadap jumlah penduduk perkotaan (%)	81	81	81	61	64,52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember Tahun 2019

Untuk kebutuhan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memiliki sarana prasarana persampahan pada 2018 berupa: Grobak Sampah 7 unit, Cointainer LHC 47 unit , Transfer Depo 3 unit, Kontainer 47 Unit, TPS 30 unit, Dum Truk 4 unit, Am Roll Truck 9 Unit , Compactor 1 unit, Sweeper 1 unit, Kendaraan penisir pick-up 1 unit. Sementara daya tampung TPS sebagai berikut :



Tabel 8.6 : Daya Tampung Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Jember Tahun 2018

Uraian	Jumlah
Transfer Depo	3 unit
Tong Sampah 5 warna	63 (1 M3)
Tong Sampah 3 Warna	12 Unit (3 M3)
TPS Terbuka	12 Unit (3 M3)
Daya Tampung TPA	70.500 M3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember Tahun 2019

8.4 Pos dan Telekomunikasi

Dalam upaya untuk mengembangkan infrastruktur Pos dan Telekomunikasi, pemerintah telah berupaya untuk membangun kerjasama yang sangat baik dengan investor yang ingin menanamkan modalnya untuk pembangunan Jember. Salah satu upaya serius pemerintah Kabupaten Jember adalah dengan mempermudah serta mempercepat proses pengurusan ijin bagi kepentingan dunia usaha. Disamping itu juga ada beberapa rancangan yang telah dipersiapkan dan bahkan dilakukan oleh pemerintah antara lain:

- Penyediaan kantor pos dan kantor telepon pada setiap kecamatan.
- Pengembangan rumah pos dan telepon umum.
- Pengembangan BTS untuk penguatan sinyal telepon seluler.
- Pengembangan infrastruktur *Jimbarwana Network* untuk peningkatan Aplikasi *E-Government*.
- Pengembangan jaringan *Backbone* dan jaringan distribusi untuk desa-desa dan Sekolah Dasar yang belum terjangkau secara langsung.



Jumlah kantor pos sampai dengan tahun 2018 tercatat 5 (lima) buah 2 (dua) unit di Kecamatan Melaya, 1 (satu) unit masing-masing di Kecamatan Jember, Mendoyo dan Pekutatan. Dengan adanya daya saing perusahaan pemerintah (Telkom) dengan beberapa perusahaan penyedia jasa telekomunikasi (Provider) jaringan telepon genggam, pelanggan telepon khususnya untuk kebutuhan rumah tangga mengalami fluktuasi kendati telepon genggam relatif lebih mahal daripada telepon konvensional. Namun dengan kelebihanannya, yaitu dapat digunakan secara mobile telepon genggam saat ini lebih diminati oleh masyarakat dibuktikan dengan banyaknya Tower/ Menara Telekomunikasi Seluler.

Dalam sebuah masyarakat, kebutuhan akan media informasi adalah mutlak diperlukan. Dengan adanya media informasi tersebut, maka berita/informasi dalam berbagai aspek kehidupan dalam sebuah masyarakat akan dapat tersampaikan dengan cepat. Berikut adalah jumlah media surat kabar di Kabupaten Jember pada tahun 2014-2018.

Tabel 8.7 : Jumlah Media Surat Kabar di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah
2014	18
2015	18
2016	13
2017	13
2018	13

Sumber: Dinas Infokom Kab. Jember, Tahun 2019

Selain media Surat Kabar, di Kabupaten Jember juga terdapat media informasi elektronik berupa radio. Selain digunakan sebagai media informasi berupa berita, radio juga digunakan sebagai media hiburan, seperti misalnya pemutaran musik, *talk show* cerita bersambung, dan lain-lain. Sebagai media informasi dan hiburan yang paling digemari



masyarakat, televisi di Kabupaten Jembrana telah dapat menerima siaran seluruh TV Nasional dan beberapa TV lokal di Provinsi Bali. Namun berdasarkan survey primer yang telah dilakukan, belum terdapat siaran TV lokal khusus untuk Kabupaten Jembrana. Berikut adalah data jumlah siaran radio/TV yang bisa ditangkap di Kabupaten Jembrana pada tahun 2014-2018.

Tabel 8.8 : Jumlah Radio/TV di Kabupaten Jembrana Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah
2014	14 (TV) + 7 (Radio)
2015	14 (TV) + 7 (Radio)
2016	14 (TV) + 7 (Radio)
2017	14 (TV) + 7 (Radio)
2018	14 (TV) + 8 (Radio)

Sumber: Dinas Infokom Kab. Jembrana, Tahun 2019

8.5 Karakteristik Transportasi

Sistem transportasi Kabupaten Jembrana melayani dua pola pergerakan yaitu pergerakan regional dan pergerakan antar wilayah di dalam Kabupaten Jembrana sendiri. Pola pergerakan regional terjadi karena posisi Kabupaten Jembrana berada di pintu masuk ke Pulau Bali dari Pulau Jawa yaitu melalui Pelabuhan Gilimanuk. Sedangkan pola pergerakan antar wilayah di dalam Kabupaten merupakan pergerakan antar desa, antara desa dan antar kota kecamatan, antar wilayah kecamatan dan antara kecamatan dengan ibukota kabupaten. Sistem transportasi yang berada di Kabupaten Jembrana tersebut meliputi transportasi jalan raya dan transportasi laut.

8.5.1 Transportasi Darat

1) Jaringan Jalan

Prasarana jaringan jalan yang ada di Kabupaten Jembrana



kondisinya cukup baik terutama dalam menunjang pola pergerakan barang dan orang, sehingga mampu menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan daerah. Prasarana jalan di Kabupaten Jember dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi jalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.9 : Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang Berwenang di Kabupaten Jember, 2014-2018

Kecamatan	Status Jalan			Jumlah
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	
1. Melaya	24,57	1,91	212,71	239,19
2. Negara	9,95	11,82	266,06	287,83
3. Jember	4,60	2,08	204,43	211,11
4. Mendoyo	17,10	0,47	294,23	311,80
5. Pekutatan	15,70	12,59	98,50	126,79
Tahun 2018	71,92	28,87	1 075,93	1 176,72
2017	71,92	28,87	1 075,93	1 176,72
2016	71,92	28,87	941,02	1 041,81
2015	71,92	28,87	941,02	1 041,81
2014	71,92	28,87	941,02	1 041,81

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Jember, Tahun 2019

Untuk jalan kabupaten dari total panjang jalan 1.075 Km dibedakan menurut perkerasan jalannya dengan panjang jalan yaitu; jalan aspal sepanjang 1.129,73 Km dan jalan Kerikil 32,434 Km.

Tabel 8.10 : Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Jember, 2014-2018

Status Jalan	Jenis Permukaan				Jumlah
	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	
1. Jalan Negara	71,92	-	-	-	71,92
2. Jalan Provinsi	28,87	-	-	-	28,87
3. Jalan Kabupaten	1.028,942	32,438	14,550	1.028,942	1 075,93
Tahun 2018	719,53	58,330	29,460	369,390	1 176,72
2017	1.129,73	25,50	-	-	1 176,72
2016	1.016	25,50	-	-	1 041,81
2015	1.016	45,05	-	-	1 041,81
2014	996,76	56,46	-	-	1 041,81

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Jember, Tahun 2019



Kondisi jalan yang terdapat di Kabupaten Jember secara umum dapat di kategorikan baik, rusak ringan, sedang dan rusak berat. Dari data Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, kondisi jalan baik sepanjang 618,740 Km (57,51 %) dan kondisi rusak berat sepanjang 369,390Km (34,33%). Pemerintah Kabupaten Jember setiap tahunnya terus melakukan perawatan dan peningkatan kondisi perkerasan jalan guna menunjang pola pergerakan barang dan orang, sehingga mampu menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan daerah.

Tabel 8.11 : Panjang Jalan Menurut Kondisinya di Kabupaten Jember,
Tahun 2014-2018

Status Jalan	Jenis Permukaan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1. Jalan Negara	71,92	-	-	-	71,92
2. Jalan Provinsi	28,87	-	-	-	28,87
3. Jalan Kabupaten	618,740	58,330	29,460	369,390	1 075,93
Tahun 2018	618,74	156,50	173,14	229,38	1 176,72
2017	617,70	156,50	173,14	229,38	1 176,72
2016	557,23	135,52	215,10	133,96	1 041,81
2015	557,23	135,52	215,10	133,96	1 041,81
2014	501,35	129,27	233,90	177,29	1 041,81
2013	445,20	128,45	273,37	194,79	1 041,81

Sumber: Dinas PUPR Kab. Jember Tahun 2019

Sistem jaringan transportasi menjadi bagian utama dalam pembentukan struktur ruang. Sistem jaringan transportasi memberikan kerangka terhadap struktur ruang kawasan Kabupaten Jember. Sistem transportasi regional yang terdapat di Kabupaten Jember lebih banyak ditunjang oleh sistem transportasi darat. Secara keseluruhan sistem transportasi di Kabupaten Jember masih didominasi oleh angkutan jalan raya, prasarana dan sarana transportasi yang ada pada prinsipnya telah menjangkau daerah-daerah penting di Kabupaten Jember termasuk wilayah perdesaan.



2) Jumlah dan Perkembangan Kendaraan/Moda

Jumlah kendaraan bermotor/ moda yang terdaftar di Kabupaten Jember setiap tahun mengalami peningkatan jumlahnya. Jumlah kendaraan bermotor didominasi oleh jumlah sepeda motor, dimana kepemilikannya setiap tahun terus bertambah. Kendaraan Mobil Pribadi jumlahnya dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan jumlah. Sedangkan kendaraan Angkutan Penumpang justru mengalami penurunan. Data selengkapnya mengenai peningkatan jumlah kendaraan bermotor ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 8.12 : Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018 (unit)

No	Jenis Kendaraan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sepeda Motor	96.399	98.327	100.294	102.299	104.345
2.	Mobil Pribadi	4.290	4.437	4.685	5.164	5.821
3.	Angkutan Penumpang	431	467	507	521	534
4.	Angkutan Barang	4.600	5.335	5.994	6.340	6.587
Jumlah		105.720	108.566	111.480	114.324	117.287

Sumber: UPT Disependa di Kab. Jember & Dinas Perhubungan Prov. Bali

A. 3) Angkutan Umum

Terdapat sekitar 4 trayek angkutan umum dan 26 jumlah ijin trayek tahun 2018. Dari jumlah armada yang beroperasi dapat dilihat bahwa rute trayek meliputi : Negara-Baler Bale Agung-Loloan; Negara-Yeh Embang-Pekutatan, Negara-Tegal Cangkring-Pertigaan Penyaringan, Negara-Banyubiru-Tuwed. Disamping kendaraan bermotor jenis angkutan lainnya yang beroperasi adalah ojek.



Tabel 8.13 : Rute Angkutan Umum di Kabupaten Jember
Tahun 2014- 2018

No	No/Kode Trayek	Nama Trayek	Tahun (Unit)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	TG	Negara-Baler Bale Agung - Loloan	2	2	1	1	1
2	T.1	Negara - Tegal Cangkring - Pertigaan Penyaringan	15	14	12	11	11
3	T.2	Negara - Yehembang - Pekutatan	17	15	14	13	13
4	B.1	Negara - Banyubiru - Tuwed	2	2	2	1	1

Sumber :Dinas Infokom Kab. Jember, Tahun 2019

3) Terminal

Terminal adalah tempat putus arus atau peralihan/perpindahan penumpang orang dan barang dari sistem transportasi yang satu ke sistem transportasi yang lainnya sebagai tuntutan wajar untuk efisiensi dalam sistem transportasi. Terminal selain sebagai bagian integral dari suatu sistem lalu lintas dan angkutan jalan raya juga berupa bagian dari tata ruang kota yang membantu efisiensi pemanfaatan jalan. Terminal penumpang di Kabupaten Jember terdiri dari dua buah terminal yaitu Terminal Penumpang Gilimanuk dan Terminal Penumpang Negara.

Terminal Barang di Kabupaten Jember hanya terdapat satu buah terminal barang yang terdapat di Kecamatan Jember. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 8.14 : Terminal Angkutan Barang dan Kapasitas Kendaraan di Kabupaten Jember Tahun 2018

No	Kecamatan	Terminal	
		Jumlah	Kapasitas (Kendaraan)
1.	Melaya	1	120
2.	Negara	1	50
Jumlah		2	170
2017		2	50
2016		2	50
2015		1	50
2014		1	50

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Jember, Tahun 2019

Terdapat sekitar 5 (lima) jurusan/ trayek yang melewati Terminal Bus Negara yang terbagi kedalam beberapa jenis angkutan umum. Dari keseluruhan jurusan/trayek tersebut terdapat beberapa rute antara lain : Negara-Baler Bale Agung-Loloan; Negara-Yeh Embang-Pekutatan, Negara-Tegal Cangkring-Pertigaan Penyaringan, Negara-Banyubiru-Tuwed. Negara – Gilimanuk dan Negara – Denpasar.

8.5.2 Transportasi Laut

Di dalam sistem transportasi nasional, pelabuhan Gilimanuk merupakan pelabuhan yang melayani lalu-lintas pelayaran antar pulau, terutama angkutan penumpang dan kebutuhan pokok serta distribusi barang dan jasa.



Jaringan

transportasi laut memiliki potensi yang besar dalam pengembangan



wilayah. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional, Kabupaten Jember dilengkapi oleh pelabuhan penyeberangan Gilimanuk, yang melayani penyeberangan orang dan barang antar pulau, dan distribusi ekspor dan impor, serta pelabuhan perikanan di Pengambengan.

1) Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk



Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk dilengkapi dengan fasilitas seperti dermaga 2 buah, dengan kapasitas sandar masing-masing 1 buah kapal. Tempat parkir

7.600 m². Jumlah kapal beroperasi sebanyak 25 unit. Waktu tempuh Gilimanuk-Ketapang ±30 menit dan waktu sandar 30 menit. Perhatian dalam pengembangan jaringan transportasi laut di Kabupaten Jember terfokus pada pelabuhan Gilimanuk, sebagai simpul jaringan transportasi Jawa-Bali, dalam pelayanannya yang mendukung kegiatan perekonomian terutama di sektor pariwisata di Pulau Bali.

2) Pelabuhan Perikanan



Sumberdaya perikanan yang terdapat di sepanjang pantai selatan Kabupaten Jember terkolektif pada satu pelabuhan perikanan di



Pengembangan Kecamatan Negara. Pengembangan pelabuhan perikanan tersebut memberikan kontribusi yang cukup baik dalam perekonomian Kabupaten Jember. Hasil penangkapan ikan laut rata-rata sebanyak 56.947 ton/thn, menggunakan perahu kapal motor sebanyak 1.568 unit dan 312 perahu tanpa motor. Diperlukan jaringan transportasi laut maupun darat yang baik untuk distribusi sumberdaya perikanan di Kabupaten Jember. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan tipe B atau kelas II. Pelabuhan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran 15-16 GT dengan kapasitas 75 kapal atau 2.250 GT sekaligus. Dengan panjang dermaga ≥ 150 m, kedalaman kolam ≥ 2 m dan fasilitas tambat-labuh untuk kapal berukuran ≥ 30 GT, pelabuhan tersebut juga melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan ZEEI dan perairan nasional.



BAB IX

KINERJA EKONOMI DAN KEUANGAN KABUPATEN JEMBER





9.1 Kinerja Ekonomi

9.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Jember menurut Lapangan usaha berdasarkan Harga Konstan (2010) Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9.1 : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018

(Dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.462.938,71	1.527.504,27	1.564.040,61	1.594.067,79	1.700.948,81
B.	Pertambangan dan Penggalian	72.912,96	70.700,67	75.482,97	79.228,01	80.799,02
C.	Industri Pengolahan	359.880,24	382.670,13	401.641,79	410.673,02	422.850,42
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9.889,65	10.286,99	10.450,27	10.493,59	10.790,10
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.935,44	8.024,62	8.349,89	8.473,38	8.708,80
F.	Konstruksi	694.379,29	743.622,97	795.676,58	840.155,82	921.592,49
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Speda	732.871,17	775.312,17	826.618,57	883.507,34	937.866,46
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.126.204,16	1.197.989,26	1.258.233,47	1.315.066,98	1.353.297,95
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	908.738,33	968.484,93	1.055.132,99	1.159.758,29	1.216.888,19
J.	Informasi dan Komunikasi	466.366,93	498.000,00	541.412,77	587.396,94	631.481,90
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	227.369,40	241.057,68	261.261,95	269.214,56	277.918,93
L.	Real Estate	404.940,55	433.904,59	458.530,18	473.275,11	482.229,66
M,N.	Jasa Perusahaan	54.202,98	58.155,54	61.485,81	66.858,84	70.380,95
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	216.998,53	236.857,90	247.845,18	247.520,17	266.826,28
P.	Jasa Pendidikan	146.858,98	160.000,00	175.384,62	189.170,59	204.738,96
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	146.194,69	160.000,00	174.708,35	195.344,69	208.432,23
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	96.285,76	103.742,24	111.678,52	122.141,79	129.122,69
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7.134.967,75	7.576.313,96	8.027.934,52	8.452.346,92	8.924.873,83

Sumber : BPS Kabupaten Jember, Tahun 2019

Berdasarkan PDRB Kabupaten Jember dari tahun 2014 – 2018 atas harga konstan menunjukkan peningkatan dengan rata-rata 5,84% per tahun, selanjutnya berdasarkan harga yang berlaku menunjukkan peningkatan rata-rata 11,19 % pertahun (Tabel 9.2), dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang kontribusi paling besar dan paling rendah adalah pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar.



**Tabel 9.2 : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018**

(Dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.850.134,16	2.121.120,12	2.312.409,30	2.472.716,24	2.715.193,01
B. Pertambangan dan Penggalian	91.863,41	95.126,32	104.284,70	112.700,51	123.917,29
C. Industri Pengolahan	442.429,48	508.835,69	557.955,32	593.875,65	632.945,61
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.772,87	12.394,63	14.506,47	17.435,48	18.757,97
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.188,37	9.158,12	9.871,90	10.521,68	11.230,25
F. Konstruksi	862.256,34	974.903,88	1.074.390,42	1.158.782,80	1.325.597,19
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Speda	889.811,51	994.069,85	1.088.215,73	1.207.791,81	1.310.036,45
H. Transportasi dan Pergudangan	1.538.797,83	1.740.829,36	1.864.367,35	1.971.139,49	2.077.647,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.327.112,04	1.488.795,19	1.651.513,13	1.879.100,10	2.002.899,15
J. Informasi dan Komunikasi	480.745,96	531.581,45	587.804,95	648.552,71	715.578,10
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	288.916,20	326.207,42	364.229,24	389.486,08	415.132,24
L. Real Estate	470.073,35	520.358,49	557.684,50	588.229,19	608.365,00
M,N. Jasa Perusahaan	63.641,28	74.724,90	84.137,88	94.260,62	101.845,70
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan	232.312,15	262.562,83	283.030,57	328.355,77	380.977,71
P. Jasa Pendidikan	175.146,52	200.589,15	231.163,99	257.412,14	288.224,19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	169.890,17	200.374,59	229.582,04	266.024,43	290.715,15
R,S,T,U. Jasa Lainnya	119.900,84	136.618,22	152.520,81	172.724,44	187.432,94
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	9.019.992,48	10.198.250,21	11.167.668,32	12.169.109,14	13.206.495,14

Sumber : BPS Kabupaten Jember, Tahun 2019

9.1.2 Pendapatan (PDRB) per Kapita

Pendapatan per Kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu Negara (daerah). Pendapatan per Kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara (atau PDRB bagi daerah) dengan jumlah penduduk Negara (daerah) tersebut. Berdasarkan formula pendapatan perkapita serta data PDRB dikaitkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Jember, maka dapat dihitung Pendapatan Perkapita Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2019 seperti disajikan pada tabel berikut, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Jember semakin meningkat, hal ini ditunjukkan

meningkatnya Pendapatan Perkapita Penduduk Jember dari Rp26,373 juta tahun 2011 menjadi Rp 40,373 juta tahun 2018

Tabel 9.3 : Pendapatan Perkapita Kabupaten Jember
Tahun 2011-2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Jumlah Penduduk	Pendapatan Perkapita
1	2011	6.972.949,7	264.400	26,373
2	2012	6.972.949,7	266.200	26,194
3	2013	7.769.853,8	268.000	28,992
4	2014	9.019.716,8	269.800	33,431
5	2015	10.273.392,5	271.600	37,825
6	2016	11.167.668,3	273.300	40,862
7	2017	12.169.109,1	324.427	37,510
8	2018	13.206.495,1	327.115	40,373

Sumber : Dukcapil dan BPS Kabupaten Jember Tahun 2019 dan dianalisis

9.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)



Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah peningkatan dalam kapasitas suatu daerah/negara jangka panjang untuk

memproduksi aneka barang dan jasa bagi masyarakatnya. Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan cara membagi selisih nilai PDRB sektor/ sub sektor tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan PDRB sektor/ sub sektor tahun sebelumnya, dikalikan 100. Berdasarkan formula LPE serta dikaitkan dengan data PDRB Kabupaten Jember, maka dapat dihitung LPE Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018 disajikan pada



Tabel berikut. LPE Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018 memperlihatkan bahwa rata-rata LPE dalam empat tahun terakhir 6,02, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki LPE paling tinggi dengan rata-rata 10,88 dan paling rendah adalah Pertambangan dan Penggalian 0,78 dalam lima tahun terakhir.

Tabel 9.4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,32	4,42	2,26	2,10	6,70
B.	Pertambangan dan Penggalian	(1,43)	(3,03)	6,76	5,00	1,98
C.	Industri Pengolahan	7,26	6,36	4,82	2,38	2,97
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,52	(0,38)	7,40	2,38	2,83
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,98	1,12	2,81	2,73	2,78
F.	Konstruksi	0,53	7,09	7,00	5,63	9,69
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Speda	6,07	6,06	6,60	6,64	6,15
H.	Transportasi dan Pergudangan	9,96	6,21	6,44	3,31	2,91
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,51	6,79	7,40	11,25	4,93
J.	Informasi dan Komunikasi	5,82	6,78	8,72	8,49	7,51
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,30	7,34	7,76	2,37	3,23
L.	Real Estate	7,63	7,15	5,68	3,26	1,89
M,N.	Jasa Perusahaan	6,34	7,29	5,73	8,74	5,27
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	9,56	8,31	5,45	(0,13)	7,80
P.	Jasa Pendidikan	9,43	8,95	9,62	7,86	8,23
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,21	9,44	9,19	11,85	6,70
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	6,55	7,74	7,65	9,37	5,72
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		6,05	6,23	6,55	5,48	5,59

Sumber : BPS Kabupaten Jember Tahun 2019

9.1.4 Inflasi dan Indeks Harga Implisit (IHI)



Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga



merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Salah satu cara untuk mengukur Inflasi adalah menggunakan Indeks Harga Implisit (IHI). IHI menggambarkan tingkat perkembangan harga (dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar) atau inflasi secara makro. Indeks harga implisit diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada tahun yang sama dikalikan dengan 100.

Berdasarkan formula Indeks Harga Implisit (IHI) serta dikaitkan dengan data PDRB Atas Harga Berlaku dan PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Jember, maka dapat dihitung IHI Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2018 bahwa Inflasi yang diukur dari IHI Kabupaten Jember dalam tahun 2011 – 2018 rata-rata naik 5,05%. Kondisi ini berarti bahwa secara keseluruhan harga barang dan jasa di Kabupaten mengalami kenaikan rata-rata 5,07% pertahun dari tahun 2011

Tabel 9.5 : Indeks Harga Implisit (IHI) Kabupaten Jember
Tahun 2011 – 2018

No	Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	IHI
1	2011	6.295.532,6	5.999.303	104,938
2	2012	6.972.949,7	6.365.858	109,537
3	2013	7.769.853,8	6.727.786	115,489
4	2014	9.019.716,8	7.134.660	126,421
5	2015	10.273.392,5	7.579.122	135,549
6	2016	11.303.558,3	8.031.150	140,746
7	2017	12.169.109,1	8.454.052	143,944
7	2018	13.206.495,1	8.924.874	147,974

Sumber : BPS Kabupaten Jember Tahun 2019 dan dianalisis



9.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia



(masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara (*daerah*) adalah negara (*daerah*) maju, negara (*daerah*) berkembang atau negara (*daerah*) terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 9.6 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember
Tahun 2014 - 2018

Tahun	Angka Harapan	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)	IPM Jember	IPM Bali
2014	71,39	11,48	7,30	10.944	68,67	72,48
2015	71,43	11,88	7,54	11.168	69,66	73,27
2016	71,57	12,27	7,59	11.343	70,38	73,65
2017	71,7	12,4	7,62	11.468	70,72	74,3
2018	71,91	12,61	7,95	11.666	71,65	74,77

Sumber : BPS Kabupaten Jember Tahun 2019 dan dianalisis



IPM Kabupaten Jembrana tahun 2014 – 2018 rata-rata 70,22, dimana IPM Propinsi Bali setiap tahun selalu lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Jembrana dari tahun 2014 – 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali secara rata-rata lebih maju dari pada Kabupaten Jembrana.

9.1.6 Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dengan masih adanya penduduk miskin maka menunjukkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Terdapat 14 indikator kemiskinan menurut standar BPS yaitu sebagai berikut.

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah



- 8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

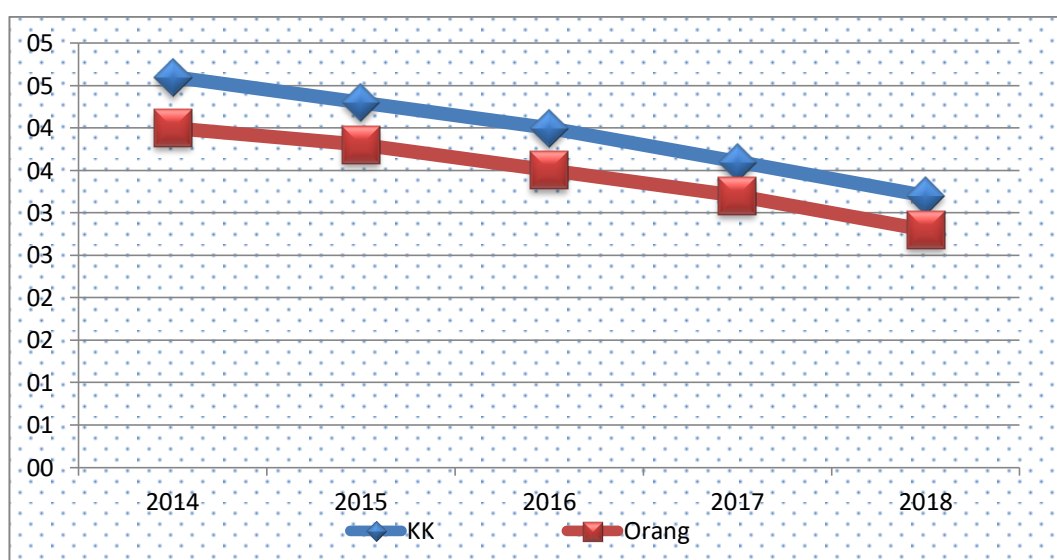
Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jember terus dapat diturunkan. Pada Tahun 2014 jumlah masyarakat miskin sebanyak 4.049 KK atau 12.900 jiwa menurun menjadi 2.928 KK atau 9.163 orang. Persentase KK miskin tahun 2014 sebesar 4,6% KK atau 4,0% orang menjadi 3,2 % KK miskin atau 2,8% orang pada tahun 2018. Jumlah KK miskin tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:



Tabel 9.7 : Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Prosentase	
		KK	Orang	KK	Orang	KK	Orang
1	2014	87.678	320.260	4.049	12.900	4,6	4,0
2	2015	87.892	311.995	3.737	11.703	4,3	3,8
3	2016	89.501	321.474	3.607	11.311	4,0	3,5
4	2017	90.552	323.211	3.283	10.326	3,6	3,2
5	2018	92.256	327.115	2.928	9.163	3,2	2,8

Sumber : Dinas BPMD Kab. Jember 2019



Gambar 9.1 : Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018

9.2 Kinerja Keuangan Daerah



kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi



tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan

9.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD)

Keuangan daerah menjadi salah satu indikator ekonomi yang sangat penting dalam pembahasan perekonomian suatu daerah. Keuangan Daerah dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau PAD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Realisasi APBD Kabupaten Jember tahun 2014 – 2018

Tabel 9.8 : Realisasi APBD Kabupaten Jember Tahun 2014– 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
I. Penerimaan Daerah	823.352.410	903.622.270	1.090.625.089,24	1.186.843.211,31	1.096.498.631,33
1.1 Pendapatan Asli Daerah	89.349.645	98 032 645,96	114.533.486,83	121.342.475,32	126.477.266,85
1.2 Dana Perimbangan	546.799.187	577 461 799,18	707.078.034,67	727.758.128,28	693.195.696,32
1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	187.203.579	228 127 824,37	2.269.013.567,73	337.742.607,71	75.788.035,09
II. Belanja Daerah	786.285.299	885 633 183,66	1.128.489.214,40	1.038.782.383,71	1.217.106.319,88
2.1 Belanja Tidak Langsung	441.901.508	506 733 927,98	520.560.153,25	495.845.592,82	527.066.694,25
2.2 Belanja Langsung	344.383.791	378 899 255,68	607.929.061,15	542.936.790,80	690.039.625,62
III. Pembiayaan	82.265.655	115 887 900,25	115.089.511,06	71.934.879,19	208.295.706,79
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah	90.665.655	124 437 900,25	132.008.467,00	79.834.879,19	219.995.706,79
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.400.000	8 550 000,00	16.918.955,94	7.900.000,00	11.700.000,00
IV. Sisa Lebih Pembiayaan	119.332.767	133 876 986,10	77.225.385,89	219.995.706,71	87.688.018,25

Sumber : Kab. Jember Dalam Angka, tahun 2015,2016,2017,2018,2019 dan dianalisis

Realisasi APBD Kabupaten Jember menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2017 Penerimaan Daerah Kabupaten Jember selalu lebih besar dibandingkan Belanja Daerah dan



pembiayaan, kecuali tahun 2018. Hal ini ditunjukkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan meningkat setiap tahun, Rp 119.332.767 ribu tahun 2014 meningkat menjadi Rp 219.995.706,10 ribu tahun 2017, tetapi tahun 2018 menurun menjadi 97.688.018,25 ribu karena terjadi peningkatan Belanja Daerah baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

9.2.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

1) Rasio PAD dengan Penerimaan Daerah

Rasio PAD dengan Penerimaan daerah sering juga disebut rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan Pendapatan Asli daerah (PAD dibagi dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman (Halim, 2002:128). Rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2002) mengungkapkan Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah meliputi sebagai berikut.



- 0 - 25 % Rendah Sekali
- >25% - 50 % Rendah
- >50% - 75% Sedang
- > 75% - 100% Tinggi

Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Jember dari tahun 2014 – 2018 menunjukkan rasio rata-rata 10,79%, hal ini menunjukkan hanya 10,79% Penerimaan daerah berasal dari PAD, berada pada kategori Rendah Sekali.

Tabel 9.9 : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Penerimaan Daerah	KKD
2014	89.349.645	546.799.187	187.203.579	734.002.766	10,85%
2015	98.032.646	577.461.799	228.127.824	903.622.270	10,85%
2016	114.533.487	707.078.035	2.269.013.568	1.090.625.089	10,50%
2017	121.342.475	727.758.128	337.742.608	1.186.843.211	10,22%
2018	126.477.267	693.195.696	75.788.035	1.096.498.631	11,53%

Sumber : Kab. Jember Dalam Angka, tahun 2015,2016,2017,2018,2019 dan dianalisis

2) Rasio PDRB dengan APBD,

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan dana. Indikator ini dapat menunjukan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan barang dan jasa publik diwilayahnya. Rasio PDRB dengan APBD semakin tinggi menunjukkan kemandirian daerah membiayai berbagai kebutuhan barang dan jasa publik diwilayahnya. Rasio PDRB dengan APBD Kabupaten Jember tahun 2014 – 2018 menunjukkan seperti pada Tabel 8.10



Tabel 9.10 : Rasio PDRB dengan APBD Kabupaten Jember Tahun 2014 -2018

Tahun	PDRB	APBD	Rasio PDRB dengan APBD
2014	9.019.716.820	823.352.410	1095%
2015	10.273.392.520	903.622.270	1137%
2016	11.303.558.380	1.090.625.089	1036%
2017	12.205.336.470	1.186.843.211	1028%
2018	13.206.495.140	1.096.498.631,33	1204%

Sumber : Kab. Jember Dalam Angka, tahun 2015,2016,2017,2018,2019 dan dianalisis

Rasio PDRB dengan APBD Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018 memiliki rata-rata 1100%. Hal ini berarti bahwa PDRB Kabupaten Jember dari tahun 2014 – 2019 lebih besar rata-rata 11 kali dari APBDnya. Rasio PDRB dengan APBD diatas 100 menunjukkan bahwa Kabupaten Jember mampu membiayai berbagai kebutuhan barang dan jasa publik diwilayahnya.

9.2.3 Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:128).

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas



>100	Sangat Efektif
>90 - 100	Efektif
>80 – 90	Cukup Efektif

Rasio Efektivitas Kabupaten Jember tahun 2014 – 2017 Kabupaten Jember diatas 100%, yang menunjukkan Tingkat Efektivitas Keuangan Kabupaten Jember Sangat Efektif, namun tahun 2018 Rasio Efektivitas Kabupaten Jember 97,16% yang berarti Efektif.

Tabel 9.11 : Rasio Efektivitas Kabupaten Jember Tahun 2014 -2018

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas
2014	89.349.645	70.007.620	127,63
2015	98.032.646	80.009.170	122,53
2016	114.533.487	88.244.040	129,79
2017	121.342.475	119.758.100	101,32
2018	126.477.267	130.178.760	97,16

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2015, 2016,2017,2018,2019 dan dianalisis

9.3 Upah Minimum Kabupaten (UMK)



Upah minimum selalu menjadi bahan perdebatan panjang setiap tahunnya. Di Indonesia, ada dua macam upah minimum yaitu UMP dan UMK. UMP adalah Upah Minimum Provinsi sedangkan UMK

adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota

UMP dan UMK memiliki tingkatan yang berbeda karena UMP berlaku untuk seluruh provinsi sedangkan UMK berlaku hanya di kawasan kabupaten/kota yang bersangkutan. Namun, dari segi nilai,



UMK yang merupakan memiliki nilai yang lebih tinggi dari UMP. Hal ini disebabkan oleh UMP yang merupakan batasan dalam penetapan Standar UMK Indonesia.

UMP ditetapkan untuk seluruh propinsi yang mempertimbangkan beberapa faktor yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), tingkat ekonomi daerah, tingkat inflasi, daya beli masyarakat, dan kemampuan industri. Namun, tentunya ada perbedaan kondisi di masing-masing kabupaten/kota. Sebagai contoh, KHL di daerah industri biasanya lebih tinggi dari KHL di daerah kabupaten yang industrinya tidak banyak. Oleh karena itu, UMP dibuat sebagai batas minimum di propinsi tersebut dan UMK harus lebih tinggi atau setidaknya sama dengan UMP.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, upah minimum ditetapkan setiap tahunnya dan berlaku mulai tanggal 1 Januari. Penetapan UMP harus dilakukan jauh hari yaitu setidaknya 60 hari sebelum masa berlakunya. Sedangkan untuk UMK, penetapannya 40 hari sebelum masa berlaku.

UMP dan UMK ditetapkan setiap tahunnya karena selalu ada perubahan ekonomi yang terjadi. Biasanya UMP dan UMK yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun, ada beberapa daerah yang upah minimumnya sama dengan tahun lalu. Tentunya nilai tersebut didapatkan berdasarkan hasil perhitungan yang matang.

Sebelum menetapkan upah minimum, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota melakukan survey untuk menentukan kebutuhan hidup layak (KHL). Penetapan KHL mengikuti standar komponen yang ditetapkan pemerintah pusat yang kini berjumlah 60 komponen. Komponen tersebut meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi,

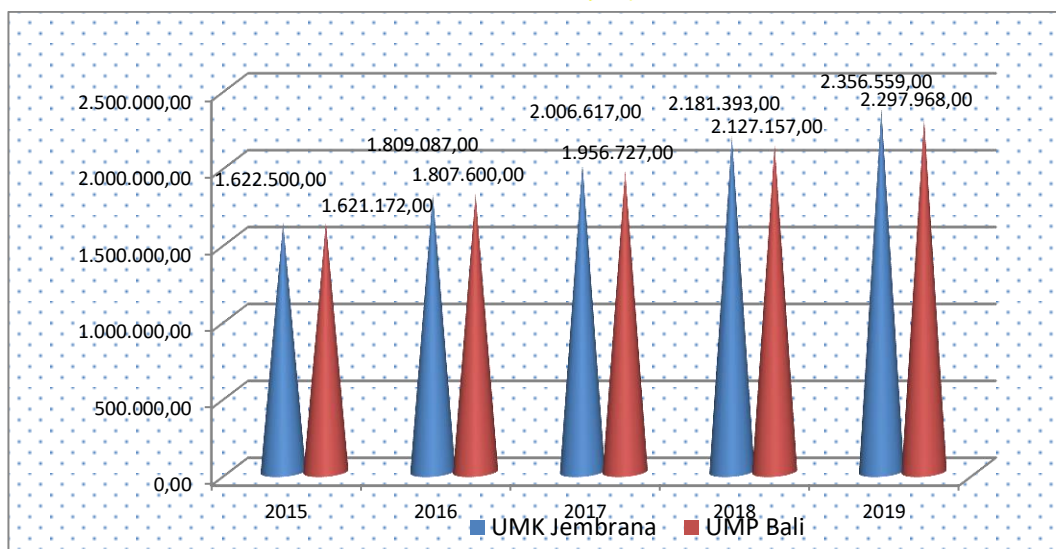


rekreasi, dan tabungan. Setelah didapatkan nilai KHL untuk kawasan tersebut, barulah dilakukan perundingan lebih lanjut mengenai upah minimum.

Dalam menentukan upah minimum, pemerintah daerah selalu melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan pekerja, perwakilan pengusaha, dan pihak netral yang terdiri dari para ahli. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan semua pihak. Pihak pekerja akan terlindungi kebutuhannya sedangkan pihak perusahaan tidak akan kesulitan dalam melakukan kewajibannya. UMK Bali untuk tiap Kabupaten/Kota di Bali ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan selanjutnya selalu dilaporkan ke Kementrian Tenaga Kerja yang selanjutnya akan diberitakan secara luas agar masyarakat Indonesia mengetahui hak dan kewajiban yang tersangkut dengan upah minimum. UMK Jember dan UMP Bali tahun 2015 -2019 disajikan pada table berikut yang menunjukkan UMK Jember rata-rata naik 10% pertahun, dimana UMP Jember selalu lebih besar dari pada UMP Bali.

Tabel 9.12 : Upah Minimum Kabupaten Jember dan Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2015 - 2019

Tahun	UMK Jember (Rp/bulan)	UMP Bali (Rp/bulan)
2015	1.622.500,00	1.621.172,00
2016	1.809.087,00	1.807.600,00
2017	2.006.617,00	1.956.727,00
2018	2.181.393,00	2.127.157,00
2019	2.356.559,00	2.297.968,00



Gambar 9.2 : Upah Minimum Kabupaten Jemberana dan Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019

9.4 Investasi, Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

9.4.1 Investasi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Investasi pada Pemerintahan terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Realisasi Investasi di Kabupaten Jemberana Tahun 2014 – 2019 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 9.13 : Realisasi Investasi di Kabupaten Jemberana Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	Realisasi Investasi (Rp)	
		Penanam Modal Asing (PMA)	Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)
1	2014	-	230.228.972.962
2	2015	-	142.640.196.135
3	2016	-	314.579.253.663
4	2017	1.796.661.612.993.000	201.990.637.737.000
5	2018	-	4.413.136.401.877
Total		1.796.661.612.993.000	207.091.222.561.637

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kab. Jemberana, Tahun 2019



Sektor perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Jember. Apabila dikelola dengan baik, hasil kekayaan alam yang melimpah tersebut, yang terdiri dari potensi laut dan darat akan dapat dijadikan komoditas ekspor ke luar daerah sehingga dapat memajukan perekonomian daerah. Beberapa komoditas yang banyak dikenal dan dihasilkan di Kabupaten Jember tersebut seperti produksi kakao dan ikan laut.

Untuk menunjang sektor perdagangan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, diperlukan dukungan dari sektor industri dan kerajinan. Dengan adanya sektor tersebut, maka nilai ekonomi suatu barang akan semakin meningkat sehingga akan semakin menambah daya jual. Potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Jember, yang dapat dijadikan sebagai bahan mentah, menjadikan sektor industri dan kerajinan memiliki prospek untuk dikembangkan. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk lebih memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (K-UMKM) sehingga mampu memotivasi dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di masyarakat, menciptakan kemandirian masyarakat dalam berusaha, menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9.4.2 Perdagangan

Sektor Perdagangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi paling besar dalam perekonomian baik secara nasional maupun di daerah. Pengembangan sektor perdagangan khususnya perdagangan dalam negeri bertujuan untuk



memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, menjaga stabilitas harga diarahkan pada tingkat yang wajar bagi produsen dan terjangkau oleh masyarakat. Tantangan yang semakin besar di sektor pertanian karena semakin sempitnya lahan, membuat sebagian besar masyarakat cenderung memilih sektor perdagangan sebagai sumber ekonomi. Perkembangan sektor perdagangan juga disebabkan oleh semakin berkembangnya sarana dan prasarana dan infrastruktur wilayah, kemajuan teknologi serta jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan mobilitas yang semakin tinggi.

Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Jember dapat dilihat dari peningkatan jumlah pedagang yang disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tampak jelas dari kontribusi masing-masing sektor dalam membentuk PDRB Jember. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mempunyai keterkaitan dengan pola konsumsi masyarakat mempunyai kontribusi yang paling besar, terpaut sedikit dengan sektor pertanian.

Pada Tahun 2018, jumlah UMKM sektor perdagangan sebanyak 10.557, Formal sebanyak 1.595 unit dan Non Formal sebanyak 8.662 unit. Dilihat berdasarkan Kecamatan, UMKM sektor perdagangan terbanyak ada di Kabupaten Negara yaitu sebanyak 5.003 dan terkecil di Kecamatan Jember sebanyak 588 unit. Secara detail disajikan pada tabel dan gambar berikut.





Tabel 9.14 : Perkembangan Jumlah UMKM Sektor Perdagangan
Kabupaten Jember Tahun 2018

No	Kecamatan	Formal	Non Formal	Jumlah
1	Melaya	151	1.095	1.246
2	Negara	894	4.109	5.003
3	Jember	76	512	588
4	Mendoyo	496	1.681	2.177
5	Pekutatan	318	1.225	1.543
Jumlah		1.595	8.622	10.557

Sumber : Diskopperindag Kab. Jember, Tahun 2019

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Di Kabupaten Jember terdapat beberapa pasar baik dikelola oleh pemerintah kabupaten, perusahaan daerah, dan desa pekramanan.

Data pasar dan pengelolaan pasar Kabupaten Jember sampai dengan tahun 2018 menunjukkan jumlah pasar tradisional sebanyak 17 unit ; 4 unit di Kecamatan Melaya, 3 unit di Negara, 5 unit di Jember, 3 unit di Mendoyo dan 2 unit di Kecamatan Pekutatan.

Tabel 9.15 : Jumlah Pasar Tradisional di Kabupaten Jember
Tahun 2018

Tahun	Kecamatan					Jumlah
	Melaya	Negara	Jember	Mendoyo	Pekutatan	
2018	4	3	5	3	2	17

Sumber : Diskopperindag Kab. Jember, Tahun 2019



Tabel 9.16 : Data Pasar dan Pengelola di Kabupaten Jember Tahun 2018

Nama Pasar	Luas	Bangunan				Jumlah Pedagang	Pengelola
		Toko	Kios	Los	Pelataran		
Pasar Umum Negara	2 ha	84	282	590	25	956	Perusda
Pasar Umum Dauh Waru	15 are	11	7	52	50	70	Perusda
Pasar Anyar Br. Tengah	20 are		42	148	5	190	Perusda
Pasar Umum Melaya	1 ha	12	46	163	5	221	Perusda
Pasar Umum Gilimanuk	1 ha	75	32	165	15	272	Perusda
Pasar Umum Tegal Cangkring	20 are	13	22	121	15	156	Perusda
Pasar Umum Yehembang	30 are	18	50	44	5	112	Perusda
Pasar Pekutatan	50 are	16	15	175	10	206	
Peken Ijo Gading	67 are	0	88	132	0	208	Disperindagkop
Penampungan Kaki Lima							
Pasar Senggol terminal Negara	10 are					88	Perusda
pasar Tradisional (Kuliner)	15 are	13	1			29	Perusda
Pasar Senggol Yehembang	7 are	7	1			27	Disperindagkop
Pasar Senggol Melaya	14 are		1			35	Disperindagkop
Pasar Desa Pekraman							
Pasar Adat Lelateng	22 are		70	177	36	247	desa Adat
Pasar Desa Pekraman Kertajaya Pendem	7,8 are		21	32	6	53	desa Adat
pasar Desa Pekraman baler Bale Agung	10,8 are		31	3	10	60	desa Adat
Pasar Desa Tukadaya	20 are					17	Desa Dinas
Pasar Desa Ekasari	6 are					120	Desa Dinas
TOTAL		249	709	1.801	182	3.067	

Sumber : Diskopperindag, Kab. Jember Tahun 2019

9.4.3 Perindustrian

Kebijakan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran dengan program pembinaan dan pengembangan industri, area industrialisasi di Kabupaten Jember masih terbuka bagi investor. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya kawasan industri yang berkembang di Desa Pengambengan. Sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Jember adalah industri perikanan



dan kerajinan. Selain industri tersebut, industri agrobisnis juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Jember.

Pembangunan sektor Industri Kabupaten Jember senantiasa diarahkan dan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan umum Kabupaten Jember maupun kebijakan pembangunan industri nasional sehingga terjadi sinergi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Jember dalam memajukan pembangunan sektor industri adalah mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif di masyarakat, termasuk usaha industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dalam arti luas dengan penumbuhan dan pengembangan IKM. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Jember yang seluruhnya terdiri IKM tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9.17: Perkembangan Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Investasi Sektor Industri Tahun 2014 – 2018

Tahun	Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Investasi (Milyar)
2014	1.549	13.344	63,84
2015	1.596	9.607	64,92
2016	1.646	8.503	286,26
2017	1.752	8.726	284,28
2018	1.800	8.827	287,44

Sumber : Diskopperindag, Kab. Jember Tahun 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan unit usaha, tenaga kerja dan investasi pada sektor industri Kecil menengah (IKM dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.



9.4.4 Koperasi

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini, apabila dilihat perkembangan jumlah koperasi dan anggota setiap tahunnya di Kabupaten Jember selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa jenis usaha koperasi di Kabupaten Jember masih diminati oleh masyarakat. Data Koperasi di Kabupaten Jember dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan peningkatan, demikian juga yang aktif dan koperasi yang sehat, sedangkan jumlah koperasi yang tidak aktif cenderung menurun.

Tabel 9.13 : Data Koperasi di Kabupaten Jember, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Koperasi	Unit	242	246	253	260	262
2	Koperasi Aktif	Unit	223	228	237	252	254
3	Koperasi Tidak Aktif	Unit	19	18	16	8	8
4	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	124	129	106	130	135

Sumber : Statistik Sektor Kab. Jember, Tahun 2019

9.4.5 Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (formal dan informal) Kabupaten Jember tahun 2018 terdiri dari 2.392 formal dan 15.534 Informal, yang tersebar diseluruh kecamatan, sebagian besar tergolong Usaha Mikro dan sektor Aneka Jasa.



**Tabel 9.12 : Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kabupaten Jember Tahun 2018**

No.	Desa/Kelurahan	Sektor								Klasifikasi							
		Perdagangan		Nelayan/Perikanan		Non Nelayan		Aneka Jasa		Mikro		Kecil		Menengah		Jumlah	
		F	IF	F	IF	F	IF	F	IF	F	IF	F	IF	F	IF	F	IF
1	Kecamatan Melaya	151	1.095	1	98	8	48	34	517	130	1.410	64	342	0	0	194	1.752
2	Kecamatan Negara	894	4.109	8	1.939	37	51	174	1.213	801	5.695	299	1.607	13	0	1.113	7.302
3	Kecamatan Jember	76	512	0	1.230	2	15	22	158	61	1.133	38	782	1	0	100	1.915
4	Kecamatan Mendoyo	496	1.681	7	78	25	103	83	916	358	2.217	243	561	10	0	611	2.778
5	Kecamatan Pekutatan	318	1.225	0	185	5	21	51	356	263	1.361	109	426	2	0	374	1.787
Jumlah		1.935	8.622	16	3.530	77	238	364	3.160	1.613	11.816	753	3.718	26	0	2.392	15.534

Sumber : Diskoperindag Kab. Jember Tahun 2019

Ket : F : Formal

IF : Informal

9.5 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) atau Farmers Term of Trade) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali Tahun 2018 seperti Tabel Berikut.



Tabel 9.20 : Nilai Indeks Petani Provinsi Bali Tahun 2019

Bulan	Indeks Diterima	Indeks Dibayar	Nilai Tukar Petani
Januari	131.14	126.73	103.48
Februari	132.28	127.34	103.88
Maret	132.68	128.19	103.50
April	132.54	128.45	103.18
Mei	132.40	128.26	103.23
Juni	132.92	128.38	103.54
Juli	133.41	129.03	103.40
Agustus	133.61	129.05	103.54
September	132.73	128.51	103.28
Oktober	133.86	129.08	103.70
November	134.06	129.96	103.15
Desember	136.40	131.32	103.87

Sumber : BPS Prov. Bali Tahun 2019

NTP Provinsi Bali Tahun 2018 menunjukka peningkatan relative mengalami peningkatan baik dilihat dari Indeks Diterima, Indeks Dibayar dan Nilai Tukar Petani.

9.6 Lembaga Keuangan

Usaha perekonomian harus didukung dengan adanya sistem keuangan perbankan yang memadai. Dimana bank berfungsi sebagai tempat transaksi keuangan baik untuk menyimpan, meminjam dana dan juga berguna untuk mendukung transaksi perekonomian dalam hal pembayaran. Bank juga berfungsi menyalurkan kredit dalam membantu masyarakat menggerakkan perekonomian suatu wilayah. Disamping Bank Umum komersial dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terdapat pula Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD merupakan salah satu lembaga pengelola dana non bank diharapkan dapat menggerakkan perekonomian secara optimal apalagi di Kabupaten Jember hampir disetiap desa



pekrasan sekarang sudah berdiri LPD. Jumlah LPD di Kabupaten Jember saat ini sebanyak 64 buah.

Perkembangan Simpanan, Pinjaman dan Kredit UMKM Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 8.18. Tabel 8.18 menunjukkan jumlah Simpanan, Pinjaman dan Kredit UMKM mengalami peningkatan, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat perekonomian di Kabupaten Jember meningkat.

Tabel 8.18 : Perkembangan Simpanan, Pinjaman dan Kredit UMKM Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

No	Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Simpanan	1.424.742	1.594.463	1.606.184	1.801.648	1.899.466
	Giro	160.465	214.383	203.529	316.546	130.327
	Simpanan Berjangka	362.194	413.420	413.545	477.544	563.321
	Tabungan	902.083	966.660	989.110	1.007.558	1.205.818
2	Pinjaman/Kredit	1.523.042	1.843.323	2.916.534	3.306.407	3.525.595
	Modal Kerja	653.846	757.267	1.199.697	1.365.662	1.551.831
	Investasi	157.338	233.091	442.544	506.228	447.275
	Konsumsi	711.858	852.965	1.274.293	1.434.517	1.526.489
3	Kredit UMKM	811.169	990.343	1.434.965	1.635.941	1.758.866
	Mikro	341.458	435.674	574.338	672.435	799.595
	Kecil	383.098	439.870	609.404	680.924	724.419
	Menengah	86.613	114.799	251.223	282.582	234.852

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah, Prov. Bali, Januari 2019



BAB X

KINERJA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JEMBER





10.1 Pendidikan

Banyak yang beranggapan bahwa bangsa yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan lebih mampu bersaing dalam memasarkan barang dan jasa yang dihasilkannya, sehingga dengan sendirinya akan menguasai perekonomian dunia. Salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan SDM adalah pendidikan. Karena itu kualitas SDM selalu diupayakan untuk ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas, demi tercapainya keberhasilan pembangunan.



Selanjutnya pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diamanatkan bahwa salah satu tujuan negara yang merupakan prioritas utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah keharusan seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan.



Upaya yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Jember dalam bidang pendidikan mulai tahun 2006, telah memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat. Program yang diusung

oleh Kabupaten Jember adalah pendidikan bersubsidi di kalangan siswa – siswinya baik dari tingkat SD maupun SMP. Berdasarkan program pendidikan gratis tersebut beberapa indikator pendidikan di Kabupaten Jember menunjukkan peningkatan dari tahun – ke tahun.



10.1.1 Kondisi Pendidikan

Jenjang pendidikan di Kabupaten Jember adalah terbagi menjadi : SD/Sederajat, SLTP/Sederajat dan SMA/Sederajat. Jumlah murid paling banyak pada tahun 2018 adalah jenjang pendidikan SD/Sederajat dengan jumlah sebanyak 25.409 siswa sedangkan paling sedikit adalah jenjang SMA/ Sederajat dengan jumlah sebanyak 12.440 siswa

Tabel 10.1 : Jumlah Murid Tiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Murid SD/MI	Jumlah Murid SMP/MTs	Jumlah Murid SMA/SMK/MA
2014	24.607	14.234	8.384
2015	24.729	14.269	11.461
2016	27.446	14.281	11.919
2017	27.972	14.454	12.903
2018	25.409	14.127	12.440

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam Kab. Jember dalam Angka, Tahun 2015, 2016,2017,2019

Fasilitas pendidikan berupa sekolah merupakan persyaratan utama agar kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan. Jumlah sekolah mulai TK sampai dengan SLTA yang ada di Kabupaten Jember adalah sebagai Kabupaten

Tabel 10.2 : Jumlah Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTS/, SMA/SMK/MA di Kabupaten Jember Tahun 2011-2015

Tahun	TK/PAUD		SD/MI		SMP/ MTs		SMA/SMK/MA	
	N	S	N	S	N	S	N	S
2014	5	116	188	9	22	13	11	13
2015	7	116	188	14	22	13	13	15
2016	7	136	188	14	24	12	13	17
2017	6	164	188	16	22	15	14	16
2018	6	199	189	15	22	16	14	15

Sumber : Kab. Jember dalam Angka, Tahun 2015, 2016,2017,2019

Tabel 10.3 : Jumlah Sekolah Berdasarkan Kecamatan SD, SMP, SMA Negeri Dan Swasta di Kabupaten Jember Tahun 2018

Kecamatan	SD		SMP		SMA		SMK	
	N	S	N	S	N	S	N	S
Melaya	36	2	5	3	1	2	1	0
Negara	43	0	3	2	0	4	2	3
Jember	33	1	3	2	2	1	0	2
Mendoyo	47	0	5	0	2	0	1	0
Pekutatan	23	0	2	0	1	0	1	0
Jumlah	182	3	18	7	6	7	5	5

Sumber : Jember dalam Angka, Tahun 2015, 2016,2017,2019

Tabel 10.4 : Jumlah Sekolah Berdasarkan Kecamatan MI,MTs, MA Negeri Dan Swasta di Kabupaten Jember Tahun 2018

Kecamatan	MI		MTs		MA	
	N	S	N	S	N	S
Melaya	1	2	1	4	0	1
Negara	3	7	1	4	1	2
Jember	2	1	1	1	1	0
Mendoyo	1	0	1	0	1	0
Pekutatan	0	2	0	0	0	0
Jumlah	6	6	4	8	3	6

Sumber : Jember dalam Angka, Tahun 2015, 2016,2017,2019

Perkembangan jumlah sekolah SD baik negeri maupun swasta secara keseluruhan di Kabupaten Jember sampai tahun 2018 sebanyak 204 buah, SD/MI Negeri sebanyak 189 buah, swasta 15 buah, SMP/MTs sebanyak 36 buah terdiri dari Negeri 22 buah dan



swasta 16 buah, SMA/SMK/MA sebanyak 29 sekolah terdiri dari Negeri sebanyak 15 buah, swasta 14 buah. Dilihat dari kondisinya sebagian

besar berada pada kondisi baik, termasuk sarana dan prasarana yang ada didalamnya.



Sementara kualitas pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan Guru. guru yang merupakan tenaga pendidik utama dapat melaksanakan tugasnya

sehingga kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik Berikut disajikan jumlah jumlah guru tiap jenjang pendidikan di Kabupaten Jember

Tabel 10.5 : Jumlah Guru Pengajar di Masing-masing Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Jember 2014-2018

Tahun	Jumlah Guru			
	TK/Paud	SD/MI	SMP/MTS	SMA/ SMK/MA
2014	399	1.483	688	869
2015	375	1.661	885	888
2016	481	1.271	905	907
2017	571	1.843	715	977
2018	144	1.612	913	930

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam Kab. Jember dalam Angka, Tahun 2015, 2016,2017,2019

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah rasio guru terhadap murid di Kabupaten Jember dalam perkembangannya mulai tahun 2014-2018.

Tabel 10.6 : Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Jember,
Tahun 2014-2018

Tahun	Rasio Guru terhadap murid		
	SD//MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
2014	16,59	20,69	9,65
2015	14,89	13,88	12,91
2016	21,59	12,69	13,14
2017	15,18	16,13	13,21
2018	15,76	15,47	13,38

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam
Kab. Jember dalam Angka, Tahun 2015, 2016, 2017, 2019 dan
dianalisis

Kualitas pendidikan disamping dipengaruhi oleh tingkat Rasio Guru terhadap murid juga dipengaruhi kualitas guru pengajar. Tingkat pendidikan Guru pengajar merupakan salah satu indikator yang bias digunakan untuk melihat kualitasnya. Berikut table guru pengajar berdasar tingkat pendidikan yang ditempuhnya.

Tabel 10.7 : Jumlah Guru Berdasar Tingkat Pendidikan Terakhir Pada
Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Jember Tahun 2018

Kategori		Laki	Perempuan	Jumlah
SD	Jml Guru	555	813	1.368
	SMA	4	5	9
	D1-D3	15	11	26
	S1	516	777	1.293
	S2	20	20	40
SMP	Jml Guru	329	345	674
	SMA	-	-	-
	D1-D3	5	6	11
	S1	291	315	606
	S2	33	24	57

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Jember, 2019

Angka kelulusan merupakan salah satu ukuran untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan yang sedang berjalan. Ketersediaan sarana prasana sebagaimana yang diuraikan, menjadi



penentu keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tingkat pendidikannya. Berikut tabel angka kelulusan di setiap tingkat pendidikan dari tahun 2014-2018.

Tabel 10.8 : Angka Kelulusan menurut Tingkatan Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Jemberana 2014 - 2018

Tahun	SD	SMP
2014	100	100
2015	100	100
2016	100	100
2017	100	100
2018	100	100

Sumber : ; Dinas Pendidikan ,Pemuda dan Olah Raga, 2019

Sementara sebagai ukuran kualitas dari tingkat kelulusan dapat dilihat dari nilai UAN yang dihasilkan siswa di masing-masing tingkat pendidikan. Selengkapnya nilai UAN dari tahun 2011-2015 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 10.9 : Nilai UN Rata-rata SD dan SMP di Kabupaten Jemberana 2014-2018

Tahun	SD	SMP
2014	7.64	7.24
2015	7.36	5.13
2016	7,48	4,72
2017	7,61	4,91
2018	7,75	4,76

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Jemberana ,2019

10.1.2 Capaian Kinerja Pendidikan

Capaian kinerja pendidikan dalam kajian ini meliputi : Angka Melek Huruf; Angka Partisipasi Kasar (APK); Angka Partisipasi Murni (APM); Angka Partisipasi Sekolah (APS).

1) Angka Melek Huruf

Tujuan utama dari pendidikan dasar adalah memberantas buta huruf (melek aksara). Ini adalah dasar penting bagi pengetahuan yang lebih luas dan pengetahuan yang luas adalah modal utama demi terbentuknya kecakapan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri.



Melek aksara adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Biasanya, tingkat melek aksara dihitung dari persentase populasi dewasa yang bisa menulis dan membaca.

Melek aksara juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam





bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Melek huruf dan pendidikan adalah pintu strategis untuk pengentasan kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Jember mulai tahun 2006, telah menyikapi hal ini dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 tahun 2006 Tentang Subsidi Biaya Pendidikan Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Jember dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 tahun. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 tahun 2006 berfungsi untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada TK,SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan bertujuan untuk membantu meringankan beban orang tua/wali murid pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 tahun 2006, selanjutnya Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar yang salah satunya bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan

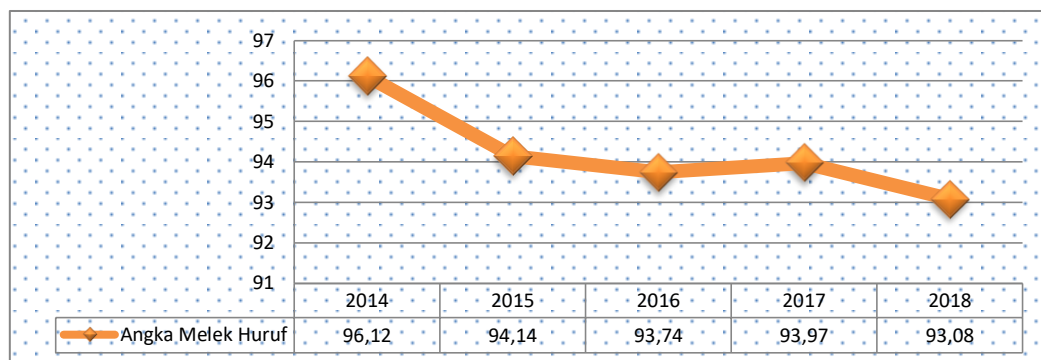
pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut dimaksudkan salah satunya adalah untuk memberantas buta aksara.

Berdasarkan implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang pendidikan dasar, Angka Melek Huruf di Kabupaten Jember dari tahun 2014 – 2018 menunjukkan angka kecenderungan meningkat dari 96,12 tahun 2014 menjadi 92,97 tahun 2018.

Tabel 10.10 Angka Melek Huruf Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

Keterangan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Melek Huruf	96,12	94,14	93,74	93,97	93,08

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam Kab. Jember dalam Angka, Tahun 2015, 2016, 2017, 2019



Gambar 10.1 : Angka Melek Huruf Kabupaten Jember
Tahun 2011 - 2018

2) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak

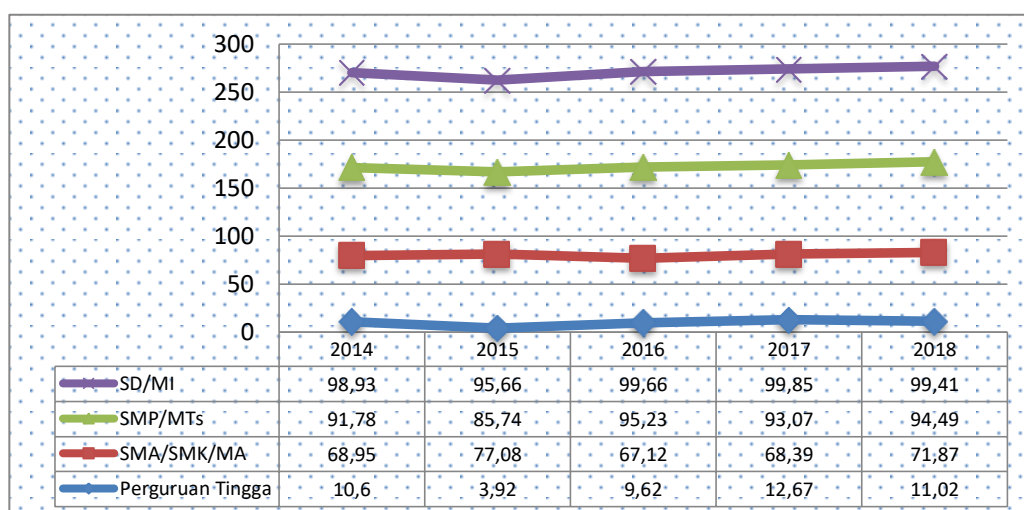


usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 10.11 : Angka Partisipasi Murni Kabupaten Jemberana Menurut Kelompok Usia Tahun 2014 – 2018

APM	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Perguruan Tinggi	10,60	3,92	9,62	12,67	11,02
SMA/SMK/MA	68,95	77,08	67,12	68,39	71,87
SMP/MTs	91,78	85,74	95,23	93,07	94,49
SD/MI	98,93	95,66	99,66	99,85	99,41

Sumber : Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam Kab. Jemberana dalam Angka, Tahun 2015, 2016, 2017, 2019



Gambar 10.2 : Angka Partisipasi Murni Kabupaten Jemberana Menurut Kelompok Usia Tahun 2014 – 2018

APM Kabupaten Jemberana berdasarkan kelompok usia menunjukkan tingkat SD/MI memiliki capaian paling tinggi dibandingkan tingkat SMP/MTs dan SMA/MA. APM Tingkat SD/MI rata-rata 98,70 dalam lima tahun terakhir; SMP/MTs rata-rata 92,06; SMA/MA rata-rata 76,68 ; dan Perguruan Tinggi rata-rata 9,57 . Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah murid kelompok usia sekolah SD pada jenjang pendidikan



SD/MI dengan penduduk usia sekolah SD/MI 98,72% , artinya hanya 0,30% anak usia yang seharusnya di SD/MI tidak sekolah di SD/MI di Kabupaten Jember, ini bisa terjadi karena belum masuk sekolah, sekolah di Kabupaten lain atau sudah sekolah pada tingkat SMP/MTs pada hal usia seharusnya masih sekolah SD

3) Angka Partisipasi Kasar

Selain Angka melek huruf dan Angka Partisipasi Murni, keberhasilan pendidikan juga bisa dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.

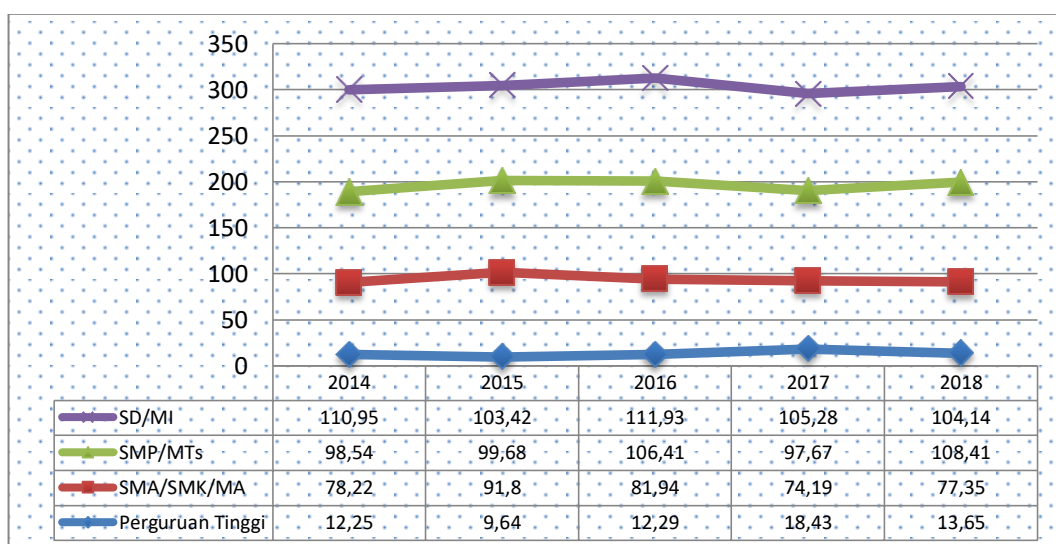
APK Kabupaten Jember pada tahun 2014 -2018 menunjukkan bahwa tingkat SD/MI memiliki capaian paling tinggi dibandingkan tingkat SMP/MTs dan SMA/MA. APK Tingkat SD/MI rata-rata 104,14 dalam lima tahun terakhir; SMP/MTs rata-rata 102,14; dan SMA/MA rata-rata 80,70 dan Perguruan Tinggi 13,25. APK tingkat SD/MI rata-rata 104,14 menunjukkan bahwa di Kabupaten Jember jumlah murid kelompok usia sekolah SD/SD dibandingkan dengan penduduk usia SD lebih besar 4,14%. Kondisi ini disebabkan karena penduduk kabupaten lain sekolah di kabupaten Jember untuk usia SD/MI.



Tabel 10.12 : Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Jemberana Menurut Kelompok Usia Tahun 2014 – 2018

APK	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Perguruan Tinggi	12,25	9,64	12,29	18,43	13,65
SMA/SMK/MA	78,22	91,8	81,94	74,19	77,85
SMP/MTs	98,54	99,68	106,41	97,67	104,14
SD/MI	110,95	103,42	111,93	105,28	108,41

Sumber : Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam Kab. Jemberana dalam Angka, Tahun,2019



Gambar 10.3 : Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Jemberana Menurut Kelompok Usia Tahun 2014-2018

APK tingkat SMP/MTs rata-rata 102,42 menunjukkan bahwa 2,42% penduduk luar Kabupaten Jemberana usia sekolah SMP/MTs sekolah di Kabupaten Jemberana, APK SMA/MA rata-rata 80,70 menunjukkan 19,30% penduduk Kabupaten Jemberana usia sekolah SMA/MA sekolah diluar Kabupaten Jemberana, selanjutnya APK Perguruan Tinggi rata-rata 13,25 menunjukkan bahwa 86,75% penduduk



Kabupaten Jember usia sekolah Perguruan Tinggi sekolah diluar Kabupaten Jember atau sudah bekerja.

10.1.3 Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan secara tidak langsung mendukung penyebaran informasi dan pengetahuan, sehingga memberi dampak dalam peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat. Berikut data tentang Jumlah Perpustakaan, Jumlah Koleksi, dan Jumlah Pengunjung perpustakaan di Kabupaten Jember dari tahun 2015 sampai 2018 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 10.13 : Jumlah Perpustakaan, Koleksi, dan Pengunjung di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jember tahun 2015-2018

Nama	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Jumlah Perpustakaan	303	303	303	273
Jumlah Koleksi				
- Judul	7.375	7.935	8.331	8.886
- Eksemplar	15.961	17.686	18.895	20.798
Jumlah Pengunjung	9.166	10.340	12.550	15.080

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jember, Tahun 2019

Fasilitas yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sampai tahun 2018 adalah 2 unit Mobil Perpustakaan Keliling dan 14 unit Komputer untuk pelayanan internet.

10.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan Kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

10.2.1 Sumberdaya di Bidang Kesehatan

Upaya Kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil guna bila pemenuhan sumber daya tenaga, pembiayaan dan sarana kesehatan dapat memadai dan seimbang dengan kebutuhan. Di Kabupaten Jember kebijakan di bidang kesehatan terus didorong secara berkelanjutan. Berbagai kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya memberikan subsidi biaya kesehatan melalui sharing dana JKBM Pemerintah Provinsi Bali serta secara terus menerus meningkatkan kualitas dan fasilitas atau sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat.

1) Fasilitas/Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Jember tahun 2018 terdiri dari : 4 unit Rumah Sakit 1 milik Pemkab Jember dan 3 unit milik swasta; Puskesmas Rawat Inap 6 unit, Non Rawat Inap 4 unit, Keliling 10 unit dan Pembantu 44 unit; Klinik Pratama 5 unit, Klinik Utama 1 unit, Praktek Dokter Perorangan 14 unit, Praktek Dokter Gigi Perorangan 14 unit, Praktek Dokter Spesialis Perorangan 31 unit, Unit Transfusi Darah 1 unit; serta 44 unit Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

Tabel 10.14 : Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

No	Fasilitas Kesehatan	Pemkab Jember	Swasta	Jumlah
Rumah Sakit				
1	Rumah Sakit Umum	1	3	4



No	Fasilitas Kesehatan	Pemkab Jember	Swasta	Jumlah
2	Rumah Sakit Khusus	0	0	0
Puskesmas dan Jaringannya				
1	Puskesmas Rawat Inap	6	0	6
	- Jumlah Tempat Tidur	104	0	104
2	Puskesmas Non Rawat Inap	4	0	4
3	Puskesmas Keliling	10	0	10
4	Puskesmas Pembantu	44	0	44
Sarana Pelayanan Lain				
1	Rumah Bersalin	0	0	0
2	Klinik Pratama	5	0	5
3	Klinik Utama	1	0	1
4	Balai Pengobatan	0	0	0
5	Praktik Dokter Bersama	0	0	0
6	Praktik Dokter Umum Perorangan	0	69	69
7	Praktik Dokter Gigi Perorangan	0	14	14
8	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	0	31	31
9	Praktik Pengobatan Tradisional	0	0	0
10	Bank Darah Rumah Sakit	0	0	0
11	Unit Transfusi Darah	1	0	1
Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian				
1	Industri Farmasi	0	0	0
2	Industri Obat Tradisional	0	0	0
3	Usaha Mikro Obat Tradisional	0	0	0
4	Produksi Alat Kesehatan	0	0	0
5	Pedagang Besar Farmasi	0	0	0
6	Apotek	0	32	32
7	Apotek Prb	0	0	0
8	Toko Obat	0	10	10
9	Toko Alkes	0	0	0
10	Optical	0	2	2

Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019

2) Tenaga Kesehatan

Salah satu sumber daya kesehatan selain tersedianya sarana pelayanan kesehatan dan sumber pembiayaan kesehatan telah pula

disediakan tenaga kesehatan yang meliputi dokter, bidan, perawat dan lain-lain. Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan bagian yang saling melengkapi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

(1) Persebaran Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Jember telah menunjukkan jumlah yang mencukupi. Masing-masing Puskesmas telah diisi dengan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dasar untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan meskipun masih terdapat Puskesmas yang belum terisi. Tenaga kesehatan yang ada telah tersebar pada sarana pelayanan kesehatan di 5 (lima) Kecamatan yang terdiri 10 Puskesmas seperti tertera di dalam tabel.

Tabel 10.15 : Persebaran Tenaga Kesehatan di Puskesmas di Kabupaten Jember Tahun 2018

No	Jenis Tenaga	Puskemas										Klinik Di Dinas Kesehatan	RSU Negara	RSU Bunda	RSU Kertayasa	RSU Balimed	Jumlah
		Melaya I	Melaya II	Negara I	Negara II	Jember I	Jember II	Mendo I	Mendo II	Pekutan I	Pekutan II						
1	Dokter umum	5	5	3	5	2	5	4	2	4	4	0	18	9	7	15	88
2	Dokter Spesialis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	16	6	20	63
3	Dokter gigi	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	0	3	2	2	3	31
4	Bidan	21	34	32	24	14	22	29	14	26	13	0	63	24	10	26	352
5	Perawat	11	8	5	7	4	7	9	6	9	3	0	175	24	18	24	310
6	Farmasi	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	0	11	5	3	4	37
7	Kesehatan Masyarakat	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	9
8	Kesehatan Lingkungan	0	2	2	2	1	1	0	0	1	1	2	1	0	0	1	14
9	Gizi	2	1	1	2	1	1	2	0	3	2	0	7	1	1	1	25
10	Laboratorium Medik	2	3	1	2	1	2	1	1	2	2	0	8	2	1	4	32
11	Ketrampilan fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3
12	Teknisi Medis	0	1	0	1	1	0	1	0	2	1	0	13	4	1	3	28
13	Biomedik Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	4	3	6	24
14	Tenaga Penunjang Kesehatan	17	27	14	23	18	24	20	18	19	14	0	203	32	27	55	511
	Jumlah	62	87	62	70	46	65	71	44	71	43	6	535	123	80	162	1527

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019

(2) Rasio Tenaga Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan maka upaya dititik beratkan pada pelayanan

kesehatan dasar sebagai upaya terpadu yang diselenggarakan melalui Puskesmas. Gambaran mengenai Keadaan Tenaga Kesehatan yang bekerja di Kabupaten Jember termasuk yang bekerja di RSUD Negara termasuk RSUD Suasta menunjukkan bahwa Dari jumlah penduduk di kabupaten Jember pada tahun tahun 2014 sebesar 269.800 Jiwa dan tahun 2015 sebesar 271.600 Jiwa, tahun 2016 sebesar 273.300 jiwa, tahun 2017 sebesar 274.900 jiwa dan tahun 2018 sebesar 276.600 jiwa. Maka berdasarkan rasio 100.000 penduduk, menunjukkan nilai rasio sebagai berikut :

Tabel 10.16 : Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jember Tahun 2014- 2018

No.	Jenis Tenaga	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	Dokter Spesialis	14	5,08	15	5,55	19	7	21	7,68	40	14,55	63	22,40
2	Dokter Umum	54	19,59	79	29,28	80	29,46	69	25,25	76	27,65	88	31,40
3	Dokter Gigi	10	3,62	12	4,45	20	7,36	26	9,51	25	9,09	31	11,80
4	Bidan	212	153,63	237	174,4	253	184,94	265	192,59	302	218,05	352	127,30
5	Perawat	229	83,07	216	80,05	248	71,06	249	66,58	281	94,58	310	112,10
6	Farmasi	12	5,54	27	10	31	11,42	32	11,7	37	13,82	37	13,38
7	Kesehatan Masyarakat	21	7,61	38	14,08	31	11,41	29	10,61	30	10,91	9	3,25
8	Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	5,06
9	Gizi	19	8	22	8,15	23	8,47	21	7,68	22	8	25	9,04
10	Laboratorium Medik	21	6,17	15	5,56	20	7,36	14	5,12	16	5,82	32	11,57
11	Terapi Fisik	1	0,2	0	0	3	1,1	2	0,73	4	1,46	3	1,08
12	Teknis Medik	2	0,73	24	8,89	41	15,1	24	8,78	11	4	28	10,12
13	Biomedik Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	8,68
14	Tenaga Penunjang Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	184,74

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019

3) Pembiayaan Kesehatan

Anggaran Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Jember yang bersumber dari dana APBD dari tahun 2014 sampai dengan

tahun 2018 berfluktuasi, hal mana mempengaruhi Anggaran kesehatan perkapita di Kabupaten Jember, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 10.17 : Anggaran Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014– 2018 (dalam rupiah)

Tahun	APBD			Jumlah Penduduk	Per Kapita	
	Total	Kesehatan	% Kes. thd. Total		Total	Kesehatan
2013	797.854.892.375	106.239.371.099	13,32	275.615	2.894.816	385.462
2014	903.784.555.025	119.985.975.535	12,34	269.800	3.349.831	444.721
2015	1.011.594.916.859	195.319.916.859	19,31	271.600	3.724.576	719.145
2016	1.083.886.940.414	68.466.892.293	6,32	273.300	3.965.923	250.519
2017	1.201.592.435.477	216.551.832.149	18,02	274.900	4.371.016	787.747
2018	1.329.738.139.789	98.830.588.041	7,43	276.600	4.807.441	357.305

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Negara 2017.

10.2.2 Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum (RSU) Negara satu-satunya Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Jember memiliki Sarana kesehatan sebagai berikut.

1) Unit Rawat Inap

Pelayanan rawat inap memegang peranan penting dalam menunjukkan kemampuan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh sebuah rumah sakit. RSUD Negara memiliki kapasitas 125 bed, pelayanan rawat inap diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang prima. Ruang Rawat Inap RSUD Negara terdiri dari 7 (tujuh) ruang dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Ruang Anggrek untuk penyakit dalam dan saraf
- 2) Ruang Bakung untuk kebidanan dan penyakit kandungan
- 3) Ruang Puduk untuk prinatologi

- 4) Ruang Cempaka untuk penyakit anak
- 5) Ruang Dahlia untuk bedah
- 6) Ruang Flamboyan untuk bedah
- 7) Puri Rahayu untuk perawatan VIP
- 8) ICU

Jumlah ruang, tempat tidur yang dimiliki RSU Negara memperlihatkan bahwa RSU Negara memiliki layanan Rawat Inap sebanyak 149 bed juga ditunjang dengan layanan laboratorium, *rontgent*, farmasi, Palang Merah Indonesia (PMI), dan layanan *ambulance*.

Table 10.18 : Jumlah Ruang, Tempat Tidur dan Jumlah Bed di RSU Negara Tahun 2018

No	Layanan	Kelas						Jumlah Bed
		I	II	III	Utama I	Utama II	Non Kelas	
1	Anggrek	8	12	0	0	0	0	20
2	Bakung	4	6	12	0	0	0	22
3	Pudak	0	0	0	0	0	15	15
4	Cempaka	4	4	12	0	0	0	20
5	Dahlia	4	6	12	0	0	0	22
6	Flamboyan	0	0	32	0	0	0	32
7	Puri Rahayu	0	0	0	6	8	0	14
8	Icu	0	0	0	0	0	4	4
Jumlah		20	28	68	6	8	19	149

Sumber : Profile Rumah sakit Umum Negara Tahun 2019

2) Unit Rawat Jalan

Fasilitas Unit Rawat Jalan yang ada di RSU Negara meliputi sebagai berikut.

(1) Poliklinik Umum

Unit pelayanan yang menangani kasus-kasus untuk konsultasi rawat jalan. Memiliki unit layanan konsultasi dokter umum dan



dilengkapi ruang pemeriksaan dan peralatan. Unit ini ditangani oleh satu orang dokter umum dan dua orang perawat. Poli ini juga digunakan untuk pemeriksaan penyakit mata bila ada kunjungan dokter mata yang dilaksanakan dengan cara kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar.

(2) Poliklinik Kebidanan dan KB

Unit pelayanan ini menangani pemeriksaan untuk konsultasi rawat jalan kebidanan dan Keluarga Berencana, pemeriksaan kehamilan dan post melahirkan. Poliklinik ini dilengkapi meja Gynecologi standart dan USG, yang ditangani oleh satu orang dokter spesialis Obgyn dari 3 oarang dokter spesialis obgyn yang ada di RSUD yang bertugas secara bergantian sesuai dengan jadwal dan dibantu oleh tiga orang bidan.

(3) Poliklinik Gigi

Unit pelayanan yang menangani pemeriksaan dan perawatan gigi dengan jenis-jenis pelayanan seperti : ekstraksi gigi, pembersihan plak dan karang gigi, penambalan gigi dan pemeliharaan gigi serta penyakit gigi dan mulut lainnya. Unit ini dilengkapi dengan dua dental unit yang ditangani oleh 1 orang dokter gigi spesialis, 4 orang dokter gigi dan 3 orang perawat gigi.

(4) Poliklinik Bedah

Unit pelayanan ini menangani pemeriksaan untuk konsultasi rawat jalan bedah dengan jenis-jenis pelayanan antara lain : rawat luka, pasang/buka kateter, perawatan post operasi. Unit ini dilengkapi *Viewer Box* (lampu baca rontgen) dan ditangani oleh satu orang dokter umum, satu orang dokter spesialis bedah umum dari 2 dokter spesialis bedah umum yang ada dan 4 orang perawat.



(5) Poliklinik Bedah Orthopedi

Poliklinik ini baru dimulai pada bulan September 2015, melayani kasus – kasus bedah tulang (orthopedic) yang ditangani oleh dokter spesialis bedah orthopedic dan dibantu oleh 2 orang perawat

(6) Poliklinik Syaraf

Unit pelayanan ini menangani kasus-kasus penyakit syaraf, unit ini ditangani oleh satu orang dokter umum, satu orang dokter spesialis syaraf dan dua orang perawat.

(7) Poliklinik Penyakit Dalam.

Unit pelayanan ini menangani kasus-kasus internis, dimana unit ini dilengkapi dengan ruang pemeriksaan , peralatan ECG dan *Viewer Box* (lampu baca rontgen) serta ditangani satu orang dokter spesialis penyakit dalam dari 3 orang dokter spesialis , satu orang dokter umum dan tiga orang perawat.

(8) Poliklinik Anak

Unit pelayanan ini menangani konsultasi dan pemeriksaan pada bayi, balita dan anak (dibawah usia 12 tahun). Poliklinik ini ditangani oleh satu orang dokter spesialis anak, dari 3 dokter spesialis , 1 orang dokter umum dan dua orang perawat.

(9) Poliklinik THT

Unit pelayanan ini dilayani oleh satu orang dokter spesialis THT dan dua orang perawat.

3) Instalasi Gawat Darurat 24 jam

Unit pelayanan ini menangani kasus-kasus yang bersifat kegawat daruratan, yang terdiri dari kasus darurat bedah dan darurat non bedah serta kasus kebidanan. Unit ini dalam satu kali shift jaga



ditangani oleh satu orang dokter umum dan 4 orang perawat dan 2 orang bidan. Total jumlah tenaga perawat di IRD adalah 24 orang dan bidan 10 orang.

4) Penunjang Medis

Penunjang medis yang dimiliki RSUD Negara sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut.

(1) Bedah Sentral

Instalasi bedah sentral yang dimiliki RSUD Negara meliputi bedah umum dan bedah kebidanan dan penyakit kandungan. Fasilitas ini dilengkapi dengan 3 (tiga) kamar operasi. Unit ini ditangani oleh lima orang dokter spesialis bedah umum, dua orang spesialis ginekologi, dua orang spesialis anesthesi, empat orang anesthesi dan lima orang perawat

(2) Laboratorium

Instalasi ini merupakan penunjang dalam upaya menentukan diagnose penyakit pasien secara tepat dan akurat. Tindakan atau treatment medis yang akan diberikan kepada pasien sangat mempertimbangkan hasil laboratorium yang diperoleh. Jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat dilaksanakan di RSUD Negara terdiri dari : pemeriksaan kimia klinik dan pemeriksaan rutin. Saat RSUD Negara sudah menggunakan komperisasi. Unit ini ditangani oleh satu orang dokter spesialis Patologi Klinik, satu orang analis dan empat orang pembantu analis serta satu orang staf, unit ini buka 2 shift (pagi dan sore).

(3) Apotek

Pelayanan yang diberikan oleh apotek Rumah Sakit Umum Negara berupa penyediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan



bagi pasien rawat jalan dan rawat inap, sekaligus pelayanan obat-obatan bagi masyarakat luas. Unit ini buka 24 jam.

(4) Instalasi Radiologi

Unit ini memberikan pelayanan radiology, khususnya untuk pemeriksaan rontgent dan USG. Unit ini ditangani oleh satu orang dokter spesialis radiology, dua orang tenaga AKPRO dan satu orang staf administrasi.

(5) Instalasi Gizi

Instalasi Gizi RSUD Negara menangani gizi untuk pasien rawat inap (pengadaan makanan pasien) serta menangani konsultasi rawat jalan. Unit ini ditangani oleh dua orang tenaga gizi dan 6 orang staf.

(6) Rehabilitasi medik

Unit Rehabilitasi medik memberikan pelayanan terapi medik kepada pasien yang membutuhkan, unit ini dilayani oleh satu orang fisiotherapi.

(7) Unit Central Sterile Supply Departement (CSSD)

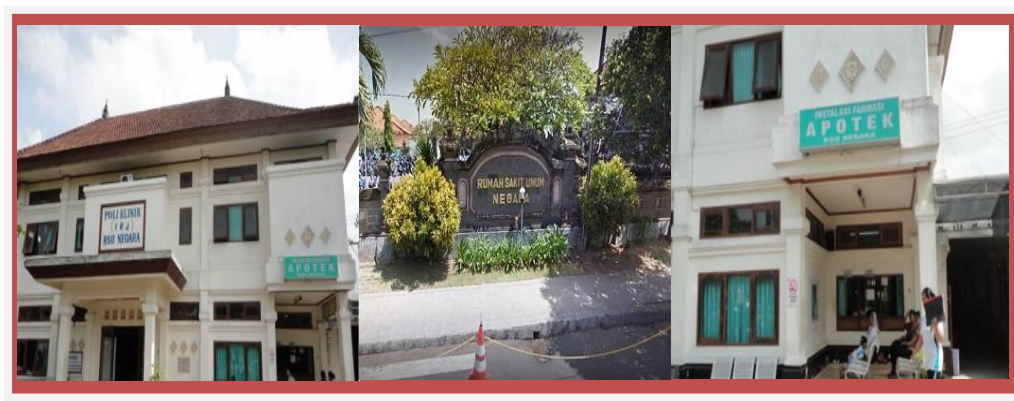
Unit Sterilisasi ini bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap semua kebutuhan kondisi steril atau bebas dari semua mikroorganisme secara tepat dan cepat, sterilisasi ini bertujuan untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi . Unit CSSD di RSUD Negara sudah mempergunakan alat sterilisator yang canggih dan memenuhi standart kesehatan. Jumlah tenaga yang bertugas di CSSD hanya 4 orang dan telah mendapat pelatihan CSSD.

5) Pelayanan Lain

Pelayanan lain yang dimiliki RSUD Negara meliputi : Pelayanan Cek Up, Ambulance dan Pelayanan BPJS/Askes. Ambulance merupakan unit bergerak ini memberikan pelayanan kegawat



daruratan, pelayanan ambulance jenazah dan referral pasien. Sarana yang ada adalah satu ambulance jenazah, lima ambulance pasien yang ditangani enam orang sopir.



10.2.3 Capaian Kinerja di Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah



satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan Kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. .

1) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk mengukur kinerja di bidang kesehatan, Pemerintah telah mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku secara nasional. Adapun capaian Indikator Kinerja SPM Kesehatan di Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 10.19 : Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2017

No	Indikator	Realisasi	Sasaran	Capaian (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K4	4.629	5.248	88,21
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.604	5.009	91,9
3.	pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	4.608	4.773	96,54
4.	Pelayanan Kesehatan Balita (0–59 bulan)	18.536	20.153	91,98
5.	Pelayanan Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar (kls.1 dan kls 7)	9.192	9.339	98,43
6.	Pelayanan Kesehatan usia produktif (usia 15-59 tahun) yang mendapat scrining kesehatan sesuai dengan standar	96.716	176.500	54,80
7.	Pelayan kesehatan terhadap usia lanjut	7.410	33.9908	21,80
8.	Pelayanan kesehatan penderita Hypertensi	4.021	32.912	12,22
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus (DM)	1.567	14.193	11,04
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	280	328	85,37
11.	Pelayanan Kesehatan penderita TB	201	222	90,54
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	4.972	9.786	50,81

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2019

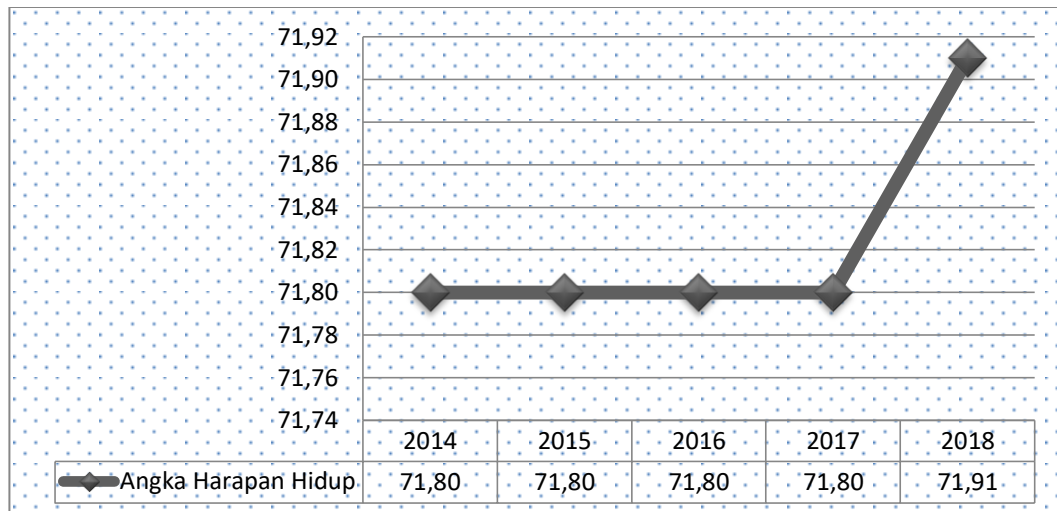
2) Angka Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat selain ditentukan oleh menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian juga ditentukan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup. Tinggi rendahnya Angka Umur Harapan Hidup menggambarkan tinggi rendahnya taraf hidup suatu daerah. Dengan melihat Angka Kematian Bayi dan Angka Umur Harapan Hidup dapat ditentukan indeks mutu hidup atau Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah secara lengkap. Estimasi menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup Kabupaten Jember tahun 2014 – 2018 sama yaitu 71,80 tahun dan tahun 2019 71,91 tahun.

Tabel 10.20 : Angka Harapan Hidup Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

Keterangan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Umur Harapan Hidup	71.80	71.80	71,80	71,80	71,91

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 10.4 Angka Harapan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

3) Angka Kematian

Angka Kematian secara umum berkaitan erat dengan tingkat Angka Kesakitan dan Status Gizi. Indikator untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan dilihat dari perkembangan Angka Kematian. Tingkat Angka Kematian dari beberapa indikator, antara lain :

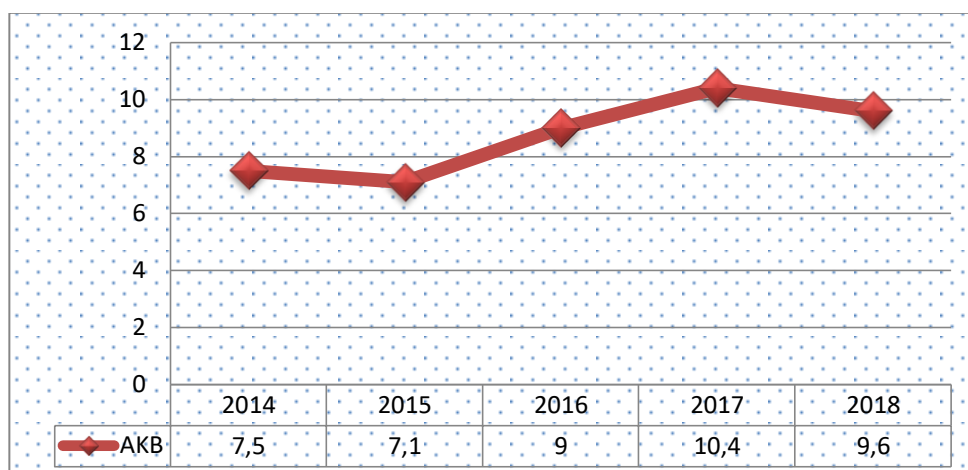
(1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* , selama lima tahun 2014-2018 sebagai berikut.

Tabel 10.21 Angka Kematian Bayi Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
AKB	7,5	7,1	9,00	10,45	9,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2019



Tabel 10.5 : Angka Kematian Bayi Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

AKB Kabupaten Jember tahun 2014-2018 berfluktuasi dari tahun 2014-2018 dimana pada tahun 2014 sebesar 7,5/1.000 kelahiran hidup yaitu jumlah kematian bayi sebesar 35 dari jumlah kelahiran hidup yaitu 4.671 orang , pada tahun 2015 sebesar 7,1 /1.000 kelahiran hidup yaitu jumlah kematian bayi sebesar 34 orang dari jumlah bayi lahir hidup sebesar 4.804 orang , tahun 2016 sebesar 9,0/1.000 kelahiran hidup yaitu jumlah kematian bayi sebesar 43 orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 4.784 orang dan tahun 2017 sebesar 10,4/1.000 kelahiran hidup yaitu jumlah kematian bayi sebesar 48 orang dari jumlah kelahiran hidup yaitu 4.605 orang, tahun 2018 sebesar 9,6 /1.000 kelahiran hidup yaitu jumlah kematian bayi sebesar 31 orang dari jumlah kelahiran hidup yaitu 4.505 orang ini menunjukkan trend penurunan yang menunjukkan pelayanan kesehatan sudah semakin baik.

(2) Angka Kematian Balita (AKABA)

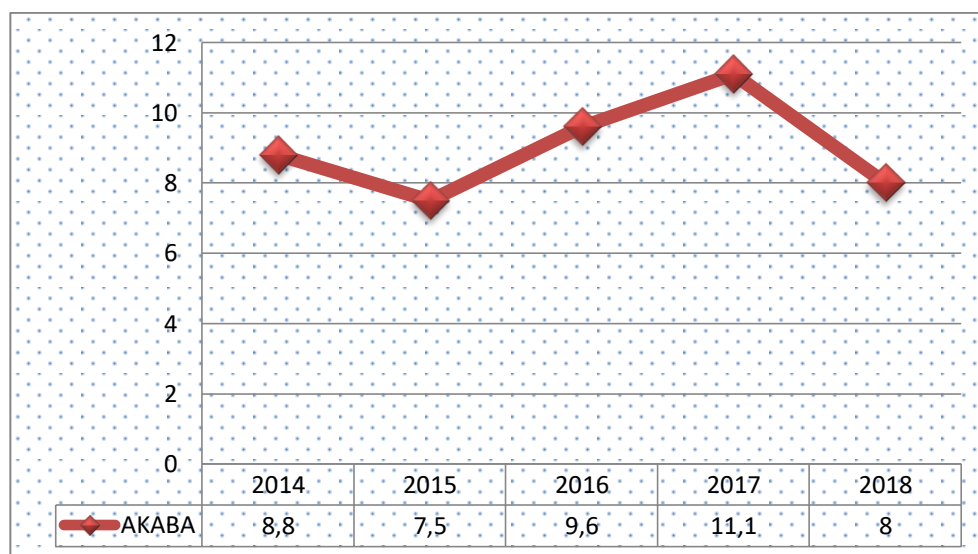
Angka Kematian Balita (AKABA), selama lima tahun terakhir berfluktuasi juga naik turun yang tidak begitu berpengaruh , tahun

2014 meningkat menjadi 8,8/1.000 kelahiran hidup dari jumlah kematian balita sebesar 41 orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 4.671 orang pada tahun 2015 yaitu 7,5/1.000 kelahiran hidup dimana jumlah kematian balitanya sebesar 36 orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 4.804 orang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tahun 2016 sebesar 9,6 / 1.000 kelahiran hidup dimana jumlah kematian balita sebesar 46 orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 4.748 orang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2017 sebesar 11,1 / 1.000 kelahiran hidup dimana kematian balita sebesar 51 orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 4.605 orang, dan tahun 2018. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 10.22 Angka Kematian Balita Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Indikator	T a h u n				
	2014	2015	2016	2017	2018
AKABA	8,8	7,5	9,6	11,1	8,0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember , Tahun 2019



Tabel 10.7 Angka Kematian Balita Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018



(3) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) menunjukkan jumlah kematian ibu pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu ini dipergunakan untuk menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, keadaan sosial ekonomi, kondisi kesehatan lingkungan serta fasilitas dan tingkat pelayanan prenatal. Angka Kematian Ibu Kabupaten Jember tahun 2014 sebesar 42,8/100.000 kelahiran hidup, dimana jumlah kematian ibu bersalin sebesar 2 orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 4.671 orang dimana kematian disebabkan dengan diagnose Obstetrik 0 dan Non Obstetrik 2 orang.

Tahun 2015 sebesar 145,7/100.000 kelahiran hidup dimana jumlah kematian ibu bersalin sebesar 7 orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 4.808 orang terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya ini disebabkan oleh kematian dengan diagnose obstetrik 3 orang dan non obstetrik 4 orang .

Tahun 2016 sebesar 104,5 / 100.000 kelahiran hidup terjadi penurunan kembali dimana jumlah kematian ibu sebesar 5 orang dari jumlah kelahiran hidup sebesar 4.784 orang , ini disebabkan kematian dengan diagnose Obstetrik 1 orang , Non Obstetrik 4 orang (Penyakit jantung kanker dan LSE).

Tahun 2017 sebesar 108,6/100.000 kelahiran hidup 4.605 orang dimana jumlah kematian ibu sebesar 5 orang, diantaranya penyebab kematian obstetrik yaitu 2 orang dan Non Obstetrik 3 orang ini disebabkan oleh penyebab kematian dengan diagnose Obstetrik tiga orang, Non Obstetrik empat orang (kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung, kanker dan LSE).

Tahun 2018 sebesar 66,59 /100.000 kelahiran hidup 4.505 orang dimana jumlah kematian ibu sebesar 3. orang, diantaranya penyebab kematian perdarahan 2 orang dan lain-lain 1 orang

Tabel 10.23 : Diagnose Kematian Ibu Hamil di Kabupaten Jember
Tahun 2014-2018

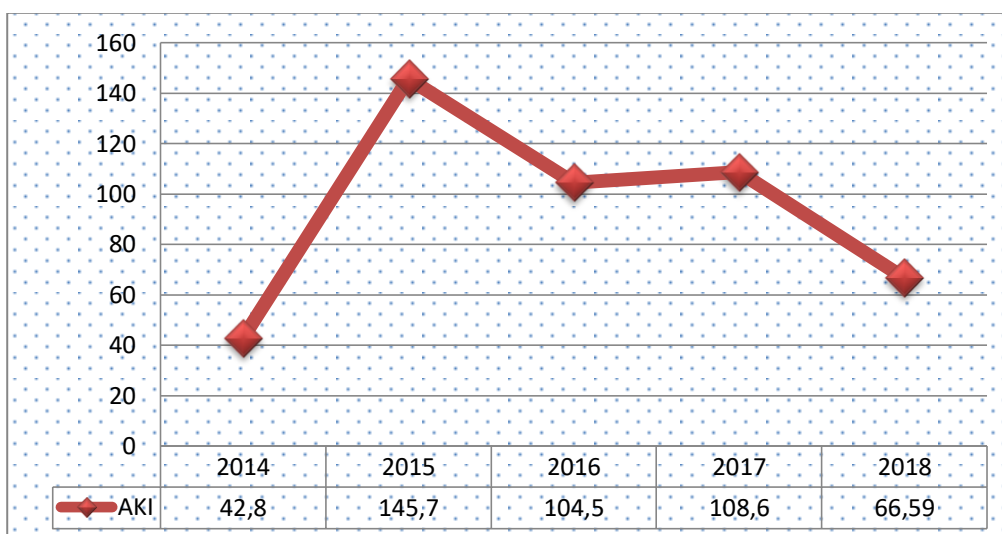
No	Diagnosa	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Obstetric	0	3	1	2	0
2	Non Obstetric	2	4	4	3	0
3	Pendarahan	0	0	0	0	1
Jumlah		5	2	5	5	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, tahun 2019

Tabel 10.24 : Angka Kematian Ibu Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
A K I	42,8	145,7	104,5	108,6	66,59

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2019



Gambar 10.6 : Angka Kematian Ibu Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018



(4) Angka Kematian Kasar (AKK)

Angka Kematian Kasar (AKK) atau Crude Death Rate (CDR) menunjukkan jumlah kematian yang terjadi per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi di suatu daerah. Tingginya Angka Kematian Kasar menunjukkan keadaan status kesehatan, ekonomi, lingkungan fisik dan biologik masyarakat di wilayah tersebut masih rendah.

Menurut Data Rumah Sakit Umum Daerah Negara, jumlah kematian dalam tahun 2018 sebanyak 543 jiwa. Merujuk dari data tersebut maka Angka Kematian Kasar (CDR) Kabupaten Jember mencapai 1,98 per 1.000 penduduk dan tahun 2017 jumlah pasien keluar mati sebesar 498 jiwa atau angka kematian kasar (CDR) 1,81 per 1.000 jumlah penduduk dimana mengalami penurunan 0,01 % dari tahun sebelumnya ini berarti akses pelayanan kesehatan di RSUD Negara sudah semakin baik dan tahun 2018 jumlah pasien keluar mati sebesar 553 jiwa.

4) Angka Kesakitan

a) Pola Penyakit dan Angka Kesakitan Penderita Rawat Jalan

(1) Puskesmas.

Pola Penyakit (10 besar Penyakit) Rawat Jalan di Puskesmas untuk Semua Golongan Umur Kabupaten Jember Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 10.25 : Pola Penyakit (10 besar Penyakit) Rawat Jalan di Puskesmas untuk Semua Golongan Umur Kabupaten. Jember Tahun 2018

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Nassoparingitis Akut (common cold)	15.054
2	ISPA	14.706
3	HT	12591
4	Faringitis Akut	10.002
5	Dispepsia	7.890
6	DM	7.564
7	Artritis	6.719
8	Kecelakaan dan Ruda Paksa	6.659
9	V.app	4.281
10	Gastritis Akut	4.234

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019

(2) Rumah Sakit

Pola penyakit Rawat Jalan semua golongan umur Tahun 2018 dari laporan data kesakitan di Kabupaten Jember antara lain seperti dalam tabel berikut

Tabel 10.26 : 10 (Sepuluh) Besar Diagnosa Di IRJA RSU Negara Tahun 2018

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	End – stage renal disease	8.889
2	HIV disease resulting in multiple infections	2.862
3	Cerebral Infaction unspecified	2.246
4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	2.208
5	Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure	2.009
6	Asthma unspecified	1.934
7	Essential (primary) hypertension	1.753
8	Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complication	1.526
9	Congestive heart failure	1.147
10	Grand Mal seizures unspecified	1.043

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember Tahun 2019

Tabel 10.27 : 10 (Sepuluh) Besar Diagnosa Di IRNA
RSU Negara Tahun 2018

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Anameia, unspecified	570
2	Essential (primare) hypertension	455
3	Congestive heart failure	396
4	Cerebral infarction, unspectified	322
5	Non-insulin-defedent diabetes millitus:with peripheral circulatory complication	312
6	Acute renal failure,unspectified	289
7	Pnemonia, unspecsified	254
8	Volume depletion	185
9	Disease of stomach and deodenum unspecefied	182
10	Cronic obstructive pulmena dieasei unspecified	179

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember Tahun 2019

(3) Indikator Pelayanan

Indikator pelayanan rumah sakit digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator-indikator berikut bersumber dari sensus harian rawat inap. Di RSU Negara indikator pelayanan dapat diukur melalui beberapa indikator seperti : BOR , LOS , BTO, TOI seperti pada tabel dibawah.

Tabel 10.28 : Hari Rawat, BOR dan LOS RSU Negara Tahun 2018

No	Ruangan	BOR	LOS	BTO	TOI
1	Anggrek	34,32	3,22	36,55	6,56
2	Bakung	83,82	1,97	154,14	0,38
3	Cempaka	31,01	3,70	30,70	8,20
4	Dahlia	71,52	3,68	72,14	1,44
5	Flamboyan	46,46	3,17	52,91	3,69
6	Puri Rahayu/VIP	69,90	3,24	82,00	1,34
7	Prenatologi	44,92	5,41	31,13	6,45
8	ICU	16,58	2,43	3,50	87,00
Rata-rata		53,23	2,99	64,73	2,64

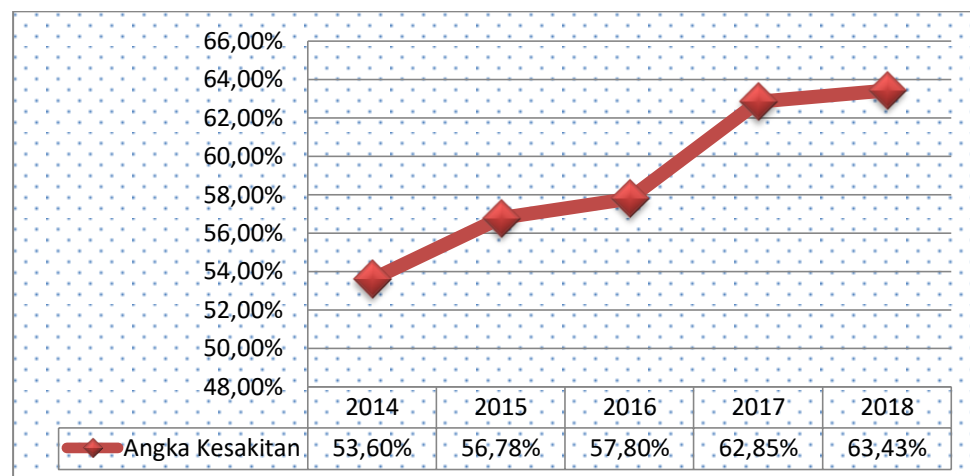
Sumber : RSU Negara, Tahun 2019

Sedangkan angka kesakitan Puskesmas di Kabupaten Jember dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018, disamping jumlah kunjungan ke sarana Puskesmas meningkat karena semakin merasakan manfaatnya dan didukung dengan adanya program JKN. Ini dapat dilihat seperti tertera di dalam tabel berikut.

Tabel 10.29 : Angka Kesakitan di Puskesmas Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Kesakitan	53,60 %	56,78 %	57,8 %	62,85 %	63,43%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 10.7 : Angka Kesakitan di Puskesmas Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

4) Penyakit Menular

a) Bersumber Binatang.

(1) Penyakit Filariasis dan Malaria.

Penyakit Filariasis di Kabupaten Jember tahun 2014 – 2018 tidak ada kasus. Kasus Penyakit Malaria di Kabupaten



Jember, menunjukkan pada tahun 2014 sediaan darah diperiksa 2.644 yang Positif 5 orang (0,19 %) dan tahun 2015 jumlah suspek 3.053 dengan sediaan darah diperiksa 3.053 yang positif 0, tahun 2016 jumlah suspek 3.108 dengan sediaan darah diperiksa 3.108 yang positif 3 orang, sedangkan di tahun 2017 jumlah suspek TB 1.451 yang positif sebanyak 135 kasus dan % BTA + terhadap suspek sebesar 9,30%.

Namun bila dilihat dari angka *Annual Parasite Incidence* (API) yaitu tahun 2013 kasus malaria di Kabupaten Jember mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi nol dan tahun 2014 API/1.000 penduduk yaitu 0,02. Sedangkan tahun 2015 sebanyak 0 dan tahun 2016 sebanyak 0 dan tahun 2017 tidak ada, Sesuai indikator daerah pembebasan malaria bahwa kasus indigenus tidak boleh melebihi 1/1.000 pada tiga tahun berturut-turut. Selama tiga tahun terakhir angka API yaitu gabungan kasus indigenus dan kasus import masih berada di bawah 1/1.000 sehingga masih tergolong *Low Case Incidence*. Tahun 2018 jumlah suspek TB 296, yang positif sebanyak 193 kasus dan % BTA + terhadap suspek sebesar 65,20 %. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 10.30 : Penderita Malaria dan API /1.000 penduduk
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Penderita Malaria			Meninggal	API per 1.000 penduduk
	Positif ACD	Positif PCD	Jumlah		
2014	5	0	5	0	0,02
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019



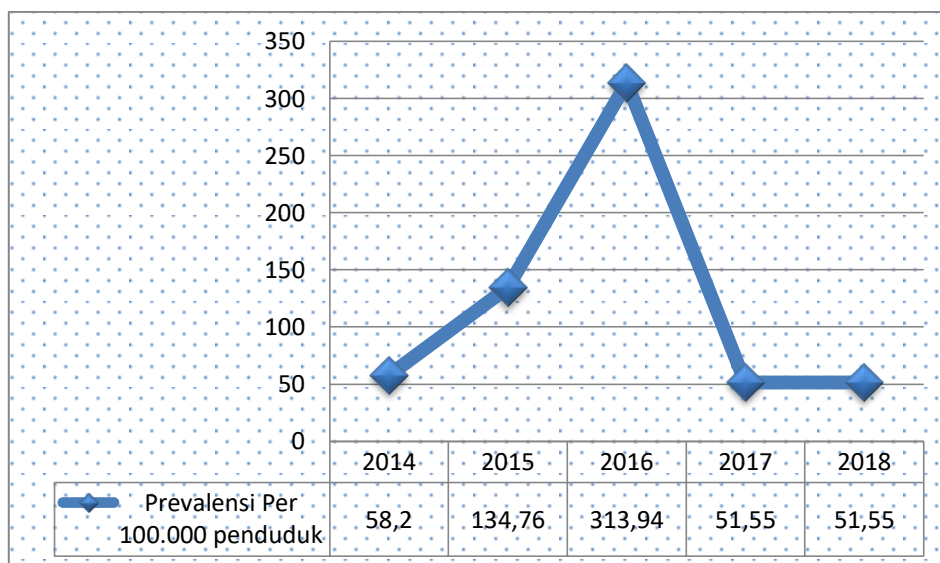
(2) Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Jumlah kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jember dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang berfluktuasi. Pada tahun 2014 jumlah kasus 157 orang, tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 366 kasus dan tahun 2016 sebanyak 858 kasus mengalami peningkatan kembali ini disebabkan dampak dari musim hujan yang berkepanjangan dan peranserta dalam hal pemberantasan sarang nyamuk perlu ditingkatkan serta penyemprotan /Fogging dengan rutin dilaksanakan dimana terjadi kasus. dan tahun 2017 terdapat kasus sebanyak 140 kasus, dilihat dari kasus tahun sebelumnya terjadi penurunan, ini dapat ditekan berkat kerja keras petugas kesehatan dalam hal penanganan Fogging dan dan peran serta masyarakat khususnya dalam hal kegiatan PSN . Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10.31 : Prevalensi Rate/100.000 penduduk dan CFR/ 100 Penderita Penyakit DBD Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018.

Tahun	Jumlah Penderita	Meninggal	Prevalensi Per 100.000 penduduk	CFR (%)
2014	157	0	58,2	0
2015	366	0	134,76	0
2016	858	1	313,94	0,1
2017	140	0	51,55	0
2018	36	0	13,01	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 10.8 : Prevalensi Rate/100.000 penduduk dan CFR/100 Penderita Penyakit DBD Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

b) Penyakit Menular Langsung.

(1) Tuberculosis (TB)

(a) Angka Deteksi Dini (*Case Detection Rate*)

Pada tahun 2014 jumlah suspek TB sebanyak 976 kasus dan yang positif TB sebanyak 116 orang (11,89%). CDR pada tahun 2014 yaitu 67 /100.000 penduduk; tahun 2015 jumlah suspek TB Paru 1.040 kasus dan yang dinyatakan positif 118 kasus (11,36 %) dari suspek TB Paru; tahun 2016 jumlah suspek 786 orang BTA Positif (+) jumlah 111 orang (14,12 %) angka kesembuhan dan pengobatan TB Paru yaitu TB Paru Positif (+) diobati jumlah 114 orang; tahun 2017 dimana jumlah kasus suspek sebesar 1.451 orang sedangkan BTA (+) sebesar 135 orang dan % BTA (+) terhadap suspek 9.30 %; tahun 2018 jumlah suspek TB sebesar. 1.926 penemuan penderita kasus baru yang positif 296 orang sedangkan BTA (+) sebesar 193. orang dan % BTA (+) terhadap suspek 65,20. %, keberhasilan dari tahun sebelumnya sudah baik



dimana tingkat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya dalam hal penanganan kasus TB dapat ditingkatkan

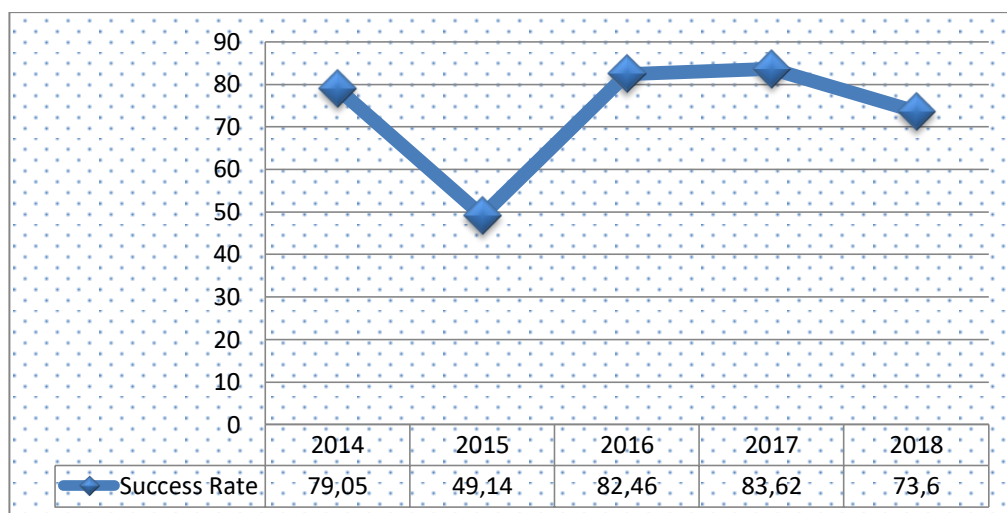
(b) Pengobatan Penderita Tuberculosis

Tahun 2014 jumlah BTA (+) diobati 148 orang dan angka kesembuhan (*Cure Rate*) 60,81 % serta angka pengobatan lengkap (*Complete Rate*) 18,24 % dan angka keberhasilan Pengobatan Succes Rate /SR 79,05 % serta jumlah kematian selama dalam pengobatan 11 orang (4,1%) di tahun 2015 pengobatan terhadap TB Paru Positif sebanyak 116 kasus dan angka kesembuhan (*cure rate*) 49,14 % dan angka pengobatan lengkap (*complete rate*) 35,34 % serta keberhasilan dalam hal pengobatan (*succes rate*) 84,48 % dan jumlah kematian dalam pengobatan sebanyak 7 orang sedangkan di tahun 2016 pengobatan terhadap TB Paru Positif (+) yaitu 114 orang dan angka kesembuhan (*cure rate*) yaitu jumlah 74 orang (64,91 %) dan pengobatan lengkap (*complete rate*) yaitu jumlah 20 orang (17,54 %) dan angka keberhasilan pengobatan (*cusses rate*) 82,46 % dan tahun 2017 pengobatan terhadap TB Paru (+) yaitu sebesar 116 orang dan angka kesembuhan (*cure rate*) 97 orang (83,62 %) dan angka pengobatan lengkap (*complete rate*) sebesar 5 orang (4,31 %). tahun 2018 pengobatan terhadap TB Paru (+) yaitu sebesar 202 orang dan angka kesembuhan (*cure rate*) 109 orang (73,6 %) dan angka pengobatan lengkap ((*complete rate*) sebesar 76 orang (37,6 %). Ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 10.32 : Penemuan dan Pengobatan Penderita TB. Paru Tahun 2014 – 2018

Tahun	Penemuan Penderita		Pengobatan Penderita TB		Penderita TBC yang sembuh	Angka Kesuksesan (<i>Success Rate</i>)
	Tersangka	BTA (+)	BTA (+)	BTA (-) Ro (+)		
2014	976	116	148	0	90	79,05
2015	1.040	118	116	0	57	49,14
2016	786	111	114	0	74	82,46
2017	1451	135	116	0	97	83,62
2018	1.926	296	193	0	109	73,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2019



Gambar 10.9 : Penemuan dan Pengobatan Penderita TB. Paru Tahun 2014 – 2018

(2) P2 Kusta.

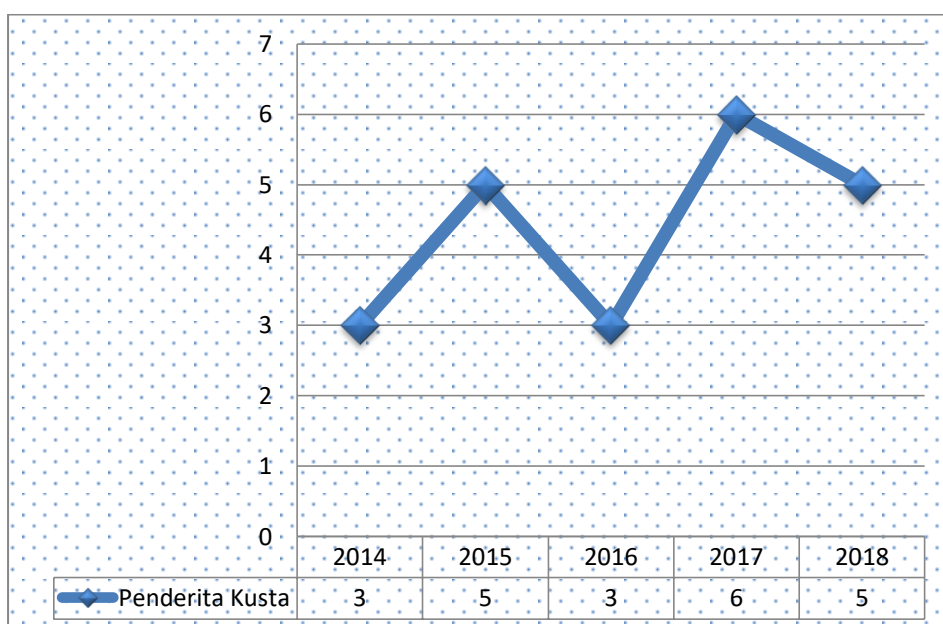
P2 Kusta tahun 2014 ada 3 kasus dan tahun 2015 ada 5 kasus dan tahun 2016 terdapat 4 kasus baru dan tahun 2017 terdapat 6 kasus, dan tahun 2018 ada 5 kasus, dari lima tahun terakhir bervariasi yaitu naik turun tidak ada terlalu menonjol dan ini sudah dapat penanganan secara baik dari petugas kesehatan. ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 10. 33 : Penemuan Penderita Kusta di Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Kasus Baru		Pengobatan Penderita	
	MB	PB	MB	PB
2014	3	0	3	0
2015	5	0	5	0
2016	3	1	5	1
2017	6	0	6	0
2018	5	0	5	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, tahun 2019



Gambar 10. 10 : Penemuan Penderita Kusta di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

(3) Diare.

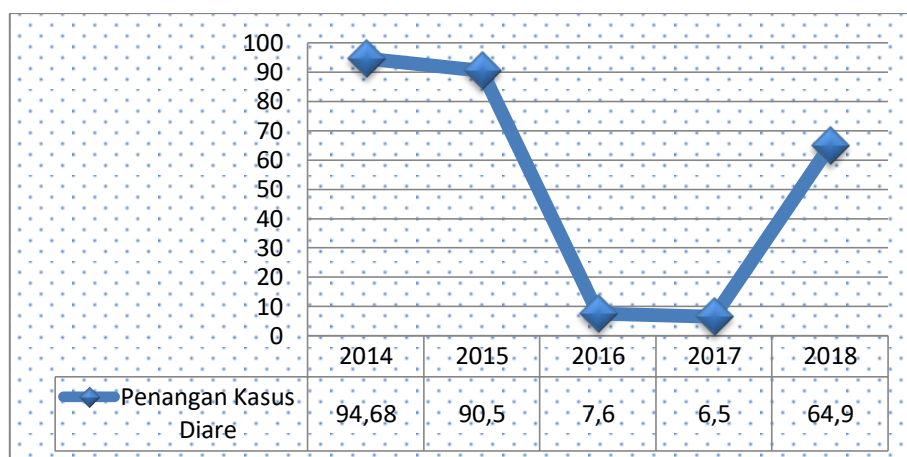
Perkiraan penderita diare tahun 2014 dengan target penemuan 5.774 ditangani 5.467 atau (94,7 %); tahun 2015 kasus diare sebanyak 5.812 kasus, ditangani 5.259 (90,5 %); tahun 2016 jumlah target penemuan 73.792 orang, kasus Diare ditangani 5.642 orang (7,6 %) dan tahun 2017 jumlah target penemuan

kasus diare sebesar 74.223 kasus yang ditangani sebesar 4.836 kasus, ditangani sebesar 6,5 %, tahun 2018 jumlah target penemuan kasus diare semua umur ditangani sebesar 4.845 kasus, yaitu % ditangani sebesar 64,9 % hasil capainya penanganan baik ini disebabkan karena tingginya target penemuan kasus .

Tabel 10.34 : Penemuan dan Penangan Kasus Diare di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Tahun	Jumlah Target penemuan	Ditangani	
		Jumlah	%
2014	5.774	5.467	94,68
2015	5.812	5.259	90,5
2016	73.792	5.642	7,6
2017	74.223	4.836	6,5
2018	7.468	4.845	64,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2019



Gambar 10.11 : Penangan Kasus Diare di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

(4) P2 IMS - HIV / AIDS.

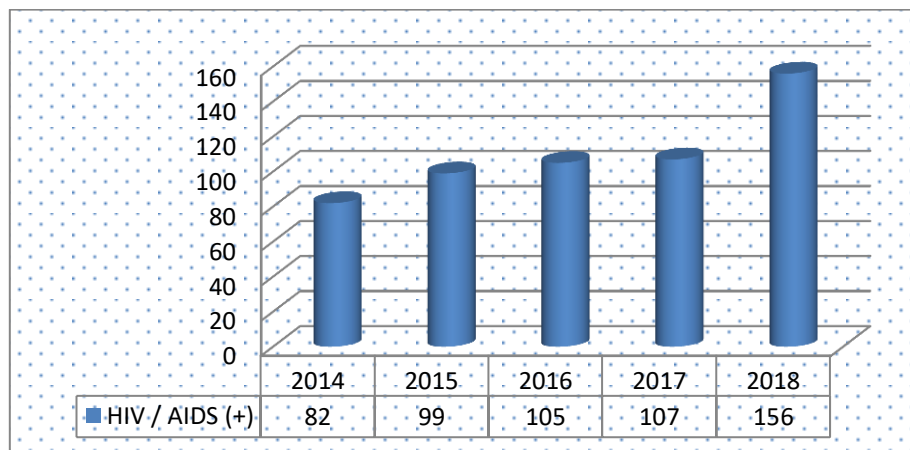
Pada tahun 2014 terdapat kasus HIV/.Aids 82 kasus sedangkan spilis/IMS lainnya 0, tahun 2015 terdapat Kasus HIV/AIDS 99

kasus dan Sipilis /IMS lainnya 4 kasus, tahun 2016 kasus HIV/Aids sebanyak 105 kasus, tahun 2017 terdapat kasus HIV 40 kasus dan AIDS kasus sebesar 67 kasus jumlah HIV/AIDS sebesar 107 kasus dan Sypilis tidak ada kasus, dan tahun 2018 terdapat 156 kasus kasus jumlah HIV/AIDS dan Sypilis tidak ada kasus.

Tabel 10.35 : Penderita Penyakit Kelamin dan HIV / AIDS di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Tahun	HIV / AIDS (+)	Siphilis/IMS lainnya
2014	82	0
2015	99	4
2016	105	0
2017	107	0
2018	156	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 10. 12 : Penderita HIV / AIDS di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

(5) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit telah dilakukan melalui kegiatan imunisasi. Sasaran dan pencapaian imunisasi pada bayi yang dilaksanakan tahun 2014 jumlah

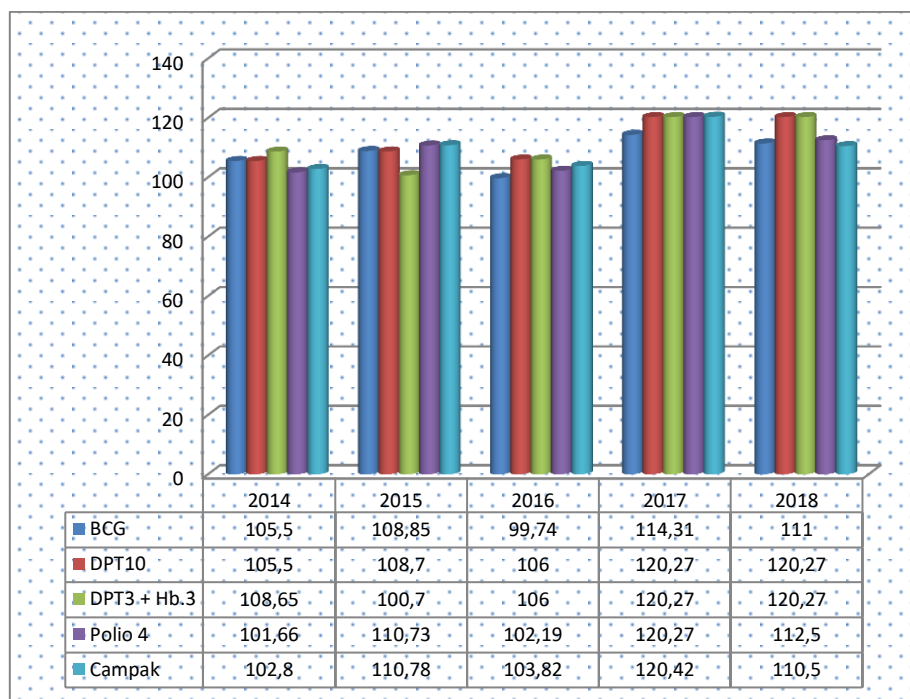


sasaran bayi sebanyak 4.310 bayi yang mendapat BCG 105,5 % DPT1+Hb1 105,5 % DPT 3+HB1.3 108,65 % Polio 4 yaitu 101,66 % dan Campak 102,80 %; tahun 2015 jumlah sasaran bayi sebanyak 4.545 bayi yang mendapat BCG 108,85 % DPT1+Hb1 108,7 % DPT 3+HB1. 100,7 % Polio 4 yaitu 110,73 % dan Campak 110,78%; tahun 2016 jumlah sasaran bayi sebanyak 4.672 bayi yang mendapat BCG 99,74 % DPT1+Hb1 106,00 % DPT 3+HB1. 106,00 % Polio 4 yaitu 102,19 % dan Campak 103,82 %; tahun 2017 jumlah sasaran bayi sebanyak 3.912. bayi yang mendapat BCG 114,31 % DPT1+Hb1 120,27 % DPT 3+HB1. 120,27 % Polio 4 yaitu 120,27 % dan Campak 120,42 %; dan tahun 2018 jumlah sasaran bayi sebanyak 3.993 bayi yang mendapat BCG 111,4 % DPT+HB-Hib3 112,3. % Polio 4 yaitu 112,5 % dan Campak/MR 110,5 % selama lima tahun terakhir selama lima tahun terakhir pemberian imunisasi terhadap bayi sudah baik rata-rata diatas 100 % , ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 10.36 : Cakupan Imunisasi BCG, DPT1, Hb 3, Polio 3 dan Campak pada Bayi di Kabupaen Jmbrana
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Sasaran Bayi	Pencapaian (%)				
		BCG	DPT1 +Hb1	DPT3 +Hb. 3	Polio 4	Campak
2014	4.310	105,5	105,5	108,65	101,66	102,80
2015	4.545	108,85	108,7	100,7	110,73	110,78
2016	4.627	99,74	106,00	106,00	102,19	103,82
2017	3.912	114,31	120,27	120,27	120,27	120,42
2018	3.993	111,4	120,27	120,27	112,5	110,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2019



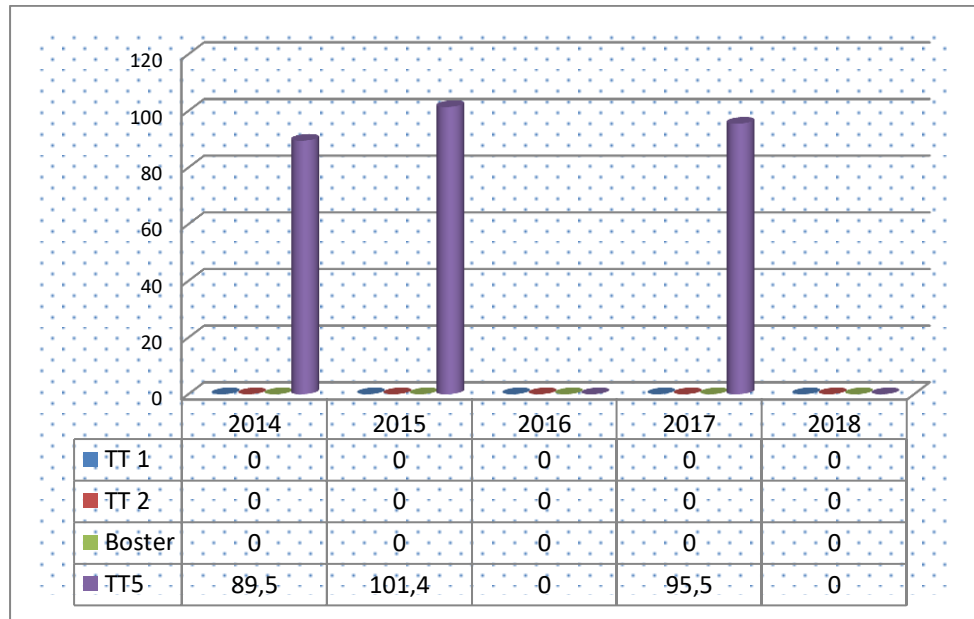
Gambar 10.13 : Cakupan Imunisasi BCG, DPT1, Hb 3, Polio 3 dan Campak pada Bayi di Kabupaen Jembrana Tahun 2014 – 2018

Sedangkan cakupan imunisasi TT 1, TT 2 dan Boster pada Ibu Hamil tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.37 : Cakupan Imunisasi TT 1, TT 2, Boster, dan TT5 pada Ibu Hamil Tahun 2014 – 2018

Tahun	Ibu Hamil	TT 1	TT 2	Boster	TT5
2014	4.774	0,00	0,00	0,00	89,5
2015	4.899	0,00	0,00	0,00	101,4
2016	5.130	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5.248	0,00	0,00	0,00	95,5
2018	4.393	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 10.14 : Cakupan Imunisasi TT 1, TT 2, Booster, dan TT5 pada Ibu Hamil di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

6) Angka Status Gizi Masyarakat

Masalah Gizi Masyarakat merupakan salah satu penentu Kualitas Sumber Daya Manusia. Kurang Gizi akan menyebabkan kegagalan pembentukan fisik dan terjadinya gangguan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktivitas kerja, menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Sementara terhadap gizi lebih juga memperlihatkan dampak negative. Masalah yang timbul dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain status kesehatan, status ekonomi, ketersediaan pangan, pendidikan, asupan zat-zat gizi, sosial budaya sehingga penanganannya memacu kita untuk lebih profesional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan.

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah gizi telah dilakukan melalui Program Perbaikan Gizi Masyarakat, di tahun 2016 seperti pemberian kapsul Vitamin A pada bayi umur 6 – 11 bulan 4.385 bayi



(101,60 %) anak balita 12 –56 bulan 17.170 (95,12%) , balita umur 6-59 bulan jumlah mendapat Vit.A 21.555 (96,63 %) distribusi kapsul yodium untuk penduduk pada daerah rawan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), pemberian tablet Fe untuk ibu hamil dan upaya lain yang berhubungan dengan peningkatan konsumsi pangan dan pendapatan masyarakat, sedangkan di tahun 2017 seperti pemberian kapsul Vitamin A pada bayi umur 6 – 11 bulan 2.689 bayi (99,23 %) anak balita 12 –56 bulan 16514 (81,94 %) , balita umur 6-59 bulan jumlah mendapat Vit.A 19.203 (83,99 %) dibanding dari tahun sebelumnya terjadi penurunan capaian kegiatan yang tidak berpengaruh , masih baik.

a. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat antara lain melalui Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu konsumsi pangan sehingga berdampak pada status gizi masyarakat. Peningkatan gizi diarahkan pada peningkatan intelektualitas, produktivitas dan prestasi kerja serta penurunan angka gangguan, terutama gizi kurang dan buruk. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelacakan kasus gizi buruk, pemantauan status gizi balita, pemantauan pertumbuhan balita dan pemberian makan tambahan pada balita gizi buruk.

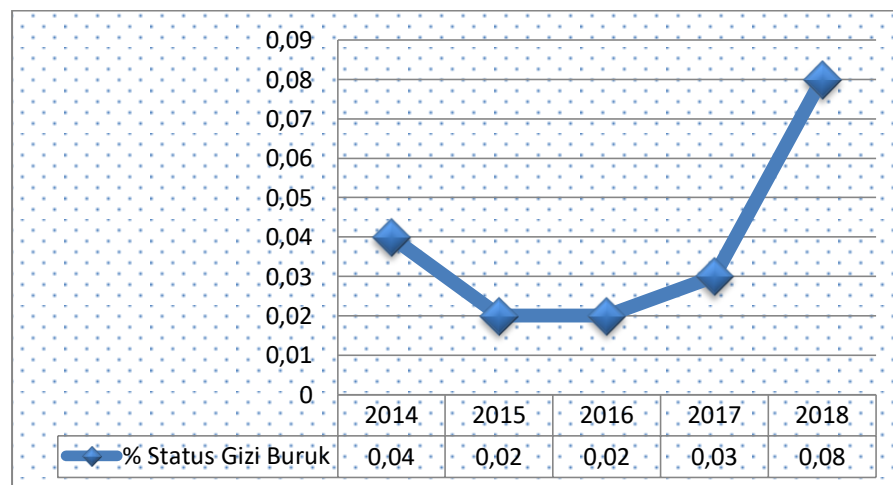
Dari hasil pelacakan kasus gizi buruk pada tahun 2014 ada 9 kasus (0,04 %) dan tahun 2015 ditemukan 6 kasus gizi buruk (0,02%) tahun 2016 terdapat 5 kasus (0,02 %) dari jumlah balita yaitu 22.367 orang, tahun 2017 sebanyak 6 kasus dari jumlah balita sebanyak 19.426 (0,03); dan tahun 2018 sebanyak 15 kasus. Peningkatan dari tahun sebelumnya karena jumlah balitanya lebih kecil sebagai pembaginya , semuanya telah ditangani dengan baik.



Tabel 10.38: Prevalensi Status Gizi Buruk pada Balita Di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Indikator Cakupan	T a h u n				
	2014	2015	2016	2017	2018
% Status Gizi Buruk	0,04	0,02	0,02	0,03	0,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember , Tahun 2019



Gambar 10.15 : Prevalensi Status Gizi Buruk pada Balita Di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

b. Kekurangan Vitamin A.

Tujuan utama program penanggulangan Kekurangan Vitamin A adalah untuk menurunkan prevalensi kebutaan akibat Xerophthalmia. Distribusi Vitamin A untuk bayi dan balita usia 6 bulan – 5 tahun dilaksanakan bulan Februari dan Agustus. Sedangkan kegiatan sweeping Vitamin A dilaksanakan pada bulan Maret dan September. Pada tahun 2014 jumlah bayi umur (umur 6 – 11 bulan) yang mendapat Vit.A sebanyak 4.268 orang (99,82 %) Anak Balita (umur 12-59 bulan) sebanyak 16.295 orang (100,00 %) dan Balita (umur 6 – 59 bulan) 20.563 (99,63 %); tahun 2015 jumlah bayi umur (6-11 bulan) 4.218 orang yang mendapat Vit A 4.177 orang (99.03 %)

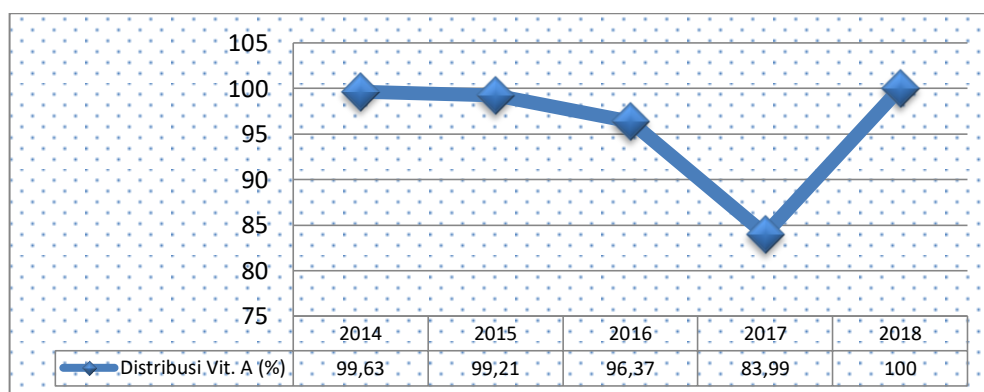


sedangkan anak balita (umur 12-59 bulan) jumlah 158.900 orang yang dapat Vit A 15.627 orang (98,28 %) dan jumlah balita (umur 6-59 bulan) jumlah 20.118 orang yang dapat Vit.A 19.960 orang (99.21 %). Tahun 2016 jumlah bayi (6-11 bulan) yang mendapat vit .A 4.385 (101,60 %) dan Anak Balita (12-59 bulan) mendapat Vit.A jumlah 17.170 orang (95,12 %) dan Balita umur (6-59 bulan) jumlah 21.555 orang (96,37 %). Tahun 2017 jumlah bayi (6-11 bulan) yang mendapat vit .A 2.689. (99,23%) dan Anak Balita (12-59 bulan) mendapat Vit.A 16.541 orang (81,94 %) dan Balita umur (6-59 bulan) jumlah 19.203. orang (83,99 %). Tahun 2018 jumlah bayi (6-11 bulan) yang mendapat vit .A sebanyak 2.219 (100.%) dan Anak Balita (12-59 bulan) mendapat Vit.A sebanyak 15.428. orang (100 %) dan Balita umur (6-59 bulan) jumlah 17.647 orang (100 %) dilihat dari porsi pemberian Vit A dari tahun 2014 - 2018 seperti tabel dibawah ini

Tabel 10.39 : Distribusi Vitamin A di Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

Indikator Cakupan	T a h u n				
	2014	2015	2016	2017	2018
Distribusi Vit. A (%)	99,63	99,21	96,37	83,99	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember , Tahun 2019



Gambar 10.16 :Distribusi Vitamin A di Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018



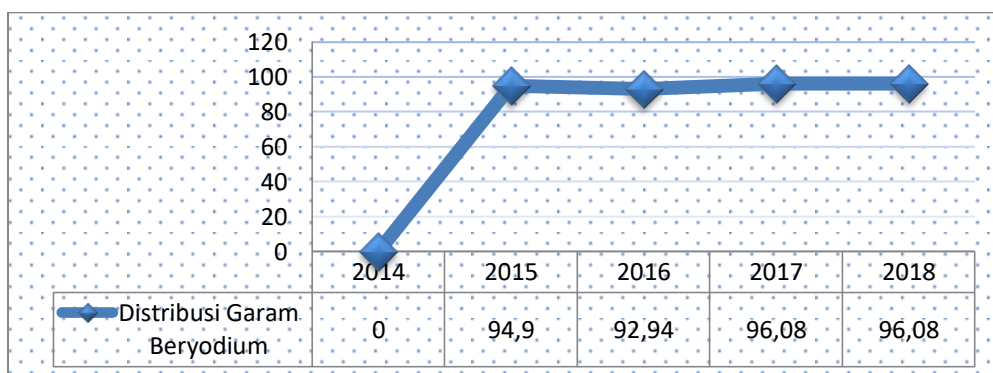
c) Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).

Program penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium bertujuan untuk menurunkan Angka Gondok serta mencegah munculnya kasus kretin pada bayi baru lahir. Upaya yang dilakukan dengan cara pendistribusian kapsul yodium dan yodisasi garam pada keluarga yang membutuhkan. Pada tahun 2014 tidak dilakukan pendistribusian garam yodium, tahun 2015 jumlah RT konsumsi garam yodium 484 rumah tangga (94,9 %), tahun 2016 jumlah RT yang mengkonsumsi garam yodium 474 RT (92,94 %), tahun 2017 jumlah RT yang mengkonsumsi sebesar 490 RT (96,08%), tahun 2018 jumlah RT yang mengkonsumsi sebesar 494 RT (96,9 %). Jumlah RT diperiksa kebutuhan akan garam yodium meningkat dari tahun sebelumnya karena manfaatnya semakin dapat dirasakan .

Tabel 10.40 : Distribusi Garam Beryodium di Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

Indikator Cakupan	T a h u n				
	2014	2015	2016	2017	2018
Distribusi Garam Yodium (%)	0,00	94,9	92,94	96,08	96,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember , Tahun 2019



Gambar 10.17 : Distribusi Garam Beryodium di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

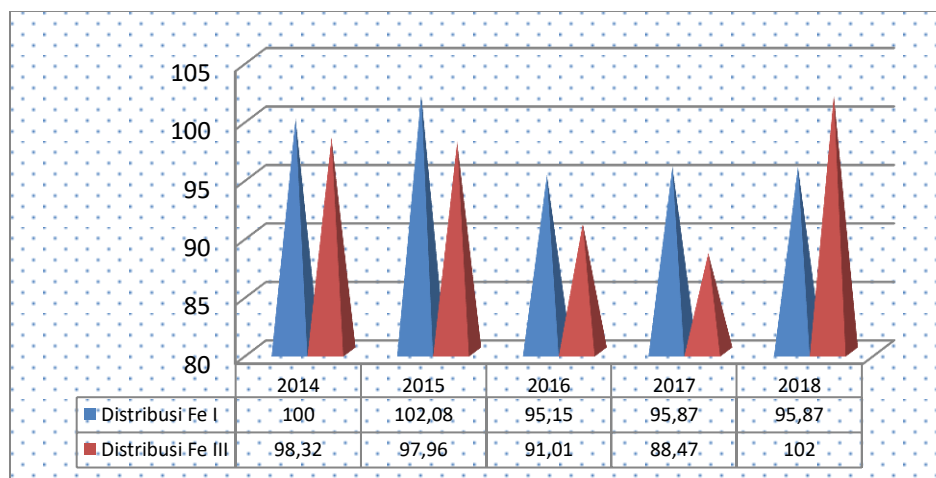
d) Penanggulangan Anemia.

Anemia gizi merupakan masalah klasik kesehatan, terutama bagi ibu hamil. Cakupan distribusi Tablet besi (Fe I) untuk ibu hamil pada tahun 2014 pemberian Fe I 100% dan tahun 2015 sebesar Fe.1 sebesar 102,08 % tahun 2016 pemberian Fe.1 sebesar 95,15%, tahun 2017 pemberian tablet Fe.1 sebesar 5.031 orang atau (95,87 %). Sedangkan cakupan distribusi Tablet besi (Fe III) untuk ibu hamil pada tahun 2014 pemberian tablet Fe III sebesar 98,32% dan tahun 2015 97,96 %, tahun 2016 sebanyak 91,01%, tahun 2017 yang mendapat Fe.III sebesar 4.643 orang (88,47%), dan tahun 2018 yang mendapat Fe.III sebesar 4.394. orang (100,2%)

Tabel 10.41 : Distribusi Tablet Besi (Fe.) pada Ibu Hamil di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

Indikator Cakupan	T a h u n				
	2014	2015	2016	2017	2018
Distribusi Fe.I	100,00	102,08	95,15	95,87	95,87
Distribusi Fe.III	98,32	97,96	91,01	88,47	102

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember , Tahun 2019



Gambar 10.18 : Distribusi Tablet Besi (Fe.) pada Ibu Hamil di Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018



7) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga merupakan salah satu strategi untuk menggerakkan dan memperdalam anggota rumah tangga untuk hidup bersih dan sehat. Melalui upaya ini setiap rumah tangga diberdayakan agar tahu, mau dan mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dengan mengupayakan lingkungan sehat, mencegah dan menanggulangi masalah- masalah kesehatan yang dihadapi serta memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Setiap rumah tangga juga digerakkan untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.

Tahun 2018 Presentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dan yang dipantau sebanyak 10.710 RT. (12,02 %) jadi yang BER- PHBS sebesar 9.232 RT (86,20 %). Berdasarkan hasil survey PHBS yang dilaksanakan pada 51 Desa/Kelurahan di Kabupaten Jember tahun 2018 prosentase rumah tangga sehat sudah cukup baik dan telah memenuhi target Indonesia Sehat 2010 yaitu 92,74 %. Hasil survey sesuai indikator PHBS Tahun 2018 yang dilakukan di Kabupaten Jember didapati skor rumah tangga sebagai berikut :

a. Persalinan oleh Nakes	: 107,2 %
b. Bayi diberi ASI Eksklusif	: 85,67 %
c. Balita ditimbang	: 89,61 %
d. Tidak merokok	: Tidak di survey
e. Aktivitas fisik	: Tidak di survey
f. Diet Sayur Buah	: Tidak di survey
g. JPK	: Tidak di survey
h. jamban	: 96,75 %
i. Air Bersih	: 98,5 %



Berikut adalah hasil survei PHBS di Kabupaten Jember mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 10.42 : Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Kabupaten Jember Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator PHBS	T a h u n				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	RT Sehat	86,99	95,15	79,43	96,29	-
2.	Persalinan oleh Nakes	103,0	102,9	97,8	914,9	107,2
3.	ASI Eksklusif	83,5	84,7	54,0	47,6	86,7
4.	Balita ditimbang	84,2	86,0	91,8	92,09	89,61
5.	Tidak merokok	-	-	-	-	-
6.	Aktivitas fisik	-	-	-	-	-
7.	Diet Sayur Buah	-	-	-	-	-
8.	Cuci tangan (Air + sabun)	99,62	-	-	-	-
9.	JPK	-	-	-	-	-
10.	Pemberantasan Jentik	99,33	98,10	-	-	-
11.	Jamban	98,10	92,9	94,31	94,35	96,75
12.	Air bersih	99,62	95,62	97,19	97,00	98,8
13.	Luas lantai	-	-	-	-	-
14.	Lantai bukan tanah	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019

8) Pelayanan Kesehatan

Tujuan pokok Program Upaya Kesehatan adalah untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. Sasaran program ini ditujukan agar tersedianya sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik oleh pemerintah maupun swasta yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem prapelayanan.



a) Pelayanan Kesehatan Dasar

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana pelayanan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang didukung pula dengan Puskesmas Keliling. Disamping itu telah pula dilakukan penempatan tenaga kesehatan di sarana-sarana kesehatan. Meski demikian, penampilan dan mutu pelayanan kesehatan dirasakan sudah ada peningkatan dengan adanya penilaian Akreditasi Puskesmas di 10 puskesmas yang ada .

Tahun 2014 jumlah Kunjungan Rawat Jalan sebanyak 95.438 kasus baru ini terjadi peningkatan dibanding dengan tahun lalu karena animo masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya puskesmas sangat tinggi. Tahun 2015 jumlah kunjungan rawat jalan di Puskesmas sebanyak 154.216 kasus baru terjadi peningkatan dibanding dengan tahun lalu ini disebabkan semakin banyak pengguna fasilitas kesehatan disaran kesehatan Puskesmas dengan memanfaatkan JKBM. Tahun 2016 jumlah kunjungan rawat jalan di Puskesmas sebanyak 157.955 kasus baru dan tahun 2017 sebanyak 172.776 kasus baru kunjungan rawat jalan. Tahun 2018 sebanyak 175.454 kasus baru kunjungan rawat jalan.

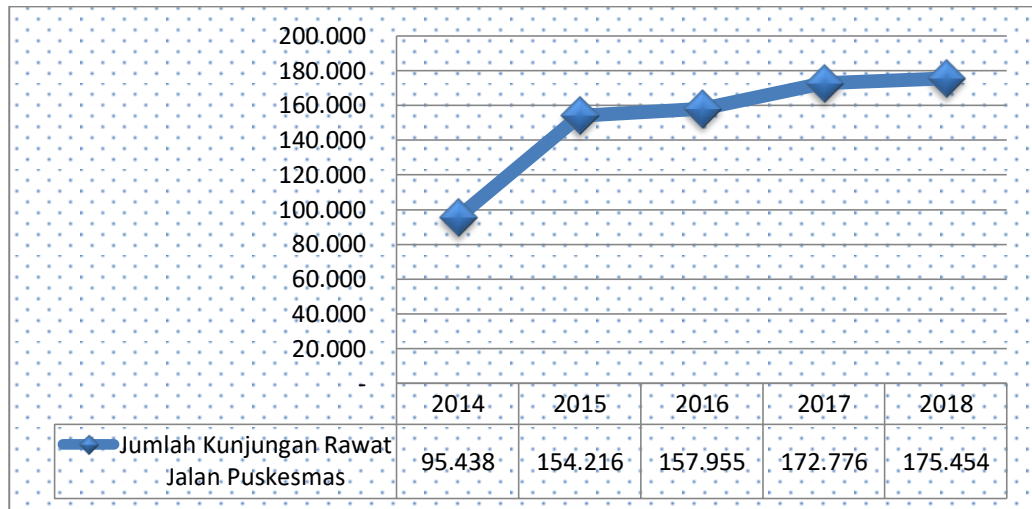
Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana pelayanan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang didukung pula dengan Puskesmas Keliling. Disamping itu telah pula dilakukan penempatan tenaga kesehatan di sarana-sarana kesehatan.



Tabel 10.43 : Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

No.	Jenis Kunjungan	T a h u n				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rawat Jalan Kasus Baru	95.438	154.216	157.955	172.776	175.454

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 10.19 : Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

(1) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

(a) Pelayanan Antenatal

Pada tahun 2014 (K.1) sebesar 100,00 % dan tahun 2015 sebesar 102 % dan tahun 2016 sebesar 95,5 %. dan tahun 2017 sebesar 5.036 orang atau 96,0 % dari jumlah ibu hamil yang ada yaitu 5.248 orang ini mengalami sedikit peningkatan dan pada umumnya sudah baik. Sedangkan pencapaian cakupan kunjungan (K4) Tahun 2013 sebesar 92,17% , dan tahun 2014 (K.4) sebesar 98,3 % dan tahun 2015 sebesar 98,1 % dan tahun 2016 jumlah K.4 / ibu hamil yang mendapat pelayanan 4.679 orang atau 91,2 % dari jumlah Ibu Hamil yaitu 5.130 orang, tahun 2017

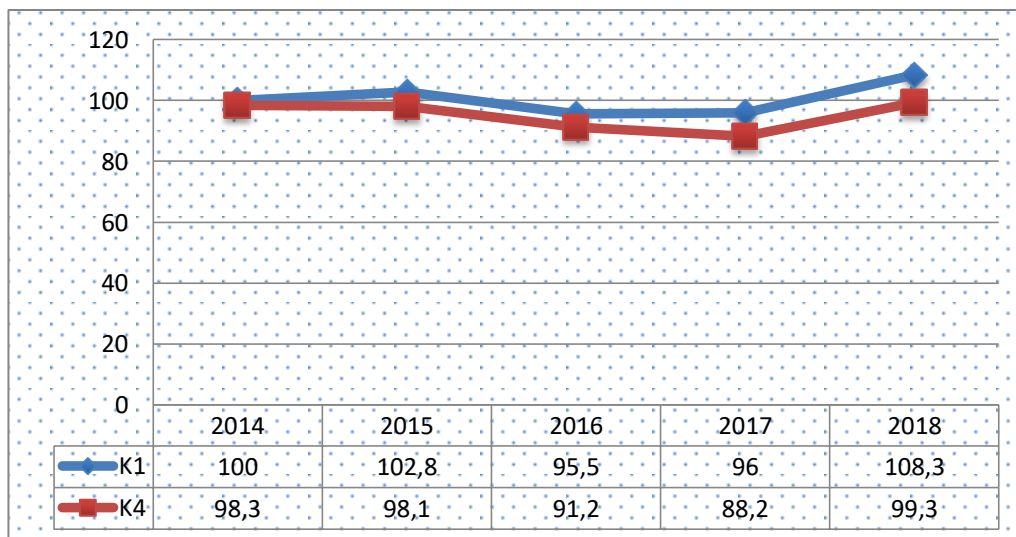


pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil sebesar 4.629 orang atau 88,2% dari jumlah ibu hamil yaitu 5.248 orang, tahun 2018 pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil (K.1) sebesar 4.759.. orang atau 108,3%, peningkatan yang dialami dari tahun sebelumnya tidak begitu berarti capaiannya sudah baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 10.44 : Cakupan Pelayanan Antenatal Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

No.	Tahun	Cakupan Pelayanan Ibu hamil (%)	
		K1	K4
1.	2014	100,00	98,3
2.	2015	102,8	98,1
3.	2016	95,5	91,2
4.	2017	96,0	88,2
5.	2018	108,3	99,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 10.20 : Cakupan Pelayanan Antenatal Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018



(b) Pertolongan Persalinan

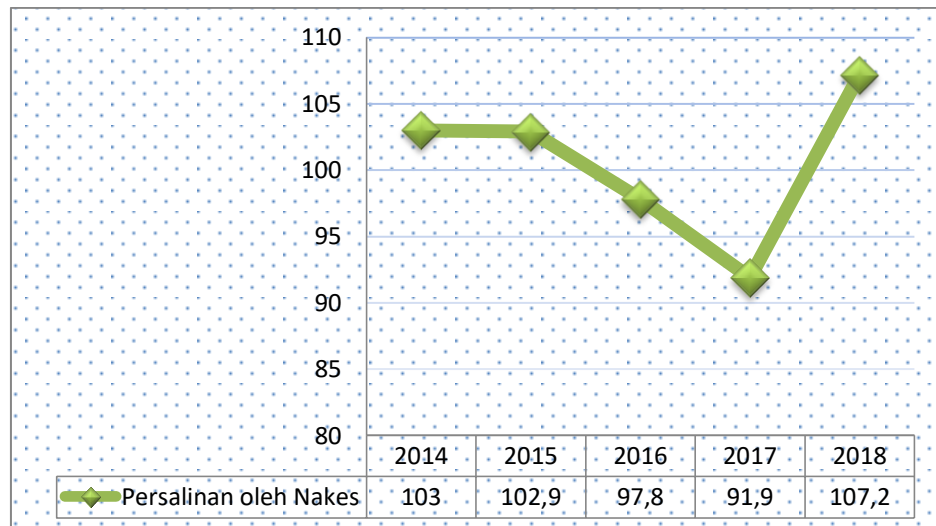
Cakupan pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan (Nakes) pada tahun 2014 pertolongan oleh tenaga kesehatan 4.696 orang atau 103,00 % , pada tahun 2015 jumlah persalinan 4.677 atau 101,9 . dan tahun 2016 jumlah persalinan ditolong tenaga kesehatan sebesar 4.787 atau 97,8 %, tahun 2017 pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 4.604 orang dan jumlah persalinan yaitu 5.009 orang atau 91,9 %. tahun 2018 pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 4.494 orang dan jumlah persalinan yaitu 4.193 orang atau 107,2. %

Berdasarkan perkembangan pertolongan persalinan oleh Nakes dari tahun ketahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan dan capaiannya sudah baik, pada umumnya dengan kesadaran tinggi masyarakat, didukung oleh pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan yang baik serta teknologi yang memadai, pertolongan persalinannya cenderung ke sarana kesehatan pemerintah atau praktek bidan atau dokter SPOG swasta / ditolong oleh tenaga kesehatan.

Tabel 10.45 : Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

No.	Cakupan (%)	T a h u n				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persalinan oleh Nakes	103,00	102,9	97,8	91,9	107,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019



Tabel 10.21 : Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

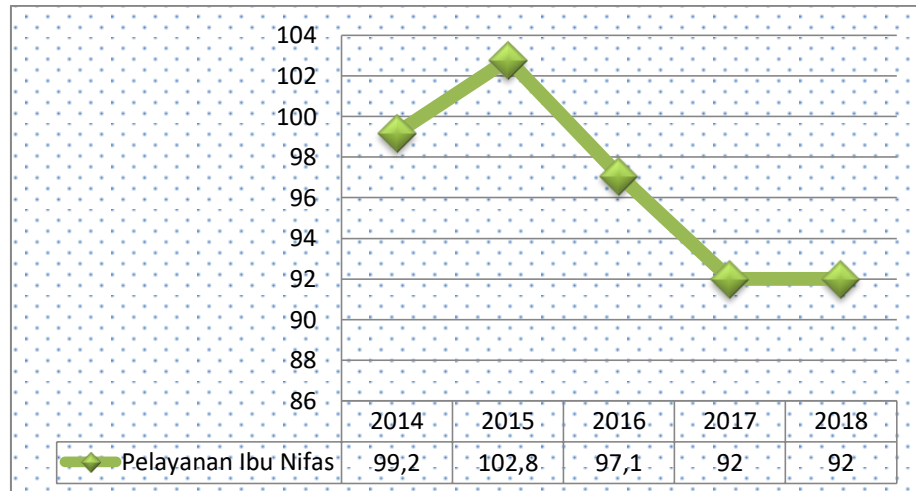
(c) Pelayanan Nifas.

Selama lima tahun terakhir trend pencapaian pelayanan kesehatan pada ibu nifas di Kabupaten Jember berfluktuatif. Jumlah pelayanan nifas dalam tahun 2014 pelayanan ibu nifas 4.520 atau (99.2 %), tahun 2015 sebesar 4.808 (102,80) dan tahun 2016 sebesar 4.757 (97,1 %), tahun 2017 sebesar 4.608 orang (92,2%), tahun 2018 sebesar 4.492 orang (107,1 %) dari jumlah ibu hamil terjadi trend penurunan dari tahun 2015 s/d 2018 trendnya meningkat dan capainnya masih tetap baik selengkapanya dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel 10.46 : Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

No.	Cakupan (%).	T a h u n				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pelayanan Ibu Nifas	99,2	102,80	97,1	92,0	107,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember, Tahun 2019



Gambar 10.22 : Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kabupaten Jember Tahun 2014 – 2018

10.4 Keluarga Berencana

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana dapat ditinjau dari 3 unsur antara lain : Pencapaian target KB Baru, Cakupan peserta KB Aktif dan penggunaan Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET).

(1) Pencapaian Target Peserta KB Baru.

Pada tahun 2014 sebesar 4.726 (8,2 %) terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dan tahun 2015 sebesar 4.438 (8,3 %) dan tahun 2016 sebesar 4.215 (7,8 %) dan tahun 2017 sebesar 3.705 (6,7 %) . dari jumlah perolehan Akseptor KB Baru pada tahun 2013 tersebut penggunaan alat kontrasepsi MKJP 1.943 (35,60 %) Non MKJP sebesar 3.519 orang (64,40%) tahun 2014 MKJP 1.643 (34,8%) dan tahun 2015 menggunakan MKJP sebesar 1.619 orang (36,5 %) NON MKJP 2.891 (63,5 %) dan tahun 2016 yang menggunakan MKJP 1.525 (36,26 %) dan NON MKJP 2.690 (63,8 %) sedangkan tahun 2017 sebesar yang menggunakan MKJP sebesar 1.346 (36.3 %) sedangkan



yang menggunakan NON MKJP sebesar 2.359 atau (63,7 %). Tahun 2018 peserta KB Paska Persalinan sebesar 2.987 orang (71,2 %) .

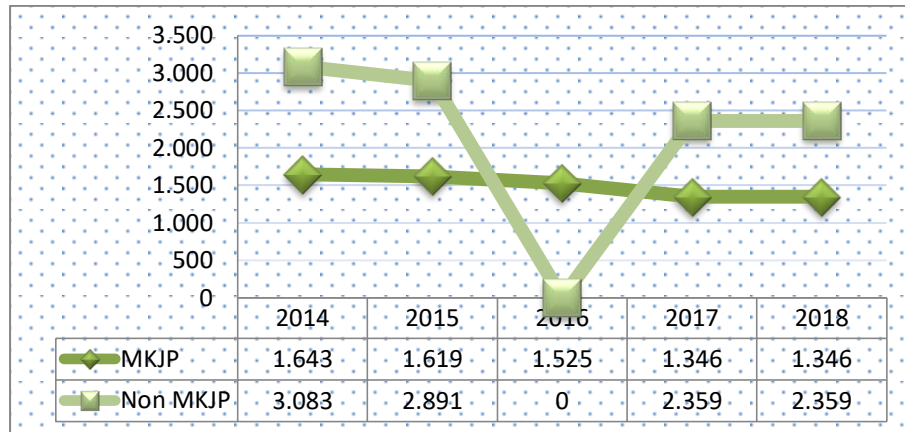
(2) Peserta KB Aktif.

Untuk mengetahui Cakupan peserta KB Aktif, indikator yang dipergunakan antara lain : Cakupan KB Aktif terhadap PUS dan prosentase peserta KB Aktif menurut pola penggunaan alat kontrasepsi. Pada tahun 2014 jumlah perolehan Akseptor KB Aktif tersebut penggunaan alat kontrasepsi MKJP 17.283 orang (35,00 %) Non MKJP sebanyak 32.064 orang (65,00 %) tahun 2015 dengan MKJP 12.614 orang (8,4 %) yang dengan NON MKJP 29.700 orang (70,2 %). dan tahun 2016 penggunaan MKJP 13.991 (32,1 %) dan menggunakan NON MKJP 29.634 (67,9 %), tahun 2017 yang menggunakan MKJP sebesar 14.345 atau (32,2 %) dan yang menggunakan NON MKJP sebesar 30.249 atau (67,8%) dari jumlah PUS, tahun 2018 peserta KB Aktif 45.705. atau (81,9 %) atau (81,9. %) dari jumlah PUS

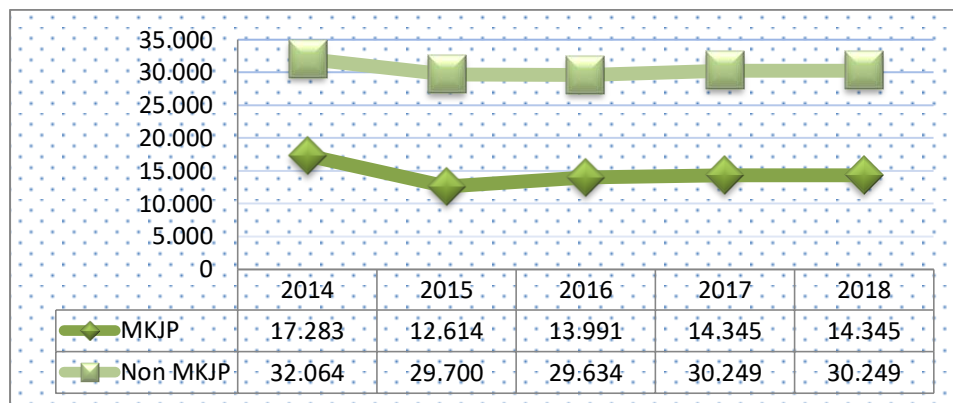
Tabel 10.47 : Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
Tahun 2014 – 2018

No.	Tahun	Jumlah Peserta KB Baru		Jumlah Peserta KB Aktif	
		MKJP	Non MKJP	MKJP	Non MKJP
1.	2014	1.643	3.083	17.283	32.064
2.	2015	1.619	2.891	12.614	29.700
3.	2016	1.525	2.90	13.991	29.634
4.	2017	1.346	2.359	14.345	30.249
5.	2018	1.346	2.359	14.345	30.249

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Jember , Tahun 2019



Gambar 10.23 : Pelayanan Keluarga Berencana Baru
Kabupaten Jemberana Tahun 2014 – 2018



Gambar 10.24 : Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten Jemberana
Tahun 2014 – 2018

10.3 Sertifikat Tanah

Hak atas tanah ialah hak yang memberi wewenang kepada pemiliknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Ciri khasnya ialah si empunya hak berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki. Pengelompokan hak-hak atas tanah ialah sebagai berikut :

1) Hak Milik/ HM



Merupakan hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dan jangka waktu Hak Milik tidak terbatas.

2) Hak Guna Usaha/ HGU

Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara selama jangka waktu tertentu, dan tujuan penggunaan tanahnya terbatas. Hak Guna Usaha juga tidak dapat dibebankan pada tanah Hak Milik dan hanya dapat diberikan oleh Negara.

3) Hak Guna Bangunan/ HGB

Merupakan hak untuk mengusahakan (mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah) tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, untuk jangka waktu tertentu.

4) Hak Pakai/ HP

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan / atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan undang-undang.

5) Hak Pengelolaan/ HPL

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f Undang-



Undang Nomor 21 Tahun 1997 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, antara lain berupa perencanaan dan peruntukan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada pihak lain dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

6) Wakaf

Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 16 menerangkan harta benda yang dapat diwakafkan. Pasal ini menyebutkan bahwa benda bergerak dan tidak bergerak dapat menjadi obyek wakaf Ayat 2 dari pasal 16 menyebutkan benda tidak dapat bergerak yang dapat diwakafkan adalah meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanah wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama – lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Berikut data luas lahan yang terdaftar sampai dengan tahun 2018:



Tabel `10.48 : Lahan Terdaftar di Kabupaten Jember Tahun 2018

Kabupaten	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Guna Usaha	Hak Pakai
Jember	96.249	1.690	13	353
Jumlah	96.249	1.690	13	353
Uraian			Jumlah	Satuan
Jumlah bidang tanah tersertipikat			98.305	Bidang
Luas bidang tersertipikat			267.617.344	Bidang
Jumlah bidang tanah belum tersertipikat			-	Bidang
Luas bidang belum tersertipikat			-	Bidang

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Tahun 2019

10.5 Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. (Pasal 1 Juncto 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Jumlah Notaris di Kabupaten Badung data dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.49 : Jumlah Notaris di Kabupaten Jember Tahun 2014-2018

No.	Profesi	Tahun						Sumber Data
		2014			2018			
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Notaris	5	5	10	5	5	10	Direktori Notaris Web Site Kementerian Hukum dan Ham



10.6 Perijinan dan Retribusi Daerah

Pelaksanaan sistem Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Jember berpedoman pada Perda No. 3 Tahun 2008. Program ini juga dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan terbangunnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu tersebut di Kabupaten Jember dilaksanakan sejak tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan direvisi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011

Sistem Pelayanan Publik yang dibangun Kabupaten Jember tersebut memiliki berbagai macam kelebihan. Sistem ini menerapkan para pencari izin maupun pengurusan administrasi yang hanya dilayani oleh petugas di *Front Office*, sehingga memutus rantai calo yang biasanya meminta upah dalam bentuk pungutan liar (pungli). Selain itu, dengan model tersebut waktu yang dibutuhkan untuk mengurus sebuah izin maupun pengurusan administrasi menjadi lebih cepat.

Sampai dengan Tahun 2018 Ruang lingkup kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) di Kabupaten Jember berupa penyelenggaraan pelayanan perijinan yang dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 10.50 : Jenis Ijin dan Aturannya di Kabupaten Jember

Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
1	IZIN PRINSIP	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
		2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
		3	Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016, Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.	persyaratan.	Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jember dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jember.
		4	Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2012 - 2032.		
		5	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi.		
		6	Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.		
2	IZIN LOKASI	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan aspek teknis terpenuhi.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi.		
		3	Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2012 - 2032.		
		4	Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.		
3	IZIN PENG-GUNAAN PEMANFAATAN TANAH	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2012 - 2032.		
		3	Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.		
4	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	1	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Non Perumahan Rakyat 05/PRT/M/2016 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		2	Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
		3	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2012 - 2032.		Kabupaten Jember.
		4	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.		
5	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	1	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.		
6	IZIN LINGKUNGAN	1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.		
		3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib AMDAL.		
		4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.		
		5	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha/Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan.		
		6	Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
7	IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)	1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.		
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.		
		4	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.		
		5	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.		
		6	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.		
		7	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.		
		8	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.		
		9	Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.		
8	IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
		2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).		
		3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Limbah B3 Oleh Pemerintah Daerah.		
		4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.		
		5	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 586).		
		6	Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.		
9	IZIN TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3	1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
		3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Limbah B3 Oleh Pemerintah Daerah.		
		4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.		
		5	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 586).		
		6	Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.		
10	IZIN TEMPAT USAHA PENGELOLAAN SAMPAH	1	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69).	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347).		
		3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.		
		4	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).		
		5	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
11	IZIN USAHA PERKEBUNAN	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.		
		3	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/Kb.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.		
		4	Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.		
12	IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA (IUP-B)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.		
		3	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/Kb.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.		
		4	Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.		
13	IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN (IUP-P)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
		3	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/Kb.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.		
		4	Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.		
14	IZIN USAHA/ TANDA DAF TAR USAHA (TDU) PERUSAHAAN PENGGI LING PADI, HULLER DAN PENYOSHAN BERAS RMU)	1	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/11/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (RMU).	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember
		2	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/Hk.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal.		
16	IZIN PEMOTONGAN HEWAN PENANGAN DAGING BESERTA IKUTANNYA	1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember
		2	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/Hk.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal.		
17	IZIN PENYELENGGARAAN	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas	Dinas Perhubungan, Kelautan dan



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
	ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.	permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Perikanan Kabupaten Jember.
		3	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
18	IZIN PEYELENGGAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
19	IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.		
20	KARTU PENGAWAS AN UMUM ANGKUTAN PEDESAAN	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.		
21	IZIN INSIDENTIL (PENYIMPAN GAN TRAYEK)	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum.		
		4	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.		
22	SURAT TANDA UJI KENDARAAN BERMOTOR	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
23	IZIN USAHA PERIKANAN	1	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PermenKP/2014 tentang Usaha Budidaya Perikanan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.		
24	TANDA DAFTAR IZIN USAHA PERIKANAN (TD-IUP)	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
25	IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Tertentu.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.		
26	IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Tertentu.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.		
27	IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Tertentu.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.		
28	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN TANDA PENDAFTAR	1	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.	Maksimal 2 (dua) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
	AN PERUSAHAAN (TDP) SIMULTAN	2	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.		Kabupaten Jember.
29	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	1	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.		
30	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)	1	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Minuman Beralkohol.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 72/M-DAG/PER/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Minuman Beralkohol.		
		3	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Minuman Beralkohol.		
		4	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 32/M-DAG/PER/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Minuman Beralkohol.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
31	SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	1	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
32	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	1	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
33	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	1	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.		
		3	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14/M/IND/PER/6/2008 Tanggal 25 Juni 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M/IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008.		
		4	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/10/2014, Tanggal 26 Juli 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klarifikasi Usaha Industri.		
34	IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI	1	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
		2	Peraturan menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.	persyaratan.	Perdagangan Kabupaten Jember.
		3	Peraturan menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.		
35	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)	1	Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
36	IZIN APOTEK	1	Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
37	IZIN OPTIKAL	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optik.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
38	IZIN LABORATORIUM KESEHATAN SWASTA	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
39	IZIN TOKO OBAT	1	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
40	IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
41	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER/DOKTER GIGI	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.		
42	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.		
43	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.		
44	SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIKP)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.		
45	SURAT IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN (SIKTTK)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Izin Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.		
46	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
	ANESTESI	2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyeleggaran Praktik Penata Anaestesi.	dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	
47	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGZ)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyeleggaran Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.		
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyeleggaran Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.		
48	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROME DIS (SIP-E)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyeleggaran Praktik Elektromedis.		
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyeleggaran Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.		
49	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS (SIP-ATLM)	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.		
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyeleggaran Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.		
50	SURAT IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT UMUM KELAS C DAN D	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
51	IZIN OPRASIONAL RUMAH SAKIT UMUM KELAS C DAN D	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
52	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
53	SURAT IZIN MENDIRIKAN KLINIK	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
54	IZIN OPERASIONAL KLINIK	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
55	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)	1	Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
56	IZIN TUKANG GIGI	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
57	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIKPM)	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
58	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 Tahun 2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
59	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
60	SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI (SIKPG)	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
61	IZIN SALON KECANTIKAN	1	Peraturan Bupati Jember Nomor 146 Tahun 2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Bidang Kesehatan.	Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
62	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
63	IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM)	1	Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2013.		
64	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		
65	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.		
		4	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
66	IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.		
67	IZIN INSIDENTIL (PENYIMPANAN TRAYEK)	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.		
		3	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Angkutan Orang Dijalan dengan Kendaraan Umum.		
68	IZIN TANDA UJI KENDARAAN BERMOTOR	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
69	IZIN USAHA PERIKANAN	1	Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PermenKP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi Perizinan Tertentu.		
70	TANDA DAFTAR IZIN USAHA PERIKANAN (TD-IUP)	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi Perizinan Tertentu.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember.
71	IZIN PEMASANGAN REKLAME	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.	Izin Reklame berlaku maksimal 1 (satu) tahun dan Izin reklame yang sifatnya isidentil berlaku sesuai permohonan.	Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.		
72	IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Jember.



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
		2	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.		
73	IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Jember.
74	REKOMENDASI/IZIN PEMAKAIAN GEDUNG MENDOPO KESARI	1	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
75	LAYANAN AKTA CATATAN SIPIL AKTA KELAHIRAN	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.		
		3	Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember.		
76	LAYANAN AKTA CATATAN SIPIL AKTA PERKAWINAN	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.		
		3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.		
		4	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.		
		5	Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember.		



Nama Produk Layanan		Dasar Hukum Layanan		Standar Waktu Penyelesaian	Instansi Teknis
77	LAYANAN AKTA CATATAN SIPIL AKTA PERCERAIAN	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.		
78	LAYANAN AKTA CATATAN SIPIL AKTA KEMATIAN	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.		
		3	Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember.		
79	PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK, PENGAKUAN ANAK DAN PENGESAHAN ANAK, PERUBAHAN NAMA	1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.
		2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.		
		3	Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jember.		
80	KARTU TANDA PENCARI KERJA (AK-1)	1	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.	Maksimal 30 (tiga puluh) menit terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Kabupaten Jember.
		2	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.251/DPPTK/IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.		
81	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)	1	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Kabupaten Jember.



Tabel 10.51 : Jumlah Ijin yang Diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan
Kabupaten Jember

No	Nama Perizinan	Jumlah Izin Terbit			
		2015	2016	2017	2018
1	Izin Prinsip	228	196	188	99
2	Izin Lokasi	-	-	-	19
3	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	-	-	-	95
4	Izin Lingkungan	29	14	24	89
5	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	321	237	79	-
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	396	982	548	332
7	Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha (TDU) Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (RMU)	1	4	1	1
8	Izin Pemasangan Reklame	450	570	561	363
9	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Akomodasi	3	26	16	-
10	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan Minuman	5	-	5	-
11	Izin Usaha Peternakan	5	5	4	-
12	Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat	2	-	-	-
13	Izin Pemotongan Ternak Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya	-	1	-	-
14	Izin Usaha Perikanan	13	12	9	4
15	Tanda Daftar Izin Usaha Perikanan (TD-IUP)	13	12	3	1
16	Surat Izin Penangkapan Ikan	16	6	-	-
17	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	53	38	84	36
18	Pengesahan Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT)	23	26	1	-
19	Izin Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Masyarakat	-	29	4	-
20	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	-	-	-	-
21	Izin Usaha Pusat Berbelanjaan (IUPP)	-	-	2	-
22	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	3	1	3	2
23	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	179	123	172	113
24	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	-	1	6	1
25	Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3	-	7	1
26	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	195	134	204	-
27	Izin Usaha Industri (IUI)	6	4	13	11
28	Tanda Daftar Industri (TDI)	22	1	-	-
29	Tanda Daftar Gudang (TDG)	14	11	5	2
30	Izin Apotek	8	12	9	6
31	Izin Optikal	1	2	1	2
32	Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum	-	-	-	-



No	Nama Perizinan	Jumlah Izin Terbit			
		2015	2016	2017	2018
33	Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi	-	-	-	-
34	Izin Klinik	-	-	-	-
35	Izin Balai Pengobatan Gigi	-	-	-	-
36	Izin Unit Transfusi Darah	-	-	-	-
37	Izin Tukang Gigi	-	-	-	-
38	Izin Praktek Fisioterapi	-	1	-	-
39	Surat Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi (SIPD)	56	135	140	98
40	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	12	18	20	120
41	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	2	1	1	42
42	Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	1	6	6	9
43	Izin Toko Obat	2	1	3	-
44	Izin Salon Kecantikan	2	1	3	3
45	Surat Izin Kerja (SIK)	132	449	162	-
46	Izin Laboratorium Kesehatan Swasta	-	1	1	2
47	Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	1	-	-
48	Izin Operasional Rumah Sakit Umum	1	1	1	-
49	Izin Operasional Menara (IOM)	-	-	-	-
50	Izin Penimbunan/Penyimpanan BBM	17	18	-	-
51	Izin Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Umum	38	3	3	-
52	Kartu Tanda Pemilikan Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum	824	889	506	-
53	Izin Trayek Angkutan Pedesaan	68	46	60	-
54	Izin Insidentil (Penyimpangan Trayek)	-	-	-	-
55	Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor	9.437	9.575	9.081	8.848
56	Izin Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3	1	4	2	6
57	Izin Pemanfaatan Air Tanah / Pengusahaan Air Tanah	8	-	-	-
58	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	1	4	2	-
59	Rekomendasi / Izin Pemakaian Gedung Mendopo Kesari	28	17	21	31
60	Izin Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	-	13
61	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi	-	-	-	14
62	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	-	20
63	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	-	-	-	45
64	Surat Izin Tenaga Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	-	-	-	3
65	Surat Izin Praktik Penata Anestesi	-	-	-	14
66	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ)	-	-	-	8



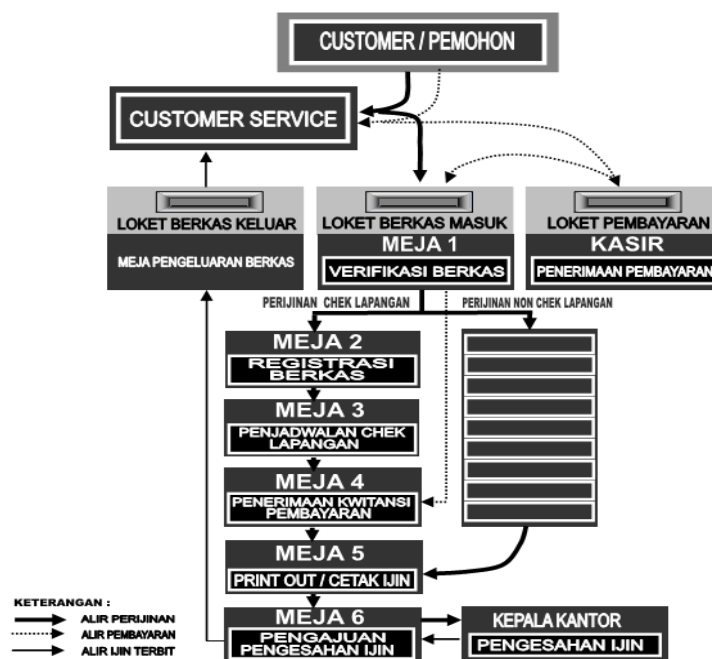
No	Nama Perizinan	Jumlah Izin Terbit			
		2015	2016	2017	2018
67	Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	-	-	-	6
68	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	-	-	-	12
69	Surat Izin Kerja Radiografer	-	-	-	8
70	Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1)	-	-	-	1.401
71	Kartu Pengawasan Umum Angkutan Pedesaan	-	-	-	50
Total		12.619	13.618	11.961	10.336

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Kab. Jembrana, Tahun 2019

Standar Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan menggunakan mekanisme Ban Berjalan, artinya setiap proses akan melalui tahapannya, dimulai dari verifikasi (penelitian dan pemeriksaan berkas) sampai pada tahapan akhir yaitu penetapan/ penandatanganan surat ijin.

Mekanisme ban berjalan menggunakan 6 (enam) meja, setiap meja membidangi tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana bagan alir dibawah ini



Gambar 10.25 : Bagan Alir Prosedur Layanan Perijinan



BAB XI

KONDISI INVESTASI

KABUPATEN JEMBER





Kondisi iklim investasi yang terdapat dalam suatu daerah merupakan faktor utama menentukan daya saing daerah. Kemampuan daerah untuk menarik investor sangat ditentukan oleh kondisi iklim investasi daerah tersebut, pada sisi lain peningkatan kegiatan investasi sangat ditentukan oleh kemampuan dari daerah dalam memberikan pelayanan dan keamanan bagi investor yang akan atau telah menanamkan investasinya. Iklim yang mendukung kegiatan investasi tersebut antara lain: keamanan, perizinan, ketersediaan sarana dan prasarana.

Kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran dengan program pembinaan dan pengembangan industri, area industrialisasi di Kabupaten Jember masih terbuka bagi investor. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya kawasan industri yang berkembang di Desa Pengambengan. Sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Jember adalah industri perikanan dan kerajinan. Selain industri tersebut, industri agrobisnis juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Jember.

Pembangunan sektor Industri Kabupaten Jember senantiasa diarahkan dan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan umum Kabupaten Jember maupun kebijakan pembangunan industri nasional sehingga terjadi sinergi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Jember dalam memajukan pembangunan sektor industri adalah mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif di masyarakat, termasuk usaha industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dalam arti luas dengan penumbuhan dan pengembangan industri kecil maupun menengah.

11.1 Analisis LQ Sektor Kabupaten Jember Terhadap Sektor Provinsi Bali

Sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan bentuk perbandingan berskala internasional, nasional maupun regional. Metode *Location Quotionet* digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan potensi perekonomian Kabupaten Jember. Analisis LQ menunjukkan potensi dari tempat terkait dengan kondisi kekayaan yang ada di wilayah tersebut. LQ berguna untuk melihat spesialisasi kegiatan produksi suatu wilayah. Pada dasarnya, teknik ini menyajikan perbandingan relative antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas.

$$LQ = \frac{S_i / N_1}{S / N} = \frac{S_i / S}{N_1 / N}$$

Keterangan:

- S_i = Jumlah produksi komoditas x di Kabupaten Jember
- S = Jumlah seluruh produksi komoditas di Provinsi Bali
- N_1 = Jumlah produksi komoditas x di Kabupaten Jember
- N = Jumlah seluruh produksi komoditas x di Provinsi Bali

Bila

$LQ > 1$ menunjukkan sektor tersebut sektor unggulan atau basis

$LQ = 1$ menunjukkan keswasembadaan, dalam artian memiliki potensial yang sama dengan sektor sejenis di daerah tertentu, sehingga hanya cukup untuk melayani kebutuhan daerah sendiri.

$LQ < 1$ menunjukkan tergolong bukan sektor unggulan



Tabel 11.1: Perhitungan LQ Lapangan Usaha di Kabupaten Jembrana Tahun 2018

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB(Juta Rp)		LQ
		Jembrana	Bali	
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.700.948,81	20.849.863,79	1,41
B.	Pertambangan dan Penggalian	80.799,02	1.441.410,89	0,97
C.	Industri Pengolahan	422.850,42	9.698.076,95	0,75
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	10.790,10	323.994,71	0,58
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.708,80	319.284,90	0,47
F.	Konstruksi	921.592,49	15.363.906,19	1,04
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Speda	937.866,46	14.245.148,19	1,14
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.353.297,95	11.349.098,29	2,06
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.216.888,19	31.250.818,31	0,67
J.	Informasi dan Komunikasi	631.481,90	6.214.395,40	1,76
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	277.918,93	6.214.395,40	0,77
L.	Real Estate	482.229,66	7.058.764,00	1,18
M,N.	Jasa Perusahaan	70.380,95	1.730.608,98	0,70
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	266.826,28	8.590.364,03	0,54
P.	Jasa Pendidikan	204.738,96	8.574.398,43	0,41
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208.432,23	3.709.330,59	0,97
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	129.122,69	2.543.240,99	0,88
		8.924.873,83	154.150.978,73	1

Sumber : Data BPS Kab. Jembrana & BPS Provinsi Bali, dianalisis tahun 2019

Penilaian menggunakan LQ memberi gambaran apakah suatu komoditas bersifat ekspor atau habis diwilayah sendiri. Batasan ekspor dapat diartikan keluar dari kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional, kesemuanya berdasar ketersediaan data dan pembanding yang dimiliki. Berdasarkan hasil perhitungan LQ Kabupaten Jembrana terhadap Provinsi Bali, bahwa sektor unggulan adalah sektor pertanian (subsektor Tanaman Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan) dan sektor bangunan. Dimana memiliki $LQ > 1$ yang merupakan syarat utama menjadi

sektor unggulan. Adapun sektor selain pertanian (subsektor Tanaman Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan) merupakan sektor belum potensial/non basis dengan sektor sejenis di daerah tertentu, sehingga bukan merupakan sektor unggulan.

11.1.1 Analisis Growth

Melalui perhitungan LQ, akan diperoleh sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dilakukan ekspor (distribusi keluar daerah lain). Selanjutnya dilakukan analisis *Growth* yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dari sektor ekonomi tersebut setiap tahunnya (minimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir).

Dimana :

$$Rumus = \frac{T_n - (T_n - 1)}{T_n - 1} \times 100\%$$

T_n : Σ Produksi tahun ke-n

T_{n-1} : Σ Produksi tahun ke n-1

Tabel 11.2 : Perhitungan Pertumbuhan Lapangan Usaha di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2018

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Milyar Rp)			Nilai Growth	Nilai Growth
		2016	2017	2018	%	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.564,04	1.594,07	1.700,95	1,92	6,70
B	Pertambangan dan Penggalan	75,48	79,23	80,80	4,96	1,98
C	Industri Pengolahan	401,64	410,67	422,85	2,25	2,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,45	10,49	10,79	0,41	2,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,35	8,47	8,71	1,48	2,78
F	Konstruksi	795,68	840,16	921,59	5,59	9,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	826,62	883,51	937,87	6,88	6,15
H	Transportasi dan Pergudangan	1.258,23	1.315,07	1.353,30	4,52	2,91



No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Milyar Rp)			Nilai Growth	Nilai Growth
		2016	2017	2018	%	%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.055,13	1.159,76	1.216,89	9,92	4,93
J	Informasi dan Komunikasi	541,41	587,40	631,48	8,49	7,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	261,26	269,21	277,92	3,04	3,23
L	Real Estate	458,53	473,28	482,23	3,22	1,89
M,N	Jasa Perusahaan	61,49	66,86	70,38	8,74	5,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	247,85	247,52	266,83	-0,13	7,80
P	Jasa Pendidikan	175,38	189,17	204,74	7,86	8,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174,71	195,34	208,43	11,81	6,70
R,S,T,U	Jasa Lainnya	111,68	122,14	129,12	9,37	5,72

Sumber : Data BPS Kab. Jember, dianalisis tahun 2019

Berdasarkan perhitungan analisis growth Tabel 11.2 diketahui secara keseluruhan sektor lapangan usaha pada tahun 2018 memiliki nilai pertumbuhan atau growth (+). Dari tahun 2016 hingga tahun 2017 secara keseluruhan memiliki nilai pertumbuhan (+) pada semua sector lapangan usaha, kecuali sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan mengalami pertumbuhan negatif (-) tahun 2017-2018. Namun nilai pada lapangan usaha sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan mengalami pertumbuhan positif dan peningkatan pada tahun 2017-2018. Nilai growth sektor lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan dibandingkan antara tahun 2016-2017 dan tahun 2017-2018 mengalami kenaikan dari 4,96 menjadi 6,70.

11.1.2 Analisis Share

Analisis share digunakan untuk melihat karakteristik struktur ekonomi di suatu wilayah. Share dengan nilai >1 diberi poin 3, nilai = 1 diberi poin 2 dan nilai <1 diberi poin 1. Share positif yaitu sektor yang



mempunyai poin sama atau lebih dari 2 menunjukkan sektor tersebut berpotensi untuk dikembangkan. Penetapan tanda positif hanya diperuntukkan untuk sektor yang mempunyai poin sama atau lebih dari 2 dengan pertimbangan bahwa sektor tersebut mempunyai kontribusi dalam perekonomian regional.

$$Share = \frac{NP_1}{NP_2} \times 100\%$$

Keterangan:

NP₁ = Nilai produksi komoditas x di Kabupaten Jembrana

NP₂ = Nilai produksi komoditas x di Provinsi Bali

Tabel 11.3 Perhitungan Share Lapangan Usaha di Kabupaten Jembrana
Tahun 2018

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Milyar Rp)		Share
		Kabupaten Jembrana	Provinsi Bali	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.700,95	20.849,86	8,16
B	Pertambangan dan Penggalan	80,80	1.441,41	5,61
C	Industri Pengolahan	422,85	9.698,08	4,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,79	323,99	3,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,71	319,28	2,73
F	Konstruksi	921,59	15.363,91	6,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	937,87	14.245,15	6,58
H	Transportasi dan Pergudangan	1.353,30	11.349,10	11,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.216,89	31.250,82	3,89
J	Informasi dan Komunikasi	631,48	6.214,40	10,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	277,92	6.214,40	4,47
L	Real Estate	482,23	7.058,76	6,83
M,N	Jasa Perusahaan	70,38	1.730,61	4,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	266,83	8.590,36	3,11
P	Jasa Pendidikan	204,74	8.574,40	2,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208,43	3.709,33	5,62
R,S,T,U	Jasa Lainnya	129,12	2.543,24	5,08

Sumber :Data BPS Kab. Jembrana, dianalisis Tahun 2019

Untuk menyatakan kontribusi yang diberikan itu besar atau tidak adalah dengan melihat ketentuan berikut: bila share bernilai $x > 2$ diberi tanda (+) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan besar dan bila share bernilai $1 < x < 2$ diberi tanda (-) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan kecil (rendah).

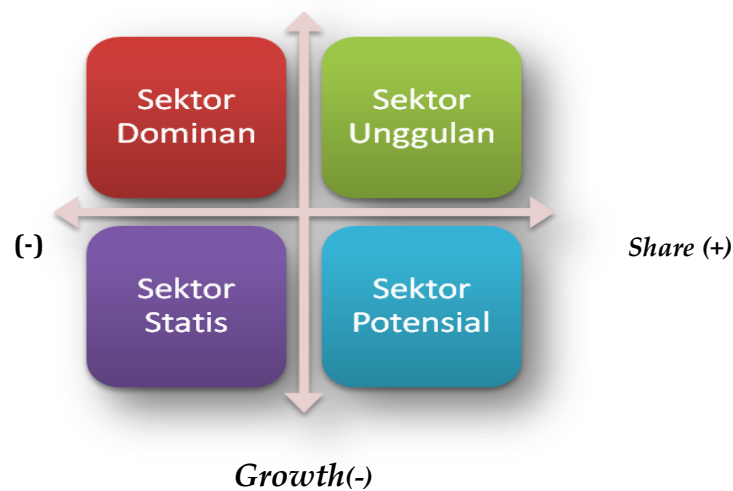
11.1.3 Klasifikasi Sektor Berdasarkan Tingkat Pertumbuhan

Berdasarkan pertimbangan klasifikasi sektor ditinjau dari tingkat pertumbuhan pada tahun 2018 Kabupaten Jember, maka ditetapkan komoditas-komoditas unggulan menjadi beberapa klasifikasi sektor, yaitu:

Tabel 11.4 Klasifikasi Lapangan Usaha di Kab.Jember Berdasarkan Diagram Growth Share Tahun 2018

No.	Lapangan Usaha	Growth	Share	Klasifikasi Sektor
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(+)	(+)	Sektor Dominan
B.	Pertambangan dan Penggalian	(+)	(+)	Sektor Dominan
C.	Industri Pengolahan	(+)	(+)	Sektor Dominan
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	(+)	(+)	Sektor Dominan
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(+)	(+)	Sektor Dominan
F.	Konstruksi	(+)	(+)	Sektor Dominan
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Speda	(+)	(+)	Sektor Dominan
H.	Transportasi dan Pergudangan	(+)	(+)	Sektor Dominan
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(+)	(+)	Sektor Dominan
J.	Informasi dan Komunikasi	(+)	(+)	Sektor Dominan
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	(+)	(+)	Sektor Dominan
L.	Real Estate	(+)	(+)	Sektor Dominan
M,N.	Jasa Perusahaan	(+)	(+)	Sektor Dominan
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	(+)	(+)	Sektor Dominan
P.	Jasa Pendidikan	(+)	(+)	Sektor Dominan
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(+)	(+)	Sektor Dominan
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	(+)	(+)	Sektor Dominan

Sumber :Data BPS Kab. Jember diolah, Tahun 2019



Gambar 11.1 Diagram Growth Share

1) Sektor Unggulan

Komoditas yang masuk dalam klasifikasi sektor unggulan menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi (+) dan kontribusi yang diberikan cukup besar (+). Sektor unggulan nantinya akan menjadi sektor basis suatu wilayah. Tidak ada komoditas yang masuk dalam sektor unggulan.

2) Sektor Potensial

Komoditas yang masuk dalam sektor potensial menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah (-) tetapi kontribusi yang diberikan cukup besar (+). Sektor potensial ini nantinya mampu dijadikan sebagai sektor basis dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa sektor tersebut dapat dikembangkan menjadi basis ekonomi Kabupaten Jembrana dengan perlakuan-perlakuan khusus. Tidak ada komoditas yang masuk dalam sektor unggulan.



3) Sektor dominan

Komoditas yang masuk dalam sektor dominan menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi (+) akan tetapi memiliki kontribusi yang kecil (-). Sektor dominan dapat dikembangkan menjadi sektor basis dengan adanya perlakuan-perlakuan khusus. Berdasarkan analisis diatas, sebagian besar sektor lapangan usaha termasuk dalam klasifikasi sektor dominan.

4) Sektor statis

Komoditas yang masuk dalam sektor statis menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah (-) dan memiliki kontribusi yang kecil (-). Berdasarkan analisis diatas, tidak ada komoditas yang termasuk sektor statis.

11.1.4 Kontribusi Sektor Berdasarkan Distribusi PDRB

Meningkatkan perekonomian Kabupaten Jember perlu terlebih dahulu identifikasi potensi basis dan non basis berdasarkan sektor-sektor yang ada dalam Produk Domestik Regional Bruto. Selain itu, untuk mengetahui keadaan PDRB Kabupaten Jember dan sembilan sektor penyusun PDRB dimasa yang akan datang serta untuk mengetahui terjadi atau tidaknya fluktuasi maka dibutuhkan penjelasan PDRB Kabupaten Jember.

Struktur ekonomi tahun 2014-2015 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dari kontribusi sektor terbesar sampai terkecil dan asumsi sektor ini dibagi dalam 3 kelompok :

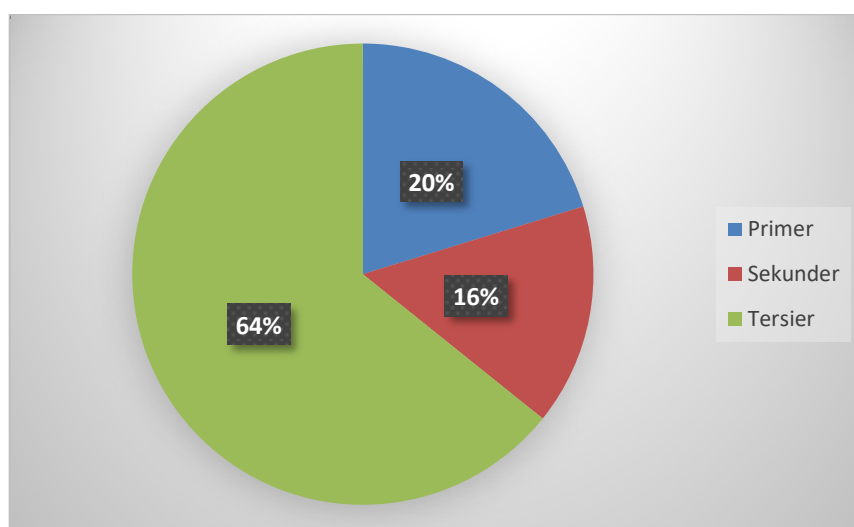
- Kelompok sektor primer
- Kelompok sektor sekunder
- Kelompok sektor tersier

Kelompok sektor primer terdiri dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Kelompok sektor sekunder terdiri dari tiga sektor, masing-masing sektor industri pengolahan, kemudian sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan/konstruksi. Selanjutnya kelompok sektor tersier terdiri dari empat sektor yaitu: sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Secara umum perekonomian Kabupaten Jember tahun 2017-2018 pada ketiga sektor tumbuh positif. Hal ini seperti dalam Tabel 11.5 berikut ini.

Tabel 11.5 Distribusi PDRB Harga Berlaku Menurut Sektor,
Tahun 2017-2018

No.	Sektor	2017	2018
1	Primer	20%	20%
2	Sekunder	15 %	16 %
3	Tersier	65%	64 %

Sumber : BPS Kabupaten Jember, Tahun 2019



Gambar 11.2 Distribusi PDRB tahun 2018

Struktur perekonomian di Bali memiliki karakteristik yang unik dan berbeda, apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Sektor pariwisata di Bali memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Jembrana sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali tidak memiliki potensi pariwisata sebesar dengan kabupaten lainnya di wilayah Bali Selatan. Struktur ekonomi Kabupaten Jembrana saat ini yang berperan besar adalah sektor tersier sebesar 64%, kemudian sektor primer sebesar 20%, yakni pertanian dalam arti luas, dan sektor sekunder sebesar 16%. Sektor tersier mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, sedangkan sektor sekunder mengalami peningkatan dan sektor primer tidak mengalami perubahan.

11.2 Nilai Investasi Di Kabupaten Jembrana

Relisasi investasi di Kabupaten Jembrana berasal dari Alokasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang tercatat pada Kantor perijinan terpadu Kabupaten Jembrana dari tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 11.6 berikut ini.

Tabel 11.6: Jumlah Investasi PMA dan PMDN Di Kabupaten Jembrana
Tahun 2014 – 2018 (Rp000)

No	Jenis DATA	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN))	230.228.973	142.640.196	314.579.254	226.608.757.787	4.413.136.402
2	Jumlah Perusahaan (PMA dan PMDN)				1.796.661.612.993	

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana, Tahun 2019



11.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Jember memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan bernilai ekonomis, potensi alam dan bentangan alam memiliki panorama yang eksotik terutama hutan lindung dan budidaya wisata alam dan bahari sebagai daerah daya tarik kunjungan wisatawan. Pengembangan wilayah tersebut dibagi atas:

- 1) Potensi Kawasan Lindung, meliputi:
 - a. Potensi kawasan suaka alam dan suaka margasatwa, yang meliputi kawasan suaka alam laut di Kecamatan Melaya dan Gilimanuk yang merupakan bagian Taman Nasional Bali Barat.
 - b. Potensi kawasan pelestarian alam yang terdiri dari Taman Nasional dan taman wisata alam
 - c. Potensi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dimana potensi tersebut terletak di kecamatan negara, situs Gilimanuk dan Monumen Lintas Laut Gilimanuk
 - d. Potensi Kawasan perlindungan bawahan terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan resapan air dan kawasan konservasi kelas I
 - e. Potensi kawasan perlindungan setempat terdiri kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar waduk, sepadan sungai, pantai, kawasan kota terbuka hijau dan kawasan suci pura.
- 2) Potensi kawasan budidaya, yang meliputi:
 - a. Potensi Kawasan Hutan Produksi;
 - b. Potensi Pengembangan Lahan Pertanian;
 - c. Potensi Perikanan;
 - d. Potensi Peternakan;
 - e. Potensi Pengembangan Industri;
 - f. Potensi Pertambangan;



- g. Potensi Perdagangan;
 - h. Potensi Kawasan Pusat Pemerintahan dan Cagar Budaya.
- 3) Potensi Kawasan Strategis merupakan kawasan yang menjadi prioritas pengembangan melalui manfaat masyarakat.
 - 4) Potensi Kawasan Pesisir dan Kepulauan, terbentang dari Dilimanuk kecamatan Melaya hingga Desa Pengeragoan di Kawasan Pekutatan yang memiliki pengembangan potensi pariwisata.

11.4 Potensi Unggulan Daerah Yang Memiliki Peluang Berkembang

a. Tanaman Pangan

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, khususnya beras telah dilakukan berbagai usaha seperti pengaturan pola tanam, pelaksanaan intensifikasi dan penanganan pasca panen melalui sistem Organisasi petani sawah tradisional/adat yang lebih dikenal dengan Subak.

b. Perkebunan

Dilihat dari letak geografis dan luas penggunaan tanah daerah Kabupaten Jember memiliki potensi untuk pengembangan perkebunan seperti tanaman keras tahunan dan musiman seperti kelapa, kopi, cengkeh, kakao. Selain itu juga tanaman hortikultura dapat dikembangkan seperti alpukat, mangga, jeruk, melon, semangka. Khusus untuk pengembangan tanaman kakao Pemerintah Kabupaten Jember telah mengembangkan Pengolahan Biji Kakao di Kecamatan Melaya.

c. Peternakan

Kabupaten Jember cocok untuk dikembangkan usaha peternakan. Pemerintah bekerjasama dengan BPTP telah membangun Agroteknopark (ATP) merintis pengembangan sapi secara kloning



yang dikelola oleh koperasi yang membangun kandang percontohan yang berkapasitas 1.500 ekor dan pengolahan limbah kotoran menjadi pupuk kandang.

d. Perikanan

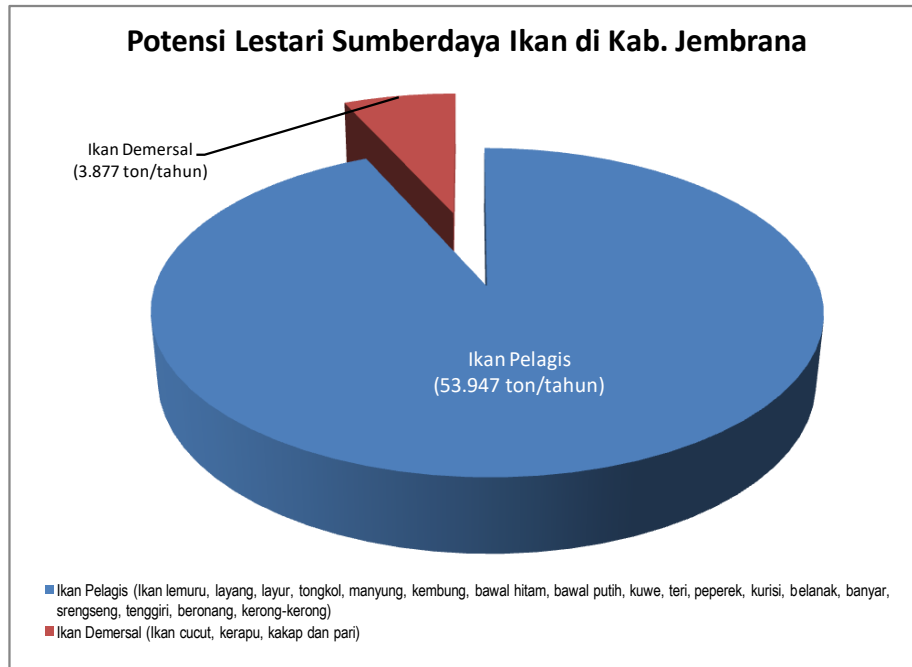
Potensi perikanan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Jember meliputi budidaya ikan air tawar, budidaya laut dan budidaya air payau (tambak), yaitu:

- Budidaya air tawar di Kecamatan Mendoyo, Pekutatan dan Melaya
- Budidaya laut di Kecamatan Melaya dan Negara dengan usaha budidaya kerang dan rumput laut.
- Budidaya air payau di kecamatan Mendoyo, Pekutatan, Jember, Negara dan Melaya dengan komoditi udang dan bandeng.

Pemerintah juga menyediakan fasilitas pelayanan perikanan berupa Pelabuhan perikanan/Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di desa Pengambengan Kecamatan Negara dan Balai Benih Ikan di Tegak Gede Desa Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo.

Potensi lestari sumberdaya ikan di wilayah perairan Kabupaten Jember sebesar 56.947 ton/tahun, terdiri dari ikan pelagis 53.947 ton/tahun dan ikan demersal 3.877 ton/tahun. Potensi perikanan laut Kabupaten Jember didukung oleh sumber daya ikan di perairan Selat Bali dan perairan Samudera Hindia. Selain itu, perikanan tangkap juga didukung oleh perairan pantai. Wilayah perairan Selat Bali dengan luas area sekitar 2,500 km², sedangkan luas perairan laut ± 604,24 km². Perairan Selat Bali mengandung sumber daya ikan pelagis kecil yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu ikan lemuru (*Sardinella lemuru*). Ikan lemuru memiliki kemampuan bermigrasi yang kuat dan terlihat dalam gerombolan (*schooling*) di daerah pesisir

pada kedalaman kurang dari 60 m, (Merta, 2003). Distribusi ikan lemuru ditemukan hampir di seluruh Selat Bali.



Gambar 11.3 : Diagram Potensi Lestari Sumberdaya Ikan

Potensi perikanan perairan umum yang utama di Kabupaten Jember adalah perairan waduk/bendungan/bendung dan sungai. Potensi sumber daya ikan perikanan perairan umum yaitu ikan mas, nila, lele, mujair, tawes, gabus dan ikan lainnya. Perairan waduk/bendungan yang terdapat di Kabupaten Jember yaitu Waduk Palasari dan Bendungan Benel di Kecamatan Melaya. Selain itu, potensi perikanan perairan umum juga didukung oleh beberapa bendung lainnya. Sedangkan sungai-sungai potensial penunjang kegiatan perikanan tangkap yaitu:

- a) Kecamatan Negara dan Jember: Tukad Berangbang, Tukadaya, Tukad Kaliakah, Tukad Ijogading, Tukad Gayung, Tukad Titis, Tukad Budeng, dan Tukad Susul.



- b) Kecamatan Mendoyo: Tukad Mendoyo, Tukad Petapan, Tukad Biluk Poh, Tukad Yeh Buah, Tukad Yeh Embang, Tukad Yeh Sumbul, dan Tukad Satang.
- c) Kecamatan Pekutatan: Tukad Medewi, Tukad Pulukan, Tukad Yeh Lebah, Tukad Pangyangan, Tukad Gumbrih, Tukad Pengeragoan, dan Tukad Yeh Leh.



Gambar 11.4 Bendungan di Kabupaten Jembrana

DATA DAERAH RAWAN KECELAKAAN LALU LINTAS		
NO	KILO METER	LOKASI
1	KM 66 - 67	Pangyangan timur jembatan di bawah tikungan dan tanjakan s/d di depan SLTP Pekutatan di tikungan barat.
2	KM 83 - 84	Tembles di datar persawahan s/d Tembles barat Dolog sekitar 150 m.
3	KM 90 - 91	Timur pertigaan Mendoyo Dangin Tukad 50 m s/d Depan SPBU Mendoyo Dauh Tukad sisi timur.
4	KM 106 - 107	Dsn. Munduk Bayur depan pabrik minyak Tuwed s/d Ds. Tuwed barat wartel sekitar 200 m.
5	KM 126 - 127	Depan SPBU Cekik Gilimanuk s/d Depan Pura Dalem Gilimanuk.



BAB XII

PENUTUP





Profile Kabupaten Jemberana Tahun 2019 menyajikan informasi tentang keberadaan kabupaten Jemberana pada tahun 2018 dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, data yang disajikan dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang dipresentasikan dalam bentuk media informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel sebagai dasar penyusunan program pembangunan di Kabupaten Jemberana.

Informasi yang disajikan dalam Profile Kabupaten Jemberana Tahun 2019, meliputi :

- 1) Sejarah dan Visi Misi Kabupaten Jemberana
- 2) Kondisi Geografis dan Lingkungan Kabupaten Jemberana
- 3) Struktur Pemerintah Kabupaten Jemberana
- 4) Kondisi Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Jemberana
- 5) Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Jemberana
- 6) Sumber Daya Alam Kabupaten Jemberana
- 7) Kondisi Infrastruktur Kabupaten Jemberana
- 8) Kinerja Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Jemberana
- 9) Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Jemberana
- 10) Investasi Kabupaten Jemberana

